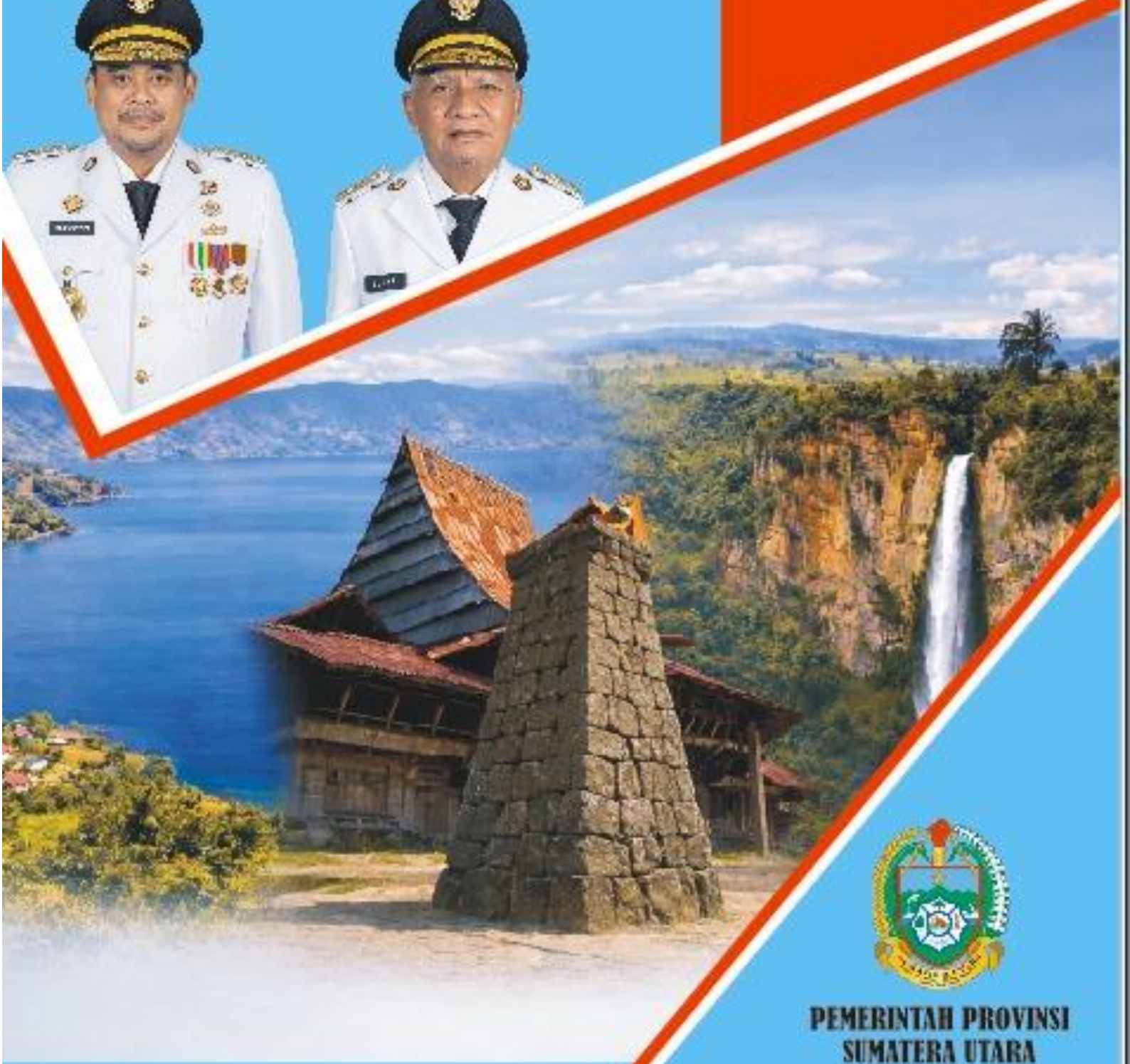
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirrabbil'alamiin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dan disampaikan dengan tepat waktu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2025. Dokumen ini juga menjadi sarana evaluasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam laporan ini disajikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan umum daerah, pengelolaan keuangan daerah, capaian kinerja program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, serta berbagai tantangan dan langkah strategis yang telah dan akan ditempuh. Seluruh proses penyusunan laporan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada akhir November 2025, Provinsi Sumatera Utara menghadapi sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan aktivitas pembangunan di beberapa wilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespons kondisi tersebut melalui langkah-langkah penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, TNI/Polri, dan unsur masyarakat. Upaya penanganan difokuskan pada penyelamatan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan infrastruktur vital, serta penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana guna meminimalkan risiko kejadian serupa di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun anggaran 2025 masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan, termasuk dinamika kondisi alam yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Oleh karena itu, masukan, saran, dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		hal	i
Daftar Isi		hal	iii
BAB I	PENDAHULUAN	hal	1
	A. Dasar Hukum	hal	3
	B. Visi dan Misi Kepala Daerah	hal	5
	C. Data Umum Daerah	hal	7
	1. Data Geografis Wilayah	hal	7
	2. Jumlah Penduduk	hal	12
	3. Pertumbuhan Penduduk	hal	17
	4. Jumlah PNS	hal	18
	5. Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan	hal	19
	6. Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja	hal	20
	7. Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan	hal	21
	D. Kondisi Makro Ekonomi	hal	22
	1. Kemiskinan dan Ketimpangan	hal	23
	2. Ketenagakerjaan	hal	24
	3. Indeks Pembangunan Manusia	hal	26
	4. Pertumbuhan Ekonomi	hal	31
	5. Inflasi	hal	39
	6. Perdagangan Luar Negeri	hal	40
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	hal	42
	A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	hal	43
	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	hal	43
	2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	hal	46
	3. Permasalahan dan Solusi	hal	47
	B. Pengelolaan Belanja Daerah	hal	48
	1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	hal	48
	2. Target dan Realisasi Belanja	hal	49
	C. Pembiayaan Daerah	hal	51
	1. Defenisi dan Struktur Pembiayaan	hal	51
	2. Regulasi Pemerintah tentang Pembiayaan	hal	51
	3. Permasalahan dan Solusi	hal	53
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	hal	54
	A. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Wajib	hal	57
	1. Urusan Wajib Pendidikan	hal	57
	2. Urusan Wajib Kesehatan	hal	66
	3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum	hal	93
	4. Urusan Wajib Perumahan	hal	102

5. Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat hal 107
6. Urusan Wajib Sosial hal 110
7. Urusan Wajib Ketenagakerjaan hal 118
8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hal 123
9. Urusan Wajib Pangan hal 131
10. Urusan Wajib Pertanahan hal 136
11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup hal 139
12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil hal 145
13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal 159
14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hal 172
15. Urusan Wajib Perhubungan hal 178
16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika hal 182
17. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hal 185
18. Urusan Wajib Penanaman Modal hal 189
19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga hal 192
20. Urusan Wajib Statistik hal 197
21. Urusan Wajib Persandian hal 199
22. Urusan Wajib Kebudayaan hal 201
23. Urusan Wajib Perpustakaan hal 206
24. Urusan Wajib Kearsipan hal 211

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan hal 214
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan hal 214
2. Urusan Pilihan Pariwisata hal 218
3. Urusan Pilihan Pertanian hal 222
4. Urusan Pilihan Kehutanan hal 235
5. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral hal 239
6. Urusan Pilihan Perdagangan hal 245
7. Urusan Pilihan Perindustrian hal 250
8. Urusan Pilihan Transmigrasi hal 254

C. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan hal 258
1. Inspektorat Provsu hal 258
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provsu hal 261
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu hal 274
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara hal 281
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu hal 287
6. Badan Kepegawaian Daerah Provsu hal 291

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu hal 295
8. Badan Penghubung Daerah Provsu hal 298
9. Sekretariat DPRD Provsu hal 303
10. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu hal 308
11. Biro Hukum Setdaprovsu hal 313
12. Biro Organisasi Setdaprovsu hal 316
13. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu hal 319
14. Biro Perekonomian Setdaprovsu hal 325
15 Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu hal 341
16. Biro Umum Setdaprovsu hal 345
17. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu hal 350
18. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu hal 355

D. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum hal 357
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu hal 357

E. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provsu hal 369
1. PT. Bank Sumut hal 369
2. PDAM Tirtanadi hal 372
3. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara hal 374
4. PT. Perkebunan Sumatera Utara hal 375
5. PT. Dhirga Surya hal 383
6. PD. Aneka Industri dan Jasa hal 385

F. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan hal 387

G. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD hal 388

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN hal 480
A. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan hal 481
B. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian hal 484

BAB V PENUTUP hal 485

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi tersebut diwujudkan melalui desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki keterkaitan langsung dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pada Pasal 69 ayat (1) ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ memuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah penyampaian LKPJ kepada lembaga yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil evaluasi, refleksi, dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penyusunan LKPJ ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, yaitu delapan misi pembangunan nasional yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, reformasi birokrasi, serta pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pembangunan nasional yang terintegrasi hingga tingkat daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut mencakup capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya pada setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah beserta implementasinya; serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.

Dengan demikian, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah kepada DPRD, sekaligus menjadi sarana penguatan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, LKPJ juga berfungsi sebagai media evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara juga terus berupaya dalam meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai program yang telah dijalankan memberikan pencapaian yang penting dan memperoleh penghargaan baik pada tingkat regional maupun nasional pada tahun 2025, seperti :

1. Penghargaan dari kepala Kantor Regional VI BKN atas Kolaborasi Dalam Pelaksanaan Seleksi CASN Menggunakan Metode CAT BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN.
2. Penghargaan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2024. Penghargaan ini merupakan raihan yang ke 11 kali sercara berturut-turut sejak tahun 2014.
3. Penghargaan dari BNPB. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah yang terakreditasi di bidang teknis penanggulangan bencana.
4. Penghargaan dari Badan Penyelenggaraan Ideologi Pancasila. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu menerima penghargaan dengan akreditasi Istimewa sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinan ideologi Pancasila.

5. Penghargaan PKN II dan PKAI Tingkat Nasional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Program pelatihan struktural kepemimpinan dan program pelatihan fungsional khusus analis kebijakan pada BPSDM Provsu sebagai program pelatihan dengan status terakreditasi.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 43);

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di sumatera Utara. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029, yaitu :

"Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Kolaborasi, bermakna proses kerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan bergerak dalam rangka menyelesaikan masalah secara berkolaborasi menuju visi "bersama" RPJMN;
b. SUMUT - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
c. Berkah, bermakna harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak serta selaras dengan visi "emas" RPJMN;
d. Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan visi "unggul" RPJPD Sumatera Utara;
e. Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan yang selaras dengan visi "maju" RPJMN dan RPJPD Sumatera Utara;
f. Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik dimana selaras dengan visi "berkelanjutan" RPJPD Sumatera Utara.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan perlindungan sosial pada kelompok rentan yang sejalan dengan Asta Cita 4 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 1 pada RPJPD Sumut.

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui stabilisasi harga, pemerataan pembangunan ekonomi, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan Asta Cita 2, 3, 5 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 serta 4 pada RPJPD Sumut.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum disertai penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta penegakan keamanan dan ketertiban lingkungan yang sejalan dengan Asta Cita 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 serta 8 pada RPJPD Sumut.

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang sejalan dengan Asta Cita 3 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 6 serta 7 pada RPJPD Sumut.

Misi 5 Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui penguatan peran keluarga, kesetaraan gender, toleransi dan kerukunan antarumat beragama, melestarikan budaya lokal, menjaga demokrasi, serta mendukung pemberantasan narkoba yang sejalan dengan Asta Cita 1, 4 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 5 pada RPJPD Sumut.

C. DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 18.298.123 Ha (182.981,23 Km^2) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 Ha dan luas lautan 11.000.000 Ha. Luas daratan Sumut sekitar 3,82% dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 pulau.

Jika dilihat dari luas wilayah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Langkat 6.262,00 Km^2, atau sekitar 8,58% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 Km^2 atau 8,40%, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 Km^2 atau sekitar 8,26%, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 Km^2 atau sekitar 0,04%.

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 450 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

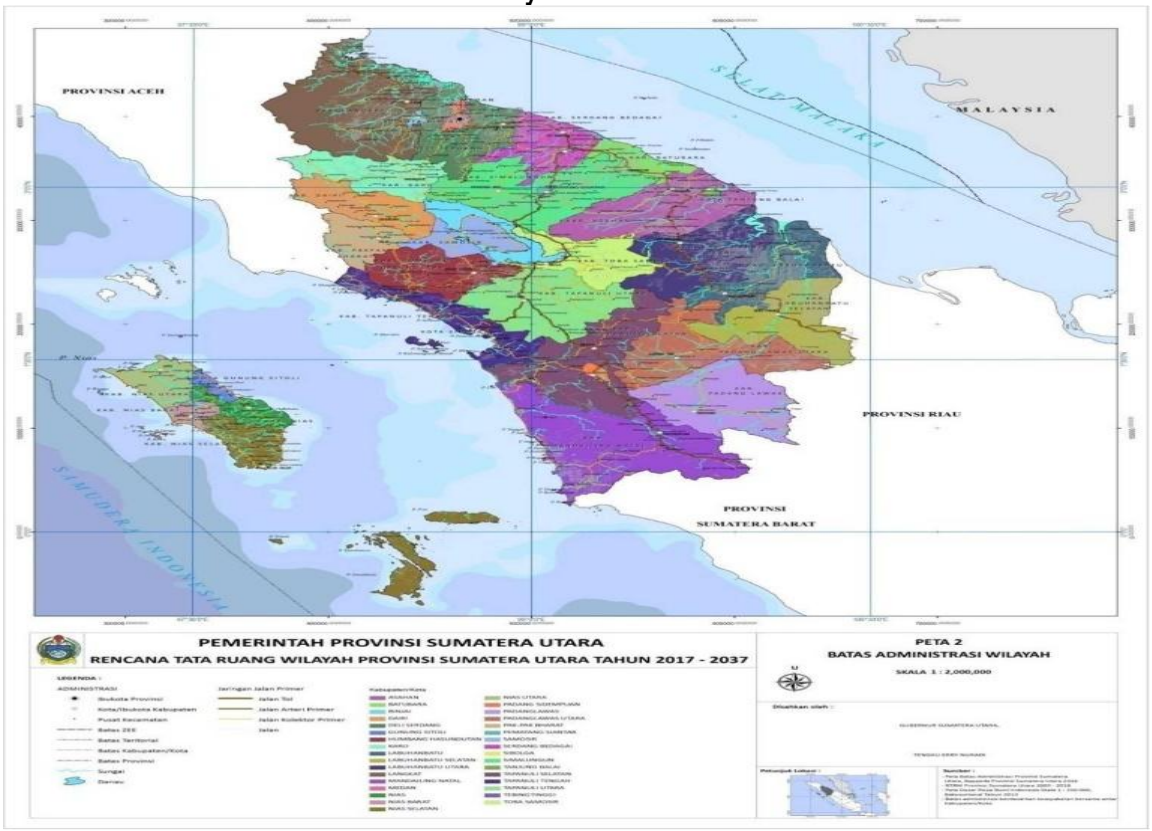
Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00

12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3,892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA		450	5417	693	72.981,23

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi



1.2 Letak dan Kondisi Geografis Daerah

a. Posisi Astronomis

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98°- 100° Bujur Timur, serta memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

c. Kondisi / Kawasan

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 4 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah Timur relatif datar, bagian Tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba dengan luas mencapai 112.986,15 ha atau 1,57% dari total luas wilayah Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki ketinggian paling tinggi di atas permukaan laut adalah Kabupaten Toba yakni sekitar 900-2.000 meter di atas permukaan laut (MDPL).

1.3 Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% berada di tengah, membujur searah

dengan Danau Toba (dari arah Barat Laut-Tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian Timur dan pesisir Barat. Kemiringan tanah antara 0 – 12% seluas 47.810 Km^2, antara 12 – 40% seluas 6.305 Km^2 dan diatas 40% seluas 17.719 Km^2.

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0 - 300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33% dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300 - 600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70% dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96% dari luas daratan Sumatera Utara.

1.4 Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Eurasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

1) Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
2) Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
3) Batuan malihan atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
4) Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
5) Batuan sedimen dengan porositas kecil.

b. Potensi

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

1.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 239 DAS meliputi dari 56 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 183 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumun. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 49,36% dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 50,64%.

b. Sungai, Danau dan Rawa

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni :

Tabel 1.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

	Alas – Singkil	Lintas Provinsi
	Batang Natal-Batang Batahan	Lintas Provinsi
	Rokan	Lintas Provinsi
	Belawan – Ular – Padang	Strategis Nasional
	Toba – Asahan	Strategis Nasional
	Batang Angkola -Batang Gadis	Lintas Kab/Kota
	Wampu – Besitang	Lintas Kab/Kota
	Bah Bolon	Lintas Kab/Kota
	Barumun – Kualuh	Lintas Kab/Kota
	Pulau Nias	Lintas Kab/Kota
	Sibundong - Batang Toru	Lintas Kab/Kota

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Badan air berupa danau meliputi Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 Kabupaten seluas 112.986,15 Ha. Di Pulau Samosir Kabupaten Samosir terdapat dua danau yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau dengan debit air cukup besar potensial bagi pengembangan sistem pengairan dan peyediaan air baku dan danau yang memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

c. Debit

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumun, Sungai Silau, dan Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi, bahan baku air bersih dan sumber air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri, selain sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu. Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi.

Kebutuhan air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian perlu dijaga sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat yang potensial dikembangkan dari melimpahnya air di sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga untuk menjaga investasi di bidang energi perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan yang menjadi daerah tangkapan air DAS yang dimanfaatkan.

1.6 Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat rata – rata tekanan udara 1.007,658 mb, jumlah curah hujan 2.543,4 mm dengan jumlah hari hujan 170 hari. Rata – rata suhu udara adalah 27,1 derajat celsius, dengan rata – rata kecepatan angin 3,275 m/detik.

2. Jumlah Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Penduduk Sumatera Utara tahun 2025 berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 sebesar 15.785.839 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2025 sebesar 1,37%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.922.846 jiwa (50,19%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.862.993 jiwa (49,81%) dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 100,76%.

Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sumatera Utara. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perhitungan rasio ketergantungan dapat menjadi gambaran indikator keadaan ekonomi negara/wilayah. Negara/wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi daerah maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 didapat rasio ketergantungan Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 48,74%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48-49 orang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau rasio ketergantungan di bawah 50%. Dengan demikian Sumatera Utara masuk dalam daerah yang mengalami era Bonus demografi. Bonus demografi adalah *window of opportunity* atau kesempatan bagi negara yang sedang mengalaminya.

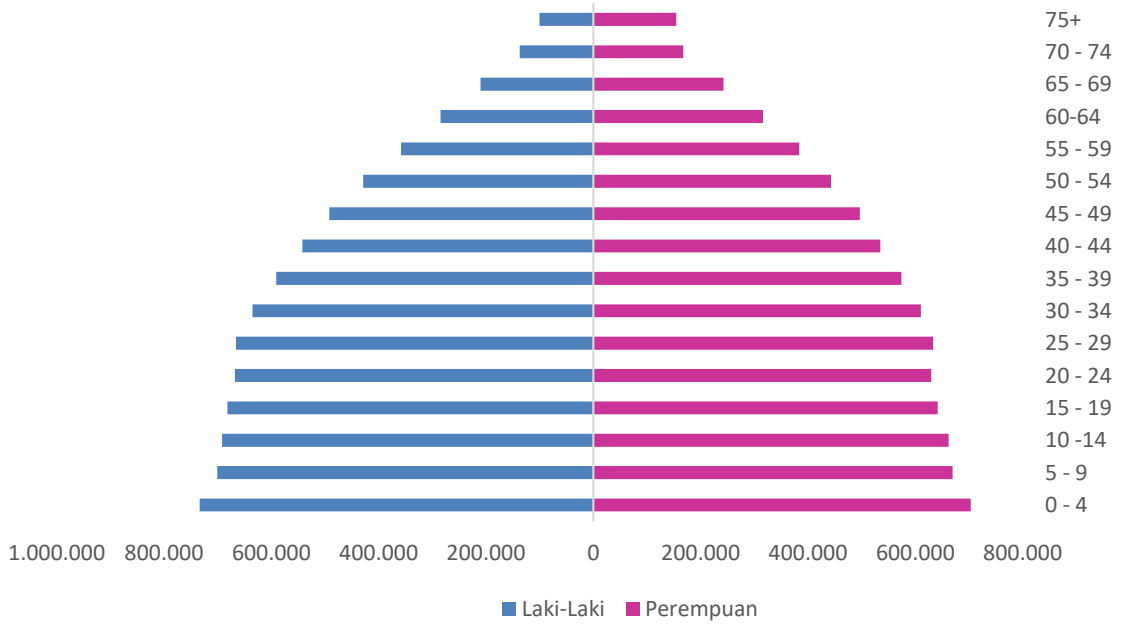
Jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak mengakibatkan kesempatan kerja dan kesempatan untuk menjadi produktif. Tentu saja akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara, peningkatan tabungan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembentukan generasi emas. Tentu saja, sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam fenomena ini yakni pembukuan lapangan kerja yang luas, memiliki *knowledge* dan *skill* yang mumpuni. Selan itu, pemerintah provinsi Sumatera Utara akan mendorong terciptanya para wirausaha baru yang akan membantu menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2025[1)]

Kel Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
0- 4	733.515	703.213	1.436.728	104,31
5- 9	700.822	669.788	1.370.610	104,63
10-14	692.034	662.103	1.354.137	104,52
15-19	682.101	641.912	1.324.013	106,26
20-24	667.887	629.742	1.297.629	106,06
25-29	666.036	633.268	1.299.304	105,17
30-34	635.114	610.439	1.245.553	104,04
35-39	590.892	574.322	1.165.214	102,89
40-44	542.301	534.641	1.076.942	101,43
45-49	492.175	496.422	988.597	99,144
50-54	428.817	442.879	871.696	96,825
55-59	358.564	383.870	742.434	93,408
60-64	284.995	315.949	600.944	90,203
65-69	210.038	242.702	452.740	86,542
70-74	136.971	167.280	304.251	81,881
75+	100.584	154.463	255.047	65,119
TOTAL	**7.922.846**	**7.862.993**	**15.785.839**	**100,76**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : [1)] Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Gambar 1.2
Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2025[1)]



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sebagian besar penduduk Sumatera Utara berada di kawasan Pantai Timur mencapai 9.601.696 jiwa (60,83%), kawasan Dataran Tinggi sebanyak 3.077.104 jiwa (19,49%), kawasan Pantai Barat sebanyak 2.144.220 jiwa (13,58%) dan Kepulauan Nias sebanyak 962.819 Jiwa (6,10%).

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2025[1)]

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan	1.243.422	1.254.871	2.498.293
2	Binjai	155.462	155.470	310.932
3	Pematangsiantar	138.049	141.149	279.198
4	Padangsidimpuan	124.153	119.690	243.843
5	Tanjungbalai	95.122	92.941	188.063
6	Tebing Tinggi	90.979	91.989	182.968
7	Gunungsitoli	72.138	75.378	147.516
8	Sibolga	46.365	45.879	92.244
9	Deli Serdang	1.044.002	1.034.044	2.078.046
10	Langkat	550.151	539.818	1.089.969
11	Simalungun	537.650	529.849	1.067.499
12	Asahan	416.498	408.099	824.597
13	Serdang Bedagai	352.386	347.691	700.077
14	Labuhan Batu	267.450	259.593	527.043
15	Mandailing Natal	256.215	257.321	513.536
16	Batu Bara	223.280	220.718	443.998
17	Karo	214.413	217.636	432.049
18	Labuanbatu Utara	210.420	205.065	415.485
19	Tapanuli Tengah	203.302	199.602	402.904
20	Nias Selatan	200.067	197.157	397.224
21	Labuhanbatu Selatan	174.296	167.929	342.225
22	Dairi	168.924	167.479	336.403
23	Tapanuli Utara	165.876	164.980	330.856
24	Tapanuli Selatan	161.441	158.889	320.330
25	Padang Lawas	143.305	142.399	285.704
26	Padang Lawas Utara	145.527	140.132	285.659
27	Toba	109.884	109.696	219.580
28	Humbang Hasundutan	105.101	104.359	209.460
29	Nias Utara	80.244	81.198	161.442
30	Nias	77.000	80.513	157.513
31	Samosir	72.510	72.303	144.813
32	Nias Barat	48.265	50.859	99.124
33	Pakpak Bharat	28.949	28.297	57.246
Sumatera Utara		**7.922.846**	**7.862.993**	**15.785.839**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Medan yang mencapai 2.498.293 jiwa (15,83%) dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang 2.078.046 jiwa (13,16%), Kabupaten Langkat 1.089.969 jiwa (6,90%), Kabupaten Simalungun 1.067.499 jiwa (6,76%), dan Kabupaten

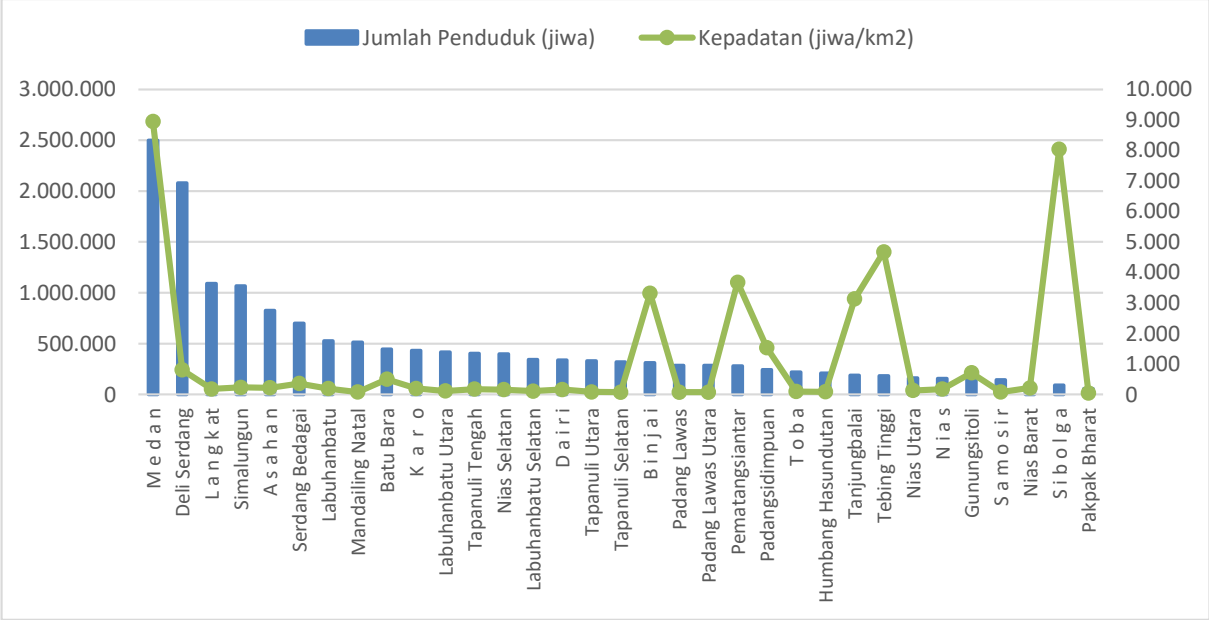
Asahan 824.597 jiwa (5,22%). Jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang berjumlah 57.246 jiwa (0,36%), Kota Sibolga 92.244 jiwa (0,58%), Kabupaten Nias Barat 99.124 jiwa (0,63%), Kabupaten Samosir 144.813 jiwa (0,92%), Kota Gunungsitoli 147.516 jiwa (0,93%), dan Kabupaten Nias 157.513 jiwa (1,00%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 5%.

Tabel 1.5
Jumlah, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2025[1)]

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km^2)	Distribusi (%)
1	Medan	2.498.293	8.945,16	15,83
2	Sibolga	92.244	8.041,50	0,58
3	Tebing Tinggi	182.968	4.671,13	1,16
4	Pematangsiantar	279.198	3.677,58	1,77
5	Binjai	310.932	3.315,90	1,97
6	Tanjungbalai	188.063	3.130,63	1,19
7	Padangsidimpuan	243.843	1.530,73	1,54
8	Gunungsitoli	147.516	706,89	0,93
9	Deli Serdang	2.078.046	805,06	13,16
10	Batu Bara	443.998	499,92	2,81
11	Serdang Bedagai	700.077	359,16	4,43
12	Simalungun	1.067.499	231,99	6,76
13	Asahan	824.597	220,61	5,22
14	Nias Barat	99.124	213,53	0,63
15	Karo	432.049	195,77	2,74
16	Labuhan Batu	527.043	190,10	3,34
17	Langkat	1.089.969	177,52	6,90
18	Nias	157.513	174,55	1,00
19	Tapanuli Tengah	402.904	174,59	2,55
20	Dairi	336.403	161,45	2,13
21	Nias Selatan	397.224	156,90	2,52
22	Nias Utara	161.442	130,40	1,02
23	Labuanbatu Utara	415.485	112,72	2,63
24	Labuhanbatu Selatan	342.225	111,13	2,17
25	Toba	219.580	95,82	1,39
26	Humbang Hasundutan	209.460	89,07	1,33
27	Tapanuli Utara	330.856	84,93	2,10
28	Samosir	144.813	78,28	0,92
29	Mandailing Natal	513.536	78,44	3,25
30	Tapanuli Selatan	320.330	76,25	2,03
31	Padang Lawas	285.704	72,99	1,81
32	Padang Lawas Utara	285.659	72,40	1,81
33	Pakpak Bharat	57.246	41,92	0,36
Sumatera Utara		**15.785.839**	**217,85**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020

Gambar 1.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2025[1)]



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 diolah

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.460,744 km², kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2025 mencapai 218 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan berjumlah 8.945 jiwa per km², Kota Sibolga berjumlah 8.041 jiwa per km², diikuti oleh Kota Tebing Tinggi berjumlah 4.671 jiwa per km², Kota Pematang Siantar berjumlah 3.677 jiwa per km², Kota Binjai berjumlah 3.316 jiwa per km², Kota Tanjungbalai berjumlah 3.131 jiwa per km² dan Kota Padang Sidempuan berjumlah 1.531 jiwa per km².

Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk dibawah 100 jiwa per km² antara lain di Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 42 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 72 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas berjumlah 73 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 76 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Samosir berjumlah 78 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 85 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 89 jiwa per km², dan Kabupaten Toba berjumlah 96 jiwa per km².

3. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Sumatera Utara tahun 2025 berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 sebesar 15.785.839 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2025 sebesar 1,37%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.922.846 jiwa (50,19%) dan penduduk perempuan sebanyak 7.862.993 jiwa (49,81%) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 100,76%.

4. Jumlah PNS

Pada periode 31 Desember 2025 jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 24.532 Orang terdiri dari PNS 20.743 orang dan PPPK 3.789 orang. Jumlah ASN tersebut terdiri dari beberapa item, antara lain :

Tabel 1.6
Jumlah PNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Golongan

PNS Berdasarkan Golongan				Jumlah
I	II	III	IV	
45	1.339	13.517	5.742	20.743
PPPK Berdasarkan Golongan				Jumlah
V	VII	IX	X	
261	135	3.363	30	3.789

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.7
Jumlah PNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin

PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
Laki – Laki	Perempuan	
8.643	12.100	20.743
PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
Laki – Laki	Perempuan	
1.600	2.189	3.789

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.8
Jumlah PNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Agama

PNS Berdasarkan Agama						Jumlah
Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	
11.145	8.251	1.324	1	12	10	20.743
PPPK Berdasarkan Agama						Jumlah
Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	
2.203	1.321	265	-	-	-	3.789

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.9
Jumlah PNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Pendidikan

PNS Berdasarkan Pendidikan									Jumlah (Org)
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	
40	68	1.595	23	15	807	14.793	3.348	54	20.743
PPPK Berdasarkan Pendidikan									Jumlah (Org)
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	
-	-	261	-	-	135	3.345	48	-	3.789

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

Tabel 1.10
Jumlah PNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Eselon

PNS Berdasarkan Eselon									Jumlah (Org)
I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFU	JFT	
1	32	10	171	170	593	5	5.146	14.615	20.743
PPPK Berdasarkan Eselon									Jumlah (Org)
							JFU	JFT	
							306	3.483	3.789

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

5. Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
b. Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**6.419.301.627.754,00**	**5.686.332.189.656,26**	**88,59**
Pajak Daerah	5.605.254.375.313,00	5.062.104.690.315,09	90,31
Retribusi Daerah	192.531.703.635,00	208.476.146.302,52	108,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	353.166.995.232,00	329.075.868.190,00	93,18
Lain-lain PAD yang Sah	268.348.553.574,00	86.809.132.332,65	32,35
PENDAPATAN TRANSFER	**5.907.944.781.000,00**	**5.937.997.803.485,00**	**100,51**
Pendapatan Transfer	5.907.944.781.000,00	5.937.997.803.485,00	100,51

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**407.863.968.629,00**	**402.754.580.542,0**	**105,75**
Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	6.282.708.000,00	99,73
Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	354.554.453.629,00	376.471.872.542,00	106,18
PENDAPATAN DAERAH	**12.708.100.862.383,00**	**12.027.332.189.656,26**	**94,64**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu, diolah dari e-keuangan Provsu
Keterangan : data 6 Maret 2026

6. Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni :

1) Kondisi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2) Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
3) Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1) Belanja Operasi, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal, meliputi : Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya.
3) Belanja Tidak Terduga;
4) Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	**12.507.012.266.279,56**	**11.505.837.768.759,97**	**92,00**
BELANJA OPERASI	**7.354.037.091.904,56**	**7.093.261.964.818,66**	**96,45**
Belanja Pegawai	3.564.822.018.789,92	3.554.032.291.729,80	99,70
Belanja Barang dan Jasa	2.891.751.233.984,64	2.726.008.931.921,86	94,27
Belanja Hibah	882.656.024.000,00	799.152.656.001,00	90,54
Belanja Bantuan Sosial	14.807.815.130,00	14.068.085.166,00	95,00

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA MODAL	**1.371.853.825.344,00**	**1.217.262.853.771,51**	**88,73**
Belanja Modal Tanah	7.363.233.952,00		0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.364.968.819,00	326.728.867.489,00	92,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.136.889.681,00	156.913.073.342,84	89,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	698.166.570.044,00	596.142.299.760,67	85,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.521.108.508,00	135.862.052.429,00	99,52
Belanja Modal Aset Lainnya	2.301.054.340,00	1.616.560.750,00	70,25
BELANJA TIDAK TERDUGA	**98.340.847.728,00**	**67.551.879.437,80**	**68,69**
Belanja Tidak Terduga	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69
BELANJA TRANSFER	**3.682.780.501.303,00**	**3.127.761.070.732**	**84,93**
Belanja Bagi Hasil	3.554.256.970.681	2.979.389.050.110	83,83
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	128.523.530.622,00	148.372.020.622,00	115,44

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
Keterangan : Data Unaudited

7. Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, mencakup penerimaan (pinjaman, SiLPA, hasil investasi) dan pengeluaran (pembayaran utang pokok, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan) yang harus dibayar kembali atau diterima kembali, dengan tujuan pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Sumbernya bisa dari internal (PAD, hasil investasi) atau eksternal (transfer pusat, pinjaman daerah, obligasi daerah).

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Pembiayaan, terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 1.13
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

JENIS PEMBIAYAAN		ANGGARAN	REALISASI	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH		**(39.007.474.103,44)**	**10.992.525.896,56**	**(28,18)**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**10.992.525.896,56**	**10.992.525.896,56**	**100**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**50.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(39.007.474.103,44)**	**10.992.525.896,56**	**(28,18)**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
Keterangan : Data Unaudited

D. KONDISI MAKRO EKONOMI

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2025. Indikator makro sosial ekonomi tersebut merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2025. Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan, Angkatan Kerja, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Ekspor Impor.

Tabel 1.14
Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Penduduk Miskin kondisi Maret			
	a. Jumlah (ribu jiwa)	1.228,01	1.140,25	-7,15%
	b. Persentase (%)	7,99	7,36	-0,63% poin
2.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Maret	0,297	0,295	-0,002 poin
3.	Ketenagakerjaan (Agustus)			
	a. Angkatan Kerja (ribu jiwa)	8.181	8.425	2,98%
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,36	72,29	0,93% poin
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,60	5,32	-0,28% poin
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,76	76,47	0,71 poin
5.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,53	-0,50% poin

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
6.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)			
	a. Atas Dasar Harga Berlaku	73,57	78,31	6,44%
	b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	40,58	41,89	3,23%
7.	Inflasi (%)	2,12	4,66	2,54% poin
8.	Perdagangan Luar Negeri (ribu US$)			
	a. Ekspor	10.799.901	12.396.413	14,78%
	b. Impor	5.795.160	5.467.904	-5,65%
	c. Neraca Perdagangan	5.004.741	6.928.510	38,44%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Ket : *) Komponen UHH menggunakan data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)*

1. Kemiskinan dan Ketimpangan

Berbagai Program Pengentasan Kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil Susenas bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,63%poin yaitu dari 7,99 persen pada Maret 2024 menjadi 7,36 persen pada Maret 2025. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.140.250 jiwa pada Maret 2025, atau berkurang sekitar 87.760 jiwa.

Sedangkan kondisi bulan September 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.128,06 ribu jiwa atau sebesar 7,24 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2024 yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.228,01 ribu jiwa atau sebesar 7,99 persen. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 12.190 jiwa pada periode Maret 2025 - September 2025, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,07 poin

Tabel 1.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. Maret 2024	697,46	530,55	1.228,01	7,93	8,08	7,99
2. September 2024	623,78	487,14	1.110,92	7,01	7,44	7,19
3. Maret 2025	636,55	503,71	1.140,25	7,10	7,71	7,36
4. September 2025	648,75	479,31	1.128,06	7,16	7,35	7,24

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2024 – 2025

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,295. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,297. Pada September 2025, nilai Gini Ratio turun menjadi 0,283. Secara umum nilai Gini Ratio Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada periode tahun 2024-2025.

Tabel 1.16
Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2024-2025

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Maret 2024	0,325	0,230	0,297
2. September 2024	0,333	0,236	0,306
3. Maret 2025	0,324	0,228	0,295
4. September 2025	0,305	0,233	0,283

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2024 – 2025

2. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2025 sebanyak 8.425.000 orang, naik 244.000 orang dibanding Agustus 2024. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 7.723.000 orang, sedangkan yang menganggur 458.000 orang. Dibanding tahun 2024, jumlah penduduk bekerja tahun 2025 bertambah 253.000 orang (3,20%) menjadi 7.976.000 orang, sedangkan jumlah pengangguran turun 1.000 orang (2,23%) menjadi 448.000 orang.

Tabel 1.17
Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2023 – Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	11.289	11.464	11.653
2. Angkatan Kerja	Ribu Orang	8.022	8.181	8.425
a. Bekerja	Ribu Orang	7.550	7.723	7.976
b. Pengangguran	Ribu Orang	472	458	448
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	3.267	3.283	3.229
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,06	71,36	72,29
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,89	5,60	5,32

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023- 2025

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2025 tercatat sebesar 72,29%, naik 0,93 poin dibanding setahun yang lalu yang sebesar 71,36%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 5,32%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,28 poin dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 5,60%.

Tabel 1.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2024 – 2025

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2024		Agustus 2025	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.562	33,18	2.595	32,53
2.	B. Pertambangan dan Penggalian	47	0,60	39	0,49
3.	C. Industri Pengolahan	706	9,14	721	9,04
4.	D. Pengadaan Listrik dan Gas	22	0,29	24	0,30
5.	E. Pengadaan Air	35	0,45	41	0,51
6.	F. Konstruksi	468	6,06	480	6,02
7.	G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.533	19,85	1.586	19,89
8.	H. Transportasi dan Pergudangan	335	4,33	360	4,51
9.	I. Akomodasi dan Makan Minum	645	8,35	666	8,35
10.	J. Informasi dan Komunikasi	45	0,58	47	0,59
11.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	67	0,86	64	0,81
12.	L. Real Estat	10	0,12	14	0,17
13.	M, N. Jasa Perusahaan	130	1,68	123	1,55
14.	O. Administrasi Pemerintahan	262	3,40	277	3,48
15.	P. Jasa Pendidikan	386	4,99	422	5,29
16.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131	1,70	133	1,67
17.	R,S,T,U. Jasa Lainnya	340	4,40	382	4,79
JUMLAH		**7.723**	**100,00**	**7.976**	**100,00**

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024-2025

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja, tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2025, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 2.595.000 orang (32,53%), disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.586.000 orang (19,89%) dan 721.000 orang (9,04%).

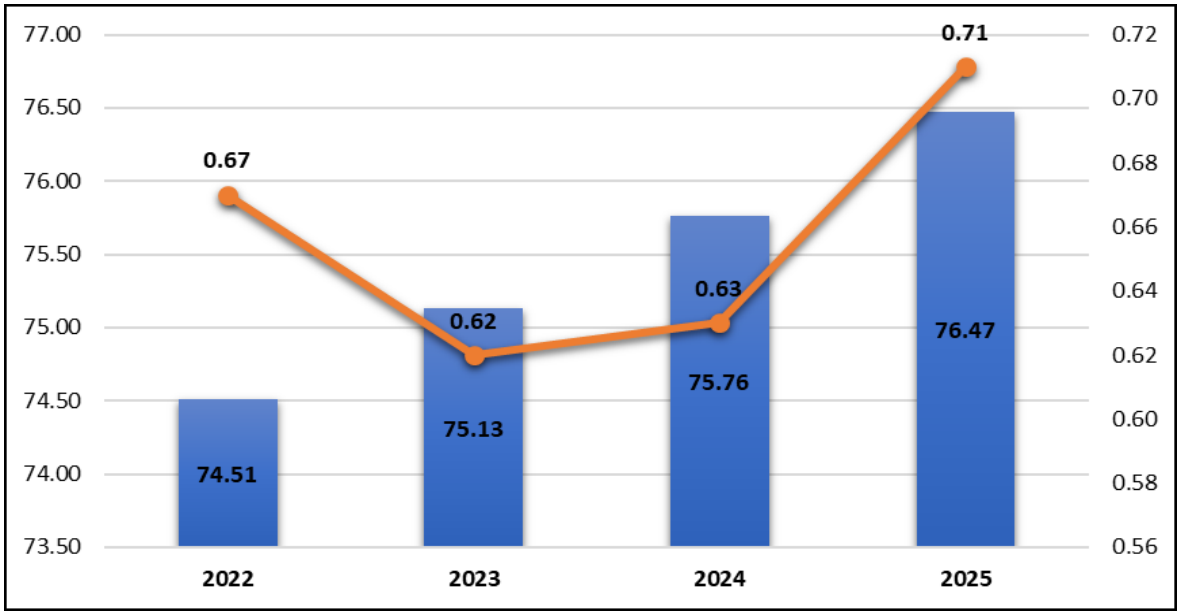
Jika dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2024-Agustus 2025, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar ada pada sektor Jasa Pendidikan (0,30 poin).

3. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara 2022-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Gambar diatas menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2022 hingga 2025. IPM Sumatera Utara pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2025 sebesar 76,47 atau tumbuh 0,94% (meningkat 0,71 poin) dibandingkan capaian IPM 2024 yang sebesar 75,76. Pertumbuhan ini meningkat jika dibanding pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 0,84 %.

Tabel 1.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen
Tahun 2022-2025

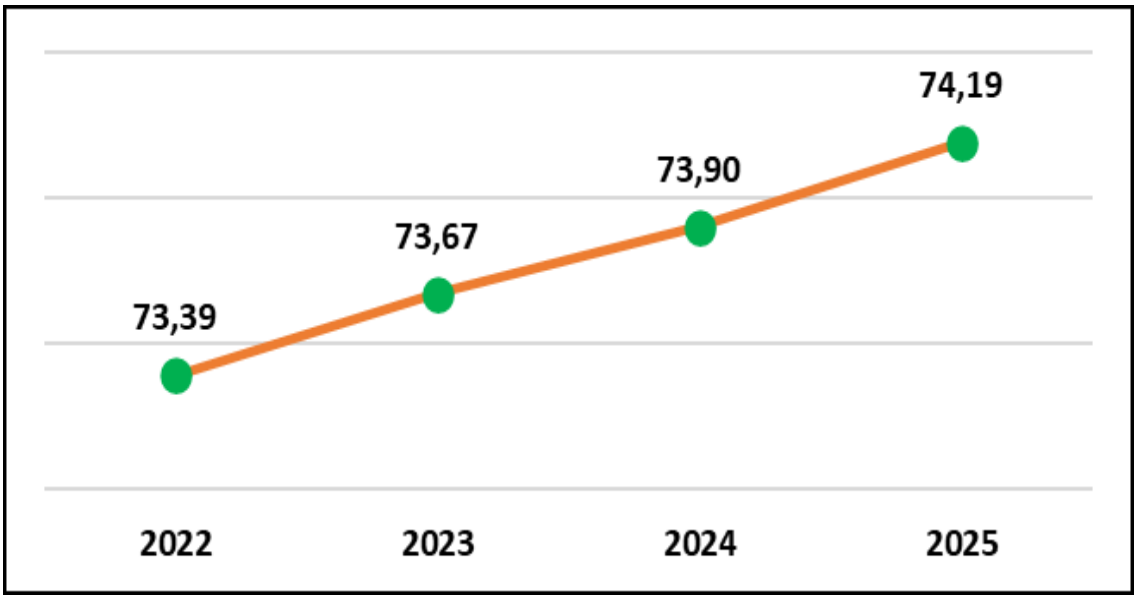
Komponen	Satuan	2022	2023	2024	2025
(1)	*(2)*	*(2)*	*(4)*	*(4)*	*(5)*
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,39	73,67	73,90	74,19
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,31	13,48	13,49	13,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,71	9,82	9,93	10,08
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	10.848	11.049	11.460	11.898
IPM		**74,51**	**75,13**	**75,76**	**76,47**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan: Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

3.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,29 tahun pada periode tahun 2024-2025. Pada tahun 2022, UHH di Sumatera Utara adalah 73,39 tahun, meningkat menjadi 73,67 tahun pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 73,90 tahun pada 2024, dan pada tahun 2025 mencapai 74,19 tahun.

Gambar 1.5
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara 2022-2025

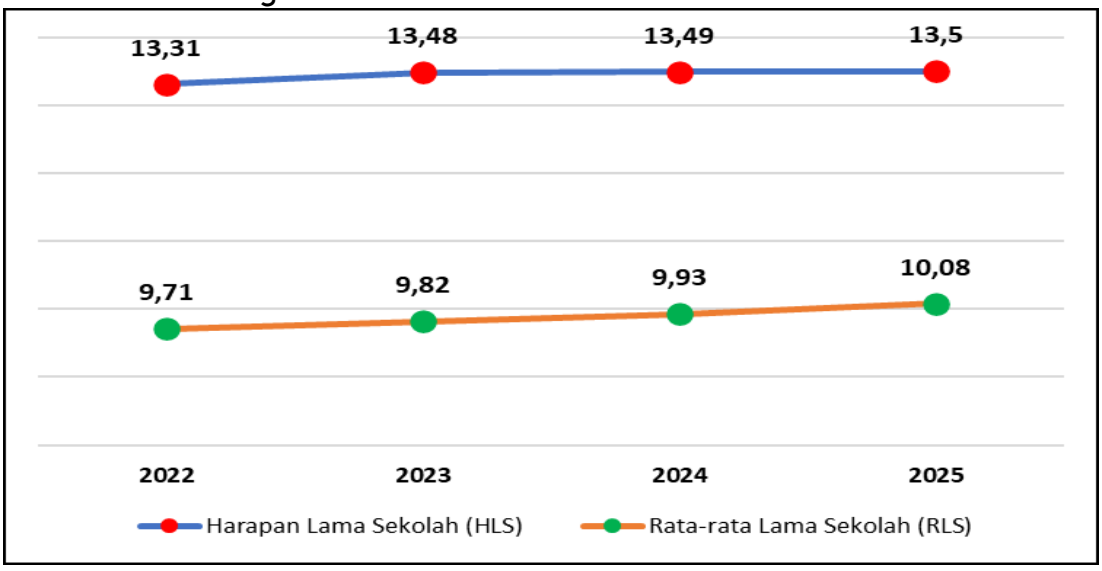


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.2 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2022 hingga 2025, HLS dan RLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan.

Gambar 1.6
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2022-2025

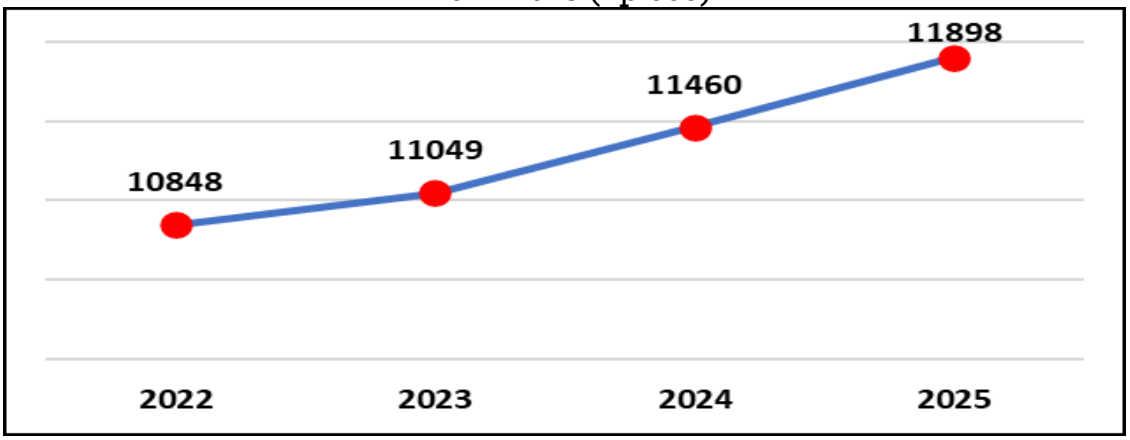


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.3 Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2024 mencapai Rp11.460.000 per tahun dan meningkat sebesar 3,68% pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp11.898.000 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah era pasca covid melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 1.7
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara 2022-2025 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antarkabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (66,65), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (83,74) disusul oleh Pematang Siantar (81,71) dengan status capaian pembangunan manusia yang ‘‘sangat tinggi’’ (IPM ≥ 80).

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM ‘‘rendah’’ (IPM<60) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM ‘‘sangat tinggi’’ (IPM ≥ 80) pada tahun 2025 menjadi 2 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM ‘‘tinggi’’ (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2025 menjadi 27 kabupaten/kota. Sedangkan IPM dengan status ‘‘sedang’’ (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 4 kabupaten/kota.

Tabel 1.20
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sumatera Utara
2022– 2025

No.	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024	2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*
1	Nias	64,3063,69	65,15	66,13	66,79
2	Mandailing Natal	72,1768,05	72,65	73,44	74,26
3	Tapanuli Selatan	73,9670,92	74,58	75,18	75,78
4	Tapanuli Tengah	72,1870,31	72,77	73,34	73,97
5	Tapanuli Utara	76,4374,14	76,86	77,48	78,09
6	Toba	77,5875,96	77,83	78,44	79,17
7	Labuhanbatu	73,9672,92	74,70	75,20	75,79
8	Asahan	73,1871,13	73,59	74,17	75,13
9	Simalungun	74,6873,77	75,17	75,88	76,48
10	Dairi	74,6072,56	75,18	75,88	76,68
11	Karo	76,3775,36	76,88	77,49	78,10
12	Deli Serdang	76,8676,19	77,16	77,56	78,29
13	Langkat	74,0371,86	74,33	74,85	75,58
14	Nias Selatan	64,0563,17	64,98	65,87	66,74
15	Humbang Hasundutan	72,0570,32	72,49	73,33	73,93
16	Pakpak Bharat	71,5768,85	72,30	73,09	73,89
17	Samosir	72,5771,67	72,93	73,77	74,63
18	Serdang Bedagai	72,8971,21	73,40	74,15	74,69
19	Batu Bara	71,7569,51	72,56	73,14	73,92
20	Padang Lawas Utara	72,7770,93	73,45	74,16	75,12
21	Padang Lawas	71,4169,58	72,16	73,10	73,90
22	Labuhanbatu Selatan	73,5972,16	74,23	75,11	75,74
23	Labuhanbatu Utara	74,6172,77	75,45	76,20	76,71
24	Nias Utara	64,5563,75	65,44	66,42	67,38
25	Nias Barat	63,9662,93	64,68	65,66	66,65
26	Sibolga	76,6974,74	77,07	77,52	78,11
27	Tanjungbalai	74,7369,86	75,42	75,95	76,70
28	Pematang Siantar	79,7179,70	80,46	81,17	81,71

No.	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
29	Tebing Tinggi	77,3976,17	78,17	78,68	79,26
30	Medan	82,1381,76	82,61	83,23	83,74
31	Binjai	77,5076,95	78,11	78,67	79,20
32	Padang Sidempuan	77,7376,05	78,10	78,61	79,19
33	Gunungsitoli	71,1170,23	71,55	72,30	73,29
Sumatera Utara		**74,51**	**75,13**	**75,76**	**76,47**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2024-2025 adalah Kabupaten Nias Barat yang mencapai 1,51%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kota Medan yang sebesar 0,61% tercatat sebagai yang paling lambat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.1.236,19 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.72,65 juta. Secara makro, kinerja perekonomian Sumatera Utara tahun 2025 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,53%, angka ini mengalami perlambatan dibanding capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,74%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 10,24 %.

Tabel 1.21
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024*)	2025**)	2024*)	2025**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	279.732,30	313.000,70	158.940,63	166.702,95
B. Pertambangan & Penggalian	13.308,37	14.582,05	7.812,28	7.945,15
C. Industri Pengolahan	210.618,69	227.374,41	108.101,46	111.869,00
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	1.125,19	1.169,70	867,32	895,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	1.001,63	1.091,71	598,49	635,36
F. Konstruksi	149.061,01	149.718,65	79.752,79	79.734,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	215.708,94	234.500,12	116.065,40	123.197,78
H. Transportasi dan Pergudangan	57.640,22	64.018,36	29.453,12	32.616,04

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.335,31	27.043,07	15.741,20	16.429,69
J. Informasi dan Komunikasi	26.124,96	28.018,56	21.661,70	23.074,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	31.626,43	33.061,89	18.222,68	18.787,78
L. Real Estate	52.204,45	54.994,54	26.977,20	29.308,68
M,N. Jasa Perusahaan	12,010,07	13.529,23	5.747,52	6.347,86
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34.463,70	34.468,27	19.506,72	19.390,42
P. Jasa Pendidikan	19.784,20	20.973,65	13.634,23	14.201,83
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	10.668,57	11.909,46	5.972,61	6.470,75
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.505,72	6.739,20	3.479,39	3.596,36
PDRB	**1.146.919,75**	**1.236.193,57**	**632.534,73**	**661.204,18**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Pada tahun 2025 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.236,19 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp661,20 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2025 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.313 triliun (25,32%), diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.234,50 triliun (18,97%), lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.227,37 trilun (18,39%), lapangan usaha Konstruksi Rp.149,72 triliun (12,11%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Rp.64,02 triliun (5,18%). Sedangkan 12 lapangan usaha lainnya hanya mampu menghasilkan nilai tambah bruto masing-masing dibawah 5% dari nilai total PDRB Sumatera Utara.

Tabel 1.22
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2022-2025 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Distribusi PDRB			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,98	23,38	24,39	25,32
B. Pertambangan & Penggalian	1,21	1,17	1,16	1,18
C. Industri Pengolahan	19,13	18,57	18,36	18,39
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,10	0,10	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	13,23	13,21	13,00	12,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,99	19,12	18,81	18,97
H. Transportasi dan Pergudangan	4,54	5,06	5,03	5,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,04	2,11	2,21	2,19
J. Informasi dan Komunikasi	2,33	2,30	2,28	2,27
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	2,88	2,76	2,67
L. Real Estate	4,88	4,66	4,55	4,45
M,N. Jasa Perusahaan	1,05	1,06	1,05	1,09
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,00	3,00	2,79

Lapangan Usaha/ Kategori	Distribusi PDRB			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
S. Jasa Pendidikan	1,77	1,75	1,72	1,70
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,93	0,96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,55	0,58	0,57	0,55
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Jika diamati angka pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,74%, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,45% dan Real Estate sebesar 8,64%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,60% dan lapangan usaha Konstruksi sebesar -0,02%.

Tabel 1.23
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022-2025 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	3,04	3,72	4,88
B. Pertambangan & Penggalian	2,62	3,53	4,02	1,70
C. Industri Pengolahan	1,98	3,45	4,63	3,49
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	4,81	2,16	2,67	3,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	2,17	2,89	2,55	6,16
F. Konstruksi	3,03	6,39	6,52	-0,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,57	5,80	4,44	6,15
H. Transportasi dan Pergudangan	12,96	13,02	6,43	10,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,26	10,22	12,00	4,37
J. Informasi dan Komunikasi	7,60	7,80	7,41	6,52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,81	5,50	3,87	3,10
L. Real Estate	4,53	3,19	5,40	8,64
M,N. Jasa Perusahaan	8,78	6,68	5,13	10,45
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,73	1,92	6,08	-0,60
V. Jasa Pendidikan	5,14	7,38	5,66	4,16
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	4,83	6,42	5,14	8,34
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,72	9,47	6,54	3,36
PDRB	**4,73**	**5,01**	**5,03**	**4,53**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Pada tahun 2025, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,24% atau dari Rp.276,53 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp.304,86 triliun pada tahun 2025. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,74%, meningkat dari Rp.317,90 triliun menjadi Rp.332,95 triliun. Selanjutnya disusul oleh komponen Impor sebagai komponen pengurang yang tumbuh sebesar 3,73%, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 3,36%. Kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 0,14% dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 0,56% pada tahun 2025.

Tabel 1.24
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2024 – 2025 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024*)	2025**)	2024*)	2025**)
1. Konsumsi Rumah Tangga	583.173,30	631.894,58	317.890,13	332.948,31
2. Konsumsi LNPRT	10.524,20	11.154,49	7.134,31	7.374,27
3. Konsumsi Pemerintah	64.752,35	66.175,68	37.151,38	37.202,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	328.629,53	336.386,34	190.051,10	191.108,51
5. Perubahan Inventori	15.774,69	1.623,62	9.313,07	922,56
6. Ekspor Barang dan Jasa	450.239,70	516.023,08	276.532,14	304.859,45
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	306.174,02	327.064,22	205.537,39	213.211,52
PDRB	**1.146.919,75**	**1.236.193,57**	**632.534,73**	**661.204,18**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 51,12%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 41,74%, disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,21%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,35%, Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,90% dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,92%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,46%.

Tabel 1.25
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2022 – 2025 (persen)

Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,49	50,72	50,85	51,12
2. Konsumsi LNPRT	0,85	0,88	0,92	0,90
3. Konsumsi Pemerintah	6,00	5,84	5,65	5,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,57	29,52	28,65	27,21
5. Perubahan Inventori	1,87	1,91	1,38	0,13
6. Ekspor Barang dan Jasa	41,77	37,62	39,26	41,74
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	30,56	26,48	26,70	26,46
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 8,60%, yaitu dari Rp.62,08 juta pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.67,42 juta pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 7,76% dengan nilai sebesar Rp.72,65 juta.

Tabel 1.26
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022 – 2025 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	3,06	3,82	3,89	3,63
02. Mandailing Natal	4,34	4,93	4,83	4,38
03. Tapanuli Selatan	4,78	5,11	5,12	4,39
04. Tapanuli Tengah	4,18	4,23	4,15	3,25
05. Tapanuli Utara	4,25	4,75	4,77	4,58
06. Toba	4,24	4,93	4,84	4,10
07. Labuhanbatu	4,80	5,03	5,06	4,18
08. Asahan	4,66	4,87	4,68	4,60
09. Simalungun	4,68	5,07	4,89	4,73
10. Dairi	4,21	5,04	4,97	4,52
11. Karo	4,22	5,06	4,22	4,23
12. Deli Serdang	4,70	5,34	5,36	4,55
13. Langkat	4,69	4,93	4,98	4,10
14. Nias Selatan	3,08	3,65	3,82	3,04
15. Humbang Hasundutan	4,21	4,38	4,79	3,80
16. Pakpak Bharat	4,27	5,10	5,02	5,47
17. Samosir	4,48	5,03	5,02	4,14
18. Serdang Bedagai	4,46	5,03	5,01	5,07
19. Batubara	4,07	4,08	4,12	3,39

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. Padang Lawas Utara	4,12	4,92	4,99	4,27
21. Padang Lawas	4,61	5,14	5,02	4,19
22. Labuhanbatu Selatan	4,74	4,94	4,89	4,70
23. Labuhanbatu Utara	4,62	4,76	4,24	4,14
24. Nias Utara	3,03	3,79	3,64	3,40
25. Nias Barat	3,01	3,72	3,89	2,23
26. Sibolga	4,15	4,20	3,92	3,03
27. Tanjungbalai	3,94	4,86	4,91	4,76
28. Pematangsiantar	3,47	4,22	4,61	4,09
29. Tebing Tinggi	4,01	3,98	3,37	3,07
30. Medan	4,71	5,04	5,07	5,10
31. Binjai	4,18	4,75	4,66	4,50
32. Padangsidempuan	4,77	5,09	5,01	4,82
33. Gunungsitoli	3,11	3,69	3,84	3,43
Sumatera Utara	**4,73**	**5,01**	**5,03**	**4,53**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2025 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 2,23% persen sampai dengan 5,47%. Dan terdapat 3 kabupaten/kota yang tumbuh diatas 5%. Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,47%, diikuti oleh Kota Medan sebesar 5,10%, dan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,07%. Sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar 2,23%.

Tabel 1.27
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2024 – 2025 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024*)	2025**)	2024*)	2025**)
01. Nias	5.304,62	5.668,82	2.964,34	3.072,05
02. Mandailing Natal	20.279,38	22.043,92	11.001,61	11.483,68
03. Tapanuli Selatan	21.276,31	23.638,00	11.620,33	12.129,95
04. Tapanuli Tengah	13.671,28	14.559,65	8.084,42	8.347,56
05. Tapanuli Utara	11.279,15	12.051,74	6.931,24	7.248,51
06. Toba	10.284,43	10.831,86	6.478,13	6.743,59
07. Labuhanbatu	50.801,78	54.829,28	27.924,86	29.092,77
08. Asahan	57.457,93	63.144,24	31.341,30	32.783,93
09. Simalungun	58.906,11	64.810,17	33.052,35	34.616,99
10. Dairi	12.693,88	13.617,06	7.631,31	7.976,35
11. Karo	28.867,89	30.462,81	16.641,17	17.345,36
12. Deli Serdang	151.451,40	162.247,88	83.868,36	87.683,33
13. Langkat	62.411,48	68.152,02	34.880,49	36.311,27
14. Nias Selatan	9.128,45	9.629,63	4.806,33	4.952,27

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024*)	2025**)	2024*)	2025**)
15. Humbang Hasundutan	8.272,39	8.831,08	4.808,86	4.991,83
16. Pakpak Bharat	1.718,75	1.871,67	1.003,95	1.058,92
17. Samosir	6.100,41	6.509,11	3.644,15	3.794,86
18. Serdang Bedagai	42.012,01	46.220,20	22.883,58	24.043,80
19. Batubara	47.317,58	51.388,29	27.614,17	28.549,99
20. Padang Lawas Utara	17.831,27	19.536,99	9.855,95	10.276,52
21. Padang Lawas	18.330,40	20.555,91	9.659,72	10.064,06
22. Labuhanbatu Selatan	41.909,64	46.170,50	22.619,57	23.682,47
23. Labuhanbatu Utara	36.582,00	39.677,85	20.527,76	21.378,55
24. Nias Utara	4.790,41	5.128,29	2.678,92	2.769,93
25. Nias Barat	2.531,58	2.671,71	1.427,11	1.458,90
26. Sibolga	7.201,60	7.575,00	4.055,30	4.178,00
27. Tanjungbalai	12.207,74	13.141,28	6.744,35	7.065,41
28. Pematang Siantar	17.351,67	18.451,10	10.769,97	11.210,47
29. Tebing Tinggi	7.875,11	8.265,04	4.499,55	4.637,74
30. Medan	329.609,17	353.289,26	182.242,59	191.540,51
31. Binjai	15.588,75	16.644,36	9.322,08	9.741,60
32. Padang Sidempuan	8.576,98	9.132,34	5.025,22	5.267,67
33. Gunungsitoli	7.321,91	7.647,11	3.906,89	4.040,87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 28,74%, dengan nilai PDRB sebesar Rp.329,61 triliun. Kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang yang berkontribusi sebesar 13,20%, dengan nilai PDRB mencapai Rp.151,45 triliun, kemudian Kabupaten Langkat yang berkontribusi sebesar Rp.56,19 triliun atau sebesar 5,44% terhadap total PDRB. Selanjutnya Kabupaten Simalungun sebesar 5,14%, Kabupaten Asahan berperan sebesar 5,01%, Kabupaten Labuhanbatu sebesar 4,43%, dan Kabupaten Batu Bara berperan sebesar 4,13%. Sedangkan lima kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Samosir sebesar 0,53%, Kabupaten Nias sebesar 0,46%, Kabupaten Nias Utara sebesar 0,42%, Kabupaten Nias Barat sebesar 0,22%, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,15%.

Tabel 1.28
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2025 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2023	2024*)	2025**)
01. Nias	31.614,35	34.085,06	35,989.52
02. Mandailing Natal	36.867,69	40.128,58	42,925.76
03. Tapanuli Selatan	60.393,71	67.226,69	73,792.66
04. Tapanuli Tengah	32.649,10	34.618,71	36,136.78
05. Tapanuli Utara	32.465,61	34.493,54	36,425.94
06. Toba	45.154,41	47.454,92	49,329.92
07. Labuhanbatu	89.062,44	97.593,45	104,031.90
08. Asahan	63.897,82	70.611,43	76,575.88
09. Simalungun	50.427,74	56.002,65	60,712.16
10. Dairi	35.877,62	38.398,10	40,478.43
11. Karo	62.759,11	67.690,16	70,507.77
12. Deli Serdang	68.922,90	73.933,55	78,077.13
13. Langkat	52.677,11	57.859,34	62,526.57
14. Nias Selatan	22.415,95	23.408,87	24,242.32
15. Humbang Hasundutan	37.396,44	39.948,56	42,161.16
16. Pakpak Bharat	28.271,07	30.576,18	32,695.23
17. Samosir	40.017,20	42.639,03	44,948.39
18. Serdang Bedagai	54.961,49	60.742,77	66,021.60
19. Batu bara	101.676,29	108.189,10	115,739.92
20. Padang Lawas Utara	57.442,30	63.548,08	68,392.71
21. Padang Lawas	58.506,06	65.287,57	71,948.29
22. Labuhanbatu Selatan	113.617,43	124.517,23	134,912.71
23. Labuhanbatu Utara	82.791,65	89.497,47	95,497.68
24. Nias Utara	28.727,67	30.189,86	31,765.54
25. Nias Barat	24.508,63	26.031,41	26,953.22
26. Sibolga	74.736,18	78.494,15	82,119.13
27. Tanjungbalai	61.197,21	65.757,80	69,877.03
28. Pematang Siantar	59.045,87	62.629,18	66,086.06
29. Tebing Tinggi	41.518,75	43.514,42	45,172.04
30. Medan	122.591,56	132.571,06	141,412.26
31. Binjai	47.678,59	50.749,60	53,530.55
32. Padang Sidempuan	33.566,40	35.727,43	37,451.72
33. Gunungsitoli	48.460,15	50.414,89	51,839.22
Sumatera Utara	**68.305,71**	**73.574,62**	**78,310.29**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2025 tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp.141,41 juta, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.134,91 juta, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.115,74 juta, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.104,03 juta, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp.95,50 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp.24,24 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar

Rp.26,95 juta, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.31,77 juta, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp.32,70 juta, dan Kabupaten Nias sebesar Rp.35,99 juta.

5. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 8 kabupaten/kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi tertinggi selama tahun 2025 yaitu 10,84%, diikuti Kota Sibolga sebesar 5,62%, sedangkan Kabupaten Karo mengalami inflasi terendah selama tahun 2025 yaitu sebesar 3,15%.

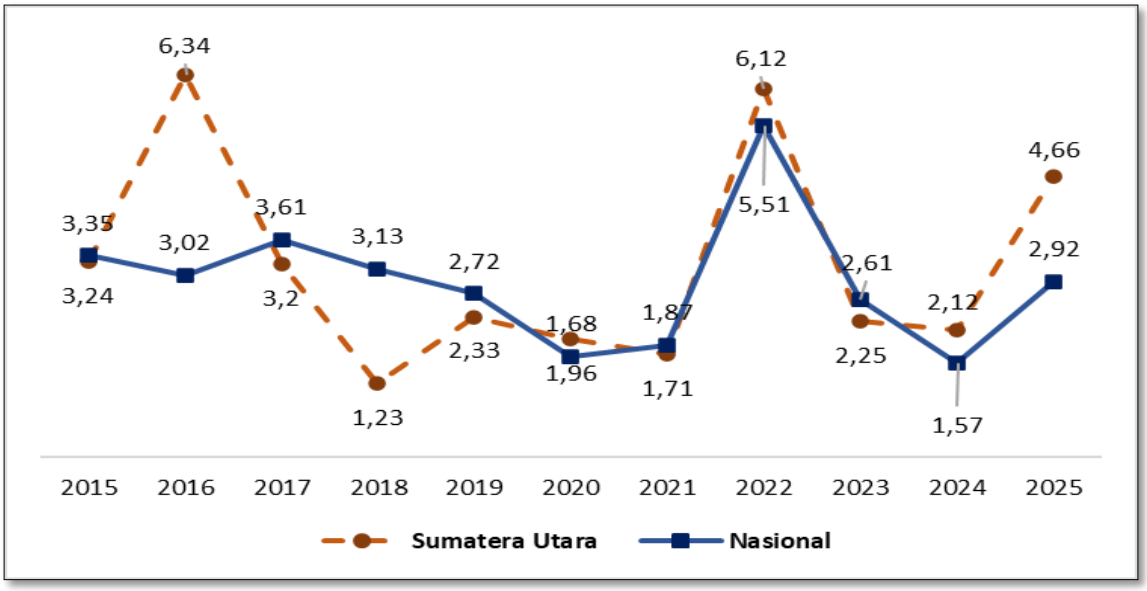
Tabel 1.29
Perkembangan Inflasi 8 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2015-2025 (persen)

Tahun	Medan	Pematang-siantar	Sibolga	Padang-sidimpuan	Gunung-sitoli	Labuhan-batu	Karo	Deli Serdang	Sumatera Utara	Nasional
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*				*(7)*	*(8)*
2015	3,32	3,36	3,34	1,66					3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28					6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82					3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22					1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15					2,33	2,72
2020	1,76	2,78	2,42	3,27	5,32				1,96	1,68
2021	1,70	2,12	1,86	1,49	0,54				1,71	1,87
2022	6,10	6,16	6,43	6,40	5,74				6,12	5,51
2023	2,19	2,30	2,80	2,95	2,35				2,25	2,61
2024	2,12	2,86	2,94	2,46	3,10	3,36	1,33	1,80	2,12	1,57
2025	4,36	5,37	5,62	5,46	10,84	4,74	3,15	5,16	4,66	2,92

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama tahun 2025, inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Sumatera Utara sebesar 4,66%, angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 2,12%. Inflasi Sumatera Utara lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 2,92%.

Gambar 1.8
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2015-2025 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

6. Perdagangan Luar Negeri

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada periode dua tahun terakhir (2024-2025) menunjukan hasil yang positif, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terus mengalami surplus. Tahun 2024 perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US$5,00 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi US$6,93 miliar di tahun 2025.

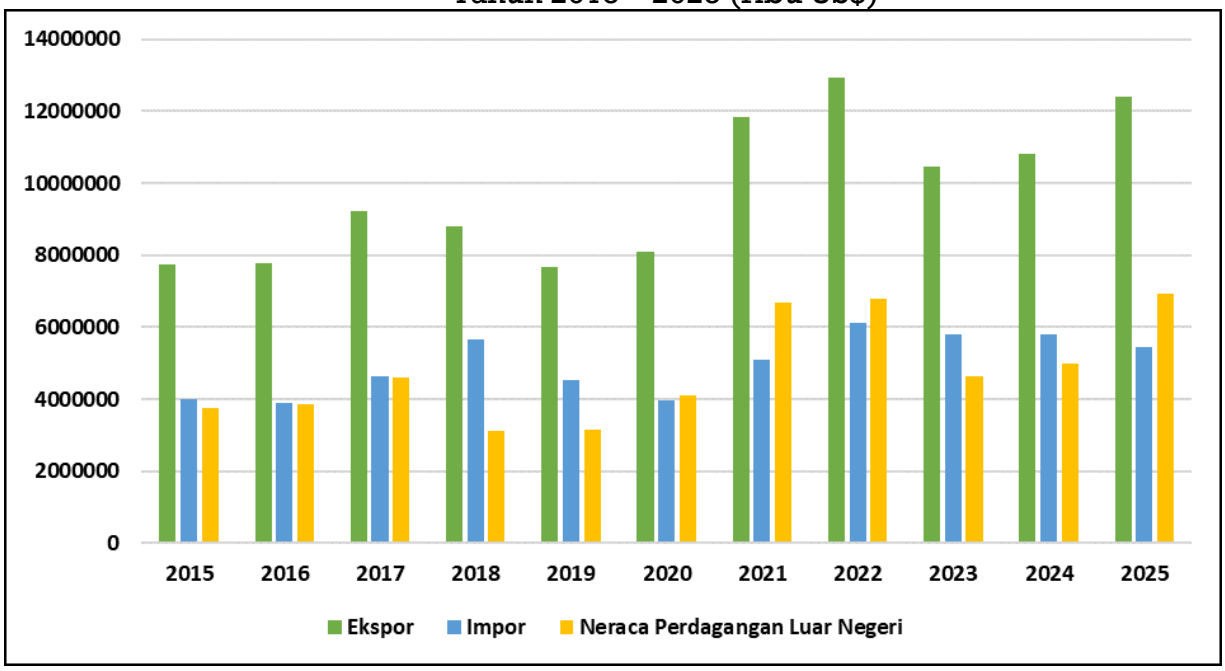
Dilihat dari sisi ekspor, pada periode 2019-2022 nilai ekspor Sumatera Utara terus mengalami peningkatan hingga mencapai US$ 12,92 miliar pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 19,15% dibanding tahun 2022, menjadi sebesar US$ 10,45 miliar di tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai ekspor kembali meningkat menjadi US$ 10,80 miliar dan meningkat lagi di tahun 2025 menjadi US$ 12,40 miliar. Di sisi lain, nilai impor mengalami penurunan bila dibandingkan nilai impor tahun 2024. Dimana nilai impor pada tahun 2024 sebesar US$ 5,80 miliar menjadi US$ 5,47miliar di tahun 2025.

Tabel 1.30
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2025

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri *(Ribu US$)*
	Berat Bersih *(Ton)*	Nilai FoB *(Ribu US$)*	Berat Bersih *(Ton)*	Nilai CiF *(Ribu US$)*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
2015	9.008.520	7.752.786	6.853.734	3.988.440	3.764.346
2016	8.387.357	7.770.742	6.819.193	3.914.490	3.856.250
2017	8.981.772	9.225.286	7.038.772	4.635.808	4.589.478
2018	9.645.621	8.787.224	7.214.945	5.652.347	3.134.878
2019	9.529.180	7.663.174	6.301.659	4.530.324	3.152.850
2020	8.831.142	8.084.391	5.795.198	3.979.889	4.104.502
2021	9.463.706	11.850.169	6.219.931	5.091.233	6.673.182
2022	9.676.270	12.923.743	6.432.586	6.134.776	6.788.991
2023	10.625.345	10.448.833	7.109.149	5.820.823	4.628.578
2024	9.553.670	10.799.901	7.382.334	5.795.160	5.004.741
2025	9.521.367	12.396.413	6.693.371	5.467.904	6.928.510

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.9
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2025 (ribu US$)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah selama satu tahun anggaran. Struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Penyusunan APBD merupakan proses perencanaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk menentukan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi aktual di daerah, prosesnya harus transparan, akuntabel, dan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. Disiplin Anggaran Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam

perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 7)

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap Objek Pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak. Ekstensifikasi Pajak ditujukan bagi wabjib pajak baik orang maupun Badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan penagihan dan penerapan sanksi tegas.

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui :

a. Optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
d. Pajak daerah lainnya sesuai kewenangan provinsi.

Aksi nyata pembangunan:

a. Peningkatan kepatuhan wajib pajak,
b. penurunan tunggakan pajak,
c. peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kegiatan ini mencerminkan implementasi kualitas tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan terintegrasi, sejalan dengan Misi Gubernur.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dan strategi di antaranya:

a. Meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi bebas denda pokok pajak dan SWDKLLJ, Bebas Denda Balik Nama Kendaraan Bermotot (BBNKB), bebas pajak progresif dan bebas tunggakan pokok PKB.
b. Mengintensifkan sinergitas dengan kepolisian melalui kegiatan Razia Terpadu Kendaraan Bermotor
c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui Pembentukan Tim Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
d. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana melalui penambahan layanan samsat gerai, penambahan layanan di tempat-tempat keramaian dan acara tertentu dengan bus samsat keliling, pengadaan barang jasa dan pemeliharaan yang dapat mendukung pelayanan kesamsatan;
e. Optimalisasi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat melalui media social (website) media luar ruang (*video tron*), media cetak (brosur, *branding, leafleat*) dan media elektronik;
f. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat;
g. Melakukan integrasi data NIK dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi dan mencegah penghindaran pajak;
h. Optimalisasi pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dalam upaya mendekatkan pelayanan, konsultasi perpajakan, pengaduan perpajakan, edukasi dan publikasi pajak kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;
i. Optimalisasi koordinasi, sinergitas dan komunikasi dengan perangkat pemerintah di kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan stakeholder lainnya;
j. Transformasi digital melalui *e-Samsat Sumut* yaitu kerja sama dengan Bank Mandiri (ATM dan Livin Mandiri) untuk pembayaran PKB, menggantikan metode pembayaran melalui *e-Commerce* dan ATM Bank Sumut.
k. Melakukan Pelayanan Samsat Malam di UPTD Pependa Binjai, UPTD Pependa Pematang Siantar, UPTD Pependa Simalungun, UPTD Pependa Padangsidempuan dan UPTD Pependa Kisaran.
l. Penambahan Kanal Pembayaran PKB melalui QRIS dan EDC.

Selain Pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan beberapa upaya peningkatan Retribusi Daerah Sumatera Utara melalui Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, diantaranya :

a. Pembentukan tim optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai Ketua Tim yang bertugas melakukan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara
b. Meningkatkan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur
c. Penerapan teknologi transformasi digital
d. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pembayaran retribusi daerah
e. Promosi dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran retribusi daerah
f. Diversifikasi retribusi daerah atas penggunaan sumber daya alam atau retribusi atas penggunaan aset daerah
g. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan dan fasilitas publik
h. Melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan.

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Badan Penghubung	1.200.000.000,00	1.288.225.000,00	107,35
2.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.340.900.000,00	1.391.374.510,00	103,76
3.	Dinas Kesehatan	176.916.023.345,00	191.804.804.170,45	108,42
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.083.200,00	6.788.302.600,00	3.571,23
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	359.726.000,00	352.705.000,00	98,05
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0
7.	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0
8.	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	302.000.000,00	258.576.000,00	85,62
9.	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.567.200.000,00	1.339.089.250,00	85,44
10.	Biro Umum	3.022.000.000,00	2.100.600.000,00	69,51
11.	Dinas Ketenagakerjaan	1.432.484.090,00	957.282.020,00	66,83
12.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.162.892.000,00	1.210.707.000,00	55,98
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	850.000.000,00	457.381.200,00	53,81
14.	Dinas Pendidikan	1.314.500.000,00	554.266.880,00	42,17
15.	Dinas Perhubungan	825.770.000,00	299.831.742,00	36,31
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.048.125.000,00	157.347.000,00	15,01
Jumlah		**192.531.703.635,00**	**208.960.492.372,45**	**108,53**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu, diolah dari e-keuangan Provsu

Dari Pendapatan Daerah memperoleh realisasi sebesar Rp. 208.960.492.372,45 atau 108,53% dari target sebesar Rp. 192.531.703.635,00 . Adapun sumber Pendapatan yang menyebabkan realisasi lebih tinggi dari target pendapatan adalah pencapaian realisasi pendapatan berbagai OPD yang melampaui target. Berbagai OPD dengan realisasi total pendapatan dan pencapaian yang tinggi antara lain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, dan Badan Penghubung.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
2) Pendapatan Transfer, meliputi : Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : Dana Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025, antara lain :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**6.419.301.627.754,00**	**5.686.332.189.656,26**	**88,59**
Pajak Daerah	5.605.254.375.313,00	5.062.104.690.315,09	90,31
Retribusi Daerah	192.531.703.635,00	208.476.146.302,52	108,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	353.166.995.232,00	329.075.868.190,00	93,18
Lain-lain PAD yang Sah	268.348.553.574,00	86.809.132.332,65	32,35
PENDAPATAN TRANSFER	**5.907.944.781.000,00**	**5.937.997.803.485,00**	**100,51**
Pendapatan Transfer	5.907.944.781.000,00	5.937.997.803.485,00	100,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**407.863.968.629,00**	**402.754.580.542,0**	**105,75**
Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	6.282.708.000,00	99,73
Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	354.554.453.629,00	376.471.872.542,00	106,18
PENDAPATAN DAERAH	**12.708.100.862.383,00**	**12.027.332.189.656,26**	**94,64**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu, diolah dari e-keuangan Provsu

Pendapatan daerah memperoleh realisasi Rp. 12.027.332.189.656,26 atau 94,64% dari target sebesar Rp.12.708.100.862.383,00. Adapun sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi lebih tinggi dari target pendapatan adalah jenis pendapatan transfer yaitu Rp. 5.937.997.803.485,00 atau 100,51% dari target sebesar Rp. 5.907.944.781.000,00.

Pendapatan Asli Daerah memperoleh realisasi yang kurang baik yaitu sebesar Rp 5.686.332.189.656,26 atau 88,59% dari target sebesar Rp. 6.419.301.627.754,00. Adapun jenis pendapatan yang mendukung adalah jenis pendapatan pajak daerah dengan realisasi Rp. 5.062.106.690.315,09 atau 90,31% dari target sebesar Rp. 5.605.254.375.313,00.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah memperoleh realisasi sebesar Rp. 402.754.580.542,0 atau 105,75% dari target Rp. 380.854.453.629,00. Adapun jenis pendapatan yang sangat mendukung adalah pendapatan hibah sebesar Rp. 6.282.708.000,00 atau 99,73% dari target Rp. 6.300.000.000,00.

3. Permasalahan dan Solusi

Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Dearah Tidak Sesuai dengan Target

1) Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih sangat rendah.
2) Penegakan hukum (*law enforcement*) belum optimal yang disebabkan razia stationer tidak dapat dilakukan sesuai dengan Edaran Korlantas POLRI.
3) Sinergitas dengan pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal yang disebabkan kurangnya dukungan Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan dan pembiayaan (*role sharing dan cost sharing*) yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
4) Belum adanya turunan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Pengukur Debit dan Penetapan Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan dalam penghitungan kubikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaaan dan belum adanya alat pengukur debit yang dapat dipantau dengan satelit.
5) Belum optimalnya Perangkat Daerah pengampu retribusi dalam melaporkan potensi, target dan kebijakan pengelolaan retribusi daerah.

Adapun Langkah-langkah Konkrit Pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1) Meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan yang meliputi bebas denda pokok pajak dan SWDKLLJ, Bebas Denda Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bebas pajak progresif dan bebas tunggakan pokok PKB.

2) Mengintensifkan sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan berbagai kanal media komunikasi, baik media cetak (brosur, *leafleat*, *branding* dan spanduk), media luar ruang (video tron) dan media sosial (*facebook*, *instagram* maupun *WhatsApp*).
3) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penguatan Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yang dilaksanakan oleh jajaran ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4) Mengoptimalkan peningkatan kualitas sentra-sentra pelayanan pembayaran pajak baik di UPTD, samsat bus keliling, Samsat Corner, Samsat malam gerai maupun di Mall Pelayanan Publik.
5) Transformasi digital melalui *e-Samsat Sumut* yaitu kerja sama dengan Bank Mandiri (ATM dan Livin Mandiri) untuk pembayaran PKB, menggantikan metode pembayaran melalui *e-Commerce* dan ATM Bank Sumut.
6) Penambahan Kanal Pembayaran PKB melalui QRIS dan EDC.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program dan juga perkembangan realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur Perubahan APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, Perubahan APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti pertumbuhan ekonomi, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
b. Disiplin Anggaran Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
c. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan proporsi alokasi yang berpihak pada kepentingan publik, dengan tetap menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya, penggunaan belanja daerah wajib mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan penghematan berdasarkan skala prioritas agar mampu memberikan dukungan optimal terhadap program-program strategis daerah.

Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	3.463.558.413.245,00	3.486.817.283.946,64	100,67
2	Dinas Kesehatan	676.155.282.986,00	652.703.936.109,74	96,53
3	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	223.531.023.446,00	228.682.402.806,00	102,30
4	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	48.760.604.006,00	37.926.924.164,00	77,78

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.165.016.844.667,00	1.018.342.611.026,81	87,41
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.731.402.046,00	37.017.936.662,27	90,88
7	Satuan Polisi Pamong Praja	47.690.071.212,00	42.782.186.005,36	89,71
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.263.347.766,00	24.664.021.522,60	81,50
9	Dinas Sosial	98.798.025.151,00	89.800.473.338,44	90,89
10	Dinas Ketenagakerjaan	47.772.483.774,00	44.144.863.451,42	92,41
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19.367.906.082,00	18.177.224.136,54	93,85
12	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	195.722.419.567,00	182.584.077.618,42	93,29
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	135.336.235.338,00	130.402.367.925,07	96,35
14	Dinas PMD, Kependudukan dan Catatan Sipil	27.246.938.624,00	26.161.206.822,20	96,02
15	Dinas Perhubungan	63.525.534.515,00	59.556.077.285,71	93,75
16	Dinas Kominfo	46.196.478.891,00	44.321.951.429,93	95,94
17	Dinas Koperasi dan UKM	47.895.672.929,00	42.927.508.462,41	89,63
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19.868.135.627,00	18.809.074.610,52	94,67
19	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	197.737.326.540,00	191.140.077.425,28	96,66
20	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	68.096.816.495,00	62.693.014.935,58	92,06
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23.589.492.799,00	22.507.241.029,87	95,41
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.875.408.765,00	31.764.365.506,54	93,77
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	63.864.740.933,00	60.707.334.845,73	95,06
24	Dinas Perindag, Energi dan Sumber Daya Mineral	71.805.743.951,00	67.647.991.415,00	94,21
25	Biro Umum Setdaprovsu	346.976.620.240,00	322.002.366.803,89	92,80
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu	2.535.698.660,00	2.427.382.718,00	95,73
27	Biro Perekonomian Setdaprovsu	1.904.141.898,00	1.620.112.025,00	85,08
28	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu	190.366.505.067,00	107.150.881.371,00	56,29
29	Biro Organisasi Setdaprovsu	2.287.562.896,00	2.011.769.597,00	87,94
30	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu	2.271.214.236,00	2.163.954.999,00	95,28
31	Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	1.748.720.341,00	1.690.663.584,00	96,68
32	Biro Hukum Setdaprovsu	2.617.340.622,00	2.128.260.618,00	81,31
33	Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	23.307.284.210,00	22.124.203.124,00	94,92
34	Sekretariat DPRD	629.037.170.374,00	601.880.326.144,20	95,68
35	Bappelitbang	54.183.449.100,00	49.987.814.099,91	92,26
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.821.002.704.063,56	3.231.067.231.281,89	84,56
37	Badan Pendapatan Daerah	321.456.715.592,00	306.688.326.732,80	95,41

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
38	Badan Kepegawaian	33.030.847.357,00	30.551.145.275,52	92,49
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.204.489.582,00	31.515.690.483,80	92,14
40	Badan Penghubung	34.675.199.746,00	31.857.900.922,91	91,88
41	Inspektorat Daerah Provinsi	76.297.405.528,00	66.912.096.844,00	87,70
42	Badan Kesbangpol	72.702.847.412,00	69.775.489.653,00	95,97
	Jumlah	**12.507.012.266.279,50**	**11.505.837.768.759,90**	**92,00**

Keterangan : Data Unaudited
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Defenisi dan Struktur Pembiayaan

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

2. Regulasi Pemerintah tentang Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan antara lain :

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;

b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan antara lain :

a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang (penyertaan modal) sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
c. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR);
d. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Adapun anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	PENYERTAAN MODAL	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**10.992.525.896,56**	**10.992.525.896,56**	**100,00**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**50.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**(39.007.474.103,44)**	**10.992.525.896,56**	**(28,18)**

Keterangan : Data Unaudited
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu, diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara TA. 2025 (Data sementara SIPD RI)

3. Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan :
Pengeluaran pembiayaan dalam hal ini penyertaan modal pada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2025 berakhir belum teralisasi, disebabkan pengelolaan keuangan pada BUMD dimaksud belum sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Solusi :
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta kepada BUMD dimaksud agar pengelolaan keuangannya memenuhi ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan transparansi dan efektif.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pada Bab ini menyajikan uraian komprehensif mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama Tahun Anggaran 2025. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Secara konseptual dan normatif, urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Pembagian urusan ini menjadi dasar dalam penentuan kewenangan, peran, dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Urusan Pemerintahan Absolut
   Merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berperan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan absolut tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren
   merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Urusan ini menjadi landasan utama pelaksanaan otonomi daerah dan terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan. Sebagian besar substansi Bab III ini berfokus pada hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capaian kinerjanya selama Tahun Anggaran 2025.

3. Urusan Pemerintahan Umum
   Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan ini meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta penanganan konflik sosial.

Penyajian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam diuraikan secara sistematis berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan memperhatikan keterkaitan antara kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, capaian yang disampaikan juga mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun dan menetapkan organisasi penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Konkuren,
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan Provsu
2	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
		RS. Umum Haji Medan
		RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
3	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
4	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
5	Urusan Wajib Trantibum dan Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
6	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial Provsu
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Wajib Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Provsu
2	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu
3	Urusan Wajib Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
4	Urusan Wajib Pertanahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
6	Urusan Wajib Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
7	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu
9	Urusan Wajib Perhubungan	Dinas Perhubungan Provsu
10	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
11	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM Provsu

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
12	Urusan Wajib Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provsu
13	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
14	Urusan Wajib Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Urusan Wajib Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Urusan Wajib Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
18	Urusan Wajib Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
		Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Urusan Pilihan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
5	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Urusan Pilihan Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Urusan Pilihan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1	Sekretariat Daerah	
	a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	b.	Biro Hukum
	c.	Biro Organisasi
	d.	Biro Administrasi Pembangunan
	e.	Biro Perekonomian
	f.	Biro Kesejahteraan Rakyat
	g.	Biro Umum
	h.	Biro Administrasi Pimpinan
	i.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Inspektorat	
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6	Badan Kepegawaian	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Badan Pendapatan Daerah	
9	Badan Penghubung Daerah	
10	Sekretariat DPRD	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah baik urusan wajib dan urusan pilihan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan umum APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2024 – 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	1	Rata-rata Lama Sekolah	9,91	9,93	10,3 - 10,33	10,08
	2	Harapan Lama Sekolah	13,56	13,49	13,61-13,63	13,50
	3	Literasi Membaca	N/A	68,41	35,99-38,49	64,09
	4	Numerasi	N/A	53,63	33,70-36,20	56,16

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Capaian pada urusan wajib pendidikan tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

1) Rata-rata lama sekolah tahun 2025 dengan target 10,3 - 10,33 dan realisasi 10,08 tahun, dimana tahun 2024 memiliki target 9,91 tahun dengan realisasi 9,93 tahun (Badan Pusat Statistik Provsu).
2) Harapan lama sekolah tahun 2025 dengan target 13,61 - 13,63 dan realisasi 13,50 tahun, dimana tahun 2024 memiliki target 13,56 tahun dan realisasi 13,49 tahun (Badan Pusat Statistik Provsu).
3) Literasi Membaca tahun 2025 dengan target 35,99-38,49 dan realisasi 64,09, dimana tahun 2024 memiliki baseline/realisasi 68,41 (Badan Pusat Statistik Provsu).
4) Numerasi tahun 2025 dengan target 33,70-36,20 dan realisasi 56,16% Dimana tahun 2024 memiliki baseline/realisasi 53,63 (Data bersumber dari Lampiran Surat Mendikdasmen).

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		2.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		3.1 Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berasarkan Tugas Dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
		4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
		4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
		4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan		
		4.5 Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan		
		4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 Bulan	12 Bulan		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		5.1 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12 Bulan	10 Bulan		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				
		6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
		6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
		6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		
		7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		
		7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		
Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	**Program Pengelolaan Pendidikan**						
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
		1.1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12 Bulan	9 Bulan		
		1.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	12 Bulan	11 Bulan		
		1.3	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	12 Bulan	12 Bulan		
		1.4	Penyediaan Infrastruktur Tik	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
		2.1	Pengadaan Mebel Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
		2.2	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	12 Bulan	5 Bulan		
		2.3	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	12 Bulan	12 Bulan		
		2.4	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Kejuruan	12 Bulan	12 Bulan		
		2.5	Penyediaan Infrastruktur Tik	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Pengelolaan Sekolah Pendidikan Khusus					
		3.1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12 Bulan	0 Bulan		
		3.2	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	12 Bulan	0 Bulan		
		3.3	Pengelolaan Dana Bos Pembinaan Sekolah Pendidikan Khusus	12 Bulan	12 Bulan		
1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pendidik 2. Perwujudan peningkatan kesejahteraan pendidik	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**						
	1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi					
		1.1	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	12 Bulan	12 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Medan Dan Deli Serdang)						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	11 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	11 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Binjai dan Langkat)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	9 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	9 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Serdang Bedagai Dan Tebing Tinggi)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
		3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Karo, Dairi Dan Pak-Pak Bharat)						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan						
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
		1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	8 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
		2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
		3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Batu Bara, Kisaran dan Tanjung Balai)						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan						
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
		2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
		3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	4	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
		4.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Pematangsiantar dan Simalungun)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1.1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
		1.1 Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
		2.1 Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
		3.1 Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	11 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
		1.1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
		2.1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	7 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
		3.1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Toba dan Samosir)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1.1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	10 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	10 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (Sibolga dan Tapanuli Tengah)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan Dan Mandailing Natal)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	11 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	10 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	8 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (Padang Lawas Utara Dan Padang Lawas)					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
	1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	9 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
	3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 Bulan	0Bulan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (Gunung Sitoli, Nias dan Nias Utara)						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan						
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
		1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
		2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	10 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
		3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV (Nias Selatan Dan Nias Barat)						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
	Program Pengelolaan Pendidikan						
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
		1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	11 Bulan		
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
		2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	12 Bulan		
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus					
		3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12 Bulan	2 Bulan		

2. Urusan Wajib Kesehatan

2.1 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Saat ini derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator kinerja utama bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan pada tabel dibawah:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/IKU	Kondisi Awal 2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH)	73,90 Tahun	74,01 Tahun	74,19 Tahun
2		Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	52,22	65,78	45,38*
3			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	2,81	3,28	3,20*
4		Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase balita *stunting* (pendek dan sangat pendek)	22%	20%	N/A (menunggu hasil Kemenkes)
5		Menurunnya angka kesakitan	Angka kesakitan (morbiditas)	10,08%	10,03%	10,43%
6		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	93,4%	98,6%	99,26%
7			Persentase Faskes yang Terakreditasi Paripurna	N/A	41,1%	53,96%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja Kesehatan oleh pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 5 (lima) tahun, periode tahun 2020 hingga tahun 2025, Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 5,09 tahun.

Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,10 tahun dan pada tahun 2025 telah mencapai 74,19 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian Umur Harapan Hidup jika dibandingkan dengan UHH Tahun 2024 yakni 73,90 tahun; UHH Tahun 2023 yakni 73,67 tahun; Tahun 2022 yakni 73,39 tahun; Tahun 2021 yakni 73,10 tahun dan Tahun 2020 yakni 73 tahun. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2025 yakni 74,01 tahun maka Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sudah melampaui target. Namun jika dibandingkan dengan UHH Indonesia Tahun 2025 yakni 74,15 tahun, maka Sumatera Utara masih di bawah angka nasional.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Dari aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* dilaporkan bahwa pada tahun 2025 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 131 kasus dari 288.684 sasaran lahir hidup sehingga AKI Tahun 2025 adalah 45,38 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan AKI dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 154 kasus dari 294.912 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2024 adalah 52,22 per 100.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2023 yaitu 203 kasus dari 278.756 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2023 adalah 72,46 per 100.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2022 yaitu 131 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2022 adalah sebesar 47,06 per 100.000 KH). Tahun 2021 yaitu 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2021 adalah sebesar 89,18 per 100.000 KH). Tahun 2020 yakni 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2020 adalah sebesar 62,50 per 100.000 KH). Tahun 2019 yaitu 202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2019 adalah sebesar 66,76 per 100.000 KH), tahun 2018 yaitu 186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2018 yakni 60,80 per 100.000 KH) dan tahun 2017 yaitu 180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2017 yakni 59,36 per 100.000 KH). Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 65,78 per 100.000 Kelahiran Hidup, maka AKI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sudah mencapai target.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Dari aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* dilaporkan bahwa pada tahun 2025 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 925 kasus dari 288.684 sasaran lahir hidup, sehingga AKB Tahun 2025 adalah 3,20 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 829 kasus dari 294.912 sasaran lahir hidup, sehingga AKB Tahun 2024 adalah 2,81 per 1.000 KH, namun masih lebih rendah dari AKB tahun 2023 yakni jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 1.006 kasus dari 278.756 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2023 adalah sebesar 3,60 per 1.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2022 yakni 610 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2022 adalah sebesar 2,19 per 1.000 KH. Tahun 2021 yaitu 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2020 yakni 2,28 per 1.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2020 yaitu 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2020 yakni 2,39 per 1.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2019 yaitu 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2019 yakni 2,61 per 1.000 KH). Tahun 2018 yaitu 869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2018 yakni 2,84 per 1.000 KH); dan Tahun 2017 yaitu 1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2017 yakni 3,52 per 1.000 KH). Meskipun terjadi peningkatan AKB dari tahun 2024, namun bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 3,28 per 1.000 Kelahiran Hidup, maka AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sudah mencapai target.

4) Prevalensi Stunting pada Balita

Tuntutan perbaikan gizi menjadi lebih penting dalam menyongsong generasi emas 2045 dan era revolusi industri 4.0 yang tentunya menuntut adanya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan mandiri.

Peraturan Presiden RI Nomor 42 tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, secara khusus diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dalam menurunkan prevalensi stunting yang fokus pada perbaikan gizi periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program perbaikan gizi merupakan bagian integral dari program

Kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan derajat masyarakat yang setingi-tingginya.

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan. Stunting merupakan salah satu indikator untuk menghitung Human Capital Index dan stunting mengurangi tingkat produktivitas anak di masa dewasanya. Untuk itu diperlukan pentingnya penanganan stunting yang mulai digaungkan sejak tahun 2017, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI ini adalah program nasional untuk mengukur status gizi balita di Indonesia. Dari hasil SSGI Tahun 2024 diperoleh data Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebesar 22%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 18,9% (Hasil Survei Kesehatan Indonesia/SKI yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI); prevalensi stunting pada balita tahun 2022 yakni 21,1%, tahun 2021 yakni 25,8%, tahun 2020 yakni 28,7%, tahun 2019 yakni 30,11%, dan tahun 2018 yakni 32,3% (Hasil Riskesdas 2018).

Pada tahun 2025, Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara ditargetkan sebesar 20%, namun hasil capaian belum tersedia dari Kementerian Kesehatan. Hasil sementara dari Aplikasi Sigizi Kesga Tahun 2025 adalah sebesar 2,35%.

5) Angka Kesakitan (*Morbiditas*)

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2025, Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebesar 10,43%, jika dibandingkan dengan angka kesakitan nasional tahun 2025 yakni 12,66%, maka Sumatera Utara masih berada di bawah angka nasional. Namun capaian tahun 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan angka kesakitan di Sumatera Utara jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni 10,08% dan tahun 2023 yakni sebesar 10,10%, namun masih lebih rendah jika dibanding dari tahun 2022 yakni sebesar 12,98%, tahun 2021 yakni sebesar 8,78%, tahun 2020 yakni sebesar 12,24%, tahun 2019 yakni sebesar 11,97%, tahun 2018 yakni sebesar 11,03%, tahun 2017 yakni sebesar 11,17%, tahun 2016 yakni sebesar 11,15% dan tahun 2015 yakni sebesar 11,84%. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 10,03%, maka Angka Kesakitan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya faktor resiko kesakitan pada masyarakat berupa kerentanan penyakit yang meliputi: Kerentanan Individu (*susceptibility*), Kerentanan Lingkungan, dan Kerentanan Perilaku Penyebab Timbulnya Kesakitan.

6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia di bidang kesehatan yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata tanpa hambatan finansial serta biaya pengobatan. Program ini merupakan asuransi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia langsung dalam melindungi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

JKN sendiri merupakan bagian dari implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Tujuan utama dari program ini adalah menjamin seluruh penduduk Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan, mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk melalui akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjamin penduduknya memperoleh perlindungan kesehatan dengan Program Berobat Gratis (PROBIS) melalui Program *Universal Health Coverage* (UHC). Untuk mencapai UHC maka target Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 98,6% dan Cakupan Kepesertaan Aktif JKN sebesar 80% sesuai amanat RPJMN Tahun 2025-2029. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025, Provinsi Sumatera Utara telah mencapai

UHC Prioritas dengan capaian Cakupan Kepesertaan JKN sebesar 99,26% dan Cakupan Kepesertaan Aktif JKN sebesar 80,16%. Dan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 98,6%, maka Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sudah mencapai target.

7) Persentase Faskes yang Terakreditasi Paripurna

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ditandai dengan tercapainya UHC Prioritas di Provindi Sumatera Utara, selanjutnya untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu atau berkualitas maka fasilitas kesehatan wajib terakreditasi.

Pada tahun 2025, dari 1.058 fasilitas kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Transfusi Darah/UTD) sebesar 41,1% (435 unit) ditargetkan untuk akreditasi paripurna dan berhasil dicapai sebesar 48,11% (509 unit). Angka ini menunjukkan bahwa persentase faskes yang terakreditasi paripurna di Provinsi Sumatera Utara telah mampu mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 41,1%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama bidang kesehatan dilaksanakan program/kegiatan/Sub Kegiatan, yakni :

2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Persentase Ibu Hamil ANC 6 kali (K6) sesuai standar dengan target sebesar 82%, realisasi 80,92%. Angka ini menunjukkan belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan untuk ibu hamil belum sesuai standar; belum semua dokter puskesmas terlatih melakukan pelayanan ANC dan USG; masih ada puskesmas yg belum mempunyai USG untuk pemeriksaan ibu hamil; adanya perubahan kebijakan dan defenisi operasional dimana sekarang ibu hamil harus diperiksa minimal 6 kali oleh tenaga kesehatan; selain itu data-data pelayanan ibu hamil yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta belum semuanya masuk ke puskesmas; jumlah sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes lebih besar daripada jumlah ibu hamil yang riil.

2) Persentase Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar dengan target sebesar 85%, realisasi 83,04%. Angka ini menunjukkan belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dan data-data pelayanan persalinan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta tersebut belum semuanya masuk ke puskesmas; selain itu aplikasi ekohort untuk pencatatan dan pelaporan belum maksimal digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
3) Persentase jumlah anak usia sekolah mendapatkan skrining kesehatan dengan target sebesar 89%, realisasi 87,27%. Angka ini menunjukkan belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya sebagian puskesmas belum mempunyai kit serta tenaga kesehatan yang terlatih untuk melakukan penjaringan kesehatan sehingga tidak melakukan kegiatan ke sekolah; di samping sebagian tenaga kesehatan belum melakukan pelayanan sesuai standar.
4) Persentase wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dengan target sebesar 8%, realisasi 1,5%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
5) Persentase bayi usia kurang dari 6 Bulan yang mendapat ASI eksklusif dengan target sebesar 73%, realisasi 79,92%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
6) Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan dengan target 85%, realisasi 88,30%. Dari angka capaian tersebut maka realiasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
7) Prevalensi depresi pada usia >15 Tahun dengan target 1,4%, realisasi 0,06%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
8) Persentase kabupaten/kota yang memiliki 70% puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa dengan target 40%, realisasi 70,00%. Dari angka capaian tersebut maka realiasi tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.
9) Persentase kabupaten/kota yang memiliki 50% puskesmas yang mampu memberikan layanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna Napza yang ditetapkan sebagai IPWL dengan target 40%, realisasi 6,00% dan dan belum dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan.
10) Persentase kabupaten /kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar dengan target 20%, realisasi 0,00% dan belum dapat mencapai target capaian yang ditetapkan.

11) Persentase cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan target 36% realisasi 22,56% dan belum dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan.
12) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan target sebesar 40,00%, realisasi sebesar 40,00% dan sudah memenuhi target capaian yang ditetapkan.
13) Persentase calon pengantin yang mendapatkan skrining kesehatan dengan target 50%, realisasi sebesar 52,12% dan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
14) Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan target 50%, realisasi sebesar 86,65% dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
15) Cakupan penemuan kasus TB dengan target 90%, realisasi sebesar 75,00% dan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
16) Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta dengan target 1 kabupaten/kota, realisasi sebesar 1 kabupaten/kota dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
17) Persenatse kabupaten/kota yang melakukan tatalaksana penyakit menular sesuai standar dengan target 80%, realisasi sebesar 77,00%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi belum mencapai target yang ditetapkan.
18) Persentase ODHIV baru ditemukan yang mendapatkan pengobatan SRT (Anti Retroviral) dengan target 90%, realisasi sebesar 79,00%. Dari angka capaian tersebut maka realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
19) Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria dengan target 1 kabupaten/kota, realisasi sebesar 0 kabupaten/kota. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi belum mencapai target yang ditetapkan.
20) Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu dengan target 85%, realisasi sebesar 85,95%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
21) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan target sebesar 100% dengan capaian tetap 100% dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
22) Persentase kabupaten/kota yang merespon alert SKDR kurang dari 24 jam minimal 95%, realisasi sebesar 100%. Hal ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

23) Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan target 2 Kab/Kota, realisasi sebesar 1 Kab/Kota. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
24) Prevalensi Obesitas >18 Tahun dengan target 25%, realisasi sebesar 2,10%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
25) Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun dengan target 12,4%, realisasi sebesar 0,41%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
26) Persentase Kabupaten/Kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan dengan target 6%, realisasi sebesar 0,00%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi belum mencapai target yang ditetapkan.
27) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Cakupan Skrining PTM Prioritas pada Penduduk Sesuai Kelompok Usia Paling Kurang 40% dengan target 8 Kabupaten/Kota, realisasi sebesar 11 Kabupaten/Kota dan belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
28) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Paling Kurang 80% Puskesmas Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker dengan target 18 Kabupaten/Kota, dengan realisasi sebesar 13 Kabupaten/Kota dan belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
29) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dengan target 100%, capaian realisasi sebesar 100% dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
30) Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 21,2%, realisasi sebesar 21,21%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
31) Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di kabupaten/kota dengan target 77%, realisasi sebesar 50,90%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
32) Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional dengan target 45%, realisasi sebesar 45,40%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
33) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar dengan target 65%, realisasi sebesar 44,70% dan namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

34) Persentase RSUD dan RS Kelas B yang Memenuhi Standar SPA (Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) dengan target 80%, realisasi sebesar 76,67%. namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan.
35) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Akses Sulit yang Menerapkan Skema/Pendekatan Khusus dalam Pemenuhan Pelayanan Khusus Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dengan target 1 Kab/Kota, realisasi sebesar 1 Kab/Kota dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
36) Persentase Kabuaten/Kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (RS PONEK) Sesuai Standar dengan target 84,80%, realisasi sebesar 84,80% dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
37) Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal/Uronefrologi sesuai Standar dengan target 30,30%, realisasi sebesar 30,30%. Dari angka capaian tersebut maka realiasasi sudah mencapai target yang ditetapkan.
38) Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Rujukan Online Nasional dengan target 45%, realisasi sebesar 45,90%. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi sudah mampu mencapai target yang ditetapkan.
39) Persentasi Kab/Kota yang Memiliki Public Safety Center (PSC) yang Teritegrasi dengan National Command Center (NCC) dengan target 60,60%, realisasi sebesar 60,60% dan sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
40) Persentase Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang Mencapai Target INM (Indikator Nasional Mutu) dengan target 10%, realisasi sebesar 17,90% dan telah memenuhi target capaian yang telah ditetapkan.
41) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan dengan target 1,5 realisasi sebesar 1,53 per-1000 penduduk dan dan sudah mampu mencapai target yang ditetapkan.
42) Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) dengan target 65%, realisasi sebesar 74.64% dan sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
43) Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standard dengan target 54%, realisasi tahun 2025 sebesar 56,93% dan sudah mencapai target ditetapkan.
44) Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Mata dengan target sebesar 88%, realisasi 89,26%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

45) Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Paru dengan target sebesar 92,43%, realisasi sebesar 92,5. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
46) Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Laosimomo dengan target 89%, realisasi 89,26%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
47) Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sesuai Standar di Laboratorium Kesehatan dengan target sebesar 80%, dengan realisasi sebesar 87,30%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
48) Persentase Parameter Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Sesuai Standar Labkesmas di UPTD Laboratorium Kesehatan dengan target 75%, realisasi sebesar 70,28% maka capaian belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

1) Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi dengan target rasio sebesar 3,88, dengan realisasi capaian sebesar 3,56 rasio dan belum memenuhi target capaian terkait rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi.
2) Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar (9 Jenis Tenaga) dengan target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 49,27%. Maka belum mencapai target yang ditetapkan. Ketidakmampuan mencapai target disebabkan oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata atau masih menumpuk di beberapa fasilitas kesehatan, untuk mengisi formasi tenaga kesehatan yang kurang adalah melalui program Penugasan Khusus dari Kementerian Kesehatan, akan tetapi program ini hanya untuk masa satu tahun saja, sehingga pasca penugasan tenaga kesehatan ini selesai, akan ada lagi kekosongan beberapa jenis tenaga kesehatan di puskesmas.
3) Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar dengan target sebesar 80%, realisasi sebesar 74,00%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
4) Persentase Faskes yang Ditingkatkan Kompetensi SDMK nya dengan target sebesar 40%, realisasi sebesar 40%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

5) Persentase SDMK yang Mendapatkan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan di UPTD Pelatihan Kesehatan dengan target sebesar 8,50%, realisasi sebesar 7,85%. Hal ini masih belum memenuhi target capaian yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan dan terjadi efisiensi anggaran untuk peningkatan kapasitas di provinsi dan kabupaten/kota

2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

1) Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan dengan target 95%, realisasi sebesar 100%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
2) Persentase Distributor Alat Kesehatan (DAK) Cabang yang Menerapkan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dengan target sebesar 75%, realisasi sebesar 75,00% dan sudah mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
3) Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta DAK Pusat yang Menerapkan CPAKB/CPPKRTB/CDAKB dengan target sebesar 32%, realisasi tahun 2025 sebesar 31,00%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1) Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat dengan target sebesar 17%, realisasi sebesar 17,5% dan masih belum memenuhi target capaian yang telah ditetapkan.
2) Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif dengan target sebesar 25%, realisasi sebesar 51,51% dan sudah mencapai target.

2.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan target nilai predikat terbaik yaitu (A), dengan realisasi AA. Angka ini menunjukkan bahwa capaian sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas sesuai standar 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Neonatal) Bayi, Balita, dan Anak 3. Peningkatan Suplementasi Gizi 4. Peningkatan Pendidikan Gizi 5. Peningkatan Surveilans Gizi 6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Peningkatan Kesehatan Jiwa 8. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Faktor Resiko 9. Penguatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Program Kesehatan Masyarakat**					1. Rendahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan kesehatan menyebabkan adanya kecenderungan lambatnya peningkatan pencapaian target sasaran terutama pada program-program yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral seperti program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan 2. Rendahnya kualitas pelayanan akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di daerah perkotaan (distribusi tenaga kesehatan yang tidak	1. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (networking) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembangunan kesehatan 2. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat teknis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga Kesehatan
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
		1.1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.2	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.6	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.8	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.10	Pengembangan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.11	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
		2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	1000 Jiwa	1000 Jiwa		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
11. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 13. Penguatan Deteksi Dini/Skrining, Pengobatan Tuntas, dan Monitoring Berkelanjutan Kasus TBC Secara Terintegrasi 14. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Resiko 15. Penguatan Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Penanggulangan Wabah/KLB dan Krisis Kesehatan/Bencana 16. Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Seluruh Desa/ Kelurahan 17. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Faktor Resiko			Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			merata) dan kurangnya kepekaan serta keprofesionalismean tenaga kesehatan berdampak pada lambatnya pencapaian sasaran utama pembangunan dan sasaran program kesehatan 3. Pendayagunaan sumber daya manusia belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi serta pengetahuan secara teknis. Disamping itu sering tenaga yang sudah dilatih pada bidang tugasnya dipindahkan ke bidang lain 4. Pembiayaan Kesehatan masih belum optimal dan terjadi refocusing dan efisiensi anggaran pada waktu pelaksanaan program/kegiatan sehingga banyak kegiatan yang terdampak tidak dapat dilaksanakan	3. Mengadvokasi pemerintah daerah untuk membuat regulasi tentang distribusi tenaga kesehatan sehingga tidak terjadi penumpukan di daerah perkotaan 4. Peningkatan dan optimalisasi pembiayaan kesehatan terutama untuk upaya promotif dan preventif
		2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12.000 Jiwa	12.000 Jiwa		
		2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.15	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.16	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.18	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.19	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
18. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Faktor Resiko 20. Penguatan Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Penanggulangan Wabah/KLB dan Krisis Kesehatan/Bencana 21. Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai Standar 22. Pemerataan Layanan Kesehatan Melalui Penyediaan dan Distribusi Dokter Spesialis 23. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan 24. Perencanaan, Pendayagunaan, dan		2.20	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	akibatnya beberapa indikator program tidak mencapai target yang ditetapkan	
		2.21	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.22	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 PSC	10 PSC		
		2.23	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.24	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					
		3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					
		4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	8 RS	8 RS		
		4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Faskes	1 Faskes		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Pengembangan SDM Kesehatan 25. Peningkatan Kualitas Institusi Penyelenggara Pelatihan Kesehatan 26. Penguatan Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) 27. Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan di Faskes							
Perencanaan, Pendayagunaan, dan Pengembangan SDM	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**						
	1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					
		1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Orang	10 Orang		
		1.2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Orang	10 Orang		
	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					
		2.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Mutu Kefarmasian, Alat Kesehatan	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**						
	1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan					
		1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	102 Unit	102 Unit		
	2	*Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)*					

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Dokumen	1 Dokumen		
1. Peningkatan Germas dan PHBS di Semua Tatanan 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Kesehatan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**						
	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					
		1.1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					
		2.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen		

2.2 Rumah Sakit Umum Haji Medan

UPTD. Khusus RSU. Haji Medan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan meliputi: pelayanan medik, keperawatan, kefarmasian, penunjang, pengobatan, pemulihan, rehabilitasi, pencegahan, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum dan melaksanakan pelayanan kesehatan jemaah haji secara khusus. saat ini Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan memiliki status kelas B dengan potensi peningkatan ke kelas yang lebih tinggi melalui pengembangan fasilitas.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berbentuk lembaga teknis daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), RSU Haji Medan juga berperan sebagai rumah sakit jejaring utama dalam pelayanan rujukan provinsi Sumatera Utara, khususnya untuk kasus kanker, kardiovaskular (jantung), stroke, uronefrologi, diabetes mellitus, kesehatan ibu dan anak (KIA), respirasi serta tuberkulosis, serta jejaring madya untuk layanan Kesehatan Jiwa dan Gastrohepatologi. hal ini turut mendukung pencapaian target indikator kinerja kesehatan daerah.

Kondisi saat ini layanan UPTD Khusus RSU Haji Medan terdapat 19 (Sembilan belas) jenis kompetensi dengan status layanan Madya yaitu Jantung, Uronefro, neonates, ibu dan ginekologi, THT, Mata, Kulit dan penyakit kelamin, Infeksi dan parasit, Pencernaan dan Hepatubilier, Hematologi, Alergi dan Imunologi, rekons dan estetik, keracunan, endokrin, luka bakar, trauma, Jiwa, paru dan pernafasan, serta forensik. 4 (Empat) jenis kompetensi dengan status layanan Dasar yaitu Rehabilitasi, Neoplasma, Saraf dan gimul, dan 1 (satu) jenis kompetensi dengan status layanan utama yaitu musculoskletal dan jaringan lunak.

Pada Perjanjian Kinerja UPTD Khusus RSU Haji Medan tahun anggaran 2025 bahwa target dari Indikator Kinerja *Bed Occupancy Rate (BOR)* sebesar 72 persen, *Length of Stay (LOS)* sebesar 4 hari dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,1 persen. Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan ditahun 2025, UPTD Khusus RSU Haji Medan memiliki program , kegiatan dan anggaran yang tertuang didalam Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran dengan 3 program,13 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025.

Sebagaimana disebutkan di atas, UPTD Khusus RSU Haji Medan memiliki 3 Indikator Kinerja Utama antara lain:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2025

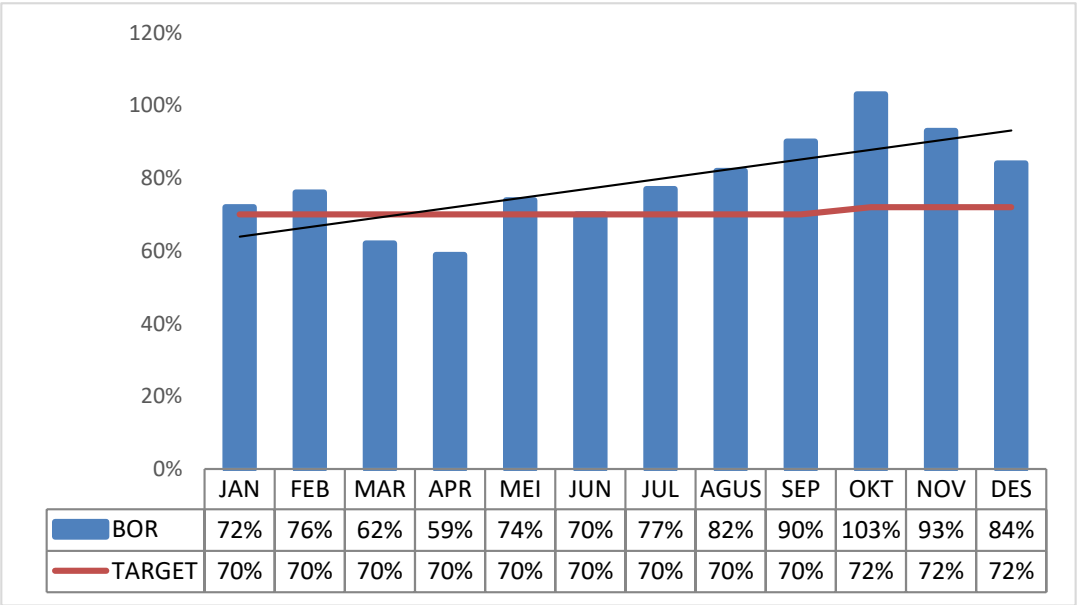
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kondisi Awal 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Derajat Kesehatan Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan yang Profesional,Ramah dan Empati	1	Bed Occupancy Rate (BOR)	77,08%	72%	78,18%	101,5%
	2	Length of Stay (LOS)	4 Hari	4 hari	4 hari	100%
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,60%	88,10%	89,31%	101,37%

Sumber : Rumah Sakit Umum Haji Medan

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja utama UPTD Khusus RSU Haji Medan tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana Indikator kinerja tahun 2025, target BOR 72% realisasi 78,18% dengan capaian kinerja 101,5%. LOS dari target 4 hari realisasi 4 hari dengan capaian kinerja 100%. Target nilai IKM 86% realisasi 89,31% dengan capaian kinerja 101,37%.

Untuk lebih rinci capaian ketiga indikator kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

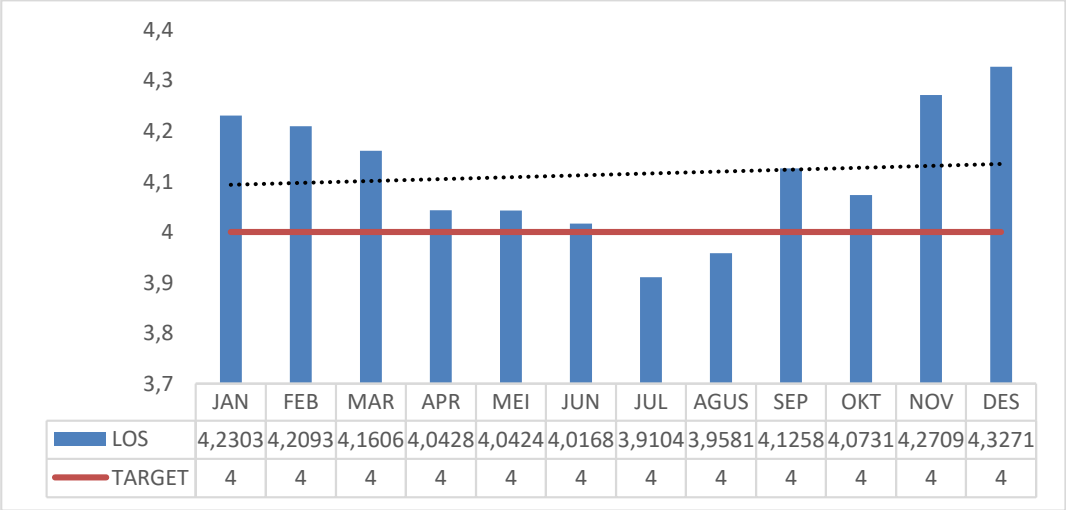
Gambar 3.1
Realisasi BOR per bulan Tahun 2025



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
BOR	72%	76%	62%	59%	74%	70%	77%	82%	90%	103%	93%	84%
TARGET	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	72%	72%	72%

Dari gambar di atas diketahui realisasi Indikator Kinerja *Bed Occupancy Rate* (BOR) per bulan sepanjang tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, grafik BOR menunjukkan adanya peningkatan pemakaian tempat tidur rumah sakit.

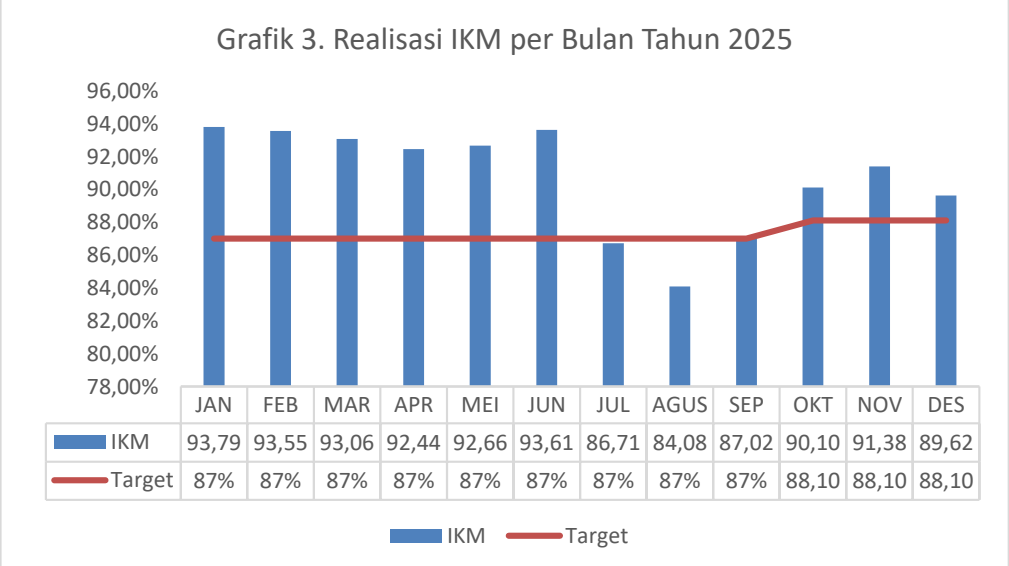
Gambar 3.2
Realisasi LOS per bulan Tahun 2025



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
LOS	4,2303	4,2093	4,1606	4,0428	4,0424	4,0168	3,9104	3,9581	4,1258	4,0731	4,2709	4,3271
TARGET	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Indikator Kinerja *Length Of Stay (LOS*) UPTD Khusus RSU Haji Medan tahun 2025 sudah sesuai target yang ditetapkan dimana target, realisasi LOS perbulan ini mengalami fluktuasi, hal ini menunjukkan variasi rata-rata lama rawatan pasien di rawat inap.

Gambar 3.3
Realisasi IKM per bulan Tahun 2025



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
IKM	93,79	93,55	93,06	92,44	92,66	93,61	86,71	84,08	87,02	90,10	91,38	89,62
Target	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	88,10	88,10	88,10

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Khusus RSU Haji Medan di tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi nilai IKM perbulan relatif stabil.

Kujungan Pasien UPTD Khusus RSU Haji Medan tahun 2025 berasal dari layanan kesehatan yang terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat, jumlah masing-masing pasien pada layanan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Data Kunjungan Pasien Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2022 – 2025

Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD	Total	Pertumbuhan
2022	84.355	9.818	16.854	111.027	0,66
2023	110.384	11.625	21.374	143.383	0,29
2024	139.791	14.652	28.377	182.820	0,27
2025	172.467	18.329	30.332	221.129	0,21

Sumber : Rumah Sakit Umum Haji Medan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Jumlah kunjungan di tahun 2025 dari masing-masing layanan dimana realisasi kunjungan Rawat Jalan sebanyak 172.467 orang atau bertumbuh sebesar 23,37% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemudian Realisasi kunjungan Rawat Inap sebanyak 18.329 orang atau bertumbuh sebesar 25,10% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Realisasi Kunjungan IGD sebanyak 30.332 orang atau bertumbuh sebesar 6,89% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan RS. Umum Haji Medan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi pemenuhan kebutuhan operasional Rumah Sakit.	**Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi**					1. Kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus tenaga kesehatan 2. Kekurangan dokter spesialis dan subspesialis: Jumlah tenaga medis spesialis belum mencukupi kriteria layanan berbasis kompetensi, menghambat ekspansi poliklinik dan pencapaian BOR optimal. 3. Kondisi bangunan berumur >30 tahun: Usia gedung utama menimbulkan risiko keselamatan pasien dan membatasi akreditasi paripurna serta peningkatan kelas rumah sakit. 4. Sarana prasarana memerlukan kalibrasi dan perbaikan: Alat kesehatan yang belum terkalibrasi serta kekurangan peralatan pendukung	1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan berbasis kompetensi dan sesuai standar nasional 2. Melakukan analisa kebutuhan Sumber Daya Manusia, penilaian kinerja atas kinerja Pegawai dan membuka Rekrutmen sesuai dengan kebutuhan. 3. Mendata ruangan yang rusak dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan / renovasi. 4. Mengalokasikan anggaran untuk kalibrasi, perbaikan dan penambahan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	98%		
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen		
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan		
		1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%		
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200 orang/bulan	200 orang/bulan		
		2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
		2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	4 dokumen		
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%		
		3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%		
		4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	650 Dokumen	650 Dokumen		
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	80%		
		5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
		5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
		5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
		5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	menghambat pelayanan dan efisiensi operasional. 5. Pengelolaan lahan terbuka belum optimal: Potensi pengembangan areal 60.002 m^2 belum dimaksimalkan untuk parkir, penghijauan, dan fasilitas pendukung, memengaruhi IKM pasien. 6. Keterbatasan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS): Sistem belum mengakomodir pencatatan dan pelaporan terintegrasi, menyulitkan monitoring indikator mutu nasional secara real-time.	dan menunjang layanan prioritas. 5. Melakukan penataan kembali lahan terbuka dan lingkungan rumah sakit sesuai dengan Master Plan. 6. Optimalisasi Sistem Informasi RS yang ada dengan melakukan pengembangan aplikasi, pemeliharaan berkelanjutan, integrasi sistem, peningkatan keamanan sistem serta pelatihan bagi civitas hospiltalia RSU Haji Medan.
		6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit		
		6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit		
		6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
		7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		
		7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan		
		7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 laporan		
		7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 laporan		
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
		8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	10 unit		
		8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	10 unit		
		8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	3 unit	3 unit		
	9	Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	100%		
		9.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja		
Pemanfaatan dan pemenuhan sarana prasarana aparatur dilaksanakan dengan bertahap dan berkesinambungan	**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**		3 Layanan	3 Layanan		
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Gedung	1 Gedung		
		1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit		
		1.2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit		
		1.3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kaliberasi	1 Unit	1 Unit		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.4	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit		
		1.5	Penyediaan Telemedicin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit		
		1.6	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit		
		1.7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket		
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		400 Tempat Tidur (TT)	328 Tempat Tidur (TT)		
		2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		1 Laporan	1 Laporan		
		3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit dilaksanakan secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan rencana pengembangan layanan kesehatan unggulan.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**			100%	100%		
	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		50 orang	50 orang		

2.3 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Tahun 2024-2026 ada 3 Indikator, yaitu :

1) *Average Lengt of Stay* (ALOS) / rata- rata lamanya pasien dirawat;
   Nilai ALOS berbanding terbalik dengan gambaran mutu pelayanan kesehatan jiwa. Semakin rendah ALOS maka semakin baik kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang terlaksana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, nilai ALOS bagi pasien jiwa adalah < 6 minggu (< 42 hari).

2) *Bed Occupancy Rate* (BOR) / persentase pemanfaatan tempat tidur pasien;
   Bed Occupancy Rate (BOR)/ Persentase Pemanfaatan Tempat Tidur Pasien menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (lebih dari 85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, Nilai indikator BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

3) Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) / pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan.
   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4.

Target dan realisasi IKU pada UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. M. Ildrem
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan RS Jiwa Dengan Unit Pelayanan Serta Instalasinya Yang Terpadu	1	Capaian Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	35 Hari	58,74 Hari
	2	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate)	Persen	72%	67,81%
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80%	86,13%

Sumber : Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. M. Ildrem

1) *Average Length of Stay* (ALOS)
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai ALOS terealisasi 58,74 hari dimana targetnya adalah 35 hari angka ini menunjukan bahwa target tidak tercapai, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi keluarga dalam hal menjemput pasien setelah mendapatkan rawatan selama 35 hari dan dinyatakan tenang serta disarankan pulang oleh Dokter Psikiater dan juga adanya program Dinas Sosial Pemprovsu yang menertibkan ODGJ terlantar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem, diantaranya yaitu melakukan pemanggilan tertulis kepada pihak keluarga, *dropping* pasien ke alamat keluarga.

2) Persentase *Bed Occupancy Rate* (BOR)
Realisasi IKU BOR (*Bed Occupancy Rate*) UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Tahun 2025 sebesar 67,81%, angka ini berada dibawah target yang ditentukan yaitu 72% tetapi masih dalam rentang nilai ideal yaitu 60-85 %. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan hunian di rawat inap juga memerlukan kerja sama lintas sektor baik dinas kesehatan kabupaten/kota juga dinas sosial kabupaten/kota bagi pasien-pasien yang sudah dapat dipulangkan agar diterima oleh keluarga dan masyarakat.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai IKM terealisasi 86,13% dimana target 80%. angka ini tergolong bagus karena sudah mencapai target 80%, meskipun demikian nilai IKM di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem diharapkan harus konsisten menunjukkan peningkatan kinerja dalam penyelengaraan pelayanan publik ke tahun selanjutnya.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan RS. Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Mewujudkan sistem administrasi yang cepat, tepat, ramah dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		100%	100%		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	7	Peningkatan Pelayanan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen		
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi ketergantungan Napza 2. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi Napza	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		100%	100%		
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen		
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen		
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	4 Dokumen	4 Dokumen		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	4 Dokumen	4 Dokumen		

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
Tahun 2024 – 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya infrastruktur dasar	1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	61,05 %	59,92 %	60,04 %	60,04 %
		2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		61.79 %	55,5 %	55,5 %
		3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	63,44 %	63,43 %	30,65%	30,65 %
		4	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 TPA	0 TPA	1 TPA	1 TPA
		5	Pendampingan Pelaksanaan Penataan Bangunan gedung Pemerintah dan, Pembangunan Gedung Kepentingan Strategis Provinsi	85.08 %	72,75 %	1 Tahun, 2 Unit	1 Tahun, 2 Unit
		6	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	86.12 %	72.75 %	75.84%	74.12%
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	80,61%	62,69%	100 %	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja adalah :

1) Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.

   Pada Indikator ini, target kinerja sebesar 60,04 % dan realisasi capaian kinerja adalah 60,04 %.

   Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) dengan melaksanakan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada 30 sungai, tersebar di 12 Kabupaten/Kota (Kota Binjai, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Kabupaten Simalungun, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Nias Utara dan Nias Selatan) yang terdiri dari pembuatan tanggul Sungai Bingei, perkuatan tebing sungai terdiri dari 4 Paket Kegiatan Pada 4 UPT dimana kegiatan pada sungai Rukkarre masih dalam tahap pengerjaan, rehabilitasi tanggul sungai terdiri dari 1 paket kegiatan pada sungai kualuh, normalisasi pada sungai Gambus.

   Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah membentuk, dan mengaktifkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara, yaitu :
   a. WS Kualuh Barumun
   b. WS Sibundong Batang Toru
   c. WS Wampu Besitang
   d. WS Bah Bolon
   e. WS Batang Angkola
   f. WS Kepulauan Nias

   Disamping kegiatan fisik diatas, terdapat juga kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis pengendalian banjir, pembangunan embung dan dokumen perencanaan teknis untuk konstruksi air tanah dan air baku dengan total dokumen perencanaan teknis.

2) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Pada indikator kinerja utama ini, target kinerja tahun anggaran 2025 sebesar 55,5 % dan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 tercapai sebesar 55,5 %.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dengan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada 9 Daerah Irigasi Permukaan dan 2 Daerah Irigasi Rawa yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota (Kab. Simalungun, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, dan Kab. Karo) yang terdiri dari peningkatan jaringan irigasi permukaan dan rehabilitasi jaringan irigasi pemukaan dengan rehabilitasi perkerjaan yaitu rehabilitasi bangunan irigasi permukaan pada 2 daerah irigasi, operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan pada 10 daerah irigasi di 3 UPT. pada daerah irigasi rawa terdapat, paket kegiatan yakni normalisasi saluran pembuangan serta pembuatan lenning dan pintu ulir di Kabupaten Langkat.

Di dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi / perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur irigasi sangat dibutuhkan dokumen perencanaan teknis, dan pada Tahun 2025 dilaksanakanlah kegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa, yang terdiri dari 1 dokumen perencanaan teknis peningkatan/ rehabilitasi jaringan irigasi.

3) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas.

Pada indikator kinerja utama ini, target kinerja tahun anggaran 2025 sebesar 30,65% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 tercapai sebesar 30,65%

Indikator kinerja ini berdasarkan perbandingan jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota (jiwa) dengan Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan (jiwa) sehingga

diperoleh Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas.

Indikator kinerja ini terdapat pada Program dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dimana fokus utama nya pada tahun ini adalah Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama JDU Tanjung Gusta Desa Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Jaringan Perpipaan yang telah selesai dibangun sepanjang 9845 meter (dari rencana awal 6810 meter) dengan kapasitas maksimum rencana sebesar 375 lt/detik atau eqivalen dengan 30.000 SR. Progres fisiknya sendiri telah mencapai 100 % sementara realisasi keuangan mencapai 98,01 % (atau setara 100 % nilai kontrak) sampai dengan triwulan keempat 2024. Selain itu dilakukan pembangunan Pipa Extension Off taker di Deli Serdang sepanjang 105 meter dengan realisasi fisik 100 %.

Nilai capaian kinerja bila mengacu pada perjanjian kinerja dan renja perubahan 2025 sebesar 63,43 %. Nilai ini didapat dari rasio jumlah sambungan rumah di wilayah mebidang dengan jumlah penduduk pada wilayah layanan (2.065.334/3.255.925), dimana jumlah sambungan rumah mengalami peningkatan sebesar 1.828 SR (eqivalen dengan 7.861 jiwa) dan terjadi kenaikan jumlah penduduk pada wilayah layanan sebesar 41.872 jiwa.

Nilai capaian kinerja bila mengacu pada RPD 2024-2026 sebesar 6,43 %; dimana target berdasarkan kapasitas yang terlayani SPAM Mebidang 24.786 SR (eqivalen 106.580 jiwa) dibanding jumlah penduduk area layanan SPAM Regional (1.652.693 jiwa), maka diperoleh angka Capaian sebesar 6,43 %.

4) Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2025 adalah menyediakan Lahan untuk Pembangunan TPA Regional Mebidang pada Desa Limau Mungkur dan Desa Patumbak Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Tahap Persiapan Pengadaan Lahan atau memang ada keterlambatan dari sisi waktu, dimana sebelumnya dijadwalkan akhir September 2024 sudah memasuki Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

5) Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Salah satu standar parameter yang kita gunakan untuk mengetahui nilai kondisi jalan berdasarkan Road Condition Survey (RCS) adalah parameter Surface Distress Index (SDI). Surface Distress Index (SDI) merupakan skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan.

Sesuai dengan P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara TA. 2025-2029 dan dokumen Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, target Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2025 adalah 75% dan realisasi kemantapan jalan pada akhir Tahun anggaran 2025 adalah 74.12% dengan capaian 98,82% yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

6) Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang

Target ini dapat dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yakni :

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi;
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi.

Realisasi dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu :

a. Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi indikator jumlah kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang ditetapkan/disusun, dimana pada tahun anggaran 2025, sudah disusun 1 dokumen pelaksananaan penataan ruang yang tersusun.
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan hasil sebagai berikut :
   - Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan RTRW Provinsi 1 Kegiatan;
   - Tersusunnya Dokumen Evaluasi Revisi Kabupaten/Kota;
   - Tersusunnya Dokumen Penyusunan Revisi dan Integrasi RTRW Provinsi 1 Dokumen;

- Tersusunnya Dokumen Penyelesaian Peta Indikastif Tumpang Tindih IGT (PITTI) di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan Evaluasi RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (4 Dokumen) di 8 Kabupaten / Kota.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi dengan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebagai Berikut :
   - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dalam 1 Tahun.
   - Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) berbasis Web GIS (1 Aplikasi).
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Kabupaten Kota Berpredikat Sedang yakni 17 Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota Berpredikat Buruk 16 Kabupaten/Kota.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air					
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	60,04 %	60,04 %		
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab/Kota	55,59 %	54,28 %		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum					
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	30,56%	30,56%		
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Unit	0	Masih menunggu reviu desain dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat perubahan peruntukan TPA menjadi TPST	Koordinasi intens Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas LHK Provsu
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		11,6 %	50,13%		
	1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	7194 M3/hari	31.085,6 M3/hari		
	Program Pengembangan Permukiman					
	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	2,4 Ha	0	Belum terbitnya Rekomendasi atas Pemanfaatan Lahan oleh ATR BPN	Terus berkoordinasi dengan Kementrian ATR BPN, dan tetap menganggarkan untuk penyediaan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
						lahan pada TA. 2025
	Program Penataan Bangunan Gedung					
	1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 unit	7 unit		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 dokumen	7 dokumen		
	Program Penyelenggaraan Jalan					
	1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	227,984km	222,779km	Kurang optimalnya pemeliharaan jalan	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100 orang	100 orang		
	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100 %	100 %		
	3	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 %	100 %		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1 Perda	0	Tahun 2025 dilakukan Review RTRW oleh LP USU dan sudah disampaikan kembali ke DPRD untuk dibahas, masih menunggu jadwal pembahasan pasal per pasal.	Koodinasi lebih entensif dengan DPRD
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	33 dokumen	31 dokumen	Tidak semua kabupaten/kota Mengusulkan	Mendorong kabupaten/kota untuk koordinasi

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
					koordinasi/sinkronisasi	
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	33 dok (app)	33 dok (app)		
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	33 Kab/kota	32 Kab/kota	Terkendala transportasi	Sudah dilaksanakan koordinasi secara online

4. Urusan Wajib Perumahan

Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Hasil pengukuran capaian kinerja pada urusan wajib perumahan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	2025		
				Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d <15 Ha	74,36%	76,89%	103,36%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio Rumah Layak Huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebanyak 400 unit.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	100 Orang	100 Orang		
	1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah				
	2.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
	4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
	4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
	4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
	4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
	4.6	Sub Kegiatan Penataausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	4.7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		
		6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan		
		6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan		
		6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1Laporan		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaran Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	10 Unit		
		7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
Pendataan Pembangunan Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**Program Pengembangan Perumahan**						
	1	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi					
		1.1	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Data untuk Identifikasi Perumahan belum optimal	Tetap melakukan pendataan secara komprehensif
Pengurangan Kawasan Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha	**Program Kawasan Permukiman**						
	1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha					
		1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum adanya petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Kolaborasi antar pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha					
		2.1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha	400 Unit	400 Unit	Data Kepemilikan RTLH setiap tahun bertambah	Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin
		2.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha S.D Dibawah 15 Ha	9 Laporan	9 Laporan	Belum optimalnya koordinasi pengelolaan infrastruktur	Lebih mengoptimalkan koordinasi dan senkronisasi pengendalian penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman
		2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha	19 Ha	10 Ha	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pekerjaan	Pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan konsolidasi lahan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)						
	1	Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman					
		1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum Optimalnya Perencanaan PSU di Permukiman	Usulan dari Kab/Kota dan Perencanaan yang sinkron dapat pempercepat pelaksanaan
		1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman	8 Lokasi	8 Lokasi	Rendahnya cakupan layanan PSU permukiman	Penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman
		1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	Belum optimalnya koordinasi pengelolaan infrastruktur	Lebih mengoptimalkan koordinasi dan senkronisasi pengelolaan PSU

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum						
	1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					
		1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	0 Dokumen	Belum optimalnya koordinasi ke Kab/Kota	Melanjutkan pendataan dan koordinasi ke Kab/Kota
Pengumpulan data ke Kab/Kota atas tanah kewenangan Provinsi	**Program Penatagunaan Tanah**						
	1	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
		1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen	Belum optimalnya koordinasi ke Kab/Kota	Mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan tersebut

5. Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang kemudian disesuaikan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 3.15
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

capaian IKU Satpol PP Provsu Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja Provsu akan berupaya terus meningkatkan capaian kinerja IKU yang lebih baik melalui optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan 2 program prioritas, yaitu :

1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Penguatan kinerja, sarana prasarana, anggaran dan SDM Satpol PP Provinsi Sumatera Utara	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**						
	1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi		100%	100%	Belum terbangun dengan baik sinergitas, komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
		1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Satuan Polisi Pamong Praja)	300 kasus	300 kasus		
		1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Satuan Polisi Pamong Praja)	145 kali	145 kasus		
		1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 dokumen	4 dokumen		
		1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	4 dokumen	4 dokumen		
	2	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		100%	100%		
		2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 dokumen	4 dokumen		
		2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)	4 dokumen	4 dokumen		
		2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)	4 dokumen	4 dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
	1	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	100%		
		1.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen		
		1.2	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang		

6. Urusan Wajib Sosial

Urusan wajib sosial adalah salah satu dari urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan ini berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar di bidang sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran Strategis sesuai dengan capaian kinerja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mampu melaksanakan fungsi sosialnya, memiliki keterampilan berusaha dan sumber mata pencaharian telah dituangkan dalam dua Indikator Kinerja Utama, dengan capaian sebagai dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provsu Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	2025	
		Target	Realisasi
1.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	0,38 (4.710 orang)	0.30 % (3.773 orang)
2.	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	92,00	84,13 %
3.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100% (1200 orang)	1.504% (1.803.549 orang)

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1) Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS

a. PPKS yang ditangani di dalam panti berjumlah 1864 orang, yaitu : penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dalam panti pada tahun 2025. PPKS yang mendapat rehabilitasi dalam Panti berjumlah 1.834 0rang dengan rincian : penyandang disabilitas terlantar 768 orang, anak terlantar 345 orang, lansia terlantar 339 orang, gelandangan pengemis 205 orang dan PPKS lainnya 177 orang. capaian yang peroleh sebesar 100%.
b. Selain itu pada tahun 2025 melalui program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam panti Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti memberikan bantuan pemberian makanan tambahan kepada 800 orang anak di panti swasta di kabupaten/kota.
c. Pada Program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal, jumlah yang ditangani untuk tahun 2025 sebanyak 51 orang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Sub Kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga telah diberikan bantuan kepada 113 KK atau 452 orang dengan pemberian bantuan UEP berupa pemberian alat keterampilan pembuatan kue, keterampilan salon dan keterampilan pangkas. Pada awalnya yang menerima bantuan UEP adalah 4 kab/kota yaitu Kota Binjai 30 KK, Kota Tebing Tinggi 49 KK, Padangsidempuan 35 KK, dan Kabupaten Langkat 45 KK. Khusus untuk Kabupaten Langkat pemberian bantuan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada kejadian bencana banjir, sedangkan untuk sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat pemberian bantuan KUBE telah dilaksanakan kepada masyarakat miskin dengan melibatkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan calon penerima mamfaat, pemberian bantuan KUBE kepada 198 KK dengan lokasi Kota Sibolga, 45 KK 30 peralatan kue, 10 peralatan jahit, 5 peralatan pangkas, Kabupaten Deli Serdang 38 KK dengan 38 peralatan kue, Kabupaten Serdang Bedagai 30 KK dengan 30 peralatan kue, Kabupaten Labuhanbatu Utara 40 KK 25 Peralatan Kue, 5 peralatan jahit, 10 peralatan pangkas, Kabupaten Dairi 40 KK 15 peralatan kue, 15 peralatan jahit dan 10 peralatan pangkas. tetapi untuk Kota Sibolga pemberian bantuan KUBE tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada musibah bencana alam banjir dan longsor, sehingga bantuan KUBE hanya diserahkan kepada 153 KK (612} orang. Rencana tindak lanjutnya untuk Tahun 2026 Kota Sibolga akan diprioritaskan menerima bantuan KUBE.

Jadi PPKS yang ditangani sesuai standar pada program Limjamsos berjumlah 1064 orang Keseluruhan PPKS yang ditangani sesuai standar melalui APBD Dinas Sosial Tahun 2025 sebanyak 3753 atau sekitar 0.30 % Kurang dari target yang ditetapkan 0,38 hal ini disebabkan adanya Kejadian bencana yang ada di Sumatera Utara dan adanya program efisiensi anggaran

2) Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar
Pada tahun 2025, PSKS yang ada di bawah koordinator Dinas Sosial adalah:
a. Karang Taruna sebanyak 848 orang;
b. TKSK sebanyak 445 orang;
c. Tagana sebanyak 1.242 orang;
d. Pelopor Perdamaian sebanyak 121 orang;
e. PSM sebanyak 149 orang;
f. Pekerja Sosial Profesional sebanyak 92 orang.
Jumlah seluruhnya berjumlah 2.897 orang target yang dicapai 47,24% dengan target yang ditetapkan dalam IKU 92%.

3) Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial

Pada tahun 2025, Program Penanganan Bencana, kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial telah dilaksanakan pada saat terjadi Bencana alam dan Longsor di Sumatera Utara dengan diberlakukannya kondisi tanggap darurat, tetapi untuk anggaran keuangan tidak ada di Pos Anggaran dari DPPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, namun menggunakan anggaran BTT Pemprovsu Adapun target yang ditentetapkan pada DPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah 1200 orang realisasi yang menerima bantuan korban bencana sejumlah 1.803.549 orang (data dari BPBD Kabupaten/Kota diolah oleh Pusdalops PB BPD Provinsi Sumatera Utara) sehingga untuk realisasi meningkat menjadi 1504%, sedangkan capaian kinerja mencapai 100 %.

Pencapaian target sesuai dengan Dokumen Anggaran pada DPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Program Rehabilitasi Sosial
   a. Program Rehabilitasi Sosial sesuai dengan target capaian yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara Kuantitas telah tercapai 100%, Jumlah PPKS yang menerima pembinaan di dalam panti berjumlah 1864 orang , namun secara kualitas belum maksimal karena belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar bagi PPKS dalam panti sesuai permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM, disebabkan masih minimnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
   b. Pemberian makanan tambahan kepada 800 orang anak di dalam panti swasta.

2) Program Penangangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Capaian target kinerja pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan telah tercapai 100 % dengan realisasi keuangan 54,07 %, jumlah yang ditangani sebanyak 51 Orang, permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah masih terkendalanya dalam hal penampungan sementara Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, karena Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS), sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal dimana berdasarkan petunjuk teknis pelayanan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan harus dibina baik mental maupun Psikososialnya. Solusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumatera utara dalam hal ini Dinas Sosial Provsu hendaknya memiliki penampungan sementara sesuai standart yang berlaku .

3) Program Pemberdayaan Sosial

Capaian kinerja pada program ini tercapai 100%, terkait Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan, pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan seperti pelaksanaan kegiatan pemberian bantuaan melalui BK3S yaitu pemberian pakaian kepada anak dan lanjut usia. tetapi untuk anggaran keuangan tidak ada di Pos Anggaran dari DPPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara namun menggunakan anggaran BTT Pemprovsu.

4) Program Penanganan Bencana

Capaian Kinerja pada program Penanganan Bencana sesuai dengan target capaian 100%, kegiatan yang dilaksanakan ditekankan pada dua sub kegiatan yaitu penyediaan makanan sebanyak 600 paket untuk 600 kk dan penyediaan sandang sebanyak 600 paket untuk 600 paket. Bantuan tersebut sudah dilaksanakan tetapi untuk anggaran keuangan tidak ada di Pos Anggaran dari DPPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara namun menggunakan anggaran BTT Pemprovsu Jumlah korban bencana yang dibantua pada saat tangap darurat bencana berjumlah 1803.549.

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian kinerja pada Program perlindungan dan jaminan sosial tercapai 72%, dengan rincian :

a. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang telah dilakukan kepada 13 orang anak angkat.
b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
    - Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan memberikan bantuan UEP berupa pemberian alat pembuatan kue, alat Keterampilan menjahit, alat keterampilan pangkas dan alat ketermpilan salon kepada 113 KK (452 jiwa) yang berlokasi 3 kab kota yaitu Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Padang Sidempuan Pemberian bantuan UEP ke Kabupaten Langkat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kejadian bencana alam banjir.
    - Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan memberiakan bantuan KUBE kepada 153 KK (612 Jiwa) berupa alat pembuatan Kue, alat keterampilan menjahit, alat keterampilan pangkas dan alat keterampilan salon yang berlokasi di 4 Kabupaten Kota. yaitu Kab Sergai, Kabutan Deli Serdang, Kabupaten Dairi , Kab Labura . Pemberian bantuan UEP ke Kota Sibolga gkat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kejadian bencana alam longsor dan banjir.

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Capaian Kinerja pada program ini telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan 73%, dimana perawatan atau pemeliharaan Taman Makam Pahlawan wajib dilakukan, program ini merupakan program yang diamanatkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai penghormatan kepada pahlawan nasional dan keluarga perintis kemerdekaan.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi PPKS/PMKS Dalam Panti.	**Program Rehabilitasi Sosial**					
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	768 orang	768 0rang	Kenyamanan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti masih belum maksimal dikarena keterbatasan SDM anggaran yang tersedia.	Agar angggaran dan SDM ditingkatkan
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	345 Orang	345 Orang		
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	339 Orang	339 Orang		
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	205 Orang	205 Orang		
	5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	177 Orang	177 Orang		
1. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya organisasi sosial (orsos) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Relawan sosial, organisasi sosial masyarakat lainnya, 2. Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan termasuk	**Program Pemberdayaaan Sosial**					
	1	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 kk kk/paket	-	Kegiatan BK3S telah dilaksanakan pada saat kondisi tanggap darurat bencana dengan pemberian bantuan pakaian kepada anak dan lansia tetapi pos anggrannya tidak di DPPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tetapi ada pada Pos Anggran BTT Provinsi Sumatera Utara	Adanya penambahan SDM di Dinas Sosial

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
pendayagunaan sumber dana sosial, dan berkembangnya jejaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan jumlah PSKS yang dilayani						
Terlaksananya pemulangan bagi pengungsi yang dapat dikembalikan ke daerah asal; bantuan terminasi; terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**					
	1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.	70 orang	51 orang	Belum adanya tempat sebagai penampungan sementara Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, karena Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS), sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal	Perlunya didirikan tempat penampungan sementara (home shelter)
Memfasilitasi masyarakat dalam proses pengangkatan anak dan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga miskin di pedesaan, perkotaan serta di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan negara, terbangunnya kerjasama	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				Target tidak terpenuhi dikarenakan ada kabupaten kota yang tidak bisa menerima bantuan UEP dan Kube yaitu Kabupaten Langkat dan Kota Sibolga dikarenakan terjadi bencana alam longsor dan banjir pada tanggal 27 Desember 2025, sehingga menghambat	Untuk Kab/Kota yang tidak bisa menerima bantuan akan diprioritaskan menerima pada Tahun 2026
	1	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	13 orang	13 orang		
	2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	357 KK	267 KK		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin, berkembangnya Geografi Informasi Sistem (GIS) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin					pelaksanaan pemebrian bantuan di lapangan	
Memberikan bantuan dasar kesejahteran sosial bagi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	**Program Penanganan Bencana**				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi telah dilaksanakan pada saat kondisi tanggap darurat bencana dengan jumlah yang telah mendapat bantuan sebanyak 1.803.549 melebihi target pada RKA 1200 orang tetapi pelaksanaannya tidak pada pos anggaran DPPA Dinas Sosial Provsu tetapi pada Pos Anggaran BTT Pemprovsu	
	1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1200 kk/paket	1200 Kk/ paket		
Meningatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, merehabilitasi sarana dan prasaranan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**Program Pengolalaan Taman Makam Pahlawan**					
	1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 keg	1 keg		

7. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara menjalankan tupoksinya dengan dukungan Sekretariat dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Bidang Pembinaan Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, Perencanaan Kerja dan Ketransmigrasian, Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, ditambah adanya UPT Balai Latihan Kerja yang bertempat di Simalungun dan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) di 6 wilayah yang mencakup Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Provsu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	0,15	0,11	0,33	0,13
		Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	90,02	39,39	60,60	45,45
2.	Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah provinsi (%)	16,70	67,31	67,50	65,00
3.	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial, dan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (indipendent), tidak memihak (fair treatment), profesional	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	8,31	21,04	9,10	29,2
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan (%)	51,45	59,70	60	79,56
	IKU Perubahan 2025					
1.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. /orang/tahun)	-	-	84,3 juta	82,90 juta
2.	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	-	-	60,60	45,45
3.	Meningkatnya produktivitas tenag kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang	-	-	0,025	0,01

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
		meningkat produktivitasnya (%)				
4.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) (%)	-	-	67,50	65,00
		Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Provinsi (unit)	-	-	14	8
		Persentase pekerja informal	-	-	56,95	57,96
5.	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan (%)	-	-	60	79,56
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	-	51	54,88

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Provsu

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.992.559,- untuk tahun 2025. Upah minimum tersebut mengalami kenaikan dari UMP Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.809.915,- dengan kenaikan sebanyak Rp. 182,644 atau 6,5%.

Capaian lainnya di bidang ketenagakerjaan seperti :

1) Jumlah Angkatan Kerja Agustus 2024 sebanyak 8,181 juta orang, naik sebanyak 243 ribu orang menjadi 8,425 juta orang pada Agustus 2025.
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 sebesar 71,36%, sedangkan pada Agustus 2025 menjadi 72,29%.
3) Jumlah Angkatan Kerja kategori bekerja pada Agustus 2024 adalah 7,723 juta orang dan pada Agustus 2025 adalah 7,976 juta orang. Angkatan Kerja dengan kategori tidak bekerja (pengangguran) Agustus 2024 adalah 458 ribu orang dan pada Agustus 2025 menjadi 448 ribu orang.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja					
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60,60%	45,45	Sebanyak 15 Kab/Kota memiliki dokumen RTKD yang masih berlaku, sementara 18 kab/kota lainnya belum menyusun RTKD ataupun sudah habis masa berlaku dokumennya	Mengadakan bimtek Penyusunan RTK Makro, diharapkan tahun selanjutnya setiap Kab/Kota menyusun RTK daerahnya
1. Meningkatkan Skill Tenaga Kerja 2. Meningkatkan Kualitas Balai Latihan Kerja 3. Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**					
	1	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	100%		
	2	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	40,65%	100%	Realisasi melampaui target yang ditetapkan	Pembangunan jejaring peningkatan produktivitas yang melibatkan lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan berjalan dengan efektif dan sinergis
1. Meningkatkan Kerjasama dengan Dunia Usaha 2. Mengembangkan sistem dan fasilitas penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri 3. Menyebarluaskan informasi mengenai prosedur penempatan	**Program Penempatan Tenaga Kerja**					
	1	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 rekomendasi	6 rekomendasi	1. Keterbatasan informasi: kurangnya sosialisasi atau penyebaran informasi yang efektif tentang peluang kerja lintas daerah kepada pencari kerja. 2. Kendala administrasi/ birokrasi: proses pengurusan dokumen dan rekomendasi antar	1. Peningkatan sosialisasi: menggunakan berbagai saluran (media sosial, pameran kerja, kerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan) untuk menginformasikan peluang AKAD.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Tenaga Kerja Luar Negeri					daerah yang memakan waktu atau rumit. 3. Program mengutamakan Tenaga Kerja Lokal	2. Pelatihan dan peningkatan keterampilan: mengadakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di daerah tujuan untuk mengatasi *mismatch*.
	2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 lembaga	2 lembaga	1. Minat LPTKS (P3MI) yang rendah: LPTKS mungkin tidak melihat potensi pasar yang cukup atau menganggap proses perluasan wilayah operasional terlalu mahal/rumit, dimana untuk mendirikan P3MI membutuhkan dana deposit 1,5 milyar 2. Penerimaan TK oleh beberapa negara yang masih tertutup (misal, Malaysia dll)	1. Pendampingan proses izin: memberikan bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada LPTKS yang berminat untuk memenuhi persyaratan perizinan. 2. Penyederhanaan regulasi: mengevaluasi dan, jika perlu, merevisi regulasi untuk mempermudah LPTKS yang kredibel memperluas jangkauan mereka. 3. Peningkatan komunikasi: memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan LPTKS untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi bersama.
	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.600 orang	13.573 orang		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	4	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	1.500 orang	2.072 orang		
1. Mengintensifkan dialog sosial tenaga kerja 2. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan	**Program Hubungan Industrial**					
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 Kabupaten/Kota	6,97%	6,15%		
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Provinsi	7,80%	4,89%	Adanya sinkronisasi data perusahaan pada OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi) dengan data perusahaan pada aplikasi WLKP online sehingga terjadi penambahan data perusahaan	Data sesuai sinkronisasi
	3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	100%	100%		
1. Memberdayakan mitra kerja dalam pengawasan ketenagakerjaan 2. Memantapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**					
	1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	49.634 perusahaan	100.148 perusahaan	Adanya sinkronisasi data perusahaan pada OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi) dengan data perusahaan pada aplikasi WLKP online sehingga terjadi penambahan data perusahaan	Data sesuai sinkronisasi

8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja utama pada urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan data capaian tahun 2025 diperkirakan akan dirilis di pertengahan tahun 2026.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu Tahun 2023 – 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Meningkatnya implementasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,31	91,5	91,36	-
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	0,399	0,41	-
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,64	68,66	63,7	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu

Capaian IKU pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan data 2025 baru akan dirilis di pertengahan tahun 2026.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 sebesar 91,50, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 91,31. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun capaian tersebut masih sedikit di bawah capaian nasional tahun 2024 sebesar 91,85, tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Selanjutnya, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,399, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,43. Penurunan nilai IKG mengindikasikan semakin berkurangnya ketimpangan gender di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan ketenagakerjaan. Capaian ini lebih baik dibandingkan capaian nasional tahun 2024 sebesar 0,421, yang menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan dan program pengarusutamaan gender di daerah.

Sementara itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2024 mencapai 68,66, meningkat signifikan dari capaian tahun 2023 sebesar 61,64. Peningkatan ini mencerminkan penguatan penyelenggaraan perlindungan anak melalui peningkatan layanan, penguatan kelembagaan, serta sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional tahun 2024 sebesar 71,02, namun menunjukkan kemajuan yang berarti dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

Tabel 3.22
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan.	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**						
	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					
		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	Masih Minimnya SDM pada OPD terkait Penyelenggaraan PUG dan regulasi teknis pada 7 Proses Pembangunan	Perlunya peningkatan kapasitas maupun SDM terlatih serta Komitmen Kepala OPD
		1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	Masih Minimnya SDM terlatih pada Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perlunya peningkatan kapasitas maupun SDM terlatih serta Komitmen Kepala OPD
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					
		2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	Masih lemahnya regulasi kebijakan, program dan kegiatan Advokasi kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Perlunya komitmen dari Pemerintah maupun Non Pemerintah terkait kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi					

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		3.1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	27 Orang	27 Orang	Masih minimnya lembaga yang memfasilitasi terkait dengan LPLPP	Butuhnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan terbentuknya LPLPP
Perlindungan terhadap Perempuan dan anak	**Program Perlindungan Perempuan**						
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	Belum optimalnya intervensi pencegahan kekerasan berbasis data serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Intervensi pencegahan kekerasan berbasis data serta meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					
		2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan KewenanganProvinsi	20 orang	20 orang	masih terbatasnya SDM Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
		2.2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	250 orang	250 orang	masih terbatasnya bantuan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Meningkatkan ketersediaan bantuan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
		2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum optimalnya jejaring dan koordinasi antar lembaga penyedia	Penguatan koordinasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						layanan perlindungan perempuan	di provinsi dan kabupaten/kota
Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang Pembangunan.	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**						
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
		1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Masih minimnya lembaga yang memfasilitasi terkait dengan LPLPKK	Butuhnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan terbentuknya LPLPKK
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak						
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					
		1.1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Belum optimalnya pengumpulan data terpilah di OPD	Penguatan SDM terkait tugas dan fungsi Forum Data Terpilah Provinsi
Implementasi Kabupaten / Kota layak anak	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**						
	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
		1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	27 perangkat daerah	27 perangkat daerah	Masih lemahnya regulasi kebijakan, program dan kegiatan terkait Pemenuhan Hak Anak	Meningkatkan komitmen dari Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media terhadap Implementasi terkait kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung Pemenuhan Hak Anak
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	300 orang	300 orang	Masih rendahnya lembaga dan SDM yang menyediakan layanan anak yang komprehensif	Melakukan upaya peningkatan kapasitas lembaga maupun SDM lembaga yang memberikan pelayanan peningkatan kualitas hidup anak secara komprehensif
		2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Masih minimnya lembaga/pusat penyedia informasi/media yang sudah terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kurangnya pengawasan terhadap informasi/ konten-konten media yang layak dikonsumsi oleh anak	Melakukan upaya fasilitasi dan pengembangan lembaga/pusat informasi agar dapat terstandarisasi PISA. Mengembangkan metode KIE yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Membangun dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap informasi/konten yang Layak Anak di seluruh media massa.
		2.3	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum optimalnya peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor, serta masih rendahnya komitmen pemerintah daerah melibatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah Kab./Kota agar melibatkan anak dalam Musrenbang dan penyusunan kebijakan. Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Perlindungan terhadap Perempuan dan anak	**Program Perlindungan Khusus Anak**						
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak antar OPD dan instansi terkati	Penguatan koordinasi antar OPD dan instansi terkait dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
		2.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	45 orang	45 orang	Kapasitas SDM lembaga layanan perlindungan AMPK belum merata, masih terbatasnya kapasitas SDM lembaga layanan di Kabupaten/Kota dalam penanganan kasus, dan belum tersedianya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan	Memberikan pelatihan berjenjang yang dilaksanakan secara rutin dan terencana
		2.2	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	90 orang	90 orang	Keterbatasan data dan pemetaan AMPK	Pengumpulan dan pemutakhiran data AMPK
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak						
Layanan pendampingan korban bagi perempuan dan anak korban	1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota.		1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 orang	72 orang	Provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan rujukan, sehingga layanan pengaduan yang menjadi layanan dasar telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota Kurangnya jangkauan masyarakat dalam melakukan pengaduan ke UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara	Peningkatan layanan fasilitas pengaduan seperti pengaduan online Peningkatan pelaksanaan sosialisasi pengaduan kasus kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung (online) kepada masyarakat
		1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	70 layanan	72 layanan	Layanan rujukan telah dilaksanakan dengan baik oleh UPTD PPA	Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					
		2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	200 orang	188 orang	Kurangnya kapasitas SDM petugas layanan AMPK di tingkat Provinsi dalam pelaksanaan layanan perlindungan pada AMPK	Peningkatan kapasitas SDM petugas layanan AMPK di tingkat Provinsi dalam pelaksanaan Layanan perlindungan bagi AMPK

9. Urusan Wajib Pangan

Capaian kinerja pada urusan wajib pangan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.23
Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2025		Persentase Capaian
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	77,88	71,45*)	91,74%
2	Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	7,20	7,20	100%
		Skor Pola Pangan Harapan	90,05	93,40	103,72%

*Keterangan : *) Angka Sementera*
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

1) Indeks Ketahanan Pangan

Target Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar 77,88 Point sedangkan realisasi sebesar 71,45 Point atau sebesar 91,74%, hal ini disebabkan :

a. Kenaikan Harga Pangan dan Inflasi Pangan
   - Indeks Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga pangan dan kemampuan masyarakat mengakses pangan. Selama 2025 terjadi inflasi cukup tinggi, terutama pada kelompok makanan pokok seperti cabai, bawang, beras, daging ayam, dan ikan, yang ikut mendorong naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Utara. Hal ini menurunkan daya beli rumah tangga miskin dan rentan pangan.
   - Inflasi yang tinggi menyebabkan komoditas pangan tidak stabil, sehingga pertumbuhan *access* dan *utilization* dalam komponen indeks pangan menjadi kurang optimal.

b. Distribusi dan Stabilitas Pasokan Pangan Belum Merata
   Produksi pangan terutama beras dan cabai menunjukkan surplus di beberapa periode namun panen yang tidak merata antardaerah dan gangguan distribusi masih menciptakan fluktuasi pasokan di pasar lokal.

c. Produktivitas dan Infrastuktur Pertanian
   Produksi pangan di beberapa daerah belum optimal, misalnya produktivitas pertanian yang perlu dorongan (seperti indeks pertanaman dan penggunaan teknologi pertanian). Realisasi target luas tanam tertentu juga sempat mengalami keterlambatan sebelum ditingkatkan akhir tahun.

d. Risiko Bencana dan Cuaca Ekstrem
Pada akhir 2025, Sumatera Utara mengalami banjir besar dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem, yang berdampak pada akses pangan, infrastruktur pertanian, dan pendistribusian pangan.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Pravelence of Undermourishment*)

Target Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Pravelence of Undermourishment*) tahun 2025 sebesar 7,20% dan realisasi sebesar 7,20% atau sebesar 100%. Ini menunjukkan pengendalian penanganan kerawanan pangan berhasil mencapai target kinerja. Hal ini disebabkan oleh :

a. Penurunan jumlah orang yang kekurangan konsumsi energi cukup
Indikator *Prevalence of Undernourishment* mengukur persentase penduduk yang secara *habitual* mengonsumsi pangan kurang dari kebutuhan energi untuk hidup normal, sehat, dan aktif. Ketika angka PoU turun atau stabil di target, ini berarti proporsi masyarakat yang kekurangan energi dari makanan tidak meningkat / berkurang — artinya ada perbaikan dalam akses terhadap pangan cukup energi dibanding tahun sebelumnya, beberapa program pemerintah seperti bantuan pangan yang salah satu nya makan bergizi berkontribusi dalam penuruan jumlah orang yang kekurangan konsumsi energi cukup

b. Perbaikan akses pangan dan dukungan sosial
Program bantuan pangan yang membantu kelompok miskin di daerah rentan pangan untuk mendapatkan cukup konsumsi energi harian mereka, yang bisa menstabilkan atau menurunkan PoU.

c. Ketersediaan pangan lokal yang relatif baik
Produksi pangan lokal yang memadai (seperti beras, jagung, sayuran, dll) dapat meningkatkan ketersediaan pangan sehingga masyarakat miskin dapat mengakses cukup makanan energi. Hal ini dapat dilihat dari capaian produksi padi, cabai merah, buah – buahan dan sayur- sayuran yang menunjukkan surplus jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

3) Skor Pola Pangan Harapan

Target Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 sebesar 90,05 Point dan realisasi sebesar 93,40 Point atau sebesar 103,72%. Skor pola pangan harapan menunjukkan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan berdasarkan proporsi kelompok pangan (energi, protein, vitamin/mineral). Dengan realisasi 93,40, artinya:

a. Konsumsi masyarakat Provinsi Sumatera Utara semakin mendekati pola konsumsi ideal;
b. Proporsi pangan non-beras (hewani, sayur, buah, kacang-kacangan) membaik.

Hal ini disebabkan oleh :

a. Efektivitas Program Penganekaragaman Pangan

   Beberapa program penganekaragaman pangan yang dilaksanakan yaitu pemanfaatan pekarangan dengan menanami sayuran bergizi bagi keluarga, penganekaragaman pangan lokal, kampanye dan edukasi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang efektif dan tepat sasaran sehingga dapat tercapaikan target kinerja skor pola pangan harapan.

b. Program Makan Bergizi

   Menu makan bergizi dirancang beragam kelompok pangan ada sayur, protein hewani, sumber karbohidrat, dan buah dengan sasaran anak sekolah yang merupakan kelompok dengan konsumsi rutin dan terukur.

Tabel 3.24
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pangan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**						
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
		1.1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumebr Daya Lokal	8 KWT	8 KWT		
		1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					
		2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	53 Ton	10,413 Ton	Efisiensi anggaran	Dianggarkan di tahun berikutnya
	3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					
		3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	5 KWT, 4 Sekolah	5 KWT, 4 Sekolah		
Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**						
	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					
		1.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebihd dari 1 daerah Kab/kota dalam 1 daerah provinsi	8 KWT	8 KWT		
Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**						
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu	3 Jenis Sertifikat	3 Jenis Sertifikat		
		1.2	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu	5 Kelembagan	5 Kelembagan		
		1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu	3 Paket	3 Paket		
		1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	48 Sampel	48 Sampel		

10. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan Wajib Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Biro Pemerintahan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanahan memiliki peran dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pertanahan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip *good governance*, diperlukan pembenahan berbagai aspek birokrasi, mengingat kondisi yang ada saat ini merupakan hasil dari interaksi kompleks serta akumulasi permasalahan yang telah berlangsung dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.

Pelaksanaan urusan pertanahan diarahkan pada peningkatan tertib administrasi pertanahan melalui fasilitasi penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan, termasuk penanganan konflik pertanahan di daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai instrumen data, antara lain kejelasan batas daerah yang tertuang dalam peta batas wilayah, ketersediaan informasi rupa bumi, serta kepastian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Batas daerah yang memiliki kekuatan hukum menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan wilayah administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penegasan batas wilayah menjadi isu strategis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penegasan batas daerah dilaksanakan melalui tahapan penegasan batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Tahapan kegiatan pasca penegasan batas daerah meliputi:

1) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
2) Perapatan pilar batas;
3) Pemasangan pilar batas;
4) Penegasan batas kecamatan dan batas desa /kelurahan;
5) Pelaksanaan kerja sama antar daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah telah melakukan pembangunan pilar batas daerah dengan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan letak titik kordinat yang telah disepakati dilakukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terdapat 2 pilar batas yang dibangun di Desa Lau Pakam Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo sebagai batas antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Aceh Tenggara yang terletak pada titik koordinat :

- 03°16'9.869''LU dan 97°56'52.201''BT
- 03°16'54.368''LU dan 97°58'28.325''BT

Kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memfokuskan pada penyelesaian penegasan batas pada segmen yang belum selesai yaitu segmen antara Kabupaten Nias dengan Kota Gunungsitoli dan segmen Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu kegiatan akan difokuskan pada perapatan pilar batas dan sosialisasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 perihal batas daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 3.25
Capaian Program dan Kegiatan Bidang Pertanahan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatkan pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**						
	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.1	Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan visi dan misi, serta pencapaian target indikator kinerja urusan wajib lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan program kerja sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
6) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
7) Program Pengelolaan Persampahan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan wajib lingkungan hidup tahun 2025, kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Tahun 2024 - 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	61,30	61,09	75,80	74,15
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,74	92,26	82,20	82,63
3	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48,74	50,26	71,05	72,44
4	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	68,61	70,82	68,67	81,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu

Berikut akan dijelaskan tentang pencapaian masing – masing indikator kinerja dimaksud :

1) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) nilai IKA dapat mendukung tujuan nomor 6, yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. Perhitungan Status Mutu Air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 8 parameter meliputi : derajat

keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), total fosfat (T-Phosphat), Nitrat dan Fecal Coli.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan melakukan kompilasi hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di Sungai dan Danau yang menjadi kewenangan Provinsi dengan hasil pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Nilai capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2025 sedikit berada dibawah target yang telah ditetapkan. Nilai IKA 74,15 mengandung arti bahwa kualitas air Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Sedang" ($60<IKA\leq85$).

Tingginya beban pencemar yang masuk ke dalam badan air dan terjadinya kerusakan ekosistem perairan (termasuk hutan dan DAS) dapat menjadi salah satu faktor pendorong tercemarnya kualitas air. Untuk itu, diperlukan beberapa aksi nyata yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas air, antara lain : 1) Meningkatkan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelaku pencemaran; 2) Meningkatkan jumlah fasilitas pengolahan air limbah domestik; 3) Rehabilitasi hutan dan DAS; 4) Mendorong penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan; serta 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun publikasi.

Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan prioritas antara lain :

a. Monitoring dan Evaluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan di 7 lokasi yaitu Sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Wampu, Sungai Bah Bolon, Sungai Padang, Sungai Asahan dan Sungai Ular. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) periode pemantauan yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan dengan 3 (tiga) titik sampling pada masing-masing sungai. Sehingga total jumlah titik sampling secara keseluruhan adalah 42 titik dimulai dari hulu sungai sampai ke hilir;
b. Pemantauan Kualitas Air Danau Toba secara berkala yang dilakukan di 22 titik lokasi;
c. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dimana ketaatan kinerja perusahaan yang dievaluasi, antara lain ketaatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), pengelolaan limbah B3 dan ketaatan terhadap dokumen lingkungan;
d. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah berupa pengadaan becak sampah sebanyak 3 unit.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia dan tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara. Kecenderungan penurunan kualitas udara disebabkan oleh kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) data IKU untuk mendukung tujuan nomor 11, yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Indeks Kualitas Udara Provinsi dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO_2 dan NO_2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien Kabupaten/ Kota dan dilakukan pada daerah yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Metode pemantauan yang digunakan adalah metode *manual passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 82,63 menunjukkan bahwa kualitas udara Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 berada dalam kategori "Sedang" ($60<IKU\leq85$) dan telah melebihi target yang ditetapkan.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Kualitas Tutupan Lahan dan Kualitas Ekosistem Gambut. Keberadaan tutupan hutan dalam skala lokal, ekosistem/ekoregion, regional dan global memiliki berbagai fungsi yakni sebagai habitat keanekaragaman hayati, menjaga kestabilan tanah, menurunkan beban pencemaran air, tanah dan pencemaran udara, pengatur air serta menjaga iklim mikro, makro dan resiko pemanasan global.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKL antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Nilai IKL memberikan manfaat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa informasi tentang kondisi tutupan lahan nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penghitungan IKL tahun 2025 adalah 72,44 sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi sudah melebihi target dengan capaian kinerja 101,96%. Berdasarkan PermenLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), bahwa nilai IKL 72,44 mengandung arti bahwa kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Sedang" (60<IKA≤85). Nilai IKL ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, yaitu dari 50,26 poin pada tahun 2024 menjadi 72,44 poin pada tahun 2025 atau meningkat 22,18 poin.

4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) nilai IKAL dapat digunakan untuk mendukung tujuan nomor 14 yaitu Ekosistem Laut. Kualitas air laut dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan di daerah pesisir dan laut. Perhitungan IKAL mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI).

Hasil penghitungan IKAL tahun 2025 adalah 81,42 sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 68,67 sehingga dapat disimpulkan realisasi sudah mencapai target dengan capaian kinerjanya yaitu 118,57%. Berdasarkan PermenLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), bahwa nilai IKAL 81,42 mengandung arti bahwa kualitas air laut Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Sedang" (60<IKA≤85).

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kegiatan pemantauan kualitas air laut di pelabuhan Belawan, pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Sibolga sebanyak 2 kali pemantauan.

Tabel 3.27
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3. Persetujuan Validasi KLHS RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR Kab/Kota se Sumatera Utara	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**				Seluruh kab/kota menyusun KLHS RPJPD dan RPJMD sementara Provinsi juga menyusun KLHS RPJPD dan RPJMD tanpa bantuan tenaga ahli, sedangkan tim teknis hanya ada 4 orang, sehingga pekerjaan sangat menumpuk	Diharapkan penambahan personil yang tetap serta dilakukan pelatihan validasi dokumen KLHS ke Kementerian Lingkungan Hidup
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-		
	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		
1. Pencegahan pencemaran air 2. Penanggulangan Pencemaran air 3. Pencegahan Pencemaran Udara 4. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lahan gambut 5. Pencegahan pencemaran air laut 6. Penanggulangan Pencemaran air laut	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				1. Berkurangnya frekuensi pemantauan 2. Data IKLH Provinsi belum dijadikan kebijakan Kab/kota dalam pengelolaan lingkungan 3. Belum dilakukan pemantauan secara menyeluruh untuk menghasilkan data yang lebih representatif	1. Untuk mendapat data yang lebih refresentatif sebaiknya dilakukan pemantauan 3 kali persungai dalam 1 tahun 2. Kedepan data IKLH ini harus dijadikan sebagai informasi kepada Kab/kota dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup 3. Melakukan pemantauan secara menyeluruh
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15 Dokumen	12 Dokumen		
	2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**					
	1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	6.070.753,65 Ton/Tahun		
Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	**Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**				Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi terhadap PPLH	Peningkatan kompetensi terhadap PPLH melalui bimbingan dan pelatihan
	1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	20 Dokumen	19 Dokumen		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
	1	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**					
	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**				Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi terhadap PPLH	Peningkatan kompetensi terhadap PPLH melalui bimbingan dan pelatihan
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	3 Dokumen	2 Dokumen		
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	**Program Pengelolaan Persampahan**				Masih rendahnya partisipasi masyarakat, swasta serta LSM dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan mengikutsertakan masyarakat, pihak swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.781.200 Ton/Tahun	699.527,76 Ton/Tahun		

12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	0,76 Poin	0,94 Poin

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan ditargetkan sebesar 0,76 Poin dan mampu direalisasikan sebesar 0,94 Point pada kategori Sangat Baik (A).

1) Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil

Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas menunjukkan sinergi erat namun memiliki fokus berbeda pendaftaran penduduk (KTP, KK, dll) mengurus status demografis warga, sementara pencatatan sipil (akta lahir, nikah, cerai) mengurusi peristiwa hukum personal untuk kepastian status, keduanya terintegrasi di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menciptakan data tunggal dan pelayanan publik efektif, meski implementasi sering menghadapi isu kualitas pelayanan, aksesibilitas, dan sinkronisasi data antar program guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisa data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu sebesar 94.11 pada kategori Sangat Baik (A). Program Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sangat sesuai dan komplementer karena keduanya adalah bagian integral dari sistem administrasi kependudukan untuk memastikan kepastian data dan status penduduk, namun kesesuaian ini perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan implementasi, teknologi, dan koordinasi untuk mencapai pelayanan publik yang prima dan data yang valid.

2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Integrasi sistem melalui SIAK Terpusat Pengelolaan informasi administrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang kini beroperasi secara terpusat. Sistem ini menyinkronkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara langsung ke dalam basis data nasional, yang kemudian menjadi sumber utama penyusunan profil kependudukan.

Sinkronisasi Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen perencanaan 2024-2026, terdapat penyelarasan target indikator di mana cakupan ketersediaan profil kependudukan ditargetkan mencapai 100% dengan dukungan basis data SIAK yang harus selalu tersedia. Hambatan dan Tantangan Meskipun sistem telah terintegrasi, tantangan pada 2025 masih meliputi keterbatasan kompetensi SDM pengelola di tingkat daerah dan perlunya optimalisasi keamanan jaringan komunikasi data (jarkomdat) untuk menjamin kerahasiaan informasi.

Tabel 3.29
Capaian Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam layanan penyelenggaraan adminduk di Sumatera Utara	**Program Pendaftaran Penduduk**			100 %	100 %		
	1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		100 %	100 %		
		1.1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	Sinkronisasi data dan regulasi antar daerah, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta tantangan implementasi kebijakan baru	Peningkatan kapasitas dan pemahaman: Kegiatan seperti bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Perbaikan Regulasi: Penyempurnaan aturan mengenai pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penguatan Koordinasi: Membangun sistem koordinasi yang lebih solid antar tingkatan pemerintahan daerah
		1.2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					
		2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	Teknis seperti server sering down, infrastruktur TIK terbatas di daerah, serta masalah SDM (literasi digital rendah, kebiasaan minta	• Peningkatan Infrastruktur & Sistem: Memperbaiki stabilitas *server* dan memastikan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						bantuan orang lain), birokrasi rumit, dan perbedaan data antar dokumen akibat input data awal yang kurang valid, yang semuanya menghambat kemudahan dan kepuasan layanan administrasi kependudukan.	ketersediaan infrastruktur TIK di seluruh wilayah. • Edukasi dan Sosialiasi : Meningkatkan literasi digital warga dan menjelaskan pentingnya data yang akurat sejak awal. • Penyederhanaan Prosedur : Mengurangi kompleksitas birokrasi dan mempercepat proses pelayanan. Verifikasi Data yang Ketat : Memastikan data awal yang dimasukkan valid dan sesuai dengan dokumen pendukung untuk menghindari perbedaan di kemudian hari.
		2.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	Kesenjangan literasi digital dan infrastruktur (terutama di daerah terpencil), ketidakpahaman prosedur dan perbedaan data (seperti nama yang tidak sinkron), kurangnya	• Peningkatan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. • Peningkatan infrastruktur dan pelatihan digital bagi masyarakat.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						sosialisasi kebijakan baru, serta kendala pemahaman formulir yang sering di salah isi oleh warga, yang semuanya menghambat pelayanan publik yang efektif dan akurat.	• Penyederhanaan prosedur dan standarisasi data.
		2.3	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	Minimnya kesadaran publik akan pentingnya administrasi kependudukan, persepsi dangkal (hanya administrasi),hingga ket erbatasan sumber daya untuk sosialisasi, sehingga perlu sinergi program seperti kampanye publik, pelatihan SDM, dan penyediaan akses mudah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	• Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan bagi petugas layanan masyarakat (pemerintah & relawan). • Kampanye Publik: Sosialisasi masif lewat media dan kegiatan langsung tentang pentingnya dokumen kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, Perkawinan). • Sinergi Program: Mengintegrasikan program pemerintah (Dukcapil, BKKBN) dengan program lembaga non-pemerintah (LSM, tokoh agama/ masyarakat)

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							Inovasi Akses: "Jemput bola" (jemput bola), layanan digital, dan pembentukan SOP khusus isu daerah
	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					
		3.1	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	Kendala SDM (kurang kompeten, tidak terbiasa teknologi), infrastruktur & teknologi (akses internet terbatas, SIAK belum optimal), regulasi & koordinasi (pelimpahan kewenangan tidak jelas antar daerah),serta kesadaranmasyarakat (rendah, sering salah data/nama), yang menghambat pelayanan publik profesional dan pendataan akurat, meski tujuannya untuk memenuhi hak penduduk dan mendukung pembangunan.	• Pelatihan penggunaan SIAK dan teknik entri data yang akurat. • Peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan profesional. • Peningkatan kesadaran penduduk melalui sosialisasi
Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan adminduk serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan	**Program Pencatatan Sipil**			100 %	100 %		
	1	Pelayanan Pencatatan Sipil		100 %	100 %		
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Meliputi kesadaran masyarakat rendah (terutama pelaporan kematian), kendala aksesibilitas (lokasi jauh, transportasi), kendala	Peningkatan Sosialisasi & Edukasi : Memberikan informasi yang mudah diakses tentang pentingnya

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						teknis & SDM (infrastruktur IT belum merata, birokrasi kaku), informasi kurang (sosialisasi lemah), serta data tidak akurat/ inkonsisten akibat kurangnya kesadaran dan perbedaan input data di masa lalu, yang berdampak pada pelayanan publik lainnya	dokumen dan prosedur. Peningkatan Aksesibilitas: Menerapkan layanan *online*, mobil keliling, atau petugas di tingkat desa/ kelurahan. Reformasi Birokrasi & Teknologi : Mempercepat proses, menyederhanakan persyaratan, dan meningkatkan infrastruktur IT. Integrasi Data: Memastikan konsistensi data antar-lembaga
Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data di lingkungan OPD Provsu dan Lembaga Pengguna untuk layanan publik berbasis NIK serta koordinasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terkait data kependudukan yang akurat dan terpadu.	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						
	1		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
		1.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	sinkronisasi regulasi dan kewenangan antara pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur IT, tantangan kualitas dan keakuratan data, kesenjangan literasi digital masyarakat, serta kebutuhan koordinasi	Digitalisasi menyeluruh (dari perencanaan berbasis data hingga pelaporan elektronik), standardisasi proses (perencanaan, pelaksanaan,

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						lintas lembaga untuk pemanfaatan data yang optimal, sehingga implementasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan menjadi tidak efektif dan data kependudukan rentan tidak sinkron atau bahkan tidak akurat.	pemantauan, evaluasi pengendalian), penguatan SDM dan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektoral dan publik untuk memastikan integrasi data dan layanan yang efisien, akurat, serta menjangkau seluruh masyarakat, bahkan di daerah terpencil. Ini melibatkan perumusan kebijakan teknis, pengembangan aplikasi SIADK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), dan pemanfaatan big data untuk pembangunan.
	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					
		2.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	Meliputi kendala Infrastruktur teknologi (sinyal, server sering down), SDM (kurang kompeten/jumlah), sosialisasi dan literasi digital masyarakat, birokrasi dan SDM yang kaku, masalah data (duplikasi, perbedaan nama/ elemen data), aksesibilitas	Peningkatan infrastruktur dan jaringan internet. Pelatihan teknis dan pengembangan SDM. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi yang lebih masif. Peningkatan kesejahteraan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						geografis (jarak jauh), hingga koordinasi antar instansi yang belum optimal, yang semuanya menghambat pelayanan publik yang cepat, tepat, dan merata, khususnya bagi warga di daerah terpencil atau rentan	pegawai untuk dedikasi lebih. Pendekatan partisipatif dan door-to-door untuk menjangkau kelompok rentan
		2.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyebaran disinformasi /hoaks, kesenjangan akses digital, hambatan bahasa dan budaya, minimnya literasi digital, serta kurangnya kepercayaan dan relevansi pesan, yang semuanya bisa merusak reputasi dan menghambat tujuan strategis, membutuhkan strategi KIE yang proaktif, adaptif, dan berbasis data untuk membangun pemahaman serta kepercayaan publik	Komunikasi Proaktif: Bangun *counter-narrative* berbasis bukti dan klarifikasi cepat untuk melawan hoaks. Literasi Digital & Kebijakan: Tingkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memfilter informasi. Pemanfaatan Multi-Channel: Gunakan berbagai media (konvensional dan digital) agar pesan menjangkau beragam audiens. Transparansi & Konsistensi: Sampaikan informasi yang optimis, jernih, dan teratur untuk membangun kepercayaan. Pendekatan Inklusif: Jembatani visi

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							pemerintah dengan aspirasi rakyat, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
		2.3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	Ketidakakuratan data (data ganda, anomali, dan perbedaan data antar instansi), disintegrasi data antar lembaga, kesadaran masyarakat rendah (terkait pelaporan peristiwa penting dan administrasi), keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pemahaman SDM, serta kendala regulasi dan kerjasama antar-instansi, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, meskipun ada upaya menuju *single identity number* dan digitalisas	Pembersihan data (data *cleansing*) secara berkala. Penyediaan portal pengaduan dan *help desk* untuk fasilitasi data. Peningkatan pelatihan SDM di bidang TIK. Perlu adanya edukasi dan pendampingan langsung ke masyarakat
		2.4	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	Meliputi birokrasi berbelit, infrastruktur digital terbatas, SDM kurang kompeten, data ganda/anomali, pungutan liar (calo), syarat tambahan,	Penyusunan Regulasi: Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Adminduk.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						lambatnya pencetakan e-KTP, dan kurangnya pemanfaatan data, yang menyebabkan pelayanan tidak optimal dan menimbulkan keluhan masyarakat, sementara solusi meliputi perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, pembersihan data, transparansi, serta inovasi pelayanan seperti "Dukcapil Menyapa Masyarakat".	Peningkatan Infrastruktur: Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Manajemen Data: Melakukan pembersihan data ganda dan anomali secara terstruktur. Penguatan Keamanan: Memperkuat sistem keamanan perangkat lunak. Peningkatan SDM: Pelatihan keterampilan pelayanan, komunikasi, dan manajemen emosi petugas. Inovasi Pelayanan: Menerapkan sistem digital dan program seperti "Dukcapil Menyapa Masyarakat" (DMM) untuk menjaring keluhan. Transparansi: Menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		100 %	100 %		
		4.1	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	meliputi belum optimalnya integrasi database (data ganda/anomali), kelemahan infrastruktur IT, SDM yang belum memadai (kompetensi & jumlah), lemahnya keamanan sistem, kurangnya peraturan turunan UU, dan tantangan pengawasan di daerah karena tumpang tindih kewenangan, yang menyebabkan data tidak akurat dan pemanfaatan data untuk pembangunan terhambat	Penyusunan segera peraturan turunan UU agar ada kejelasan operasional. Peningkatan sarana prasarana TIK dan penguatan keamanan sistem. Penyelesaian masalah data anomali dan ganda secara terstruktur. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN terkait administrasi kependudukan. Pembinaan dan koordinasi yang efektif antara pusat, provinsi, dan kab/ kota.
		4.2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukandan Pendayagunaan Data Kependudukan	33 Org	33 Org	SDM kurang kompeten, infrastruktur teknologi & jaringan data terbatas (terutama di daerah), minimnya pengembangan kompetensi pengelola, keselarasan RPJMD belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat digital, dan	Berfokus pada peningkatan kualitas SDM Dukcapil (operator kec/desa), optimalisasi sistem SIAK & IKD, pemanfaatan data untuk kebijakan publik, dan pelayanan prima

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						tumpang tindih kewenangan pengawasan, sehingga data tidak optimal dimanfaatkan untuk kebijakan publik	bebas pungli, melalui materi pelatihan seperti pengelolaan database, penanganan masalah umum, dan inovasi digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Meningkatkan kualitas dan kuantitas data kependudukan skala provinsi untuk semua keperluan berbasis NIK	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**			100 %	100 %		
	1	Penyediaan Profil Kependudukan		100 %	100 %		
		1.1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Keterbatasan infrastruktur digital & literasi masyarakat di daerah terpencil, SDM & kompetensi pengelola SIAK yang kurang, sinkronisasi data antar daerah & sumber data (provinsi vs kab/kota), minimnya kesadaran masyarakat akan akurasi data, kesenjangan kewenangan & supervisi provinsi, serta tantangan kualitas data seperti data ganda dan rendahnya aktivasi layanan digital (IKD), yang berakar pada dinamika penduduk seperti pertumbuhan dan mobilitas tinggi.	Integrasi data Dukcapil, pemanfaatan teknologi digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan SPBE, serta strategi jemput bola untuk daerah sulit, didukung regulasi yang jelas, koordinasi antar sektor, dan SDM mumpuni, untuk memastikan data akurat sebagai dasar pembangunan dan layanan publik yang efisien

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	2 Dokumen	2 Dokumen	Kualitas dan kelengkapan data (ketidakdisiplinan pelaporan, data lintas sektor belum terintegrasi), tantangan dinamika penduduk (pertumbuhan tinggi, persebaran tidak merata, usia produktif tinggi), serta kesenjangan kualitas layanan (pendidikan, kesehatan, pengangguran) yang berdampak pada perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang tidak tepat.	melibatkan penguatan sistem data kependudukan terintegrasi (e-Walidata), penerapan regulasi yang jelas (Permendagri), koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan metode demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi) untuk prediksi, guna mendukung perencanaan pembangunan (pendidikan, kesehatan, layanan sosial) dan memastikan keabsahan identitas warga melalui dokumen kependudukan yang akurat, sesuai dengan amanat UU

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merujuk kepada kewajiban pemerintah dalam menangani isu-isu terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa	63 Poin	63,73 Poin
		Persentase Desa Mandiri	8,44%	6,72 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Indeks Desa sesuai target perubahan RKPD 2025 sebesar 63 poin dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 63,73 dan persentase capaian 79,62 dengan predikat capaian tinggi.

Persentase Desa Mandiri sesuai taeget perubahan RKPD 2025 sebesar 8,44% dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 6,72 dan persentase capaian 101,25 dengan predikat sangat tinggi.

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah posisi kunci yang memastikan administrasi desa berjalan efektif dan efisien, meliputi perencanaan, pencatatan data, pengelolaan keuangan, kearsipan (umum, penduduk, keuangan, pembangunan), serta pelayanan publik terkait surat-surat desa (KTP, KK, domisili), dengan tujuan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel sesuai peraturan seperti Permendagri. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan, yakni : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Keluarahan, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis, Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.

Adapun bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyelenggaraan perlombaan untuk tingkat Provinsi, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, pemberian bantuan hibah, pembinaan dan pengawasan serta pelatihan.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan analisis untuk mencapai target kinerja indikator Persentase LKD dan LAD aktif dengan target 17,54%, realisasi sebesar 16,38% dengan capaian 93,38%. Target yang direncanakan dapat tercapai, dimana capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasiltasi Tim Penggerak PKK dalam Menyelnggrakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Penyelenggaraan kegiatan yaitu dalam bentuk pembinaan dan perlombaan. Tercapaianya target kinerja dari program ini juga tidak lepas dari dukungan kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap 3 kali dalam setahun di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam penyelenggaraan kegitan tersebut juga merupakan kegiatan yang bersifat crosscutting di beberapa OPD Provinsi Sumatera Utara, yaitu; Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Ketahanan pangan dan Holtikultura.

3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Berdasarkan analisis untuk mencapai target kinerja indikator Jumlah Desa Mandiri dengan target 40 desa, realisasi 168 desa dengan capaian lebih dari 100%. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu : Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, dimana kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi pembentukan kawasan perdesaan dan adanya pembinaan dalam pembentukan Badan Usahan Desa milik Bersama (BUMDesma).

Untuk pencapaian target kinerja Jumlah Desa Mandiri tidak lepas dari adanya kerjasama lintas OPD. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Indikator Indeks Desa Membangun dan Jumlah Desa Mandiri merupakan indikator yang saling terikat, karena Indeks Desa Membangun

memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Identifikasi Kebutuhan Menganalisis potensi, masalah, dan kebutuhan bersama antar desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Tabel 3.31
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kawasan perdesaan	**Program Penataan Desa**			100 %	100 %		
	1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		100 %	100 %		
		1.1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Mencakup SDM aparatur yang rendah (pendidikan, profesionalisme), sinkronisasi kebijakan yang lambat, keterlambatan informasi pusat ke daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana-prasarana, serta administrasi dan manajemen yang belum optimal, yang menghambat penyesuaian APBDesa, perencanaan, dan pembangunan desa secara menyeluruh dan tepat waktu	penguatan SDM perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan administrasi dan sistem pelayanan, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi, didukung pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan inovasi teknologi, dan pendampingan ahli untuk mendorong partisipasi masyarakat, mengelola sumber daya, dan mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan merata.
Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kawasan perdesaan	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**			100 %	100 %		
	1	Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi		100 %	100 %		
		1.1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kendala regulasi yang belum optimal, keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya sinergi antar SKPD, SDM desa yang	Peningkatan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						belum memadai, dan kesenjangan pemahaman antar desa, meskipun sudah diatur dalam UU Desa (UU 6/2014) untuk pengembangan bersama, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat lintas batas wilayah, sehingga perlu reformasi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai agar kerja sama ini efektif mewujudkan kesejahteraan desa	program pemberdayaan desa. Penyelarasan program dan kegiatan antar dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan kapasitas SDM aparatur desa. Reformulasi kebijakan untuk memperkuat kerja sama strategis antar desa sebagai prioritas pembangunan kawasan pedesaan
		1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	2 Dokumen	SDM terbatas (kurang paham tugas, SDM rendah), koordinasi lemah antar-sektor dan daerah, infrastruktur kurang memadai (aksesibilitas, sarana prasarana), akses terbatas ke pelayanan dasar, modal, dan pasar, serta lemahnya kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat, yang semuanya menyebabkan pemanfaatan sumber daya tidak efektif dan kesenjangan pembangunan.	Penguatan Kapasitas: Pelatihan dan koordinasi intensif untuk aparatur desa. Sinergi Lintas Sektor: Intensifikasi koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral. Pemanfaatan Potensi: Mengoptimalkan sumber daya dan sarana prasarana untuk pemberdayaan. Pengembangan Ekonomi Lokal: Meningkatkan akses modal dan pendampingan usaha UMKM. Peningkatan Pelayanan: Memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			100 %	100 %		
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100 %	100 %		
		1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	keterbatasan SDM, pemahaman tugas dan fungsi yang kurang, pelayanan publik belum optimal, administrasi desa belum maksimal, serta kurangnya pembinaan dan koordinasi terpadu antar SKPD, yang menyebabkan dampak positif lomba tidak berkelanjutan, sehingga perlu penguatan SDM, regulasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat agar evaluasi lebih substantif dan memicu perkembangan desa secara merata, bukan sekadar pencapaian administratif.	Penguatan SDM: Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang relevan. Koordinasi dan Pembinaan Terpadu: SKPD Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan pembinaan terstruktur dan berkelanjutan. Model Pembinaan Berbasis Stimulan : Memberikan prioritas program pembangunan dan pemberdayaan bagi desa peserta lomba. Perluasan Indikator Evaluasi: Menambah indikator penilaian yang lebih komprehensif terkait dampak program dan kemandirian desa. Pemanfaatan Teknologi: Mengoptimalkan sistem informasi desa untuk administrasi dan pelayanan. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong peran aktif warga dalam perencanaan dan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							pelaksanaan pembangunan
		1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	keterbatasan SDM dan kapasitas aparatur, infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai (kantor, teknologi), kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, tantangan data yang dinamis (pertumbuhan penduduk, migrasi), serta lemahnya sistem administrasi dan pengarsipan, yang semuanya menghambat pendataan, penyusunan, dan pemanfaatan data profil desa secara optimal untuk pembanguna	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan rutin. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Koordinasi intensif antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Prodeskel (berbasis Permendagri No. 12 Tahun 2007) secara berkelanjutan
		1.3	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Orang	Orang	Meliputi Kompetensi Rendah (pengetahuan administrasi, keuangan, regulasi), kurangnya pelatihan dan pendampingan efektif (terbatasnya SDM pendamping, wilayah kerja luas), keterbatasan SDM dan sarana (sumber daya manusia terbatas, sarana penunjang minim, insentif rendah), dan tantangan integritas serta transparansi (potensi penyalahgunaan wewenang dan dana desa).	Peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan yang lebih terfokus. Penambahan SDM pendamping desa atau penyesuaian wilayah pendampingan. Peningkatan kesejahteraan aparatur (insentif memadai). Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						Ini menyebabkan pelayanan masyarakat belum optimal, administrasi desa belum mandiri, dan implementasi program desa terhambat.	
		1.4	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2 Dokumen	2 Dokumen	Kapasitas SDM desa yang terbatas (pendidikan rendah, minim keterampilan), birokrasi rumit (proses pengajuan/pencairan lambat), pengawasan belum optimal (rentan penyalahgunaan dana), keterbatasan regulasi desa, aparatur desa belum profesional, akses informasi minim, serta tantangan eksternal seperti migrasi dan kebencanaan, yang semuanya menghambat efektivisi bantuan dan pembangunan desa	Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan berkelanjutan untuk aparatur desa di bidang pengelolaan keuangan, administrasi, dan perencanaan. Penyederhanaan Birokrasi: Mempercepat proses pencairan dan penggunaan dana desa. Penguatan Pengawasan: Melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pengawasan. Digitalisasi dan Modernisasi: Pemanfaatan teknologi untuk administrasi dan pelaporan yang lebih efisien. Peningkatan Kualitas Pendampingan: Memastikan pendamping desa memiliki kompetensi yang memadai.
		1.5	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Kurangnya SDM berkualitas, konflik kepentingan, lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan, minimnya pemahaman	Peningkatan Kapasitas: Pelatihan reguler bagi pengurus dan pengawas BUMDes di tingkat kabupaten/kota.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						regulasi, dan pengawasan yang tidak efektif (baik internal maupun eksternal), yang berdampak pada lemahnya tata kelola, transparansi, dan kinerja BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian desa, meskipun regulasi seperti PP No. 11 Tahun 2021 sudah ada untuk mengaturnya.	Pendampingan Intensif: Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas terkait (DPMD) perlu lebih aktif mendampingi penyusunan regulasi desa dan tata kelola BUMDes. Penguatan Peran Pengawas: BPD dan pengawas internal perlu diperkuat kompetensinya untuk melakukan pengawasan substantif, bukan hanya administratif. Transparansi & Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterbukaan informasi dan laporan BUMDes kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa. Pembinaan LKAD: Pemerintah kabupaten/kota perlu membina dan memfasilitasi LKAD untuk menciptakan sinergi antar desa yang lebih kuat.
		1.6	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Meliputi kurangnya kepastian hukum, sengketa kepentingan (adat vs. pemerintah, sumber daya	Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						alam), ketidaktegasan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, perbedaan persepsi batas, serta kendala teknis dan yuridis yang membuat proses berlarut-larut, seperti disampaikan Ombudsman RI dalam kajian sistemik terkait implementasi *One Map Policy*, menghambat tertib administrasi dan pelayanan publik.	Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Penyusunan pedoman pendanaan dan pola kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan geospasial) yang kompeten. Penerapan pendekatan sosio-emosional dan penyelesaian yang melibatkan unsur budaya serta ada
Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			100 %	100 %		
	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota		300 LPM Aktif	300 LPM Aktif		
		1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	Kurang optimalnya alokasi dan pelaksanaan program karena keterbatasan anggaran dan koordinasi, tantangan SDM (pengalaman, keterampilan), rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta hambatan sosial-budaya, yang memerlukan peningkatan sinergi antar-SKPD, dukungan anggaran memadai,	Penguatan Anggaran dan Program: Menyediakan anggaran yang memadai dan memastikan program langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						peningkatan kapasitas kader, dan strategi pemberdayaan yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lokal.	pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan pengurus/kader. Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat sinergi antar Dinas/SKPD terkait di berbagai tingkatan (Provinsi, Kabupaten, Desa). Pendekatan Partisipatif: Menggerakkan gotong royong, mengembangkan UMKM, serta mengintegrasikan program dengan potensi ekonomi lokal (ekonomi kreatif, agrowisata). Pendekatan Kontekstual: Mempertimbangkan karakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat dalam merancang program. Sinergi dengan Kepala Desa: Memperjelas tupoksi Kepala Desa dalam memimpin pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Peraturan: Mengacu pada regulasi terkait (misal Permendagri 18/2018) untuk

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							memperjelas posisi dan fungsi lembaga.
		1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	600 Lembaga	600 Lembaga	Keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kurangnya sinergi dan koordinasi antarlembaga serta pemerintah, kapasitas SDM yang rendah (pelatihan, profesionalisme), belum optimalnya partisipasi masyarakat, kesenjangan regulasi (Permendagri 18/2018), serta tantangan dalam pembinaan dan pendampingan dari instansi terkait, sehingga program pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya efektif mencapai kesejahteraan dan pelayanan publik yang optimal.	Peningkatan anggaran dan pendampingan intensif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Program penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan terpadu. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi program di tingkat kab/kota dan provinsi. Pengembangan model pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk setiap jenis kelembagaan.
		1.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Unit	20 Unit	Seringkali berkutat pada keterbatasan anggaran desa, kurangnya regulasi/pedoman teknis yang spesifik, koordinasi antar lembaga yang lemah, keterbatasan SDM pengelola, dan tantangan administrasi pertanggungjawaban, mengakibatkan sarana tidak memadai, program tidak optimal, hingga kurangnya kepemilikan dan keberlanjutan fasilitas	Meningkatkan alokasi dana desa melalui skala prioritas. Penyusunan regulasi teknis yang lebih spesifik di tingkat kab/kota. Peningkatan kapasitas pengelola (pelatihan manajemen). Sinergi program antara desa, DPMD, dan lintas sektor. Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pengadaan sarana

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.4	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Meliputi SDM yang kurang terlatih, keterbatasan pendanaan, infrastruktur pendukung yang minim (listrik, internet), kurangnya sosialisasidan pendampingan berkelanjutan, serta kesenjangan antara teknologi yang diterapkan dengan kebutuhan riil masyarakat, yang seringkali memperlambat adopsi TTG meski tujuannya untuk efisiensi dan kemandirian desa	Peningkatan pelatihan dan pendampingan intensif untuk perangkat desa dan masyarakat. Penguatan infrastruktur digital dan energi di pedesaan. Menciptakan program TTG yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal. Penguatan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
		1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	Meliputi SDM yang kurang terlatih dan berpengetahuan, sarana prasarana yang minim, partisipasi masyarakat yang menurun (terutama generasi muda karena dianggap kurang relevan), serta kurangnya pemahaman tentang organisasi dan program PKK, yang mengakibatkan lambatnya penerimaan inovasi dan rendahnya semangat gotong royong. Selain itu, kendala internal seperti kurangnya pengelolaan program dan dokumentasi juga menjadi tantangan besar, meskipun koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali sudah cukup baik.	Peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan rutin dan berkelanjutan. Pengembangan materi pelatihan yang lebih relevan bagi generasi muda. Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan data dan komunikasi. Peningkatan sinergi antara Tim Penggerak PKK, pemerintah, dan stakeholder lainnya untuk dukungan fasilitas dan sumber daya

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merujuk kepada kewajiban pemerintah daerah dalam menangani isu-isu terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	60,2	61,34	62,9

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu

Tahun 2024 capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Sumatera Utara mencapai 62,9, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 60,20. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga yang mencakup aspek ketenteraman, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga.

Capaian tersebut mencerminkan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat fungsi keluarga melalui pelaksanaan program pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan, serta pemberdayaan keluarga sebagai unit dasar pembangunan sumber daya manusia.

Meskipun capaian iBangga Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah capaian nasional sebesar 67,3, tren peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan secara positif. Kedepan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor dan peningkatan efektivitas program pembangunan keluarga guna mempercepat peningkatan capaian iBangga dan mendekati capaian nasional.

Tabel 3.33
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Meningkatkan Advokasi pada stakeholder dalam upaya Pengendalian Penduduk. 2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pengendalian penduduk.	**Program Pengendalian Penduduk**						
	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
		1.1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	3 laporan	3 laporan	Sekolah SMA dan SMK Negeri yang telah mendapatkan fasilitasi Implementasi SSK, belum optimal mengembangkan SSK	Perlu penguatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, serta peningkatan kemampuan guru dalam menyusun materi KKBP dalam mata ajar
		1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	Masih terdapat 5 Kab/Kota yang belum menetapkan GDPK (Toba, Batubara, Nias Barat, Nias dan Batu Bara)	Meningkatkan advokasi kepada Pemda Kab/Kota untuk percepatan penyusunan GDPK dan PJPK
		1.3	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	1 daerah	1 daerah	Masih terdapat Kab/Kota dengan berpersentasi Kampung KB Mandiri Plus dibawah 50%	Memperkuat advokasi ke Pemda Kab/Kota untuk peningkatan kualitas Kampung KB
	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					
		2.1	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum 100% Kab/Kota dapat mengisi data yang diminta pada setiap tabel di Profil Bangga Kencana	Penguatan pencatatan dan pelaporan Kab/Kota pada aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus kepada segmetasi sasaran	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**						
	1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
		1.1	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	3 dokumen	1 dokumen	Belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh kabupaten/kota. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dan belum terintegrasinya layanan rujukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada keluarga sasaran	
		1.2	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	7 daerah	7 daerah	- Penyelenggaraan Advokasi dan KIE Program Keluarga Berencana sangat terbatas (masih banyak pemahaman masyarakat dan - Data/informasi yang berbasis teknologi informasi kurang tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik - Anggaran untuk melakukan penguatan, peningkatan, pengembangan strategi dan pembinaan program KB sangat terbatas	- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi di setiap tingkatan wilayah - Mengembangkan dan menguatkan jejaring kemitraan dalam program KB secara kompherensif - Meningkatkan advokasi dan KIE sesuai karakteristik budaya dan segmentasi sasaran - Melakukan grouping (pengelompokan) pelaksanaan kegiatan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
		2.1	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	5 organisasi	5 organisasi	- Kolaborasi dengan mitra kerja belum optimal - Data/informasi yang berbasis teknologi informasi kurang tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik - Anggaran untuk melakukan penguatan jejaring kemitraan, peningkatan, pengembangan strategi dan pembinaan program KB sangat terbatas	- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi di setiap tingkatan wilayah - Mengembangkan dan menguatkan jejaring kemitraan dalam program KB secara kompherensif - Melakukan grouping (pengelompokan) pelaksanaan kegiatan
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**						
	1						
		1.1	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	3 Kelompok	1 Kelompok	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe) di Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui pembinaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota. Namun demikian, capaian kinerja belum sepenuhnya merata, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses dan kapasitas kelembagaan. Hal ini berdampak pada	melakukan penguatan peran pembinaan dan monitoring terhadap kabupaten/kota, serta mendorong perluasan metode sosialisasi berbasis sekolah, komunitas, dan media digital. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan layanan, kualitas pembinaan,

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						belum optimalnya peningkatan pemahaman dan partisipasi remaja dalam program GenRe secara menyeluruh	serta keseragaman pelaksanaan program GenRe di seluruh wilayah provinsi
		1.2	Advokasi, sosialisasi dan promosi indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tingkat Provinsi dan kab/Kota	2 laporan	1 laporan	kegiatan advokasi, sosialisasi, dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) telah dilaksanakan di tingkat provinsi dan kab/kota. Namun, pemanfaatan iBangga sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah masih belum optimal, terutama dalam integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	meningkatkan intensitas advokasi berbasis data kepada pemerintah kabupaten/kota serta memfasilitasi integrasi iBangga ke dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan dan analisis data iBangga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
		2.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 dokumen	1 dokumen	Belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh kabupaten/kota. Keterbatasan sumber daya manusia dan belum terintegrasinya layanan rujukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada keluarga sasaran.	Melaksanakan pembinaan dan supervisi terhadap PPKS kabupaten/kota, serta mendorong peningkatan kompetensi petugas dan penguatan jejaring layanan rujukan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							kualitas dan keterjangkauan layanan ketahanan keluarga secara berkelanjutan

15. Urusan Wajib Perhubungan

Transportasi memiliki peranan yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan. Sektor perhubungan adalah sektor yang dibutuhkan sebagai mobilitas untuk mendukung aktivitas sektor-sektor lain, seperti perdagangan, pendidikan, industri, UKM hingga pariwisata.

Peran sektor perhubungan yang sangat besar sebaiknya didukung dengan menetapkan sektor perhubungan menjadi salah satu target pada rencana kerja yang dianggarkan sepanjang tahun anggaran. Pada tahun 2025 terdapat sasaran strategis sektor perhubungan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provisu, yaitu : Meningkatnya Keselamatan, Kelancaran dan Keamanan Masyarakat Terhadap Transportasi, dengan indikator berupa :

a. Konektivitas darat;
b. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
c. Konetivitas laut; dan
d. Cakupan Perlintasan kereta api yang ditangani.

Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Perhubungan
Tahun 2024 – 2025

NO	IKK	RUMUS	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Keselamatan, Kelancaran dan Keamanan Masyarakat Terhadap Transportasi	Konektivitas Darat	75,13%	75,13%	77,06%	77,06%
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi Ideal	38,94%	38,94%	38,94%	38,94%
		Konektivitas Laut	80,00%	80,00%	84,44%	84,44%
		Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	12,5%	12,5%	25%	25%

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

1) Konektivitas Darat

Konektivitas Darat adalah kemampuan sistem transportasi darat untuk menghubungkan simpul angkutan jalan dan penyeberangan yang memungkinkan pergerakan orang, barang, dan jasa dari tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Pada konektivitas darat memiliki capaian sebesar 77,06%, cara menghitung Konektivitas Transportasi Darat (KTD) yaitu jumlah trayek yang dilayani pada provinsi eksisting dibandingkan dengan jumlah kebutuhan trayek x 100%.

Dari angka perbandingan trayek dapat diartikan bahwa :

a. Nilai trayek yang dilayani pada provinsi, berarti angkutan kabupaten/kota dalam provinsi yang melayani pengangkutan penumpang dengan lintas trayek yang melintasi provinsi.
b. Jumlah kebutuhan trayek, adalah kebutuhan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jumlah kebutuhan lintas penyeberangan.

2) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

Dalam menghitung persentase kelengkapan jalan, digunakan acuan dari Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024 - 2028, yang mengacu pada kondisi ideal di jalan Provinsi. Secara agreagat sampai dengan tahun 2025, capaian total persentase fasilitas keselamatan jalan adalah sebesar 38,94%, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Capaian Fasilitas Keselamatan Jalan sampai Tahun 2025 :

a. Guardrail : 1.260 m''
b. Delineator : 4.675 unit
c. Paku Jalan : 32.310 unit
d. Marka Jalan : 21.127 m''
e. LPJU Solar Cell : 1.093 unit
f. Zoss : 4 unit

3) Konektivitas Laut

Konektivitas Laut adalah kemampuan sistem transportasi penyeberangan danau, sungai, dan laut untuk menghubungkan wilayah yang memungkinkan pergerakan orang, barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dalam mengukur kinerja konektivitas adalah dengan menghitung jumlah trayek angkutan danau dan penyeberangan eksisting dibandingkan dengan Jumlah trayek angkutan danau dan penyeberangan x 100%. Adapun rincian capaian konetivitas laut sebesar 84,44%.

4) Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani

Sampai tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan telah membangun 2 perlintasan sebidang kereta api diruas jalan provinsi, yaitu :

a. Perlintasan sebidang D.I Panjaitan di Kota Tanjungbalai.
b. Perlintasan sebidang Air Joman I di Kabupaten Asahan.

Tabel 3.35
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatnya Pelayanan. Keselamatan, Kelancaran dan ketertiban lalu lintas	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**					**Tidak ada**	**-**
	1	Kegiatan Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 %	100 %	Tidak ada	-
		1.1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	-
		1.2	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	-
	2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		38,94 %	38,94 %		
		2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	-
		2.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	-
	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		-	-		
		3.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4 Terminal	4 Terminal	Tidak ada	-
	4	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		77,06 %	77,06 %	Tidak ada	-
		4.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	-
		4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75 %	75 %	Tidak ada	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	5		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak ada	-
		5.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	-
	Program Pengelolaan Perkeretaapian						
	1		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	25 %	25 %	Tidak ada	-
		1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	-
	Program Pengelolaan Pelayaran						
	1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	84,44 %	84,44 %	Tidak ada	-
		1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Trayek	1 Trayek	Tidak ada	-
	2		**Kegiatan Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	1 Trayek	1 Trayek	Tidak ada	-
		2.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	-

16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks SPBE	3,89	3,91	103 %
	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	50	72,07	Merupakan capaian tahun 2024, untuk capaian tahun 2025 pelaksanaa pengukurannya ditahun 2026
	Indeks Pembangunan Informasi dan Komunikasi	6	6,02	Merupakan Data capaian tahun 2024, capaian tahun 2025 menunggu data dari BPS

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika memiliki 2 program utama, yaitu :

1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Hasil ini menunjukkan bahwa target sepenuhnya tercapai, pencapaian sebesar 3,91 mengindikasikan kemajuan yang cukup signifikan dalam implementasi SPBE. Capaian ini mencerminkan bahwa berbagai inisiatif digitalisasi dalam pemerintahan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun proses pemantauan dan evaluasi SPBE dimulai dengan tahapan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal Pemprovsu.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mempunyai sasaran strategis Terwujudnya Layanan Publik Berbasis Digital dengan Indikator Kinerja Utama Indeks SPBE dengan realisasi capaiannya sebesar 3,91 dari target sebesar 3,89, dengan kategori Sangat Baik., Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah masih menggunakan capaian tahun 2025 sebesae 72,07, sedangkan capaian Tahun 2025 pelaksanaan pengukurannya dimulai di tahun 2026 begitu juga dengan Indikator pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi masih menggunakan capaian tahun 2024, belum ada data publish dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan program yang mendukung Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pengelolaan Informasi. Capaian kinerja untuk Program pengelolaan Informasi Publik berdasarkan penilaian dari Kementerian Komdigi Republik Indonesia adalah Indeks pengelolaan Informasi Publik dengan target 76 % realisasi capaiannya 85,91% (nilai gabungan terdiri dari nilai Dimensi Input : 100; Dimensi Proses: 99,47; Dimensi Output: 75,14 dan Dimensi Outcome : 69,66), dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian target indikator kinerja utama ini diperoleh melalui dukungan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 3.37
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Peningkatan Pemanfaatan Inftrastruktur TIK	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**			100 %	98,41%	- Masih rendahnya SDM ASN dibidang TIK - Belum optimal Infrastruktur TIK	- Adanya Pelatihan, Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas SDM - Pengembangan Infrastruktur TIK
	1	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		100 %	98,41%		
		1.1	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.2	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
		1.3	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.4	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah		
Peningkatan diseminasi Informasi dan keterbukaan informasi Publik	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**			100%	97,40%	- Penyebaran Informasi dan Komunikasi yang belum merata - Sumber daya dan sarana prasarana komunikasi Publik yang belum merata	- Koordinasi lintas sektor kabupaten/kota - Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana komunikasi Publik
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		100 %	97,40%		
		1.1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	36 Dokumen		
		1.2	Penyusunan Konten	200 Konten	200 Konten		
		1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Laporan	12 Laporan		
		1.4	Pelayanan Informasi Publik	6 Permohonan	6 Permohonan		
		1.5	Relasi Media	12 Laporan	12 Laporan		
		1.6	Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12 Laporan	12 Laporan		
		1.7	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		

17. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 diperoleh melalui evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian target. Secara umum perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.38
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu Tahun 2025

Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,79%	1,84%	232,91%
Meningkatnya Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	46,51%	46,51%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM

diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, tangguh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Hasil dari upaya - upaya pemberdayaan yang telah dilakukan dapat dilihat dari data koperasi dan UMKM.

Tabel 3.39
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian	Keadaan	
		2024	2025
1	Jumlah Koperasi	13.599	17.667
	Aktif	5.567	12.027
	Tidak Aktif	8.032	5.640
2	Anggota	1.503.655	1.497.958
3	RAT	1.584	1.586
4	Manajer	240	213
5	Karyawan	5.366	5.550
6	Modal Sendiri	6.328.928.126.175	7.357.592.154.244
7	Modal Luar	3.615.430.165.101	4.272.885.600.975
8	Volume Usaha	5.953.202.341.388	6.285.189.252.777
9	SHU (Rp.)	297.828.753.821	373.550.579.244

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 29,91%, demikian juga dengan jumlah koperasi aktif yang meningkat 116,04%. Koperasi tidak aktif mengalami penurunan sebesar 29,78%. Perubahan yang cukup drastis di indikator jumlah koperasi, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif disebabkan oleh penambahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang cukup besar.

Indikator kelembagaan yang lain juga mengalami perubahan seperti jumlah anggota yang menurun sebesar 0,37%, pelaksanaan RAT mengalami kenaikan sebesar 0,12%, jumlah manajer menurun 12,67% dan karyawan meningkat sebesar 3,42%. Indikator keuangan juga mengalami peningkatan seperti modal sendiri sebesar 16.25%, modal luar meningkat 18,18%, volume usaha sebesar 5,57%, dan Sisa Hasil Usaha yang menurun sebesar 25,42%.

Keragaan koperasi menggambarkan pertumbuhan koperasi yang cukup baik dari semua segi jumlah, indikator kelembagaan dan indikator keuangan namun mengalami penurunan di jumlah anggota dan manajer. Kondisi ini disebabkan oleh telah diusulkannya pembubaran 4.675 koperasi sehingga telah dikeluarkan dari pendataan,

Tabel 3.40
Jumlah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara

Sektor	Jumlah (unit)	
	2024	2025
Jumlah UMKM	1.713.356	1.714.156
Jumlah Usaha Mikro	1.706.846	1.706.947
Jumlah Usaha Kecil	5.825	6.525
Jumlah Usaha Menengah	684	684

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu

Data UMKM yang awalnya sebesar 1.713.356 unit pada Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,046 persen pada Tahun 2025. Pertumbuhan ini merupakan usaha yang tumbuh melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam Fastrack Young Preneur (FYP). Namun dibalik peningkatan kuantitas UMKM tersebut, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. UMKM juga masih didominasi oleh pelaku usaha yang terbatas kemampuannya sehingga secara umum UMKM belum memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi. Tantangan eksternal juga semakin besar seperti persaingan dengan produk – produk luar negeri melalui pasar online.

Untuk terus memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun program - program yang menampung aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Program – program ini disusun sebagai rangkaian konsep pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Berikut realisasi dan evaluasi pelaksanaan program – program tersebut :

Tabel 3.41
Capaian Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Meningkatkan pemahaman pengurus/pengawas/ anggota koperasi terhadap peraturan yang berlaku serta pengawasannya	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**		0,79%	1,84%	Banyaknya koperasi bermasalah	Perlunya Peningkatan Kesehatan Koperasi Melalui peningkatan pemahaman peraturan perkoperasian dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi
	1	Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	0,79%	1,84%		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		0,79%	1,84%	1. Rendahnya profesionalisme pengurus 2. Lemahnya instrument manajemen 3. Rendahnya kewirausahaan koperasi 4. Minimnya inovasi dan terobosan di era yang terus berkembang	Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan SDM pengurus, memperkuat instrument manajemen, menumbuhkan kewirausahaan dan merangsang tumbuhnya inovasi
	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi	0,79%	1,84%		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		46,51%	46,51%	1. Akses pasar UMKM masih rendah. 2. Sebagian besar UMKM belum mampu masuk ke pasar digital. 3. Sebagian besar kualitas produk – produk UMKM masih rendah. 4. Masih rendahnya semangat wirausaha	Mengembangkan jejaring kemitraan. Melatih UMKM agar siap masuk ke pasar digital. Meningkatkan kualitas produk – produk KUMKM. Menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan pemuda/i, mahasiswa melalui pelatihan dan bimbingan teknis
	1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	46,51%	46,51%		
	Program Pengembangan UMKM		46,51%	46,51%		
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	46,51%	46,51%		

18. Urusan Wajib Penanaman Modal

Capaian Kinerja pada Urusan Wajib Penanaman Modal tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Penanaman Modal
Tahun 2025

No	Indikator	Baseline 2024	Target	Realisasi	Persentase capaian	Predikat
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	28,65	29,70	27,21	91,61%	Sangat Tinggi
2	Persentase peningkatan Investasi	23,61	25,00	21,25	85%	Tinggi

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provsu

Distribusi PDRB ADHB tahun 2025 bahwa PMTB sebesar Rp. 336.386,57 Milyar dengan nilai PDRB sebesar Rp. 1.236.193,57 Milyar. Sehingga distribusi PMTB thp PDRB sebesar 27,21%.

Data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI. Realisasi investasi yang sudah dicapai sampai Desember senilai Rp. 58,53 Triliun (109,05%) dari total target tahun 2025 senilai 53,67 Triliun

Secara umum, perbandingan antara kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja menunjukkan adanya variasi signifikan di berbagai program hingga Triwulan IV menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja (dalam persentase capaian). Program dengan capaian kinerja sangat tinggi (mendekati target) yang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik hingga Triwulan IV yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan capaian kinerja mencapai 100,95% di triwulan IV. Program ini hampir tuntas dalam capaian kinerja yang menunjukkan dukungan administrasi dan operasional dinas berjalan sangat efektif.

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian kinerja mencapai 136,5% di triwulan IV. Kinerja pelayanan ini sangat tinggi, menandakan mayoritas target layanan perizinan dan non perizinan telah terpenuhi. Program Promosi Penanaman Modal realisasi kinerja mencapai 125% di triwulan IV. Untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi kinerja mencapai 190,5% di triwulan IV. Capaian ini progresif dan baik, menunjukkan kegiatan pengawasan dan evaluasi investasi berjalan secara aktif.

Tabel 3.43
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Penanaman Modal Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Kebijakan Peningkatan Realisasi Investasi melalui promosi dengan menyiapkan materi promosi dalam bentuk media cetak/ audio visual yang efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		100 %	100 %		
	1	Penyusunan peta potensi investasi provinsi	100 %	100 %	-	-
Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan melakukan penyederhanaan proses perizinan melalui OSS RBA	**Program Promosi Penanaman Modal**					
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100 %	125 %	-	-
Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	**Program Pelayanan Modal**					
	1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	136,5 %		
	2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	-	-
Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**					
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100 %	190,5 %	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			100,95 %		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	125 %	-	-
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	0 Orang	Adanya keterbatasan biaya untuk Pelaksanaan kegiatan	Pelatihan dan pendidikan bagi ASN menjadi prioritas DPMPTSP di tahun 2026 untuk peningkatan kapasitas sebagai bagian peningkatan pelayanan publik dibidang penanaman Modal dan PTSP
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	108 %	-	-

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum capaian dan target kinerja Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga, tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.44
Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Provsu
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	2025	
		Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas dan daya saing pemuda melalui penguatan pembangunan lintas bidang kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58,50 point	59,33 Poin*
Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam aktivitas olahraga secara rutin dan berkelanjutan guna meningkatkan derajatkebugaran jasmani dan kualitas hidup	Indeks Partisipasi Olahraga	0,275 %	0,236%*

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu
Keterangan : Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Partisipasi Olahraga tahun 2025 masih menunggu rilis dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam laporan ini digunakan capaian Tahun 2024 sebagai data terakhir yang tersedia dan akan dilakukan penyesuaian setelah data tahun 2025 diumumkan secara resmi.

Pelaksanaan program/kerja pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang mendukung capaian kinerja OPD terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan diharapkan.

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan pada tahun 2025 mengalami penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tindak lanjut atas penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut berdampak pada mekanisme pengukuran kinerja, khususnya terhadap dua indikator yang capaian kinerjanya bersumber dari data resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kedua indikator dimaksud baru dapat diperoleh setelah tahun anggaran berakhir, seiring dengan rilis data oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, pada saat penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, data capaian kinerja dimaksud belum dapat disajikan secara lengkap dan akan dilaporkan pada periode pelaporan berikutnya setelah data resmi tersedia.

Tabel 3.45
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Kualitas pengembangan kapasitas kepemudaan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**						
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang	86 Orang	-	-
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang	-	-
		3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang	-	-
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-
		4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-
		4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-
		4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
		4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-
		4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
		4.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Paket	-	-
		4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-
		5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-
		5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-
		5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	13 Laporan	-	-
	6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38 unit	38 unit	-	-
		6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 unit	6 Unit	-	-
Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**						
	1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				
		1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	450 Orang	118 Orang	-	-
	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				
		2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi	9 Organisasi	36 Organisasi		
Kualitas pengembangan kapasitas kepramukaan	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**						
	1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
		1.1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,	1 Tahun	1 Tahun	-	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
			dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				
		1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-
	2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
		2.1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi (UPT.Kawasan Pusat Olahraga)	1 Tahun	1 Tahun	-	-
	3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					
		3.1	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	300 Orang	-	Target tidak tercapai dikarenakan PSD batal untuk dilaksanakan akibat terjadinya bencana alam di Sumatera Utara	-
		3.2	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	455 Orang	260 Orang	Telah dilakukannya efisiensi anggaran mempengaruhi jumlah pengiriman atlet	
		3.3	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	6.000 Orang	40 Orang	Target tidak tercapai dikarenakan PSD batal untuk dilaksanakan akibat terjadinya bencana alam di Sumatera Utara	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					
		4.1	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	-	-		
		4.2	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		4.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	996 Orang	250 Orang		
	5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					
		5.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) di UPT. Kebakatan Olahraga	1 Pelatda	1 Pelatda	-	-
	6	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					
		6.1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
		6.2	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						
	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
		1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	33 Organisasi	33 Organisasi	-	-

20. Urusan Wajib Statistik

Program penyelenggaraan statistik sektoral provinsi merupakan program yang mendukung Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam upaya meningkatkan satu data digital daerah dengan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Indeks Pembangunan Statistik Sektoral tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 2 point dan realisasi capaian nilai 1,94 point dengan merujuk kepada Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024. Hal ini dikarenakan di tahun 2025 BPS RI selaku penyelenggara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tidak menyelenggarakan evaluasi dimaksud. Sesuai ketentuan EPSS dapat dilakukan setiap tahun atau minimal dua tahun sekali.

Dalam pencapaian kinerja tersebut ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :

1) Pembinaan Standar Data Statistik Sektoral.
2) Coaching Clinic Penyusunan Metadata Tahun 2024.
3) Webinar Diseminasi Satu Data Indonesia.
4) Rakor Tindak Lanjut Progres Pengumpulan Data Secara Daring.
5) Rapat Koordinasi Akselerasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
6) Coaching Clinic Penyusunan Rekomendasi dan Metadata Statistik Tahun 2025.
7) Validasi Data Statistik Sektoral dan Penginputan Data DSSD e-Walidata SIPD-RI Tahun 2025.
8) Rakor Pemetaan dan Penyusunan Daftar Data Prioritas dan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Tabel 3.46
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Statistik Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Akselerasi Penyelenggaraan SDI dan Pembangunan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**					– Belum optimalnya pengumpulan data oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data – Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral – Belum optimalnya Penyelenggaraan SDI dan Statistik	– Akselerasi pengumpulan data bersama Perangkat Daerah selaku Produsen Data Daerah dan Kabupaten/Kota selaku Walidata Daerah – Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi pemanfaatan data kepada pengguna data dan multi pihak lainnya – Penguatan Kolaborasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		100 %	97,52 %		
		1.1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	98 %	98 %		
		1.2	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik Sektoral	50 Orang	50 Orang		

21. Urusan Wajib Persandian

Capaian di bidang persandian pada tahun 2025, kami jelaskan sebagai berikut :

1) Peningkatan nilai Indeks Keamanan Informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2025 adalah 559, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan nilai 449.
2) Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi.
3) Pembentukan *Security Operation Center*.
4) Pembentukan Tim Tanggap Insiedn Siber pada 33 Kabupaten/Kota.
5) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelaksanaan 15 pelatihan bersertifikat.
6) Indeks Indikator Persandian dan keamanan Informasi pada Indeks SPBE capaiannya level 3 (baik).

Tabel 3.47
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Persandian Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Optimalisasi OPD dalam Penerapan Pengamanan Informasi dan Persandian	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**					- Keterbatasan Infrastuktur - Keterbatasan SDM dibidang Persandian	Memanfaatkan Infrastuktur/software tidak terbayar (opensource) sesuai dengan rekomendasi BSSN Pelaksanaan Bimtek, dan Pelatihan
	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					
		1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan	12 laporan		
		1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		
	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi					
		2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		

22. Urusan Wajib Kebudayaan

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama pada urusan wajib kebudayaan memiliki 1 indikator, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Berikut ini adalah hasil capaian kinerja urusan wajib kebudayaan tahun 2025 :

Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Kebudayaan
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55,44 - 55,48	55,11

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu

Hasil capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dirilis oleh Kementerian Kebudayaan. Indikator ini memberikan gambaran pembangunan kebudayaan dengan memuat 7 dimensi, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi kesetaraan gender.

Kesesuaian antara kegiatan dengan target Indikator Kinerja Utama adalah pelaksanaan kegiatan yang secara langsung mendukung dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan, meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pelestarian objek pemajuan kebudayaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebudayaan, serta penguatan kapasitas pelaku dan kelembagaan kebudayaan, sehingga selaras dengan target Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.49
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni budaya/cagar budaya	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**						
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen	11 Dokumen		
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA belum tepat waktu	Penyusunan dokumen RKA supaya tepat waktu
		1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA belum tepat waktu	Penyusunan dokumen perubahan RKA supaya tepat waktu
		1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan DPA belum tepat waktu	Penyusunan DPA supaya tepat waktu
		1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan Perubahan DPA belum tepat waktu	Penyusunan perubahan DPA supaya tepat waktu
		1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	Penyusunan laporan capaian kinerja belum maksimal	Memaksimalkan analisa penyusunan laporan capaian kinerja
		1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja belum memadai	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja lebih ditingkatkan analisanya
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%		
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125 orang /bulan	139 orang /bulan	-	-
		2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	0%		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%		
		4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	2 unit	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal
		4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal
		4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	-	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	80,65%		
		5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket	-	-
		5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	-	-
		5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	3 paket	-	-
		5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	4 paket	-	-
		5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	4 paket	-	-
		5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
		5.7	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-
		5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	-	-
		5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-
		5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	-	-	-
		5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%		
		6.1	Pengadaan Mebel	2 paket	2 paket		
		6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
		7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan		
		7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
		7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,22%		
		8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit		
		8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62 unit	60 unit		
		8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit		
	Program Pengembangan Kebudayaan		**50%**	**57%**		
	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Objek	15 Objek		
		1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Objek	15 Objek	-	-
		1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	Efisiensi Anggaran	Penambahan anggaran di tahun berikutnya
	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				
		2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	-	-	Efisiensi Anggaran	Penambahan anggaran di tahun berikutnya
		2.2 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	4 sertifikat	-	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2 Lembaga	-		
		3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1 orang	-	Efisiensi Anggaran	Penambahan anggaran di tahun berikutnya
	Program Pembinaan Sejarah			15%	0%		
	1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		60%	0%		
		1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	60 orang	0 Orang	Efisiensi Anggaran	Penambahan anggaran di tahun berikutnya
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			5%	4%		
	1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		5 objek	10 objek		
		1.1	Penetapan Cagar Budaya	5 objek	10 objek	Data cb dari Kabupaten Kota tidak lengkap dan harus dilengkapi oleh tim dari provinsi	Kegiatan penetapan cagar budaya agar bisa dipercepat pelaksanaannya
	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		5 objek	1 objek		
		2.1	Pelindungan Cagar Budaya	3 objek	1 objek	Efisiensi Anggaran	Penambahan anggaran di tahun berikutnya
		2.2	Pengembangan Cagar Budaya	3 objek	0 Objek	Tidak memilik Tim Registrasi	Pembentukan tim registrasi CB Provinsi
		2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	3 objek	0 Objek	Efisiensi Anggaran	Penambahan anggaran di tahun berikutnya
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			**10%**	**9%**		
	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10%	9%		
		1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	80 orang	80 orang	· Kompetensi SDM pelaku kesenian tradisional masih terbatas · Akses terhadap pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional belum merata.	· Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berjenjang bagi pelaku kesenian. · Bekerja sama dengan sanggar,

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							akademisi, dan praktisi seni untuk peningkatan kompetensi SDM
		1.2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5 lembaga	5 lembaga	· Tata kelola lembaga kesenian tradisional belum profesional dan berkelanjutan · Keterbatasan kemampuan manajerial dan administrasi pengelola lembaga kesenian.	· Memberikan pendampingan dan pelatihan manajemen kelembagaan kesenian. · Mendorong penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas administrasi dan tata kelola organisasi.
	Program Pengelolaan Permuseuman			**97,93%**	**73,50%**		
	1	Pengelolaan Museum Provinsi		96.693 Org	71.065 Org		
		1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	7218 koleksi	7.100 koleksi	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal
		1.2	Pembinaan dan Peningkatan mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	5 orang	2 orang	Menyesuaikan jadwal dari instansi pembina jabatan fungsional tersebut	-
		1.3	Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5 kegiatan	6 kegiatan	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal
		1.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	3 unit	3 unit	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal
		1.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	3 unit	3 unit	Masalah tidak terlalu signifikan	Upaya pencapaian realisasi lebih maksimal

23. Urusan Wajib Perpustakaan

Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang pada gilirannya akan tercapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan menyesuaikan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI melalui penyelarasan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah sehingga terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Perpustakaan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024	2025	
			Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,39	69,02	40,54
		Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,57	70	59,36

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

Tingkat capaian atau keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan.

1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyesuaian metodologi pengukuran IPLM disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah

Komponen pengukurun IPLM terdiri dari dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru yang berbeda

dengan tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen, sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional RI Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025 disampaikan Hasil IPLM Pemerintah berada di poin 40,54 dengan perincian sebagai berikut :

- Variabel SDM : 0,481
- Variabel Koleksi : 0,411
- Variabel Pelayanan : 0,393
- Variabel Pengelolaan : 0,427
- Dimensi Kepatuhan : 0,446
- Dimensi Kinerja : 0,41

Dari Dashboard Kajian IPLM 2025 Perpustakaan Nasional 2025 dimana penghitungan IPLM ini menggunakan responden sebanyak 1.867 atau 51,7% yang terdiri :

- Perpustakaan OPD Provinsi sebanyak : 9
- Perpustakaan Provinsi sebanyak : 6
- Perpustakaan SLB (SD/SMP/SMA Negeri dan Swasta) : 83
- Perpustakaan SMA (Negeri dan Swasta) : 993
- Perpustakaan SMK (Negeri dan Swasta) : 710
- Lainnya : 66

Ada sebanyak 48.3% responden yang belum mengisi link IPLM, sehingga hal ini berpengaruh kepada nilai IPLM Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan metode penelitian Transformasi Yeo–Johnson jumlah responden minimum adalah 68%, dimana persentase tersebut merupakan 2/3 dari populasi data yang masuk sehingga diharapkan dapat merepresentasi kondisi populasi sebenarnya. Jika daerah yang tidak memenuhi jumlah responden minimal 68% dari total polulasi maka diperlukan penyesuaian nilai indeks berdasarkan jumlah responden yang masuk.

Dari hasil IPLM yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional dapat disimpulkan bahwa :

a. Penurunan indeks final bukan karena kinerja buruk, tetapi karena faktor penyesuaian 68%;

b. IPLM saat ini bukan hanya tentang indeks kinerja, tetapi juga indeks kesiapan tata kelola data, IPLM tidak cukup digunakan untuk ranking, tetapi harus menjadi alat penentuan prioritas kebijakan
c. Untuk bobot dimensi kinerja masih rendah dibandingkan dengan bobot dimensi kepatuhan, salah satu penyebab hal ini adalah belum maksimalnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara hal ini tidak terlepas dari minimnya dukungan, baik dukungan kebijakan maupun dukungan anggaran dalam hal pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan kerja sama dengan pihak eksternal yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi;
d. Diharapkan Perpustakaan Nasional dapat memprioritaskan intervensi Reformasi SDM Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota karena dari analisa data kenaikan 10% variabel SDM memberi dampak signifikan pada indeks, dibanding variabel lain

2) Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal pengukuran TKM, komponen terdiri dari dimensi pra membaca, saat membaca dan pasca membaca.

TKM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15%, dimensi saat membaca sebesar 50%, dan dimensi pasca membaca 35%.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional RI Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025 disampaikan Hasil TKM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 59.36 dengan kategori penilaian rendah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pra Membaca : 54.29
b. Saat Membaca : 58.91
c. Pasca Membaca : 61.99

Dari data TKM diatas dapat dianalisa beberapa faktor faktor yang mempengaruhi setiap fase beserta dampaknya :

a. Pra membaca
   - Faktor utama fase pra membaca dipengaruhi oleh kebiasaan dan konsistensi membaca awal, seperti penyediaan waktu dan minat membaca (membaca masih berupa beban);
   - Akses bahan bacaan dan lingkungan pendukung berperan sebagai faktor penguat, bukan faktor utama;
   - masalah utama dari membaca adalah bukan disebabkan ketiadaan buku, tetapi belum terbentuknya kebiasaan membaca.

b. Saat Membaca
   - Faktor dominan membaca adalah keterlibatan aktif saat membaca, mencakup fokus, pemahaman, dan ketekunan;
   - Untuk kegiatan diskusi dan interaksi sosial terkait bacaan memperkuat pemahaman, walaupun bukan faktor inti yang mempengaruhi fase membaca;
   - Kegiatan saat Membaca menjadi bermakna karena saat pembaca terlibat secara kognitif, bukan hanya sekadar membaca teks

c. Pasca Membaca
   - Pasca membaca atau disebut juga dampak utama membaca terlihat pada peningkatan pengetahuan dan cara berpikir;
   - Efek lanjutan mencakup kemampuan komunikasi, empati, dan refleksi diri;
   - Membaca memberikan manfaat paling besar ketika hasil bacaan diterapkan dan dimakna.

Tabel 3.51
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Perpustakaan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat	**Program Pembinaan Perpustakaan**			100 %	100 %		
	1	pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		100 %	100 %		
		1.1	Peningkatan Kapsitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	22 Orang	22 Orang		
		1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	4,458 eks	4.458 Eks		
		1.3	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	14.000 orang	14.000 orang		
	2	Kegiatan Pembudayan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		100 %	100 %		
		2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7 Lokus	7 Lokus		
		2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	7 Pojok Baca	7 Pojok Baca	Operasional Pojok Baca	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			100 %	100 %		
	1	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		100 %	100 %		
		1.1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	200 Eksemplar	200 Eksemplar		

24. Urusan Wajib Kearsipan

Urusan wajib kearsipan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip memiliki sasaran strategis ‘‘Meningkatknya Pengelolaan Arsip Secara Baku (Standar)’’, dengan 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat Ketersediaan Arsip dan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, dengan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Perpustakaan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024	2025	
			Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku (Standar)	Tingkat Ketersediaan Arsip	82,78 %	84 %	90,75 %
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	72,97	73,5	63,03

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

1) Tingkat Ketersediaan Arsip

Tingkat ketersediaan arsip adalah mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan dipertanggungjawabkan nasional. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 84% dan realisasi sebesar 90,75%, maka target IKU yang tercapai adalah 108,04%. Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu mempunyai langkah strategis, yaitu :

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis;
b. Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Digital;
d. Rapat koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan;
e. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Deli Serdang;
f. Sosialisasi dan Peluncuran Srikandi di Kanupaten Toba;

2) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah suatu ukuran atau nilai yang menunjukkan capaian kinerja penyelenggaraan kearsipan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang didapatkan dari proses pengawasan kearsipan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan :

a. Pengawasan kearsipan eksternal terhadap 33 pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara; dan

b. Pengawasan kearsipan internal terhadap 20 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan hasil akumulasi penilaian atas pemenuhan indikator dan sub indikator pengawasan kearsipan yang mencakup aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan yang dihitung berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil resmi yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Pengumuman Nomor: AK 01.00/2/2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, Nilai Pengawasan Kearsipan Sumatera Utara sebesar 63.03 atau dengan Kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 73.50 Poin, pencapaian target kinerja mencapai 85.76%.

Tabel 3.53
Perhitungan dan Capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan
Tahun 2025

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2025	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	55,22	60%	33,13
Internal	74,76	40%	29,90
Nilai Akumulasi			**63,03**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu

Dalam pelaksanaan pencapaian target, langkah strategis antara lain :

a. Bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis;
b. Sosialisasi pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
c. Bimbingan teknis pengelolaan arsip digital;
d. Rapat koordinasi perpustakaan dan kearsipan
e. Kegiatan pemusnahan arsip di Deli Serdang;
f. Sosialisasi dan peluncuran Srikandi di Kabupaten Toba.

Penurunan capaian kinerja kearsipan disebabkan oleh sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta pemahaman yang masih terbatas di tingkat perangkat daerah mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.54
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Terwujudnya pengelolaan arsip secara baik	**Program Pengelolaan Arsip**			100 %	100 %		
	1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		100 %	100 %		
		1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	5 OPD	5 OPD		
	2	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		100 %	100 %		
		2.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Provinsi melalui JIKN	5 OPD	5 OPD		
		2.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	5 Laporan	5 laporan		
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			100 %	100 %		
	1	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun		100 %	100 %		
		1.1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	5 OPD	5 OPD		

B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama pada urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, sebagaimana kami jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.55
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja	2024		2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	490.000	395.818	395.427	396.610,31(1)	100,30
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	223.000	365.928	340.000	343.550(1)	101,04
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/ Thn)	51,50	57,76	35,01	35(1)	100,03
4	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	108.39	100,95	101,35	107,62	106,19
5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Indeks)	100	95,61	98	95,39	97,34
6	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	-	-	1,6	1,67(2)	104,37
7	Luasan Kawasan Konservasi	44.336,01	44.336,01	27.343,57	27.343,57	100,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Keterangan : 1) Data Sangat Sementara menunggu hasil validasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lama Desember 2026

2) Data Sangat Sementara menunggu hasil resmi data dari BPS Sumut

Hasil sangat sementara Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 740.160,31 ton atau 100,64% dari target 735.427 ton yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Dengan adanya bantuan yang diberikan Provinsi Sumatera kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Sumatera Utara sehingga produksi perikanan dapat meningkat.

Capaian sangat sementara produksi perikanan tangkap tahun 2025 sebesar 396.610,31 ton atau 100,30% dari target produksi perikanan tangkap tahun 2025 sebesar 395.427 ton. Dengan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara, diharapkan dapat memenuhi target produksi perikanan tangkap. Bantuan yang diberikan sebagai stimulus yang dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa nelayan berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya. Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa asuransi nelayan yang diberikan kepada 6100 nelayan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Bantuan yang telah diberikan kepada nelayan Sumatera Utara

tersebut telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap. Diharapkan dengan anggaran yang meningkat ditahun berikutnya, nelayan penerima bantuan juga dapat meningkat sehingga produksi perikanan tangkap lebih meningkat.

Capaian sangat sementara produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2025 sebesar 343.550 ton atau 101,04 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 340.000 ton. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih dan pakan ikan serta mesin pembuat pakan kepada pembudidaya ikan. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang mengalami kenaikan, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

Capaian sangat sementara angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2025 mencapai 35 Kg/Kapita/Tahun. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Pencapaian tersebut dipengaruhi faktor kampanye makan ikan yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2025 mencapai angka 107,62 dari target 101,35. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga usaha perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut.

Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2025 mencapai angka 95,39 dari target 98. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat pembudidaya ikan sehingga usaha perikanan budidaya dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut.

Capaian Luasan Kawasan Konservasi seluas 27.343,57 hektar dari target seluas 27.343,57 hektar. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 100%, bahkan melampaui target yang telah direncanakan. Keberhasilan pencapaian tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam serta memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan konservasi yang terencana, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan pengawasan terhadap kawasan konservasi. Capaian luasan kawasan konservasi yang melebihi target ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Capaian sangat sementara Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB sebesar 1,67% dari target 1,6%. Capaian ini masih tergolong sangat sementara dan sudah sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Diperlukan peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, serta dukungan terhadap pelaku usaha perikanan agar kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 3.56
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Meningkatnya Nilai Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 2. Meningkatnya Nilai Luasan Kawasan Konservasi	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**						
	1.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi					
		1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	27.343,57 Ha	27.343,57 Ha	-	-
1. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**						
	1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					
		1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.100 Orang	6.100 Orang	-	-
1. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Budidaya 2. Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**						
	1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut					
		1.1	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	1 Kelompok	1 Kelompok	-	-
1. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Budidaya	**Program Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan**						
	1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil					
		1.1	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	43 Kelompok	43 Kelompok	-	-
Meningkatnya Nilai Angka Konsumsi Ikan	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**						
	1.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
		1.1	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	35,01 Kg/Kap/Tahun	35 Kg/Kap/Tahun	-	-

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama pada urusan pilihan pariwisata memiliki 3 indikator, yaitu Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Urusan Pilihan Pariwisata, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.57
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	300 - 350	292.481
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2.42	2.19
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	5.45	8.44

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

1) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Kegiatan pariwisata seperti pelaksanaan kegiatan promosi destinasi pariwisata, penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional, pengembangan daya tarik wisata, serta peningkatan kualitas amenitas dan aksesibilitas sangat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Setiap kegiatan yang memperkuat citra destinasi dan daya saing pariwisata daerah akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan asing. Bidang yang mengakomodir indikator tersebut, yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Destinasi dan Ekonomi Kreatif.

2) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Pelaksanaan kegiatan pariwisata mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat hunian akomodasi dan konsumsi wisatawan pada sektor jasa makan minum. Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Dengan meningkatnya nilai tambah sektor tersebut, maka kontribusinya terhadap total PDRB daerah juga meningkat. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dapat dihitung melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Kegiatan pariwisata memiliki keterkaitan kuat dengan peningkatan proporsi PDRB ekonomi kreatif yang dikontribusikan oleh 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu fesyen, kuliner, kriya, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, seni rupa, periklanan, penerbitan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, televisi dan radio, serta film, animasi dan video. Semakin besar nilai yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, maka semakin tinggi proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah secara keseluruhan.

Tabel 3.58
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**			23,38%	35,93%		
	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		3 kegiatan	4 Kegiatan		
		1.1	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	250 orang	216 orang		
	2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		7 KSPP	18 KSPP		
		2.1	Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasara dalam Pengelolaan Destinasi pariwisasta Provinsi	15 unit	129 unit		
		2.2	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5 lokasi	5 lokasi		
	3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		8 DPP	3 DPP		
		3.1	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 lokasi	6 lokasi		
		3.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-		
	4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		75 usaha	112 usaha		
		4.1	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	75 usaha	112 usaha		
	Program Pemasaran Pariwisata			14,25%	14,29%		
	1	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		10 kegiatan	12 kegiatan		
		1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik,dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	15 dokumen	15 dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	10 kegiatan	12 kegiatan		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intlektual			14,97%	14,97%		
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		-	-		
		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	-	-	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
	2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		-	-		
		2.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	-	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			35,90%	35,90%		
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		50 orang	-		
		1.1	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	50 orang	-	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
		1.2	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	-	-	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
		1.3	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya
	2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		100 orang	-		
		2.1	Pelatihan,Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 orang	-	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan kembali di tahun berikutnya

3. Urusan Pilihan Pertanian

3.1 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Pada tahun 2025 urusan pilihan pertanian terdapat 2 Indikator Kinerj Utara, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dan Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura. Capaian dari dua indikator tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.59
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	100,26	103,15	102,91 %
	2	Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura	92,82	94,41	101,71 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

1) Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan

Target Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan Tahun 2025 sebesar 100,26 dan realisasi sebesar 103,15 atau sebesar 102,91%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan berada pada kondisi yang lebih baik dari target, dimana harga yang diterima petani relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan konsumsi rumah tangga.. Hal ini disebabkan :

a. Harga Gabah/Pangan Naik
   Harga jual gabah meningkat karena adanya kebijakan penyerapan pemerintah yang ditetapkan dalam melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah Dan Beras.
b. Biaya Produksi Relatif Terkendali
   Tersedianya pupuk subsidi, tidak terjadi kenaikan harga pupuk, pestisida, bibit dan upah tenaga kerja
c. Dukungan Program Pemerintah
   Adanya dukungan pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana produksi

2) Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura

Target Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Hortikultura Tahun 2025 sebesar 92,82 dan realisasi sebesar 94,41 atau sebesar 101,71%. Hal ini berarti target kinerja NTP berhasil terlampaui, meskipun nilai NTP masih berada di bawah angka 100, capaian ini menunjukkan bahwa daya beli petani hortikultura relatif lebih baik dibandingkan kondisi yang diproyeksikan dalam target. Hal ini disebabkan :

a. Kenaikan harga jual komoditas hortikultura terutama cabai merah dan sayuran;
b. Adanya dukungan pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana produksi.

Tabel 3.60
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 2. Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**						
	1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanam					
		1.1	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	40 Ha	40 Ha		
		1.2	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	2 Sertifikat	2 Sertifikat		
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Pertanian	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**						
	1	Penataan Prasarana Pertanian					
		1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	184,3 M	184,3 M		
		1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	384 Unit	384 Unit		
		1.3	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	11 Unit	11 Unit		
		1.4	Pengendalian Dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan	260 Ha	260 Ha		
Memantapkan Penyelenggaraan Penyuluhan yang Efektif, Efisien dan Berkesinambungan	**Program Penyuluhan Pertanian**						
	1	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan					
		1.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	16 unit Demplot Sekolah Lapang	16 unit Demplot Sekolah Lapang		
	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan					
		2.1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	3 Kegiatan	3 Kegiatan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		2.2	Pendampingan dan Pengawalan Korporasi Petani	402 Ha	0 Ha	1. Tidak adanya subsidi 80 persen dari APBN dan ini disampaikan setelah RKA keluar dengan anggaran subsidi dari APBD utk premi sebesar 20 persen. 2. Pihak Jasindo mengeluarkan rate pembayaran premi AUTP sesuai dengan penetapan secara komersil dan bukan penugasan setelah P APBD disahkan dan ini menyulitkan untuk perubahan SSH premi asuransi	Membuat MOU Kerjasama dengan Jasindo
	3	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					
		1.1	Penguatan Kelembagan Penyuluhan Pertanian	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
		1.2	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**						
	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		11 Kali Gerakan Pengendalian, 275 Ha	11 Kali Gerakan Pengendalian, 275 Ha		
	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		11 Kali Gerakan Penanganan	11 Kali Gerakan Penanganan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Padi = 8.680 Ha Jagung = 2.830 Ha Kacang Tanah = 31,25 Ha	Padi = 8.680 Ha Jagung = 2.830 Ha Kacang Tanah = 31,25 Ha		

3.2 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan peternakan, khususnya perkebunan rakyat dengan beberapa indikator kinerja sesuai dengan target pada Renstra Tahun 2025-2029, maka dari hasil pengukuran kinerja diatas diketahui bahwa realisasi capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu

No	Program	Indikator kinerja	2025		
			Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat	226.778,78 Ton	172.510,93 Ton	76,07%
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	17.464,56 Ton	41.806,14 Ton	239,38%
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan yang difasilitasi ketersediaan prasarana perkebunan	308 Ha	286 Ha	92,86%
		Persentase peningkatan populasi ternah	0,66%	0,97%	146,97%
3	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0,39%	0,39%	100%
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV (Nomor Kontrol Veterine)	90%	92%	102,22%
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	0,23%	0,08%	34,70%
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	0,27%	0,20%	74,78%
5	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	100%	100%	100%
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	0,47%	0,56%	119,37%

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 6 program yang dilaksanakan terdiri sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan. Rata-rata program yang dilaksanakan pencapaian target kinerjanya sudah 100%, bahkan ada yang di atas 100%.

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan rakyat dan komoditas peternakan melalui fasilitasi sarana produksi yang memadai. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, indikator peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat menunjukkan realisasi sebesar 172.510,93 Ton dari target 226.778,78 Ton atau mencapai 76,07% (angka sementara).

Capaian tersebut mencerminkan bahwa dukungan sarana produksi perkebunan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi, namun belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya tanaman perkebunan rakyat yang berumur tua dan belum diremajakan, keterbatasan akses sarana produksi di beberapa wilayah sentra, serta faktor iklim yang mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, indikator peningkatan produksi komoditas peternakan menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan realisasi sebesar 41.806,14 Ton dari target 17.464,66 Ton atau mencapai 239,38%. Tingginya capaian ini didukung oleh meningkatnya produktivitas ternah, ketersediaan pakan lokal, serta membaiknya manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak rakyat. Selain itu, tingginya permintaan pasar terhadap produk peternakan turut mendorong peningkatan produksi di sejumlah sentra peternakan di Sumatera Utara.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan prasarana bagi usaha perkebunan dan peternakan agar kegiatan produksi dapat berjalan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Pada indikator cakupan luas lahan yang difasilitasi ketersediaan prasarana perkebunan, realisasi mencapai 286 Ha dari target 308 Ha, atau sebesar 92,86%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rencana fasilitasi prasarana perkebunan telah terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi terutama terkait keterbatasan waktu pelaksanaan, kondisi geografis wilayah perkebunan yang cukup luas dan beragam, serta penyesuaian terhadap kondisi lapangan di beberapa kabupaten/kota.

Selanjutnya, indikator persentase peningkatan populasi ternak menunjukkan realisasi sebesar 0,97% dari target 0,66%, atau mencapai 146,97%. Capaian ini mencermintakn keberhasilan dukungan prasarana peternakan, seperti kandang, sarana air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya, yang berkontribusi terhadap peningkatan populasi ternak secara lebih optimal.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kesehatan ternak, mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis, serta menjamin keamanan pangan asal hewan. Indikator tingkat Pengendalian Hewan Menular Strategis (PHMS) menunjukkan realisasi 0,39% dari target 0,39%, dengan capaian 102,22%.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular strategis di Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan secara efektif melalui kegiatan vaksinasi, suveilans, dan respon cepat terhadap kasus penyakit hewan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait menjadi factor pendukung utama keberhasilan program ini.

Indikator persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat NKV menunjukkan realisasi sebesar 92% dari target 90%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha pangan asal hewan terhada pentingnya jaminan keamanan dan mutu pangan, meskipun dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM pengawas dan kesiapan sarana prasarana unit usaha kecil.

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana dan perubahan iklim terhadap sector pertanian, khususnya perkebunan dan peternakan. Pada indikator persentase penanganan bencana pertanian, realisasi mencapai 0,08% dari target 0,23%, atau sebesar 74,07%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan bencana pertanian telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, luasnya wilayah terdampak, serta sifat bencana yang tidak dapat diprediksi secara pasti.

Indikator persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian menunjukkan realisasi 0,20% dari target 0,27%. Capaian ini mencerminkan bahwa adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian masih memerlukan penguatan, khususnya melalui peningkatan teknologi adaptif, penguatan kapasitas petani dan peternak, serta dukungan kebijakan lintas sektor.

5) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di sector pertanian. Indikator persentase lzin usaha pertanian yang diterbitkan menunjukkan realisasi 100% dari target 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan usaha pertanian di Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik turut mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

6) Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kemandirian kelompok tani dan peternak. Indikator Persentase Kelompok Tani yang Mendapat Penyrluhan dan Pemberdayaan menunjukkan realisasi sebesar 0,56% dari target 0,47%, atau mencapai 119,37%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani dan peternak. Dukungan penyuluh pertanian yang aldif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Tabel 3.62
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		308 Ha	286 Ha		
		1.1	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	1 Laporan		
	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		150 Ha	150 Ha		
		2.1	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan		
	3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		83 Unit	83 Unit		
		3.1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan	1 Laporan		
		3.2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan pakan, Pakan	1 Laporan	1 Laporan		
	4	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		16 Unit	16 Unit		
		4.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1 Laporan	1 Laporan		
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Pertanian	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**						
	1	Penataan Sarana Pertanian		11 Unit	11 Unit		
		1.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	30 Ha	30 Ha		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi		103.000 Ekor	103.000 Ekor		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	1 Wilayah		
		1.2	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 Daerah Provinsii	1 Laporan	1 Laporan		
Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**						
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		550 Ha 500 Ha	550 Ha 500 Ha		
		1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	400 Ha	400 Ha		
		1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	150 Ha	150 Ha		
		1.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	500 Ha	500 Ha		
	Program Perizinan Usaha Pertanian						
	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		10 Unit	10 Unit		
		1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	1 Laporan	1 Laporan		
Memantapkan Penyelenggaraan Penyuluhan yang Efektif, Efisien dan Berkesinambungan	**Program Penyuluhan Pertanian**						
	1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		8 Kegiatan	8 Kegiatan		
		1.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	8 Dokumen	8 Dokumen		
	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		14 Kelompok	14 Kelompok	Lambatnya pembahasan RPP sehingga mempengaruhi lambatnya pelaksanaan kegiatan	Dilakukan percepatan pembahasan RPP yang bersumber dari DBH Sawit
		2.1	Pendampingan dan Pengawalan Korporasi Petani	12 Unit	12 Unit		
		2.2	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	2 Unit	2 Unit		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	UPTD Perbenihan						
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Unit	5 Unit		
		1.1	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	1		Penataan Prasarana Pertanian	15 Unit	15 Unit		
		1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Laporan	1 Laporan		
	UPTD Inseminasi Buatan						
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	67 %	67 %		
		1.1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1 Laporan	1 Laporan		
	UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	1		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	780 Sampel	780 Sampel		
		1.1	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	120 Laporan	120 Laporan		
		1.2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2		**Kesejahteraan Hewan**	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha		
		2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner NKV	10 Sertifikat	10 Sertifikat		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	UPTD Klinik Hewan						
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.500 Ekor	4.500 Ekor		
		1.1	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	1 Laporan		
	UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona						
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	80 %	80 %		
		1.1	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan		
	UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang						
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	80 %	80 %		
		1.1	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan		

4. Urusan Pilihan Kehutanan

Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada urusan pilihan kehutanan, ditetapkan program kerja sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Hutan;
2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
4) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Capaian indikator kinerja utama urusan pilihan kehutanan pada tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.63
Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Kehutanan Tahun 2024 – 2025

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target kinerja		Realisasi Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Luas Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	1.000 Ha	1.300 Ha	2.060,3 Ha	1,700 Ha
		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0,8%	0,76%	0,76%	0,70%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu

1) Luas Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan;

Indikator Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam rangka mencapai target penurunan kerusakan kawasan hutan sebesar 1.700 Ha merupakan kontribusi dari beberapa hasil kegiatan utama yang terkait dengan program kerja pendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif maupun sipil teknis serta perlindungan, pengamanan dan konservasi sumber daya hutan yang menggunakan sumber dana APBD.

Dalam pencapaian realisasi kinerja penurunan kerusakan kawasan hutan (Ha) dapat tercapai salah satunya kegiatan penanaman pada areal perhutanan sosial ± 348,75 Ha yang tersebar di Areal PS pada wilayah Langkat, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Karo dan Deli Serdang. Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan juga dapat tercapai dengan melaksanakan tugas dalam perlindungan dan pengamanan hutan yang dikontribusi dari luas gangguan perlindungan dan pengamanan hutan yang diturunkan seluas ± 1.359 Ha. Sehingga diperoleh total penurunan kerusakan kawasan hutan sebesar ± 1.700 Ha.

2) Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB;

Indikator Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) merupakan peningkatan PDRB dari sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara. PDRB dapat dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Realisasi kinerja Indikator Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) memakai PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Realisasi Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB 0,70% dari target tahun ini 0,76% dan capaian kinerja 92,10%, yang artinya nilai pencapaian kinerja baik dan ini masih data sementara.

Tabel 3.64
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kehutanan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem	**Program Pengelolaan Hutan**		0,76%	0,70%		
	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 bahan	2 bahan	-	-
	2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1 bahan	1 bahan	-	-
	3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 bahan	5 bahan	1. Penilaian rencana sering menemukan ketidaksesuaian antara laporan administratif dengan kondisi lapangan, termasuk kesalahan prosedural yang dilakukan oleh tenaga teknis. 2. Adanya tumpang tindih data administratif antar instansi 3. Pada kegiatan penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi dibutuhkan integrasi antara SIPUHH, SIPNBP dan SIPASHUT, terjadi kendala jika masing masing sistem menyajikan data yang tidak sinkron satu dan yang lain	1. melakukan sistem pelaporan berbasis digital realtime, Tenaga teknis wajib mengunggah foto atau video kondisi lapangan yang terkunci secara lokasi dan waktu (timestamp) untuk meminimalkan manipulasi data 2. Sinkronisasi data antara instansi 3. Melaksanakan rekonsiliasi data produksi dari SIPNBP dan SIPUHH secara rutin
	4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m^3/ Tahun	1 bahan	1 bahan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	5	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6 Bahan	5 Bahan	Tidak adanya kegiatan Prakondisi RHL	Perlu sinkronisasi antara Perencanaan Penanaman, Dokumen RTnRl dengan Penganggaran
	6	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	20 %	20 %	1. Kurangnya sumber daya Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas pengamanan hutan 2. Kurangnya sumber daya PPNS di Dinas LHK Provsu	1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan 2. Pelaksanaan/ ikut serta dalam pelatihan pembentukan PPNS
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		**2 ; 5**	**2 % ;5%**		
	1	Pelaksanaan penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3 bahan	3 bahan		

5. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.65
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Energi
dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Akses Infrastruktur Ketenagalistrikan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	43%	42,04%
		Intensitas Energi Primer	79,40 SBM/Rp. Miliar	72,31 SBM/Rp. Miliar
		Konsumsi Listrik per Kapita	1184,21 KWH/Kapita	1158,97 KWH/Kapita

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan indikator jumlah penerima manfaat dari pembangkit EBT memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 75 orang dari target 75 orang. Kegiatan utama dari program ini yakni pembangunan 1 unit PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Pompa Air Irigasi yang terletak di Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Adapun PLTS Pompa Air ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi dari sawah yang semula hanya dapat dilakukan 1 kali panen (250 ton) menjadi 2 kali panen (500 ton).

2) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator rasio elektrifikasi memiliki persentase capaian kinerja sebesar 99,99% dari target sebesar 100%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh akses terhadap layanan tenaga listrik. Keberhasilan ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses listrik.

3) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan indikator luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebesar 5.048.600 Hektare dari target sebesar 5.048.600 Hektare. Capaian tersebut menggambarkan telah terpenuhinya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan utama dari program ini yakni fasilitasi kepengurusan izin air tanah dan pengujian air dan mineral pada UPTD Laboratorium ESDM.

4) Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara

Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara memiliki indikator kinerja yaitu persentase usaha tambang sesuai provinsi kewenangan yang tidak melanggar memiliki capaian kinerja sebesar 150,24% dengan realisasi sebesar 100% dari target 66,56%. Data persentase izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.66
Izin Pertambangan yang Memenuhi Kewajiban Sesuai Peraturan

No	Pemenuhan Kewajiban		Jumlah	Jumlah Izin	Persentase
I	**IUP OP**				
	1	Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang	40	43	93,02%
	2	Persetujuan RKAB	30	43	69,77%
	3	Laporan Berkala Bulanan	27	43	62,79%
	4	Laporan Berkala Triwulan	27	43	62,79%
	Persentase Pemenuhan Kewajiban				**72,09%**
II	**SIPB**				
	1	Laporan Berkala Bulanan	20	36	56%
	2	Laporan Berkala Triwulan	20	36	56%
	Persentase Pemenuhan Kewajiban				**56%**

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

Tabel 3.67
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
1. Meningkatkan kualitas data informasi sumber daya mineral dan energi sampai tingkat cadangan tereka dengan cara meningkatkan kegiatan eksplorasi 2. Meningkatkan penyebarluasan informasi sumber daya mineral dan energi dan memanfaatkan teknologi informasi, selebaran (leaflet), buku informasi sumber daya mineral dan energi, sosialisasi/ penyuluhan bencana geologi, sosialisasi pemanfaatan air tanah	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**		**5.048.600 Hektare**	**5.048.600 Hektare**	1. Belum tersosialisasi dengan perusahaan pemakai air tanah terkait dengan pemeriksaan laboratorium. 2. Minimnya peralatan untuk mengukur data teknis seperti GPS, alat ukur muka air tanah. 3. Belum semua kab/kota melaksanakan Pergub No. 27 Tahun 2018 dan Perubahan Pergub no. 35 Tahun 2020 di Kab/Kota yang berada di CAT Medan. 4. Kurangnya kesadaran para pemegang izin dalam pemenuhan kewajiban. 5. Peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dari Pemerintah Pusat didelegasikan kembali ke daerah (Provinsi). 6. Terdapat masih ada sebagian pemilik IUP OP yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melaksanakan kegiatan	1. Sosialisasi kepada pengusaha lebih intensif terkait kewajiban pemeriksaan sample air tanah secara berkala. 2. Mengadakan pengadaan peralatan. 3. Menyarankan kembali kab/kota yang belum melaksanakan Pergub No. 27 Tahun 2018 dan Perubahan Pergub No. 35 Tahun 2020 di Kab/Kota yang berada di CAT Medan untuk menambah PAD di bidang air tanah. 4. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemegang izin untuk pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan pemenuhan kewajiban. 5. Koordinasi dengan Kementerian ESDM RI dan Instansi Terkait. 6. Menyampaikan surat peringatan kepada pemilik IUP yang
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		4 Dokumen	4 Dokumen		
	1	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	2	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	4 Laporan	4 Laporan		
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		5 Dokumen	5 Dokumen		
	1	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah	5 Dokumen	5 Dokumen		
1. Mendukung terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal 2. Menjaga terpeliharanya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di wilayah pertambangan.	**Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara**		**100%**	**96,30%**		
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1 Laporan	1 Laporan		
	1	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil (UPTD Lab ESDM)	1 Laporan	1 Laporan		

Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		4 Dokumen	4 Dokumen	penambangan yang baik dan benar seperti tidak menyampaikan laporan dan bekerja pada luar lokasinya, ada juga yang semenjak memperoleh izin tidak melaukan kegiatan penambangan disebabkan tidak ada pemasaran, pemilik izin merasa dirugikan karena masih maraknya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin yang membuat mereka tidak ada pemasaran karena selisih harga yang lebih murah dari para pelaku PETI. 7. Banyak Kab/Kota yang tidak menyampaikan usulan revisi harga patokan mineral bukan logam dan batuan. 8. Adanya suatu perbedaan harga di Wilayah Provinsi Sumatera Utara antara harga pasar dan harga patokan yang dikelurkan oleh Perusahaan. 9. Belum ada pemahaman/ kesadaran Pemerintah Kabupaten untuk menyerahkan harga MBLB	belum melaksanakan kewajibannya dan yang tidak melaksanakan metode penambangan yang baik dan benar; Melakukan pembinaan kepada pemilik IUP melalui tenaga ahli/Kepala Teknik Tambang untuk dapat melaksanakan semua kewajibannya sebagai pemilik IUP. Solusi yang paling utama mengikuti perkembangan teknologi yaitu membuat aplikasi pelaporan berbasis Online kepada pemegang IUP OP yang kajian teknis akan diterapkan di dalam aplikasi tersebut. 7. Cabang Dinas akan melaksanakan FGD terkait revisi harga patokan mineral bukan logam dan batuan di masing-masing wilayah cabang dinas.
	1	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Dokumen	4 Dokumen		
	2	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan	4 Laporan		
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, batu Bara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		4 Dokumen	4 Dokumen		
	1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam, dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	4 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		4 Dokumen	4 Dokumen	di Quarry ke Pemerintah Provinsi. 10. Masih adanya perbedaan harga patokan mineral di setiap Kabupaten karena regulasi yang mengaturnya di dalam kabupaten sendiri dalam penetapan perdanya belum berpatokan kepada SK Gubernur. 11. Usulan lokasi masih berupa data mentah sehingga memerlukan beberapa kali survey untuk penetapan lokasi FS/DED. 12. Membutuhkan lahan yang luas untuk lokasi kontruksi. 13. Masih banyak jalan umum atau tempat yang belum memiliki penerangan hingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melakukan aktifitas di luar rumah pada malam hari. 14. Kurang pahamnya para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan ketenagalistrikan berbasis OSS - RBA atau Online Single Submission Risk -Based Approach.	8. Menetapkan harga patokan bahan galian non logam dan batuan. 9. Perlu dilakukan sosialisasi dan moitoring secara berkala dan berkesinambungan 10. Membuat sosialisasi dan forum-forum diskusi dengan mengundang semua stakeholder terkait dalam penetapannya di kemudian hari. 11. Membuat kreteria yang lebih spesifik untuk lokasi yang diusulkan pembuatan FS/DED. 12. Mengkoordinasikan dengan pemerintah setempat dan masyarakat pengguna terkait lahan. 13. Penambahan anggaran dan solusi bersama dengan instansi terkait dalam penyelesaian masalah ketenagalistrikan/ energi baru terbarukan. 14. Sosialisasi Perizinan ketenagalistrikan Berbasis OSS-RBA atau
		1 Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan	4 Dokumen	4 Dokumen		
Mendorong peran swasta/ swadaya masyrakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan guna mendukung pelaksanaan diversifikasi energi, serta meningkatkan kualitas data/informasi potensi energi baru terbarukan	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**		75 orang	75 orang		
	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		2 Dokumen	2 Dokumen		
	1	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2 Dokumen	2 Dokumen		
	2	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Unit	1 Unit		
	3	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		100%	99,99%		
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		4 Laporan	4 Laporan		
	1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi	4 Laporan	4 Laporan		
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan		
	1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan		

Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		2.500 Unit	0 Unit	15. Regulasi yang terlalu Panjang. 16. Kurang dan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh cabang dinas dari segi kualitas dan kuantitas/ jumlah pegawai, sebagai perbandingan jumlah pegawai sebanyak 5 orang untuk 5 kab/kota. 17. Masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemisikinan (TNP2K). 18. Masih terdapat masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara yang belum menikmati sambungan listrik 19. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.	online Single Submission Risk -Based Approach. 15. Memangkas regulasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dan Perlunya peran pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan pontensi energi baru terbarukan. 16. Perlu dilakukan penambahan aparatur segera dan memiliki latar belakang ilmu kelistrikan. 17. Updating Basis Data Terpadu (BDT) Tim Penanggulangan Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K). 18. Mengalokasikan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.
	1	Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	2550 Unit	0 Unit		

6. Urusan Pilihan Perdagangan

Capaian kinerja pada urusan pilihan perdagangan tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Perindustrian	1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	19,03%	18,97%*
		2	Ekspor Barang dan Jasa	16,45 – 16,54%	15,28%*
		3	Koefesien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10 Poin	5,08 Poin

Sumber : Dinas Perindag dan ESDM Provsu, diolah dari Data BPS Triwulan IV Tahun 2025
*Keterangan : *) data sementara*

Capaian kinerja program untuk urusan pilihan perdagangan adalah sebagai berikut :

1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Fokus pada program ini yakni pelaksanaan pasar murah di beberapa kabupaten/kota dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Utara serta dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pelaksanaan monitoring pasar dalam rangka memastikan ketersediaan stok Bapokting dan rapat koordinasi antar stake holder dalam rangka menjaga kestabilan harga bapokting. Manfaat dari kegiatan ini yakni berkurangnya beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya terutama untuk kebutuhan barang pokok.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan kegiatan Pasar Murah yang tersebar di 27 titik Lokasi pada tahun 2025, yaitu:

a. Dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Fitri di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Langkat, dan Kota Tebing Tinggi.
b. Dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi Sumatera Utara di Kabupaten Simalungun, Asahan, Batu Bara, Karo, Deli Serdang, Sergai Bedagai, Tapanuli Utara, Langkat, Toba, Kota Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Kota Binjai.
c. Dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi menjelang HBKN natal dan tahun baru di Kabupaten

Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Samosir, Labuhanbatu, Padang Lawas Utara dan Kota Pematangsiantar.

2) Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja Nilai Ekspor Barang di Provinsi memiliki persentase capaian kinerja sebesar 102,35% dengan realisasi sebesar Rp 187.081,59 Miliar dari target sebesar Rp 182.790,8 Miliar. Peningkatan kinerja ini didukung oleh berbagai kegiatan fasilitasi, pembinaan dan promosi ekspor kepada pelaku usaha. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja ekspor daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

3) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk melaksankan urusan Perlindungan Konsumen di daerah. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksankan yakni berupa fasilitasi terhadap 4 BPSK yang terdapat di Sumatera Utara yakni di Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kota Pematangsiantar dan Kota Sibolga. Bentuk dari fasilitasi ini adalah agar BPSK dapat berperan dalam melindungi konsumen yang ada di Sumtera Utara. Hal ini dapat dilihat dari capaian kasus yang ditangani oleh BPSK yakni dari 88 Kasus / Aduan yang masuk ke BPSK, telah terselesaikan sebanyak 84 Kasus.

Bentuk lain dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan perlindungan konsumen yakni terselenggaranya pengawasan barang beredar/jasa di Sumatera Utara yakni sebanyak 681 barang beredar telah diawasi sepanjang Tahun 2025. Selain itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara juga memiliki UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) yang dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan pengujian atas produk/ komoditi yang mereka miliki dengan standar yang telah diakui secara Nasional maupun Internasional untuk kebutuhan ekspor. UPTD PSMB juga menerima jasa kalibrasi alat untuk Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Untuk tahun 2025, UPTD PSMB telah melakukan pengujian sebanyak 1.949 Sampel

Tabel 3.69
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Pemantauan harga-harga komoditas strategis di pasar Kab/Kota	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**4,03%**	**5,08%**	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang, dari jumlah sudah banyak yang memasuki usia pensiun, serta yang mengikuti pendidikan teknis masih minim. 2. Rendahnya tingkat penyerapan dan impelementasi teknologi dan kemampuan mengembangkan teknologi alternatif dan etos kerja. 3. Kesulitan dalam mencari barang yang akan dibeli terutama bahan-bahan kimia dan peralatan pendukung laboratorium. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. 5. Rendahnya tingkat penyerapan dan	1. Melakukan realokasi anggaran untuk beberapa kegiatan dan belanja yang tidak dapat dilaksanakan. 2. Melaksanakan rapat koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. 3. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri. 4. Menempatkan Sumber Daya Manusia (ASN) sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan kebutuhan instansi. 5. Mengoptimalkan pengawasan terhadap barang beredar, barang strategis sesuai tupoksi dan kewenangan. 6. Mengoptimalkan kinerja UPTD
	1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan		
		1.1 Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	12 Laporan	12 Laporan		
	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	1 Laporan	1 Laporan		
		2.1 Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	1 Laporan	1 Laporan		
1. Pendataan dan pemberdayaan eksportir Sumatera Utara 2. Partisipasi di pameran-pameran luar negeri	**Program Pengembangan Ekspor**		**Rp. 182.790,8 M**	**Rp. 187.081,59 M**		
	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	20 Produk	20 Produk		
		1.1 Peningkatan citra produk ekspor	20 Produk	20 Produk		
1. Penanganan sengketa konsumen 2. Pengawasan terhadap barang/jasa 3. Penerbitan sertifikat mutu	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**		**81,01%**	**95,45%**		
	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	4 BPSK 100 Pengaduan	4 BPSK 88 Pengaduan		
		1.1 Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	4 BPSK	4 BPSK		
		1.2 Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	100 Pengaduan	88 Pengaduan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
untuk melindungi konsumen dan meningkatkan nilai tambah	2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		2.500 Sertifikat 2.500 Laporan	1.335 Sertifikat 1.949 Laporan	impelementasi teknologi dan kemampuan mengembangkan teknologi alternatif dan etos kerja. 6. Pengembangan ekspor: Realisasi menunjukkan peningkatan, menandakan adanya peningkatan sektor ekspor terutama di sektor perkebunan yakni ekspor produk turunan sawit yang merupakan komoditi unggulan Sumatera Utara	Perlindungan Konsumen. 7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga memacu pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. 8. Penguatan kerjasama antar instansi: Diperlukan koordinasi yang lebih kuat dan kerjasama antar instansi pemerintah di semua level untuk mengatasi permasalahan distribusi bahan berbahaya dan stabilisasi harga. 9. Intervensi pasar dan informasi pasar yang lebih baik: Untuk mengatasi masalah stabilisasi harga, pemerintah dapat meningkatkan intervensi pasar dan menyediakan informasi pasar yang lebih akurat dan tepat waktu
		2.1	Pengembangan layanan kalibrasi	2.500 Sertifikat	1.335 Sertifikat		
		2.2	Pengembangan layanan pengujian	2.500 Laporan	1.949 Laporan		
	3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan		
		3.1	Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa serta kegiatan perdagangan sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga	1 Laporan	1 Laporan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							kepada pelaku usaha dan konsumen. 10. Pendekatan holistik dalam pengembangan ekspor: Mengatasi penurunan ekspor memerlukan strategi yang lebih holistik, termasuk dukungan untuk pembinaan pelaku usaha ekspor, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran yang lebih efektif melalui partisipasi aktif dalam pameran dagang internasional.

7. Urusan Pilihan Perindustrian

Capaian indikator kinerja utama pada urusan pilihan perindustrian tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.70
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Perindustrian	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	18,66%	18,39 %*
		2	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	4,70%	3, 49 %*

Sumber : Dinas Perindag dan ESDM Provsu, diolah dari Data BPS Triwulan IV Tahun 2025
*Keterangan : *) data sementara*

Sasaran strategis pada Urusan Perindustrian, yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian dengan indikator kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan dengan target tahun 2025 sebesar 18,66% dan capaian sebesar 18,39%, dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur dengan target 4,70% dan capaian kinerja sebesar 3,49%.

Capaian kinerja program untuk urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri, dari target sebesar 28,43% mampu direalisasikan sebesar 42,38%, persentase capaian kinerja sebesar 149,68%.

Provinsi Sumatera Utara telah melangkah maju dengan strategi yang terencana dan bertujuan dalam mengembangkan sektor perindustriannya, khususnya untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM). Melalui kegiatan yang beragam, pemerintah berusaha keras meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Salah satu kunci dari strategi ini adalah program pelatihan dan pemberian bantuan peralatan, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan produksi dan kualitas produk IKM.

Adapun rekapitulasi kegiatan Bidang Perindustrian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.71
Rekapitulasi Kegiatan Bidang Perindustrian Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan		Jumlah Peserta	Satuan	Bantuan Peralatan
I	**DAK Non Fisik PK2SIKM**				
	A.	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Day Saing IKM			
	1	Pendampingan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Produk dan/atau Sistem Mutu			
		a. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan di Sumatera Utara	50	IKM	
		b. Fasilitasi Sertifikasi Merk Bagi IKM di Sumatera Utara	100	IKM	
		c. Sosialisasi Penerapan Good Manufacturing Practices bagi IKM Pangan	50	IKM	
	2	Fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil			
		a. Bimtek Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK	80	IKM	
	B.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM			
	1	Penyusunan Kajian Layanan Proses Bisnis dan Kelembagaan Sentra IKM	20	Sentra	
	C.	Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM			
	1	Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	10	Sentra	
	2	Kajian Potensi Sentra IKM	3	Sentra	
	3	Promosi dan Temu Bisnis	10	Sentra	
II	**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**				
	1	Registrasi Mesin Pelinting Rokok			
	2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Hasil Tembakau melalui Pelatihan Melinting Tembakau	50	Orang	
	3	Pelatihan Keterampilan Kerja (Pelatihan Wastra) dan bantuan modal usaha berupa barang (peralatan mesin jahit)	240	IKM	Mesin jahit 180 unit, mesin border 60 unit

Sumber : Dinas Perindag dan ESDM Provsu

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%. Di samping itu, program pengendalian izin usaha industri menekankan

pentingnya verifikasi teknis dan pemeriksaan lapangan dalam proses penerbitan izin berusaha.

Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan sektor perindustriannya mencerminkan sebuah strategi yang matang dan terintegrasi. Dengan fokus pada peningkatan kualitas, akses pasar, dan pengembangan kapasitas produksi, provinsi ini telah menetapkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, Sumatera Utara berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian sasaran strategisnya dalam urusan perindustrian. Adapun untuk fasilitasi perizinan industri telah dilaksanakan kepada 5 industri besar dan pengawasan perizinan usaha kepada 5 industri besar.

Tabel 3.72
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Fasilitasi pembentukan dan penerapan Perda Rencana Pembangunan Industri di Kab/Kota 2. Pemberian bantuan peralatan dan/atau sosialisasi teknologi industri 3. Pemberian bantuan sertifikasi dan izin usaha untuk IKM	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**			**28,43%**	**42,38%**	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang, dari jumlah sudah banyak yang memasuki usia pensiun, serta yang mengikuti pendidikan teknis masih minim. 2. Rendahnya tingkat penyerapan dan impelementasi teknologi dan kemampuan mengembangkan teknologi alternatif dan etos kerja. 3. Terbatasnya anggaran pada Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan minimnya kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIK.	1. Melakukan realokasi anggaran untuk beberapa kegiatan dan belanja yang tidak dapat dilaksanakan. 2. Melaksanakan rapat koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri. 4. Menempatkan Sumber Daya Manusia (ASN) sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan kebutuhan instansi. 5. Melakukan pendampingan secara intensif ke Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RPIK.
	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		4 Dokumen	4 Dokumen		
		1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	4 Dokumen		
		1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen		
		1.3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	4 Dokumen		
Fasilitasi dan sosialisasi terhadap aplikasi SIINas	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**			100 %	100 %		
	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		4 Dokumen	4 Dokumen		
		1.1	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Appriach (OSS RBA)	4 Dokumen	4 Dokumen		

8. Urusan Pilihan Transmigrasi

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dan lokasi tujuan program ketransmigrasian yang telah menempatkan transmigran mulai tahun 1960, dengan dimulai penempatan di Sicanggang Kabupaten Langkat sebanyak 400 KK dan terakhir penempatan pada tahun 2009. Selama periode 1960-2009 tersebut Provinsi Sumatera Utara telah menempatkan transmigran sebanyak 29.630 KK (121.136 Jiwa) yang ditempatkan pada 14 lokasi Kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Tabel 3.73
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Transmigrasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan dan Capaian		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	-	20,25	20,25	100 %

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Provsu

Saat ini Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Sumatera Utara sudah tidak ada dan sudah diserahkan ke pihak Kabupaten sebagai wilayah dan warganya serta untuk pembinaan selanjutnya, hal ini berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa setelah 5 (lima) tahun sejak awal penempatan maka diserahkan kepada pihak Kabupaten, baik secara otoritas maupun pembinaannya sehingga dalam hal ini pihak Provinsi sudah tidak mempunyai kewenangan atas Eks UPT dimaksud karena sudah menjadi kewenangan Kabupaten kecuali diminta membantu untuk penyelesaian permasalahan.

Sementara saat ini muncul berbagai permasalahan dan potensi masalah yang berkaitan dengan lahan transmigrasi, hal mana disebabkan karena meningkatnya nilai ekonomis dari lahan transmigrasi dimaksud, adanya tekanan jumlah penduduk serta meningkatnya sarana prasarana, khususnya peningkatan kondisi jalan sehingga tidak ada lagi wilayah terisolir terutama lokasi transmigrasi. Hal inilah yang memunculkan rasa ingin memiliki lahan dimaksud.

Hal tersebut melatarbelakangi kegiatan yang ada di bidang Ketransmigrasian Proivinsi Sumatera Utara sehingga dianggarkan untuk penyelesaian permasalahan pertanahan di lokasi eks UPT Sumatera Utara. Target yang ada sebanyak 79 SPT/UPT, tetapi tidak ditangani seluruhnya karena yang ditangani adalah lokasi eks UPT yang punya permasalahan serta potensi permasalahan.

Dalam rangka mewujudkan adanya permukiman transmigrasi yang layak huni, layak lingkungan, layak usaha dan layak berkembang Dinas Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Kemendes PDTT dan pemerintah setempat (Kabupaten, Kecamatan dan Desa). Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk mengamankan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), penataan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial untuk kepentingan masyarakat.

Beberapa penyelesaian masalah pemilikan lahan transmigrasi yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan pada Tahun 2025 yaitu:

a. Mandailing Natal
   1) Bukit Langit : terdapat garapan PTPN IV 65% dan garapan PT. Palmaris 30% dimana akan diupayakan penyelesaian dengan PTPN IV dan PT. Palmaris.
   2) Sinunukan V : Tuntunan penerbitan SHM yang terjadi tumpang tindih dengan PTPN IV, untuk itu telah dilakukan rapat dengar pendapat antara Disnaker Kabupaten dengan DPRD.
   3) Sikara-kara I : Permasalahan penerbitan sertifikat tumpang tindih dengan PTPN IV, upaya penyelesaian dilakukan dimana warga transmigrasi sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Kemendes PDT dan Transmigrasi RI.
   4) Batahan I : belum terbitnya SHM warga Bukit Langit dan adanya tumpang tindih dengan PTPN IV, untuk masalah ini urusan ketransmigrasian telah dialihkan ke Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal.
   5) Eks UPT Sinunukan III dan IV : permasalahnnya yaitu adanya sisa lahan kas desa dan kelebihan 1 unit bangunan rumah pada saat pembangunan awal. Kelebihan unit saat ini diperuntukkan menjadi rumah ibadah mesjid dan gereja.
   6) Eks UPT Sikara I dan II : adanya sisa lahan kas desa, saat ini dikelola warga dan menjadi pemasukan desa.

b. Tapanuli Tengah
   1) Pulau Pakkat : SHM sudah terbit tetapi objek dan subjek tidak sesuai, untuk itu BPN kabupaten akan berkoordinasi berkelanjutan dengan pihak Disnaker kabupaten.
   2) Rawa Kolang I : Lahan Usaha (LU) I dan LU II tumpang tindih dengan Teluk Nauli, sehingga Disnaker Tapanuli Tengah harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yakni Bupati dan dinas yang berkaitan dengan bidang ketransmigrasian.
   3) Eks UPT Rawa Kolang III : telah terjadi okupasi sebagian lahan warga eks transmigrasi oleh warga sekitar dengan alas dasar hanya surat keterangan dari kepala desa, hal ini sudah ditanganin Polres Tapanuli Tengah.
   4) Eks UPT Lumut : ada pengaduan tokoh masyarakat eks UPT Lumut terkait terdapatnya penguasaan lain di atas lahan masyarakat eks UPT Lumut seluas ±200 Ha oleh pihak PT. FIA. Masalah ini sudah diselesaikan oleh BPN Kabupaten Tapanuli Tengah.

c. Toba, UPT Janji Maria : penerbitan SHM 50 bidang dari 100 bidang yang diusulkan dimana usulan penerbitan SHM diusulkan dari Disnaker yang disetujui Camat untuk dibuatkan SK Bupati. Selain itu permasalahan LU I dan II yang masih dalam kawasan hutan diupayakan penyelesaian dengan dimasukkan dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

d. Tapanuli Utara, UPT Simpang Bolon: permasalahan Lahan Pekarangan, LU I dan II masih dalam kawasan hutan, Sertifikat Lahan pekarangan untuk 29 Bidang sudah diterbitkan dengan SK Bupati.

e. Tapanuli Selatan
   1) Muara Upu ada beberapa permasalahan yaitu telah terjadi penggarapan lahan oleh warga sekitar, warga transmigrasi sudah meninggalkan lokasi, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial sudah hancur, untuk itu perlu perhatian dari pemerintah setempat.
   2) Rianiate I : dilakukan monitoring progres pembatalan 25 SHM, penyerobotan lahan oleh warga sekitar, dan telah terjadi konflik antar warga. Upaya yang sudah dilaksanakan yaitu kasus pembatalan 25 bidang SHM masuk dalam ranah pengadilan.

f. Padang Lawas, Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM) Ujung Batu V: lahan pekarangan sudah memiliki SHM, disinyalir sudah banyak warga yang memindahtangankan sesuai identifikasi tahun 2019 warga yang berada di lokasi tinggal 19 KK, hal tersebut saat ini sedang dalam proses pengadilan dan menunggu putusan.

g. Pakpak Bharat, UPT Sibagindar III: permasalahannya yaitu subjek penerima hak tidak sama dengan penempatan awal untuk itu proses penerbitan SHM sedang dalam proses. Masalah lainnya yaitu LU I dan LU II masih dalam kawasan hutan, untuk itu UPT Sibagindar III termasuk dalam program TORA.

Tabel 3.74
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
1. Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana permukiman transmigrasi 2. Meningkatkan kualitas keserasian lingkungan, mengintegrasikan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitarnya	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**					
	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	20,25%	20,25%	-	-

C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan dan subkegiatan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provsu Tahun 2025-2029 yaitu tahun anggaran 2025, sehingga setiap program dan kegiatan yang tercantum di dalam dokumen Renja Inspektorat Provsu Tahun 2025 tidak terlepas dari penetapan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Inspektorat Provsu Tahun 2025-2029 tahun anggaran 2025.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 sasaran strategis pada tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Kedua sasaran strategis ini didukung oleh indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.75
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provsu
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3
		3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%	91%
		4	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	73%	94,57%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82%	80,15%
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	89%	90,07%

Sumber : Inspektorat Provsu

Tabel 3.76
Capaian Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			**100%**	**100%**		
	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		85%	100%		
		1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	72 Laporan	58 Laporan		
		1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	82 Laporan	16 Laporan		
		1.3	Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	78 Laporan		
		1.4	Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan		
		1.5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	24 Laporan	60 Laporan		
		1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	2 Kesepakatan	0		
		1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95 Dokumen	31 Dokumen		
	2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		75%	100%		
		2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	1 Laporan		
		2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	38 Laporan		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			**100%**	**100%**		
	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	100%		
		1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Rekomendasi	0		
		1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	42 Rekomendasi	0		
	2	Pendampingan dan Asistensi		100%	97,75%		
		1.4	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	0		
		1.5	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah	0		
		1.6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	0		
		1.7	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 Perangkat Daerah	-		

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Secara garis besar pencapaian target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah telah dilaksanakan dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan tabel kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.
2) Capaian kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.
3) Capaian kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
4) Capaian kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Kedepannya, untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, maka harus dibuat berbagai kebijakan strategis atau inovasi yang nantinya dipergunakan sebagai acuan dan sarana dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Kebijakan dan inovasi ini sangat penting mengingat lingkup pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan dukungan dari berbagai komponen yang ada, termasuk didalamnya berupa regulasi, sumberdaya aparatur, dana dan sumber-sumber lainnya dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan target dan juga adanya penerapan regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 .

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang Provsu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.77
Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Provsu Tahun 2024 - 2025

No	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.a	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	90,00 - 92,50%	90,40%	90,50 – 92,50	NA (data dipublish Maret 2026)
2	Indeks Inovasi Daerah	55,50 - 57,50%	59,93%	57,50 – 60,01	64,79 (inovatif)
3	Indeks Daya Saing Daerah	NA	NA	3,4	3,82

Sumber : Bappelitbang Provsu

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Provsu ada mendukung program prioritas nasional ada 3, yaitu :

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, IPPD digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian ini adalalah dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Indeks Perencanaan Pembangunan meliputi penilaian kebijakan atas dokumen-dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Standar Nasional Nilai IPPD yaitu 91.00 – 100 dengan Kriteria Sangat Baik dan untuk Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 belum dipublish (data dipublish Maret 2026).

2) Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk Standar Nasional Indeks Inovasi Daerah adalah 60.01 – 100.00 dengan kriteria Sangat Baik, dan untuk Provinsi Sumatera Utara Nilai Indeks Inovasi Daerah 64,79 dengan Kategori Inovatif.

3) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur yang dikembangkan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk mengukur produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota). Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) demi kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, mengacu pada kerangka Global Competitiveness Index (GCI) dengan empat komponen utama (lingkungan pendukung, SDM, pasar, ekosistem inovasi) yang dijabarkan dalam 12 pilar daya saing. BRIN menyediakan data ini melalui dashboard interaktif dan buku panduan agar daerah bisa evaluasi mandiri dan memperbaiki strategi pembangunan.

Untuk tahun 2025 Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan beberapa kegiatan berupa :

1) Konsultasi Publik

Forum konsultasi publik penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 provinsi sumatera utara adalah untuk menyediakan wadah dialog antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghimpun aspirasi, saran, dan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan, antara lain yaitu :

a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional;
b. Menjaring aspirasi, saran dan masukan untuk penyempurnaan serta memperkaya substansi dokumen RPJMD dan RKPD agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
c. Mengidentifikasi isu strategis dan tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RPJMD dan RKPD;
d. Memastikan arah kebijakan pembangunan sejalan dengan visi, misi daerah; dan
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan akuntabel.

Adapun sasaran kegiatan adalah terhimpunnya masukan dan saran untuk penyempurnaan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara.

Forum konsultasi publik ini dilaksanakan pada hari kamis, 20 maret 2025, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan diikuti oleh kurang lebih 230 peserta yang terdiri dari unsur DPRD, unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara, unsur lembaga dan instansi vertikal, provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara (Aceh, Sumatera Barat dan Riau), perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera utara, unsur Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, pimpinan BUMN, BUMD dan swasta, akademisi, organisasi keagamaan,

organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga profesi, pimpinan media cetak dan insan pers.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan forum konsultasi publik penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara:

a. Pertama, agar tetap menjaga kesinambungan antara perencanaan pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota melalui dokumen pembangunan daerah yang terintegrasi dengan memperhatikan dan menyesuaikan target-target indikator pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi tingkatannya;
b. Kedua, memperhatikan hasil evaluasi rpjmd dan rkpd provinsi sumatera utara tahun sebelumnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan, baik terhadap target pembangunan yang telah tercapai maupun yang belum tercapai;
c. Ketiga, menyelaraskan dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dan strategis baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota ; dan
d. Keempat, agar menyesuaikan kemampuan keuangan dan sumber daya yang ada, melakukan pemetaan permasalahan serta menyusun skala prioritas pembangunan secara terukur dengan tetap memperhatikan beberapa isu strategis antara lain: ancaman resesi global; pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, perubahan iklim, disrupsi teknologi dan pemanfaatan produk unggulan daerah.

2) Kickoff dan Orientasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
Menyamakan persepsi arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang selaras dengan pembangunan nasional dalam hal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 (RKPD 2026, P-RKPD 2025 dan RPJMD 2025 – 2029.

3) Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tahun 2025
Dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 17 Juli 2025 di Kota Medan, tanggal 26 s/d 27 September 2025 di Kabupaten Batu Bara, tanggal 6 s/d 8 November di Kabupaten Simalungun dan tanggal 11 s/d 13 Desember 2025 di Kota Pematangsiantar. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 17 Juli 2025 menyimpulkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu segera dipercepat dan disempurnakan melalui penajaman substansi program, kesesuaian indikator kinerja, serta pemenuhan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan perencanaan. Hasil rapat menegaskan masih perlunya perbaikan pada sinkronisasi tujuan,

sasaran, dan program antar perangkat daerah agar selaras dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, serta pentingnya peran aktif OPD dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi dan asistensi. Pemerintah daerah diarahkan untuk fokus pada kualitas perencanaan yang terukur, realistis, dan berdampak, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang efektif dan akuntabel.

Rapat koordinasi di Kabupaten Batu Bara menyimpulkan perlunya penguatan komitmen pemerintah kabupaten dalam mendukung percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya melalui penyiapan dan validasi data, dukungan pembiayaan, serta kesiapan pelaksanaan program prioritas daerah. Rapat menekankan tindak lanjut konkret pengendalian inflasi cabai merah melalui program JASKOP dengan kelengkapan data pengadaan *Solar Dry Dome* (SDD) dan kerja sama dengan BUMD, serta pentingnya sinkronisasi program kabupaten dengan kebijakan dan target pembangunan provinsi agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi di Kabupaten Simalungun menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi provinsi–kabupaten/kota harus diarahkan pada percepatan PHTC melalui pendekatan *Theory of Change*, dengan penekanan pada kesiapan daerah, kejelasan target hasil, dan integrasi program lintas sektor. Pemerintah Provinsi menegaskan dukungan pendanaan UHC mulai 2026, penguatan PRESTICE di tingkat masyarakat, serta penajaman intervensi penanganan kemiskinan, stunting, dan TB berbasis data. Usulan program daerah dinyatakan harus komprehensif, terukur, dan berdampak nyata, menjadi dasar seleksi dalam *beauty contest* kolaborasi, sehingga pembangunan daerah ke depan tidak berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi pada hasil nyata dan keberlanjutan pembangunan Sumatera Utara.

Rapat koordinasi di Kota Pematangsiantar menyimpulkan bahwa percepatan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas utama melalui sinkronisasi program provinsi dan kabupaten/kota yang didukung data teknis lengkap serta kesiapan pelaksanaan di lapangan. Hasil desk verifikasi menegaskan perlunya perbaikan dan penajaman usulan daerah agar sesuai kriteria, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang terdampak paling parah, serta percepatan tindak lanjut berupa penetapan SK, proses pengadaan, dan pelaporan progres rutin. Pemerintah Provinsi menegaskan penyesuaian arah kebijakan dan APBD 2026 untuk memprioritaskan daerah terdampak bencana, mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, terkoordinasi, serta berorientasi pada mitigasi risiko dan ketahanan wilayah jangka panjang.

4) Pelaksanaan North Sumatera Innovation Day dan Seminar Internasional North Sumatera Innovation Day

Diselenggarakan pada tangal 19-20 November 2025 di Halaman Parkir Kantor Gubenur Sumatera Utara. Seminar Internasional dilaksanakan pada tanggal 26 November 2025 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan Tema "*Development of New Industrial Estates Based on Regional Potential as a Strategy to Increase Local Revenue, Investment, and Sustainable Economic Growth in North Sumatra*". Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2025. Seminar Internasional membahas strategi pembangunan industri Sumatera Utara yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif, industri hijau, investasi kompetetif, dan kolaborasi nmultipihak, termasuk pengenalan Kawasan Industri Strategis Sumatera (KISS) Tanjung Kasau.

5) Musrenbang Provinsi Sumatera Utara

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah Musrenbang Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2026 dan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Utara. Tujuan Pelaksanaan Musrenbang yaitu:

a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
c. Menyepakati arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
d. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
e. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional;

6) Focus Group Discussion Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Utara

Tujuan pelaksanaan rapat ini adalah Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dimana terdapat 3 (tiga) Proyek Strategis Nasional di Sumatera Utara antara lain Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Bioetanol Berbasis Tebu, dan Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, dalam rangka pencapaian implementasi Proyek Strategis Nasional tersebut, maka diperlukan langkah konkret dan kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

7) Pembahasan Pelaksanaan 9 Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Sumatera Utara
Tujuan pelaksanaan rapat ini adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

8) Forum Bappeda se Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan, Barnjarmasin
Dilaksanakan pada tanggal 1-5 Desember 2025, yang dihadiri oleh 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia dimana Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Forum Bappeda se-Indonesia Tahun 2025-2027. Ketua Forum Bappeda se-Indonesia (FBI) mempunyai peran yang strategis menjadi Orkestrasi Perencanaan berperan sebagai pengarah sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus juru bicara kepentingan seluruh Bappeda dalam memastikan kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. Melalui kepemimpinan forum ini, kualitas perencanaan daerah distandardisasi, praktik terbaik disebarluaskan, dan transformasi Bappeda menuju perencanaan berbasis data, inovasi, dan hasil nyata didorong secara nasional. Posisi ini menjadikan forum sebagai kekuatan strategis dalam mengawal pencapaian target pembangunan Indonesia secara efektif, terukur, dan berkeadilan antarwilayah.

9) Tuan Rumah Konreg PDRD ISE se Sumatera Utara Tahun 2025
Bappelitbang Sumatera Utara menjadi tuan rumah Konreg PDRB-ISE se-Sumatera 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober di Hotel Santika Dyandra Medan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera dengan tujuan finalisasi Produk Domestik Regional Bruto-Indikato Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) dan Penyempurnaan aplikasi untuk komunikasi dan diseminasi data ekonomi-sosial.

10) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).
Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) 2025 merujuk pada pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meraih Peringkat 5 Nasional dalam PPD 2025, menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang baik dan kolaborasi tim, serta fokus pada program strategis seperti Pendidikan (PHTC) dan Penguatan Tata Kelola Data untuk meningkatkan IPM dan kesejahteraan.

11) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025. Pada ajang tersebut, Bappelitbang Sumatera Utara berhasil meraih kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Informatif,

sekaligus memperoleh nilai tertinggi dan menempati peringkat pertama di antara OPD se-Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Bappelitbang Sumatera Utara dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyediaan layanan informasi yang mudah diakses, akurat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Capaian ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.78
Capaian Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
1. Integrasi Perencanaan 2. Optimalisasi Teknologi Informasi 3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan 4. Sistem tatakelola pemerintahan dan reformasi birokasi perencanaan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		100 %	100%	Belum maksimalnya pemanfaatan dukungan layanan administrasi (SDM dan sarana dan prasarana)	- Peningkatan sarana dan prasarana kantor - Optimalisasi kinerja pejabat fungsional - Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen (Renja 2026, P.Renja 2025, LKIP 2025, Evaluasi Renja 2025, Ev. Renja Tw.I-III/2025, RKA/DPA APBD 2026 dan RKAP/DPPA APBD 2025)		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen (Laporan Keuangan Tahun 2025, Laporan Keuangan Triwulan dan Semester 2025) dan 144 ASN		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen ASN, 1 Dokumen Non ASN dan 1 Dokumen Diklat)		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Penyediaan Bacaan, 1 Dokumen Arsip, 1 Dokumen SPBE)		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Pengadaan Barang, 1 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
				Distribusi Barang, 1 Dokumen Inventaris Aset)		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen (1 Dok/Lap Jasa Listrik & Air, 1 Dok/Lap jasa Komunikasi/Internet, 1 Dok/Lap Penyediaan Jasa Security, 1 Dok/Lap Jasa Cleaning Service		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146 Unit	146 Unit (Mobil, Sepeda Motor, AC, Komputer, Instalasi Gedung dan penunjang Lainnya/Sarana Prasarana)		
	8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2 Berita Acara	2 Berita Acara (1 BA Konsultasi Publik & 1 BA Musrenbang Provinsi)		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		**100%**	**100%**	Hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam perencanaan pembangunan	Pernyataan komitmen perangkat daerah dalam pencapaian target berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	4 dokumen (RKPD Tahun 2026, & P.RKPD Tahun 2025, Konsultasi Publik RKPD Provsu Tahun 2025, Musrenbang RKPD Provsu Tahun 2026, dan Forum		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
				lintas perangkat daerah)		
	2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen (1 Dok/Lap Evaluasi Pembangunan Daerah, 1 Dok/Lap Fasilitasi Kab/Kota)		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		14 Dokumen	100%	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belum diimplementasikan secara maksimal	-Memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran -Komitmen kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian target program/ kegiatan
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 dokumen	4 dokumen (Renaksi Percepatan PDT, Pembinaan Pokja PUG, Pembinaan Aksi Konvergensi Stunting, RAD TPB SDG's, dan Pembinaan PKH)		
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 dokumen	6 dokumen (Perencanaan keuangan, investasi dan aset, perencanaan makro ekonomi, perencanaan pariwisata terintegrasi, perencanaan PPRK, Laporan DBH-CHT, dan perencanaan bidang pertanian)		
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 dokumen	4 dokumen (Laporan pelaksanaan IPDMIP, Perencanaan bidang SDA, Cipta Karya, Tata Ruang dan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
				Perkim, perencanaan transportasi, perhubungan dan kominfo serta Laporan pelaksanaan PHJD dan perencanaan pengembangan kawasan strategis dan kerjasama)		
1. Perumusan rencana kelitbangan daerah; 2. Sinkronisasi pelaksanaan Kelitbangan dengan tupoksi dan SOTK; kewenangan daerah; dan Prioritas pembangunan daerah; 3. Pengembangan sistem pengendalian mutu Kelitbangan; dan 4. Pengembangan system kebijakan berbasis riset terintegrasi	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**		100 %	100 %		
	1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen Analisis data & Informasi		
	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	2 Laporan (1 Lap Fasilitasi, Evaluasi Penilitan Bid Pemerintahan Umum, & 1 Lap fasilitasi, Evaluasi Data & Pengkajian Peraturan)		
	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	1 Dokumen Hasil Penelitian Ketenagakerjaan	Bagaimana Indentifikasi batuan dasar dan 4 erupsi utama Geopark Caldera Toba	Hasil penelitian ini menjadi rekomendasi bagi stackholder yang membutuhkan
	4	Penelitian dan Pengembang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen (1 Dok Hasil Penelitian LH, & 1 Dok Hasil Penelitian PU)	Bagaimana farming model dalam optimalisasi produktivitas pertanian di sumatera utara	Hasil penelitian ini menjadi rekomendasi bagi stackholder yang membutuhkan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	5	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Laporan	3 Laporan (1 Lap Diseminasi Inovatif, 1 Lap Diseminasi Hasil Kelitbangan, 1 Lap fasilitasi HKI)	Bagaimana pengembangan Inovasi Daerah	Hasil Inovasi ini menjadi rekomendasi bagi stackholder yang membutuhkan

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Target dan capaian indikator kinerja utama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.79
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provsu Tahun 2025

No	Indikator	Target	Capaian
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
2	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasi kan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	22 %	22,80 %
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	38 %	26,99 %
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar	92 %	110,58 %
5	Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	0,8 %	(67,79 %)
6	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu	100 %	100 %
7	Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD/Perubahan APBD/ Pertangggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %	100 %
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	12 %	1,05 %
9	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	84,42 %	5,31 %

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Dari tabel di atas, capaian indikator tersebut kami jelaskan sebagai berikut :

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.
   Laporan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2) Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasi kan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)
   Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah) dengan target sebesar 22 % namun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 besaran persentase alokasi anggaran Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah) sebesar 22,80 %

3) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan target sebesar 38 % namun pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 besaran Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 26,99 %

4) Persentase Realisasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar
Persentase Realisasi Belanja urusan wajib pelayanan dasar dengan target sebesar 92 % dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar 110,58%

5) Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
Persentase Penurunan Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 dengan terget sebesar 0,8 % dan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 Persentase Penurunan Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar minus 67,79 % atau adanya kenaikan besaran Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), hal ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran dan pengendalian realisasi belanja oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada akhir periode Tahun Anggaran 2025.

6) Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu
Persentase Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada BPK RI dengan target 100 % atau tepat waktu dan capaian pada Tahun Anggaran 2025 adalah 100 % atau tepat waktu

7) Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.
Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD Tahun Anggaran 2026, Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Angaran 2024 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan target 100 % dan capaian pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 100 %.

8) Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2025 dengan target 12 % dan capaiannya sebesar 0,01 % yang bersumber dari hasil laporan kartu inventaris barang (KIB). Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap tidak tercapai disebabkan karena adanya efisiensi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025.

9) Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi
Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi pada Tahun Anggaran 2025 dengan target 84,42 % dan capaiannya sebesar 5,31 % . Persentase Tanah milik Pemprovsu yang disertifikasi tidak tercapai target disebabkan dari 564 sertifikat tanah yang diusulkan ke BPN RI oleh Pemerintah provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 hanya 30 Sertifikat tanah yang selesai.

Tabel 3.80
Capaian Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			**100%**	**100%**		
	1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
		1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	49 Kegiatan	49 Kegiatan	-	-
		1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49 Kegiatan	49 Kegiatan	-	-
		1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	49 Kegiatan	49 Kegiatan	-	-
		1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	49 Kegiatan	49 Kegiatan	-	-
		1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**					
		2.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	33 Kegiatan	33 Kegiatan	Kurangnya kompentensi Pegawai dalam memahami Pengelolaan Keuangan Daerah	melakukan pembinaan guna meningkatkan kompetensi

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
			tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				pengelolaan keuangan Daerah
		2.2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	33 Kegiatan	33 Kegiatan		
		2.3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	33 Kegiatan	33 Kegiatan		
		2.4	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	15 dokumen	15 dokumen		
		2.5	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	2 Laporan	2 Laporan		
		2.6	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	33 Dokumen	33 Dokumen		
	2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan		91 dokumen	91 dokumen		
		2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	49 dokumen	49 dokumen		
		2.2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dookumen	12 dookumen		
		2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 laporan	12 laporan		
		2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	12 laporan	12 laporan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
			Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
		2.5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen		
	3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		19 dokumen	19 dokumen		
		3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	7 dokumen	7 dokumen		
		3.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	7 dokumen	7 dokumen		
		3.3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
		3.4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	4 dokumen	4 dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Daerah		13 dokumen	13 dokumen		
		4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
		4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen		
		4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 dokumen	4 dokumen		
		4.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 dokumen	4 dokumen		
	5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		4 dokumen	4 dokumen		
		5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 dokumen	4 dokumen		
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolan Barang Milik Daerah	**Program Barang Milik Daerah**			100%	100%		
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		**256 Dokumen**	**256 Dokumen**		
		1.1	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
		1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 dokumen	42 dokumen	-	-
		1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	42 dokumen	42 dokumen		
		1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	42 dokumen	42 dokumen		
		1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Terdapat masalah sengketa tanah pemprovsu yang dikuasai pihak lain	Melibatkan Kejaksaan (Jaksa Pengacara Negara) untuk memberikan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							pendapat hukum (Legal Opinion) dalam proses penyelesaian sengketa lahan aset, sehingga dinas terkait berani melangkah untuk mensertifikasi lahan tersebut
		1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
		1.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 dokumen	42 dokumen		
		1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
		1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 dokumen	42 dokumen		
		1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 dokumen	42 dokumen		

4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, dengan capaian pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.81
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provsu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2025	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,37%	1,59%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provsu

Capaian realisasi diatas lebih tinggi dari taget yang ditetapkan, formulasi penghitungan realisasi dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

$$\frac{5.062.106.690.315}{317.400.000.000.000,00} \times 100\% = 1,59\%$$

Secara umum rasio pajak daerah terhadap PDRB dalam kategori "Sangat Tinggi". Dalam arti kata, melalui peningkatan PAD, Bapenda secara langsung mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah berupa pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB mencerminkan optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah dan memberikan dampak sebagai berikut :

1) Dampak Langsung
   a. Meningkatnya efektivitas pemungutan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diikuti oleh peningkatan kontribusi pajak secara proporsional.
   b. Keadilan fiskal yang lebih baik, karena potensi ekonomi daerah dapat dikonversi menjadi pendapatan publik untuk kepentingan bersama.
2) Dampak Tidak Langsung
   a. Peningkatan daya saing daerah, karena pendapatan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah provinsi membangun infrastruktur ekonomi, kawasan industri, serta mendukung pengembangan kawasan strategis seperti KEK dan wilayah industri unggulan.
   b. Iklim usaha yang lebih kondusif, didukung oleh kepastian regulasi, digitalisasi layanan pajak, dan transparansi sistem perpajakan daerah.

c. Meningkatnya kepercayaan publik, karena pajak yang dibayarkan masyarakat dan dunia usaha kembali dalam bentuk layanan publik dan pembangunan yang nyata. Rasio pajak terhadap PDRB yang membaik menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah berjalan seiring dengan penguatan keuangan daerah secara sehat dan berkelanjutan

IKU ini menunjukkan kontribusi sektor pajak daerah terhadap aktivitas ekonomi regional. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak daerah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang tercermin dalam PDRB, serta menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal dan intensitas pajak daerah.

Secara efektivitas PAD, capaian IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah masuk dalam kategori "Sangat Efektif" dengan realisasi 116,81 %. Hal ini berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dengan Target tahun 2025 sebesar 5.605.254.375.313,00 dan Realisasi 5.062.106.690.315,09, Retribusi Daerah target sebesar 192.531.703.635,00 dan realisasi sebesar 208.396.410.286,52, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target sebesar 353.166.995.232,00 dan realisasi sebesar 329.075.868.190,00, Lain-lain PAD yang Sah dengan target sebesar 268.348.533.574,00 dan realisasi sebesar 99.844.559.140,39. Dan Pendapatan Transfer dengan Target sebesar 5.880.935.266.000,00 dan realisasi sebesar 5.606.394.182.790,00, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni Dana Perimbangan dengan Target sebesar 5.880.935.266.000,00 dan realisasi sebesar 5.606.394.182.790,00. Serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target sebesar 407.863.968.629,00 dan realisasi sebesar 430.391.340.142,00 terdiri dari Pendapatan Hibah dengan target sebesar 53.309.515.000,00 dan Realiasi sebesar 53.919.467.600,00 , Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan target sebesar 354.554.453.629,00 dan realisasi sebesar 376.471.872.542,00. Maka Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 dengan Target sebesar 12.708.100.862.383,00 dan Realisasi sebesar 11.736.209.050.864,00.

Berbagai upaya strategis telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2025, di antaranya :

1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui Pembentukan Tim Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
2) Kegiatan razia terpadu kendaraan bermotor;
3) Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana melalui pembangunan gedung kantor UPTD, pengadaan barang jasa dan pemeliharaan yang dapat mendukung pelayanan kesamsatan;
4) Pelatihan kesamsatan terpadu;

5) Optimalisasi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat melalui media sosial, media luar ruang (*video tron*), media cetak dan media elektronik;
6) Melakukan sosialisasi dan penyulahan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat;
7) Melakukan integrasi data NIK dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi dan mencegah penghindaran pajak;
8) Optimalisasi pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dalam upaya mendekatkan pelayanan, konsultasi perpajakan, pengaduan perpajakan, edukasi dan publikasi pajak kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;
9) Optimalisasi koordinasi, sinergitas dan komunikasi dengan perangkat pemerintah di kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan stakeholder lainnya;
10) Transformasi digital melaluiTransformasi digital melalui *e-Samsat Sumut* yaitu kerja sama dengan Bank Mandiri (ATM dan Livin Mandiri) untuk pembayaran PKB, menggantikan metode pembayaran melalui *e-Commerce* dan ATM Bank Sumut dan Penambahan Kanal Pembayaran PKB melalui QRIS dan EDC.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung IKU Persentase PAD terhadap Pendapatan adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah melalui sub kegiatan :

1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
3) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
4) Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tabel 3.82
Capaian Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**						
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		120 Laporan	120 Laporan		
		1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Sub Kegiatan ini belum linear dengan tugas dan fungsi Bidang Pengampu	Sedang dikoordinasikan dengan Kemendagri
		1.2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	12 Laporan	12 Laporan	Belum Tersusunnya Kajian Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Provsu	Membuat Kajian Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan PAD Provsu
		1.3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	3 Laporan	3 Laporan	Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah	Membentuk Tim Optimalisasi Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah
		1.4	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Perhitungan denda PKB dan opsen PKB Perhitungan tunggakan PKB setelah opsen diberlakukan Kurangnya pelatihan terkait kesamsatan untuk SDM Penerapan PAP sesuai Pergub Nomor 14 Tahun 2025 yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2025 namun karena aplikasi baru bisa berjalan di Bulan Oktober 2025 sehingga mengakibatkan adanya	Perubahan Perda dan Pergub tentang Pajak Daerah serta kurangnya sosialisasi tentang Pajak dan Opsen Pajak perlu ditingkatkan Perlunya peningkatan SDM seperti pendidikan dan pelatihan tentang Pajak Penetapan SKPD Kurang Bayar / Lebih Bayar untuk penetapan PAP Masa Pajak Maret s.d.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						lebih/kurang bayar yg sudah dilakukan WP berdasarkan penetapan pajak dengan dasar pergub 24 Tahun 2011 Formula Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (DBH PAP) Tahun 2025 tidak mengakomodir Potensi Penerimaan PAP sehingga menyebabkan DBH PAP Kabupaten Toba menurun drastis. Banyaknya Nilai Jual Alat Berat yang tidak terdapat pada Permendagri dan Pergub sebelumnya NJAB yang tidak ada ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pemungutan PBBKB atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, untuk mesin genset dan mesin industri yang digunakan, bukan merupakan objek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023	September Tahun 2025 Usulan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, formula DBH PAP agar mengakomodir Potensi Penerimaan PAP NJAB yang tidak ada ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Pergub 14 Tahun 2025, NJAB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatan anannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda Perubahan Pergub Nomor 14 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, agar menyesuaikan dengan UU Nomor 1 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Belum adanya sistem kendali dan tindak lanjut terhadap pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya Asta Cita keempat Presiden Republik Indonesia, yaitu ‘‘Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,’’ serta Asta Cita ketujuh, yakni ‘‘Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.’’

Selaras dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BPSDM juga mendukung kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, khususnya Misi Pertama, ‘‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),’’ dan Misi Ketiga, ‘‘Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.’’

Dalam periode tahun 2025–2029, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan Aparatur Sipil Negara. Sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan pada sumber daya aparatur.

Adapun target dan capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.83
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu Tahun 2025 – 2030

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Akhir Renstra	Target Kinerja Tahun (%)						Realisasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025
Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi	31,75	29,80	30,05	30,30	30,85	31,35	31,75	30,21
1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	18.000 ASN	3,88 (700 ASN)	11,11 (2.000 ASN)	16,66 (3.000 ASN)	19,44 (3.500 ASN)	22,22 (4.000 ASN)	26,66 (4.800 ASN)	20,02 (3604 ASN)
2. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	72.000 ASN	5,83 (4.200 ASN)	13,88 (10.000 ASN)	16,38 (11.800 ASN)	19,72 (14.200 ASN)	21,25 (15.300 ASN)	22,91 (16.500 ASN)	7,1 (5.111 ASN)

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu

Dari tabel diatas BPSDM menargetkan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Dimensi Kompetensi pada tahun 2025 adalah 29,80 dengan target akhir Renstra yakni 31,75. Realisasi IP ASN Dimensi Kompetensi pada tahun 2025 adalah 30,21 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKN Pusat, nilainya berada diatas dari target yang ditetapkan.

BPSDM juga menargetkan pada tahun 2025-2030 sebanyak 18.000 ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional, dan sebanyak 72.000 ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasanya realisasi kinerja pada tahun 2025 terkait jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melebihi dari target kinerja yang ditetapkan, dimana hal ini bisa terwujud disebabkan dukungan dari kegiatan-kegiatan berikut :

Tabel 3.84
Tabel Kegiatan-Kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimtek Kepamongprajaan Bagi Camat	40 Orang
2	Pelatihan Perencanaan Kontingensi Penanggulangan Bencana	40 Orang
3	Orientasi DPRD	35 Orang
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan 1 & 2	77 Orang
5	E-Learning Sumut Berkah Angkatan I	995 Orang
6	Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) IPDN Angkatan 1 & 2	78 Orang
7	E-Learning Sumut Berkah Angkatan II	826 Orang
8	Pelatihan Kolaborasi Kompetensi Fungsional Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pada Menuju Sumut Berkah	40 Orang
9	E-Learning Sumut Berkah Angkatan III	1.241 Orang
10	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan 3, 4, & 5	122 Orang
11	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1	51 Orang
12	Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) Kabupaten/Kota	305 Orang
13	E-Learning Sumut Berkah Angkatan IV	1.081 Orang
14	E-Learning Sumut Berkah Angkatan V	813 Orang
15	E-Learning Sumut Berkah Angkatan VI	40 Orang
16	E-Learning Sumut Berkah Angkatan VII	40 Orang
17	Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah	34 Orang
18	Orientasi PPPK	2.857 Orang
	Jumlah	**8.715 Orang**

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa realisasi SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pada Tahun 2025 adalah sebanyak 8.715 orang dari target 4.900 orang atau sebesar 177,04%. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan pelaksanaannya terselenggara dengan baik karena didampingi dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

Tabel 3.85
Capaian Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memenuhi Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Manajerial, Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintah serta Sertifikasi Kompetensi ASN Seluruh Provinsi Sumatera Utara.	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**			**100%**	**100%**		
	1	Pengembangan Kompetensi Teknis		100%	100%		
		1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40 ASN	40 ASN	-	-
		2.1	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100%	100%		
		2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
		2.2	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
		2.3	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Dokumen	2 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		2.4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2897 ASN	2897 ASN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Peningkatan Pelayanan BLUD					
		1.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-

6. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.86
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provsu
Tahun 2024 – 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	-	-	79,94 Poin	81,57 Poin
		Nilai Sistem Merit	340 Poin	343,5 Poin	343,5 Poin	343,5 Poin

Sumber : Badan Kepegawaian Provsu

1) Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Penilaian IP ASN baru menjadi Indikator Badan Kepegawaian pada tahun 2025, sehingga di tahun 2024 tidak ada ditargetkan Nilai IP ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemprovsu yang ditampilkan https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP/nilaiASN per tanggal 03 Februari 2026 adalah:
a. IP ASN PNS 82,01;
b. IP ASN PPPK 81,12.

Sehingga Indeks Profesionalitas ASN Pemprovsu adalah 81,57 poin, dengan perhitungan: (IP ASN PNS + IP ASN PPPK) / 2 = (82,01 + 81,12)/2 = 81,57 poin. Target Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 79,94 poin, terealisasi 81,57 poin atau 102,04%.

2) Nilai Sistem Merit

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 492 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memperoleh hasil penilaian pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 343,5 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima) dan Indeks 0,84 (nol koma delapan empat).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan penilaian sistem merit dengan kategori Sangat Baik, berdasarkan Permenpan & RB Nomor 40 Tahun 2018, untuk capaian kinerja Nilai Sistem Merit dengan Kategori Sangat Baik dievaluasi 2 tahun sekali. Maka pada Tahun 2025 Nilai Sistem Merit Pemprovsu masih dengan target dan capaian yang sama yakni 343,5 poin.

Tabel 3.87
Capaian Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100 %**	**100 %**		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14 Dokumen	100%		
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	96,58%		
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang	133 Orang		
		2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	559 Dokumen		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		
		3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket		
		3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	6 Orang		
		3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	360 Orang		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	116,67%		
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket		
		4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket		
		4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
		4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
		4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	6 Dokumen		
		4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
	5	Pengeadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0		
		5.1	Pengadaan Mebel	0	0		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	95,56%		
		5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	650 Laporan		
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan		
		5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan	0 Laporan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%		
		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit		
		6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	26 Unit		
		6.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	45 Unit	45 Unit		
		6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
	Program Kepegawaian Daerah			**100%**	**105,48%**		
	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100%	96,51%		
		1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0 Dokumen		
		1.2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan		
		1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1420 Dokumen	1222 Dokumen		
		1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1 Lembaga		
		1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	41 Dokumen	41 Dokumen		
		1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Laporan	0 Laporan		
	2	Mutasi dan Promosi		100%	145,09%		
		2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	550 Dokumen	577 Dokumen		
		2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	7800 Laporan	7671 Laporan		
		2.3	Pengelolaan Promosi ASN	150 Dokumen	348 Dokumen		
	3	Pengembangan Kompetensi ASN		100%	89,94%		
		3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	150 Orang	0 Orang		
		3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15 Dokumen	30 Dokumen		
		3.3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	0 Dokumen	0 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		3.4	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	0 Orang	0 Orang		
		3.5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0 Dokumen	0 Dokumen		
		3.6	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Laporan	0 Laporan		
		3.7	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	2.035 Orang	1.421 Orang		
	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100%	90,37%		
		4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	492 Dokumen	492 Dokumen		
		4.2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	3.000 Orang	2.005 Orang		
		4.3	Pembinaan Disiplin ASN	70 Orang	73 Orang		
		4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	0 Laporan		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%		
		1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	40 Dokumen		
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%		
		2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket		
		2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket		
		2.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%		
		3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
		3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%		
		4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit		
		4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penanggulangan Bencana. Sasaran strategis BPBD Provinsi Sumatera Utara ialah penurunan risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu, Indeks Risiko Bencana (IRB).

Tabel 3.88
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	
		Target	Realisasi
Penurunan Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Risiko Bencana	157,53 Poin	Belum Rilis BNPB

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

IRB Kajian Resiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, Indeks Risiko Bencana (IRB) diterbitkan oleh BNPB setiap tahun nya. IRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 belum dirilis BNPB Poin dimana IRB tersebut target 2025 sebesar 157,53 dan menunggu hasil rilis BNPB Tahun 2025.

Program penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penanggulangan Bencana yang mencakup tahap pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana.

Tabel 3.89
Capaian Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
	1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 %	80%	-	-
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	90%	-	-
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	80%	Minimnya kegiatan pelatihan teknis kebencanaan yang dapat diikuti ASN	Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas pelatihan penanganan bencana
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100%	-	-
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100%	Kurang nya Operasional Kendaraan dalam Penanggulangan Bencana	Berkoordinasi dengan pihak yang menyetujui akan melalukan pengadaan barang
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100%	-	-
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100%	Proses pengalihan aset kendaraan dari BNPB belum sepenuhnya selesai, sehingga sulit untuk pembayaran pajak kendaraan	Berkoordinasi dengan BNPB untuk penyelesaian pengalian status aset
	Program Program Penanggulangan Bencana						
	1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		1200 orang	2208 Orang	Terjadinya Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian Prioritas Kegiatan	Pelaksanaan Sosialisasi KIE Secara Mandiri di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Utara Kepada 2208 Orang pada Tahun 2025
		1.1	Sosialiasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1200 orang	2208 Orang		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	85%	Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian Prioritas Kegiatan	Perencanaan lebih matang
		2.1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200 Orang	200 Orang		
		2.2	Pengelola Risiko Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
		2.3	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	-		
		2.4	Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	250 Orang	100 Orang		
	3	Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	90%	Jarak dari kantor BPBD Provsu dengan lokasi bencana cukup jauh, menyebabkan waktu pelayanan menjadi lama	Penguatan kapasitas BPBD Kab/Kota sebagai pihak yang berada di lokasi bencana
		3.1	Pencaraian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Laporan	4 Laporan		
		3.2	Penyediaan Logistik Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana	33 Kab/Kota	17 Kab/kota		
		3.3	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	33 Kab/Kota	18 Kab/kota		
	4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100 %	93%	Masih sulitnya koordinasi penanganan pascabencana antar OPD	Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis terkait.
		4.1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	100 %	99 %		
		4.2	Bimbingan Teknis Pascabenca Provinsi	90 Orang	-		
		4.3	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	100 %	100 %		
		4.4	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	6 Dokumen	2 Dokumen		
		4.5	Pembinaan dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/kota		

8. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sebagian besar kegiatan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2025 telah terlaksana sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan dokumen anggaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 100.2.6.7/527/BP/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 – 2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah **Nilai Kepuasan Pelayanan** yang terdiri dari Pelayanan Pengunjung/Tamu Mess Pemprovsu Jakarta, Pelayanan Pengunjung/Tamu Mess Pemprovsu/Asrama Pemprovsu Yogyakarta, dan Pelayanan Pengunjung Anjungan Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah.

Untuk mengukur IKU tersebut metode yang dilakukan sama dengan mengukur IKU sebelumnya yaitu dengan penyebaran kuesioner/daftar pertanyaan yang disebarkan kepada masyarakat/mahasiswa maupun tamu yang menginap atau datang ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Anjungan Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Unsur yang dinilai dalam kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang menjelaskan bahwa dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan instansi pemerintah meliputi 9 unsur pelayanan, antara lain :

1) Persyaratan;
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3) Waktu penyelesaian;
4) Biaya/tarif;
5) Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6) Kompetensi pelaksana;
7) Perilaku pelaksana;
8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
9) Sarana dan prasarana;

Kemudian hasil kuesioner tersebut diolah untuk memperoleh nilai kepuasan masyarakat. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dengan mengadopsi rumus tersebut, maka diperoleh formulasi untuk mengukur IKU Badan Penghubung Daerah Provsu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.90
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provsu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Kepuasan Pelayanan	$\frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi}\ x\ Nilai\ Penimbang$	Kuesioner

Sumber : Badan Penghubung Provsu

Sesuai dengan metode pengukuran IKU dilakukan dengan penyebaran kuesioner/daftar pertanyaan yang disebarkan kepada pengunjung/tamu yang menginap di Mess Pemprovsu Jakarta, pengunjung/tamu yang menginap di Mess/Asrama Pemprovsu Yogyakarta serta Pengunjung Anjungan Sumatera Utara di Taman Mini Indonesia Indah.

Pengisian kuesioner Kepuasan Pelayanan terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sejak awal tahun. Barcode Kuesioner dicetak dan ditempel di Lobby Mess Pemprovsu Jakarta dan di isi pengunjung Mess Pemprovsu pada saat tamu *check-out* dan diperoleh responden sebanyak 827 orang. Untuk Mess/Asrama Pemprovsu Yogyakarta, kuesioner diberikan Barcode Kuesioner dicetak dan ditempel di Lobby Mess Pemprovsu Yogyakarta dan di isi pada saat tamu *check-out* dan diperoleh responden sebanyak 340 orang dan untuk Anjungan Sumatera Utara TMII, kuesioner di isi olleh pengunjung/ wisatawan dan diperoleh responden sebanyak 303 orang.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara, target capaian IKU dan hasil capaian IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.91
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provsu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Sumber Data
1.	Nilai Kepuasan Pelayanan	91	91,01	Kuesioner

Sumber : Badan Penghubung Provsu (Hasil Kuisioner, diolah)

Kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2025 telah memenuhi dan sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.92
Capaian Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	96,18%		
		1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		
		1.2	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	87,68%		
		2.1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%		
		3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				
		3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		50 Orang		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	99,08%		
		4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket		
		4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket		
		4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Paket	1 Paket		
		4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	2 Paket	2 Paket		
		4.5	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	11 Paket	11 Paket		
		4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan		
		4.7	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%		
		5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	99,42%		
		6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan		
		6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Laporan	1 Laporan		
		6.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	4 Laporan		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	97,93%		
		7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	34 Unit	34 Unit		
		7.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2Unit		
		7.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun		
	Program Pelayanan Penghubung						
	1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		100%	77,38%		
		1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	9 Laporan	8 Laporan	Gagal bayar dikarenakan ada syarat pembayaran yang tidak terpenuhi oleh penyedia	
		1.2	Pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat	9 Laporan	9 Laporan		
		1.3	Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	13 Laporan	13 Laporan		
		1.4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	5 Laporan	5 Laporan		

9. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provsu sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provsu, adalah sebagai berikut :

1) Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2) Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N;
3) Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N;
4) Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk :

1) Menetapkan rencana kerja tahunan;
2) Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3) Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
5) Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provsu Tahun 2025 seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.93
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provsu Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2025		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	90 %	90 %	100 %
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	50 %	28,57 %	57,14 %
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Indikator pertama adalah Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Target untuk indikator ini adalah 100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 100%.

Survey diisi sendiri oleh responden (pimpinan dan anggota DPRD) sebagai penerima layanan melalui google form. Hasil yang diterima menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk memberikan pelayanan sudah maksimal, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kepuasan pengguna layanan. Survey berupa google form dan diisi secara sampling sebanyak 60 responden. Terdiri dari 9 unsur pelayanan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.

Indikator kedua menunjukkan ketepatan penetapan Perda APBD, dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Realisasi indikator ini diperoleh dari telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang APBD yakni :

1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Indikator ketiga adalah Persentase Penetapan Ranperda Tahun N, dengan target sebesar 50% dan realisasi sebesar 28,57%. Realisasi didapat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 38/K/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 1 Ranperda di luar Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dari 27 usulan ranperda yang disusun, terdapat 10 usulan ranperda yang berasal dari Inisiasi DPRD. Sebanyak 1 Ranperda Kumulatif Terbuka dan 15 Ranperda *'Carry Over'* atau dilanjutkan pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan pada tahun 2025, terdapat 8 Ranperda yang disahkan , yaitu :

1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran;
2) Ranperda tentang Kentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum; (promperda yang dilanjutkan)
3) Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (promperda yang dilanjutkan)
4) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029; (Inisiasi Anggota DPRD)
5) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara; (promperda dilanjutkan)
6) Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Perseroda); (promperda dilanjutan)
7) Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. (promperda dilanjutkan)
8) Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan. (merupakan Ranperda di luar dari Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara).

Indikator Kinerja Utama keempat yaitu Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki target sebesar 100% dan mencapai realisasi 100%. Capaian ini didukung oleh terlaksananya seluruh jadwal kunjungan kerja Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kunjungan kerja Komisi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga seluruh agenda pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu.

Tabel 3.94
Capaian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Terwujudnya Pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
	1	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	78,33 %	Anggota DPRD biasanya memiliki jadwal yang padat dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Mereka mungkin menganggap bahwa melibatkan diri dalam pemeriksaan kesehatan akan mengganggu jadwal kerja mereka.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan jadwal anggota DPRD dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan terkait waktu
		1.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100 Orang	100 Orang		
		1.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6 Paket	6 Paket		
		1.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100 Orang	35 Orang		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
	1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		33 Dokumen	14 Dokumen	- Tahapan pembentukan PERDA yang panjang sehingga pembahasan propemperda dilaksanakan secara *carry over* - Sulitnya menyatukan jadwal dewan dalam pembahasan propemperda	Penyusunan jadwal dewan terorganisir baik sehingga tidak menghalangi pelaksanaan tugas pokok DPRD
		1.1	Pembahasan Rancangan Perda	28 Perda	9 Perda		
		1.2	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	5 NA	5 NA		
	2	Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	83,44%	Padatnya jadwal Dewan sehingga ada bebebrapa Dewan yang tidak mengambil melaksanakan sub kegitan tersebut	Melakukan evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kendala jadwal sejak dini serta melakukan
		2.1	Pendalaman Tugas DPRD	100 Orang	100 Orang		
		2.2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1176 Kali	1138 Kali		
		2.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	38 Orang	38 Orang		
		2.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang		
		2.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							penyesuaian rencana kerja agar target kinerja dapat tercapai secara maksimal.
	3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	98,56%	Tingginya intensitas agenda kedewanan berdampak pada keterbatasan waktu sebagian Anggota DPRD, sehingga tidak seluruh sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dapat dilaksanakan sesuai rencana, yang berakibat pada belum optimalnya capaian target kegiatan.	Melakukan penguatan koordinasi perencanaan agenda antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan, menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan secara lebih fleksibel, serta mengoptimalkan perencanaan jadwal agar pelaksanaan seluruh sub kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang ditetapkan.
		3.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	500 Laporan	500 Laporan		
		3.2	Pelaksanaan Reses	3 Kali	3 Kali		
		3.4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	630.000 Orang	602.720 Orang		
	4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		20 Laporan	20 Laporan		
		4.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	20 Laporan	20 Laporan		
	5	Fasilitasi Tugas DPRD		100 %	100 %		
		6.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50 Laporan	50 Laporan		
		6.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18 Dokumen	18 Dokumen		
	6	Pembahasan Kebijakan Anggaran		100%	70%		
		7.1	Pembahasan APBD	50 Laporan	50 Laporan		
		7.2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

10. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Utara

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.95
Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan dan Otda
Setdaprovsu Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja Utama	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Penetapan Batas Wilayah Antar Provinsi	-	-	15	2 Pilar
2	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,7	2,9	3,6	2,8
3	Jumlah Kerjasama yang Terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

Capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu antara lain sebagai berikut :

1) Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara TA. 2024, melalui surat Nomor 100.1.7/2479/2025 tanggal 19 Maret 2025.
2) Penyampaian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI melalui aplikasi elppd.kemendagri.go.id.
3) Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang.
4) Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi sebanyak 1 orang.
5) Fasilitasi Kerja Sama Daerah, yaitu :

Tabel 3.96
Data Fasilitasi Kerja Sama Daerah Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor dan Tanggal Penetapan
1	Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Penanganan sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik.	No. 100.3.7/10647/2025 No. 100.3.7/914225 No. 100.3.7/ 5757 Tanggal 6 November 2025
2	Universitas Sumatera Utara	Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Provinsi Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	No. 100.3.7/2614/2025 No. 6294/UN5.1.R/KP.00.05/2025 Tanggal 20 Maret 2025

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor dan Tanggal Penetapan
3	Universitas Negeri Medan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Provinsi Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan	No. 100.3.7/2613/2025 No. 910/UN33/KS/2025 Tanggal 20 Maret 20245
4	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Provinsi Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan	No. 100.3.7/2612/2025 No. 1318/MoU/II.3.AU/UMSU/B/ 2025 Tanggal 29 April 2025
5	Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara	Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Tugas Belajar bagi Dokter Asli Kepulauan Nias dan PNS Wilayah Provinsi Sumatera Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara	No. 000.4.7.2 /3421/DINKES/V/ 2025 No. 6140/UN5.2.1.1.D/HK.09/2025 Tanggal 14 Mei 2025
6	PT. Cipta Aksi Bersama (Creation)	Penyelenggaraan Event Trail Of The Kings by UTMB	No. 500.13/1530/Disbudparekraf No. 019/PKS/CAB-DKPEKSU/VI/25 Tanggal 1 Juli 2025
7	Yayasan Gajah Sumatera Utara Aceh (YAGASU ACEH	Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Dataran Tinggi, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/4833/2025 No. 02/YGS-SUMUT/KB/V/2025 Tanggal 3 Juni 2025
8	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)	Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Dataran Tinggi, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/5295 No. 04/AU.1/KB/BPODT/VI/2025 Tanggal 18 Juni 2025
9	Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa	Penguatan Daya Dukung Berbasis Kehutanan dan Lingkungan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Demi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/10098/2025 No. 003/TAHUKAH/MoU/X/2025 Tanggal 27 Oktober 2025
10	Yayasan Ekosistem Lestari	Penguatan Fungsi Konservasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya secara Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/10096/2025 No. 123/X/2025/ YEl-MDN Tanggal 27 Oktober 2025

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor dan Tanggal Penetapan
11	Yayasan Pelestarian Ragam Hayati dan Cipta Fondasi Indonesia	Penguatan Fungsi Konservasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya secara Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/10097/2025 No. 140/PRCF – SU/MOU/X/2025 Tanggal 27 Oktober 2025
12	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tentang Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara.	No. 100.3.7/3811.2025 No. [002/MoU/BPS/2025] Tanggal 5 Mei 2025
13	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif di Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/3813/ 2025 No. W2-HH.04.05-7902 Tanggal 5 Mei 2025
14	Kepala Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara	Nota Kesepakatan antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Sumatera Utara tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Makan Bergizi Gratis	No. 31.1/NK.01/06/ 2025 No. 100.3.7.1/004 No. 100.3.7.1-666/NK/VI/2025 No. 100.3.7.1/05/TKKSD-TT/2025 No. 100.3.7.1/06/VI/2025 No. 415.4/10300/ 2025 No. 000.4.7.2/1772/2025 No. 440/277/2025 No. 100.3.7/11/HK-KB/2025 No. 100.3.7.1/18/NK/Tapem/2025 No. 100.3.7/3860/ 2025 No. 6 Tahun 2025 No. 100.3.7/2370 No. 04/KB/HH/2025 No. 119/325/PEM/ 2025 No. 134.4/2796/KS/2025 No. 100.3.7/1447/Tapem/ 2025 No. 415.4/3/Setda/2025 No. 400.1.13-1283/NK/PEM/2025 No. 100/1365/otda/2025 No. 100.3.7.1/15/Setda/VI/ 2025 No. 100.3.7.1/15/HK/2025 No. 100.3.7.1/10208/BUP-MS/VI/2025 No. 100.3.7.1/5/TAHUN 2025 No. 100.3.7.1/4/MoU/2025

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor dan Tanggal Penetapan
			No. 103.04/28/MOU/2025 No. 115/MOU-1215.1011/VI/2025 No. 100.3.7.1/05/PEM No. 225/415.4/VI/SB/2025 No. 100.3.7.1/747.b/2025 No. 100.3.7.1/001/MOU/ 2025 No. 100.3.7/3591/2025 No. 05/NK/TU/VI/2025 No. 100/17/PEM-KS/2025 Tanggal 19 Juni 2025
15	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara	Percepatan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/7042/2025 No. 2/SKB-300.HP.02.02/VIII/2025 Tanggal 4 Agustus 2025
16	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) Dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Dukungan Pembiayaan Perumahan Bagi Pegawai Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera	No. 100.3.7.1/5801/2025 No. 26/MOU/BPT – TPR/7/2025 No. 030/Dir/DRt-PBKR/SPj/2025 Tanggal 1 Juli 2024 5
17	Badan Pusat Statistik	Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan/ atau Informasi Statistik dalam rangka Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara	No. 100.3.7/9695/ 2025 No. 71/HK.610/NK/10/2025 Tanggal 17 September 2025

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu pada tahun anggaran 2025, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.97
Capaian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatkan pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**						
	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					
		1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		1.2	Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	2	Pelaksanaan Otonomi Daerah					
		2.1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		2.2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		2.3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	3	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					
		3.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		3.2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		3.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	-	-

11. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Biro Hukum Setdaprovsu memiliki 2 sasaran strategis yang meliputi :

1) Meningkatkan pelayanan penyusunan produk hukum daerah dan penyebarluasan informasi produk hukum daerah, terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
   a. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu:
      - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi, dengan target sebanyak 30 Perda/ Pergub.
      - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi, dengan target sebanyak 450 Perda/ Perkada.
      - Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi, dengan target sebanyak 500 produk hukum.
   b. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan, dengan target sebanyak 30 produk hukum

2) Meningkatkan pelayanan hukum dan perlindungan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan pemprovsu dan masyarakat, terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
   a. Jumlah penanganan perkara Pemprovsu di Pengadilan, dengan target sebanyak 25 perkara.
   b. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM, dengan target sebanyak 25 kegiatan.

Bahwa dari perbandingan antara target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pencapaian kegiatan, dapat dianalisa kesesuaiannya sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, target sebanyak 30 Perda/ Pergub, dengan capaian realisasi sebanyak 64 Perda/ Pergub, artinya telah melebihi dari yang ditargetkan dengan persentase sebesar 213,33%.
2) Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, target sebanyak 450 Perda/ Perkada, dengan capaian realisasi sebanyak 654 produk hukum, artinya telah melebihi dari yang ditargetkan dengan persentase sebesar 145,33%.
3) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, target sebanyak 500 produk hukum, dengan capaian realisasi sebanyak 888 produk hukum, artinya telah melebihi dari yang ditargetkan dengan persentase sebesar 177,60%.

4) Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, target sebanyak 30 produk hukum, dengan capaian realisasi sebanyak 64 produk hukum, telah melebihi dari yang ditargetkan dengan persentase sebesar 213,33%.
5) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, target sebanyak 25 perkara, dengan capaian realisasi sebanyak 38 perkara, artinya telah melebihi dari yang ditargetkan dengan persentase sebesar 152%.
6) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, target sebanyak 25 kegiatan, dengan capaian realisasi sebanyak 92 kegiatan, artinya telah melebihi dari yang ditargetkan dengan persentase sebesar 368%.

Tabel 3.98
Capaian Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Membentuk Tim Propemperda dan penyusunan produk hukum daerah. Mengevaluasi, fasilitasi, verifikasi dan klarifikasi produk hukum daerah kepada Pemerintah Pusat. 2. Membentuk Kelompok Kerja dalam penyusunan produk hukum daerah. 3. Membentuk Tim Monitoring JDIH. 4. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait pemberian pelayanan bantuan hukum. 5. Membentuk pos pelayanan bantuan hukum ASN Pemprovsu.	**Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum**						
	1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan					
		1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	30 Perda/ Pergub	64 Perda/ Pergub	-	-
		1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	500 produk hukum	888 produk hukum	-	-
		1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	30 produk hukum	64 produk hukum	-	-
		1.4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	450 Perda/ perkada	654 produk hukum	-	-
	2	Fasilitasi Bantuan Hukum					
		2.1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	25 perkara	38 perkara	-	-
		2.2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	25 kegiatan	92 kegiatan	-	-

12. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.99
Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	2025	
				TARGET	REALISASI
1	Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	1. Indeks Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	88.5%	Masih dalam prose penilaian Menpan RB
		2. Indeks Pelayanan Publik	3.90 (B)	3.91 (B)	4.27 (A-)
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	89.71 (A)	89.72 (A)	89.80 (A)
		4. Nilai capaian pelaporan kinerja	11.45	11.46	Masih dalam prose penilaian Menpan RB

Sumber : Biro Organisasi Setdaprovsu

Sasaran strategis Biro Organisasi adalah meningkatkan nilai reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 4 target Indikator Kinerja, dimana 2 Indikator telah direalisiasi dengan tingkat capaian pada indikator Indeks pelayanan publik terealisasi 4.27 (A-) dengan capaian sebesar 100% dan Indeks Kepuasan Masyarakat 89.80 (A) dengan capaian sebesar 100%, dan 2 Indikator lainnya masih dalam proses penilaian Menpan RB pada nilai capaian pelaporan kinerja dan indeks evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

1) Indeks Pelayanan Publik
Nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 4.27. Terdapat peningkatan pencapaian IPP Biro Organisasi dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas pendampingan, pelatihan, dan penerapan SP/SOP di beberapa unit layanan. Dan target IPP 2025 telah tercapai 100%.

2) Indeks Pelayanan Masyarakat
Pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89,80 pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89,72 yaitu mencapai target 100%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan unit kerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur pelayanan, kompetensi petugas, kecepatan layanan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas turut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh

Tabel 3.100
Capaian Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah				
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	97,05%		
		2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	100%		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 Orang	94,98%		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	725 Buah	83,47%		
		4.2	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	223.496 Lembar	83,99%		
		4.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Orang	61,49%		
		4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95,47%		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		5.1	Penggandaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165 Lembar	100%		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		7.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	80,00%		
	Program Penataan Organisasi						
	1	Fasilitasi kelembagaan dan Analisis Jabatan					
		1.1	Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi	100%	85,21%		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.2	Fasilitasi Penataan kelembagaan kabupaten/Kota	100%	83,75%		
		1.3	Penataan Analisis Jabatan	100%	78,55%		
	2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja					
		2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	78,83%		
		2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	100%	79,59%		
		2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100%	73,08%		
		2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100%	92,90%		
		2.5	Peningkatan Pelayanan Publik	100%	82,76%		

13. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mendukung pencapaian target sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, dilaksanakan melalui program kegiatan dan sub kegiatan sebagai mana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 terdapat 2 program, 5 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dimana dari 2 program terdapat 1 program rutin dan 1 program utama.

Tabel 3.101
Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
Tahun 2024 – 2025

Sasaran strategis	Indikator kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan Kualitas Manajemen Administrasi Pembangunan Yang Profesional	Jumlah kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20 Dokumen	18 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen
	Persentase Realisasi Fisik dan non Fisik Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi.	95%	95,55%	97%	97,55%

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

Maka untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang lalu, untuk itu akan dijelaskan keluaran maupun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target dimaksud. Berikut akan dijelaskan tentang pencapaian masing – masing indikator kinerja dimaksud:

1) Jumlah kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan daerah antara lain :
   a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
   b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/30/KPTS/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/94/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/95/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
e. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/139/KPTS/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.
f. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/140/KPTS/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Tugas Pembantuan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
g. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/141/KPTS/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.
h. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/157/KPTS/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
i. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/186/KPTS/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;

j. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/474/KPTS/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
k. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/498/KPTS/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
l. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/763/KPTS/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/140/KPTS/2025 Ttanggal 10 Februarai 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Serta Bendahara Pengeluaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
m. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/797/KPTS/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara.

2) Persentase Realisasi Fisik dan non Fisik Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi.

Indikator yang kedua dimaksud untuk memberikan dan memberitahu bagaimana penyerapan anggaran setiap Perangkat Daerah setiap bulannya dengan melakukan penginputan Aplikasi PRP2SUMUT.

Pada Tahun 2025, Sesuai dengan arahan Pimpinan yaitu Bapak Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu untuk melakukan Evaluasi terhadap realisasi Fisik yang ada pada Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan pada Anggaran berjalan dan penyesuaian pagu fisik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil dari Pengimputan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, ada beberapa Perangkat Daerah yang masih minim dalam pelaksanaan penginputan realisasi pada aplikasi PRP2SUMUT.

Adapun Perangkat Daerah yang masih belum menyelesaikan realisasi fisiknya sampai saat ini pada aplikasi PRP2SUMUT adalah :

a. Inspektorat 51,93 %
b. Dinas Sosial Provsu 61,61%
c. Dinas PMD dan Catatan Sipil Provsu 71,72 %
d. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 79,75%
e. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu 82,35%

Tabel 3.102
Capaian Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Mewujudkan Kualitas Manajemen Administrasi Pembangunan Yang Profesional	**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**			100%	99.82%		
	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		95%	100%		
		1.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Keterlambatan dalam verifikasi dokumen peraturan gubernur di kemendagri RI. 2. Perubahan Nama Pelaksana Pengelola Keuangan dana DAK dll. 3. Penyesuaian Peraturan Perubahan terkait Perjalanan Dinas.	1. Koordinasi dan Konsultasi ke Kemendagri Ri. 2. Penyesuaian dan Perubahan terkait Keputusan Gubernur. 3. Koordinasi dan Konsultasi ke Dirjend Bangda Kemendagri.
		1.2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	12 Laporan	1. Perubahan Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran APBN pada Pemerintah Pusat 2. Koordinasi Pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kurang memadai 3. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah disusun.	1. Melakukan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran APBN
		1.3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	1. Perubahan Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran APBN Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2. Koordinasi Pelaksanaan Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang kurang memadai	1. Melakukan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kab/Kota. Melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						3. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah disusun.	Anggaran APBN Kab/Kota
	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100 %	100%		
		2.1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	1. Pelaksanaan Penilaian Capaian Kinerja yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan 2. Data Capaian Kinerja yang belum maksimal.	Koordinais dengan seluruh Perangkat Daerah terkait data capaian kinerja
		2.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1. Penginputan pelaksanaan realisasi Anggaran Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah belum terlaksana sedemikian rupa. 2. Admin perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menginput sepenuhnya 3. Data pada Aplikasi PRP2SUMUT belum sesuai dengan data yang ada pada BKAD	1. Melaksanakan Rakor Admin PRP2SUMUT setiap bulan 2. Melakukan monittoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah sesuai dengan data yang ada pada Aplikasi
		2.3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1. Terlambatnya data yang dihasilkan dari Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan 2. Kurang Koordinasi nya antara sub bagian	1. Melakukan pelaksanaan fasilitasi kebijakan Bersama tenaga ahli 2. Berkoordinasi dengan seluruh sub bagian terkait kebijakan

14. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mendukung pencapaian target sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Biro Perekonomian Setdaprovsu dilaksanakan melalui program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 terdapat 2 program, 7 kegiatan, dan 13 sub kegiatan dimana dari 2 program terdapat 1 program rutin dan 1 program utama.

Biro Perekonomian Setdaprovsu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama pada, yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.103
Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Setdaprovsu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2024	Target RPJMD 2025-2029	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Perjanjian Kinerja 2024	Target Perjanjian Kinerja 2025	Realisasi Perjanjian Kinerja 2025
Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup perekonomian daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Persentase usulan dokumen UPTD untuk menjadi BLUD yang ditindaklanjuti	n/a	60%	n/a	n/a	60%	100%

Sumber : Biro Perekonomian Provsu

Secara umum, capaian kinerja program menunjukkan hasil yang sesuai dengan target kinerja. Sebagian besar indikator kinerja program telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, baik yang berkaitan dengan penyusunan dan fasilitasi kebijakan ekonomi daerah, pembinaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dukungan terhadap upaya pengendalian inflasi daerah maupun fasilitasi UPTD yang mengusulkan menjadi BLUD.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang konsisten, serta koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut berperan dalam memastikan ketercapaian target kinerja program.

Terhadap indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target, Biro Perekonomian telah melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian strategi pelaksanaan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja program Biro Perekonomian telah menunjukkan kinerja yang baik dan akuntabel, serta memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang perekonomian sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian masing – masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan. Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah kebijakan yang diimplementasikan sebanyak 9 kebijakan dari target 9 kebijakan yang disusun antara lain:
   a. Surat Gubernur Sumatera Utara nomor 500.1.3.2/9696 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Antisipasi Pengendalian Harga Pangan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.
   b. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 500.10.6.3/894 TAHUN 2025 tanggal 31 Jabuari 2025 tentang Pemasangan Spanduk Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) di pasar rakyat.
   c. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 500.1/7644 TAHUN 2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Serentak se Sumatera Utara Tahun 2025.
   d. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 500.7.2.4/405 TAHUN 2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kukuk (PMK) di Provinsi Sumatera Utara.
   e. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 500/2246 TAHUN 2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2025 serta Menjaga Stabilitas Harga pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.
   f. Surat Gubernur Sumatera Utara nomor 500/404 tanggal 15 Januari 2025 tentang Atensi Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Gunungsitoli.
   g. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/264/KPTS/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/553/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
   h. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/339/KPTS/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Program Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

i. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/839/KPTS/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2025-2027.

Kebijakan tersebut di atas telah diterbitkan dan sepenuhnya diimplementasikan baik kabupaten/kota maupun OPD Provinsi, Lembaga maupun instansi yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut.

2) Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ada 3 BUMD dari 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemprovsu yang memiliki kinerja keuangan yang sehat antara lain:
a. PT Bank Sumut;
b. Perumda Tirtanadi Provsu;
c. PT PPSU.

Indikator Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Perekonomian terhadap BUMD sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, dan keberlanjutan usaha BUMD.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Pembinaan Tingkat Kesehatan BUMD mencapai 50%. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian telah melaksanakan pembinaan terhadap BUMD melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan kinerja BUMD, namun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa persentase BUMD yang memperoleh pembinaan tingkat kesehatan belum signifikan mencapai target yang ditetapkan, sehingga indikator ini belum sepenuhnya tercapai.

Tabel 3.104
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD

No	BUMD	Penilai	Nilai
1	PT. Bank SUMUT	OJK	Cukup Sehat
2	Perumda Tirtanadi Provsu	BPKP	Sehat
3	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)	Biro Perekonomian	Sehat, AA
4	PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)	Biro Perekonomian	Kurang Sehat, BB
5	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	Biro Perekonomian	Kurang Sehat, BB
6	PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu	Biro Perekonomian	Kurang Sehat, B

Sumber : Biro Perekonomian Provsu

2) Persentase usulan dokumen UPTD untuk menjadi BLUD yang ditindaklanjuti

Tahun 2025, ada 3 UPTD yang mengusulkan dokumen penilaian penerapan BLUD, yaitu :

a. 18 SMKN Dinas Pendidikan Provsu yaitu SMKN 2 Medan, SMKN 3 Medan, SMKN 6 Medan, SMKN 14 Medan, SMKN 1 Kutalimbaru, SMKN 1 Sidikalang, SMKN 1 Sitinjo, SMKN 1 Talawi, SMKN 1 Lima Puluh, SMKN 1 Kisaran, SMKN 2 Kisaran, SMKN 2 Kualuh Selatan, SMKN 2 Rantau Utara, SMKN 1 Pematang Siantar, SMKN 1 Simanindo, SMKN 1 Laguboti, SMKN 1 Palipi dan SMKN 3 Panyabungan;
b. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu;
c. UPTD Klinik Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu.

Ketiga dokumen UPTD tersebut sudah dilakukan proses penilaian sehingga realisasi capaian target indicator kinerja Persentase usulan dokumen UPTD untuk menjadi BLUD yang ditindaklanjuti 100%. Namun, belum ditetapkan sebagai BLUD dikarenakan masih proses revisi dokumen usulan. Berikut tabel gambaran UPTD yang sudah ditetapkan menjadi BLUD dan yang masih berproses.

Tabel 3.105
UPTD yang Sudah Ditetapkan Menjadi BLUD dan masih Proses Penetapan

NO	UPTD	STATUS	KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PENETAPAN BLUD	KETERANGAN
1	RSU HAJI MEDAN	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014	Sudah menerapkan BLUD
2	RSK MATA PROVSU	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/663/KPTS/2023 tanggal 18 Agustus 2023	Mulai merapkan BLUD pada Tahun 2026
3	RSK PARU PROVSU	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/664/KPTS/2023 tanggal 18 Agustus 2023	Belum menerapkan BLUD, menunggu proses pengesahan Pergub Dokumen Administrasi.
4	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/895/KPTS/2023 tanggal 16 Oktober 2023	Belum menerapkan BLUD, menunggu proses pengesahan Pergub Dokumen Administrasi.
5	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/311/KPTS/2024 tanggal 5 Juni 2024	Sudah menerapkan BLUD

NO	UPTD	STATUS	KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PENETAPAN BLUD	KETERANGAN
	Sumber Daya Manusia Provsu			
6	15 SMKN Dinas Pendidikan Provsu: 1. SMKN 7 Medan 2. SMKN 8 Medan 3. SMKN 9 Medan 4. SMKN 1 Merdeka 5. SMKN 1 Percut Sei Tuan 6. SMKN 1 Beringin 7. SMKN 1 Air Putih 8. SMKN 3 Pematang Siantar 9. SMKN 1 Lumut 10. SMKN 1 Pagaran 11. SMKN 2 Siatas Barita 12. SMKN 3 Sibolga 13. SMKN 2 Panyabungan 14. SMKN 1 Barumun 15. SMKN 1 Amandraya	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/343/KPTS/2024 tanggal 21 Juni 2024	Belum menerapkan BLUD, menunggu proses pengesahan Pergub Dokumen Administrasi.
7	Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/454/KPTS/2025 tanggal 21 Juli 2025	Belum menerapkan BLUD, menunggu proses pengesahan Pergub Dokumen Administrasi.
8	Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/628/KPTS/2025 tanggal 9 September 2025	Belum menerapkan BLUD, menunggu proses pengesahan Pergub Dokumen Administrasi.
9	RSU Kusta Lau Simomo Dinas Kesehatan Provsu	BLUD	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/629/KPTS/2025 tanggal 9 September 2025	Belum menerapkan BLUD, menunggu proses pengesahan Pergub Dokumen Administrasi.

Sumber : Biro Perekonomian Provsu

Tabel 3.106
UPTD yang Dalam Proses Penialai BLUD

NO	UPTD	STATUS	KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TIM PENILAI BLUD	KETERANGAN
1	18 SMKN Dinas Pendidikan Provsu: 1. SMKN 2 Medan 2. SMKN 3 Medan 3. SMKN 6 Medan 4. SMKN 14 Medan 5. SMKN 1 Kutalimbaru 6. SMKN 1 Sidikalang 7. SMKN 1 Sitinjo 8. SMKN 1 Talawi 9. SMKN 1 Lima Puluh 10. SMKN 1 Kisaran 11. SMKN 2 Kisaran 12. SMKN 2 Kualuh Selatan 13. SMKN 2 Rantau Utara 14. SMKN 1 Pematang Siantar 15. SMKN 1 Simanindo 16. SMKN 1 Laguboti 17. SMKN 1 Palipi 18. SMKN 3 Panyabungan	Proses Pengusulan Penilaian	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/2025 tanggal 14 Januari 2025	Proses Revisi Dokumen Usulan
2	Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu	Proses Pengusulan Penilaian	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/120/KPTS/2025 tanggal 31 Januari 2025	Proses Revisi Dokumen Usulan
3	Klinik Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu	Proses Pengusulan Penilaian	Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/689/KPTS/2025 tanggal 17 September 2025	Proses Revisi Dokumen Usulan

Sumber : Biro Perekonomian Provsu

Tabel 3.107
Capaian Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup perekonomian daerah	**Program Perekonomian dan Pembangunan**			100%	97,42%		
	1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		14 dokumen	10 dokumen		
		1.1	Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	8 dokumen	6 dokumen	1. Belum optimalnya sinergi waktu pelaksanaan intervensi pengendalian inflasi antara provinsi dan kabupaten/kota 2. Keterbatasan efektivitas *early warning system* inflasi daerah, khususnya dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas volatil sebelum memasuki periode HBKN. 3. Ketergantungan pasokan beberapa komoditas strategis terhadap wilayah tertentu. 4. Belum meratanya pemanfaatan data stok dan harga sebagai dasar pengambilan kebijakan. 5. Kapasitas intervensi non-anggaran yang masih terbatas, khususnya dalam memobilisasi pelaku usaha, BUMD pangan, dan asosiasi perdagangan untuk mendukung stabilisasi harga. 6. Masih terbatasnya jangkauan intervensi stabilisasi harga langsung	1. Menerbitkan surat edaran Gubernur Sumatera Utara: a. Nomor 500.1/7644 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Serentak se Sumatera Utara Tahun 2025; b. Nomor 188.4/839/KPTS/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2025-2027; c. dan Penguatan koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota melalui rapat teknis dan high level meeting secara berkala guna memastikan kesamaan waktu pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi. 2. Optimalisasi pemantauan harga dan ketersediaan pasokan harian, melalui pemanfaatan data Sistem Informasi Harga Pangan Strategis SiHarapanku dan Satu Data Indonesia (Sada INA)

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis tertentu dan akses pasar yang terbatas. 7. Perbedaan struktur biaya distribusi antarwilayah di Sumatera Utara, yang menimbulkan disparitas harga antar kabupaten/kota meskipun komoditas berasal dari sentra produksi yang sama.	serta laporan lapangan sebagai dasar perumusan langkah antisipatif. 3. Diversifikasi sumber pasokan komoditas pangan strategis, melalui penguatan kerja sama lintas daerah dan optimalisasi peran daerah sentra produksi di dalam dan luar Provinsi Sumatera Utara. 4. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan menjadikan hasil monitoring harga dan ketersediaan pasokan sebagai rujukan utama dalam penentuan lokasi dan waktu intervensi. 5. Peningkatan peran BUMD, dalam menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga melalui skema distribusi atau pembelian langsung komoditasi hortikultura seperti cabai merah. 6. Pelaksanaan intervensi stabilisasi harga yang lebih terarah, terutama pada wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak harga, melalui kegiatan pasar murah dan distribusi langsung. 7. Penguatan koordinasi distribusi dan logistik antarwilayah, untuk menekan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							disparitas harga melalui kelancaran arus barang dan efisiensi biaya distribusi.
		1.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6 dokumen	4 dokumen	4. UMKM di bidang sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan perkebunan mengalami kendala dalam hal pembiayaan seperti ketidaklayakan usaha, keterbatasan agunan dan lemahnya manajemen usaha serta tingginya risiko kredit macet. Selain itu, UMKM yang bertindak sebagai produsen, pengolahan hingga pemasaran dan hilirisasi produk belum berada dalam satu ekosistem usaha. 5. Terdapat penyandang disabilitas maupun UMKM penyandang disabilitas yang akses keuangannya masih terbatas akibat rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. 6. Secara umum, literasi keuangan dan akses keuangan masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada inklusi keuangan yang rendah. Selain itu, banyak	1. Pemerintah dan lembaga keuangan menginisiasi KUR Klaster bagi UMKM yang bergerak di bidang sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan perkebunan untuk menciptakan ekososistim usaha dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kapasitas dan sustainabilitas potensi unggulan daerah 2. Pemerintah dan lembaga Jasa Keuangan menyediakan produk layanan tabungan, business matching, sosialisasi dan edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan akses keuangan yang semakin inklusif dan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. 3. Sebagai upaya peningkatan akses keuangan dan literasi keuangan, Pemerintah mendorong masyarakat untuk menabung sejak dini (usia sekolah) melalui program One Student One Account (OSOA), Hari Indonesia Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan buku rekening dan sosialisasi literasi keuangan tentang keamanan

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						masyarakat yang masih terjebak dengan pinjaman illegal maupun investasi bodong. 7. Banyak masyarakat tertarik dengan produk pasar modal dan memandangnya sebagai opsi untuk menambah pendapatan melalui investasi namun terjebak dengan produk investasi illegal.	dan kenyamanan bertansaksi serta pemahaman mengenali produk keuanagn yang legal maupun illegal secara massif kepada anak usia sekolah hingga mahasiswa dan masyarakat umum. 4. Dalam rangka mendorong tingkat literasi di sektor pasar modal, pemerintah memberikan edukasi pasar modal kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan melalui meningkatnya jumlah masyarakat yang berinvestasi seccara legal setelah memahami produk pasar modal yang legal. Pemerintah juga membuka galeri investasi untuk memberikan pemebelajaran praktis bagi masyarakat dalam memahami cara kerja pasar modal secara langsung. Bagi Pemerintah Daerah juga dapat menjadi opsi pembiayaan Pembangunan selain menggunakan dana APBD
	2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		6 dokumen	5 dokumen		
		2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10 dokumen	19 dokumen	3. Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi. 4. Masih ada KTP petani yang menebus pupuk tidak update dengan data Disdukcapil.	1. Memperketat pengawasan melalui penggunaan sistem digital kartu tani. 2. Melakukan sosialisasi ke petani di desa dan kecamatan.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						5. Masih ada petani yang tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi selama setahun. 6. Kurangnya penggunaan pupuk organik bagi petani dikarenakan belum mengerti dampak penggunaan pupuk organik terhadap perubahan struktur tanah. 7. Kios Pengecer sering terlambat menerima pupuk bersubsidi yang disorder ke Distributor. 8. Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang masih kekurangan pupuk.	3. Memastikan administrasi penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan 4. Menginstruksikan kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) masing-masing agar menginformasikan kepada petani yang bersangkutan untuk melakukan penebusan pupuk atau dikuasakan kepada petani penggarap yang menguasai lahan pertanian tersebut untuk melakukan penebusan dengan membuat surat kuasa. 5. Memberikan Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang pembuatan pupuk organic. 6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak distributor pupuk agar segera menyalurkan pupuk bersubsidi ke kios pengecer. 7. Meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari Dinas Provinsi Sumatera Utara untuk mencukupi kebutuhan pupuk pada musim tanam berikutnya, serta memastikan ketersediaan stok di kios pengecer. 8. Meningkatkan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
							pengawasan dan Penyuluh Pertanian di Daerah.
		2.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10 dokumen	17 dokumen	3. Penggunaan LPG Tabung 3 Kg masih belum tepat sasaran karena masih saja ada rumah makan besar dan masyarakat mampu yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro. 4. Jumlah pengecer yang hampir sama banyaknya dengan jumlah pangkalan, hal ini sangat mempengaruhi HET LPG Tabung 3 Kg, dimana di pengecer harga LPG Tabung 3 Kg di atas HET yang berlaku. 5. Adanya Program MBG dikhawatirkan operasional dapur MBG menggunakan LPG Tabung 3 Kg. 6. Penggunaan BBM JBT dan JBKP masih belum tepat sasaran karena masih ada kendaraan perkebunan sawit, pertambangan dan industri yang masih menggunakan BBM JBT (Solar). Hal ini disebabkan karena tidak adanya	3. Telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaluran LPG Tabung 3 Kg. 4. Telah berkoordinasi dengan PT. Pertamina untuk mengajak para pengecer menjadi pangkalan atau PT. Pertamina menambah pangkalan di titik-titik yang masih kurang pangkalan. 5. Membuat Surat kepada Kepala SPPG Provinsi Sumatera Utara melalui surat Sekdaprovsu No.500.10.6/9862/2025 tgl. 21 Oktober 2025 tentang Himbauan Penggunaan LPG Tabung 3 Kg. 6. Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/718/KPTS/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Tim Koordinasi Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak usus Penugasan pada Konsumen Pengguna Provinsi SumatKhera Utara. Untuk mengurangi dampak antrian panjang Pemerintah Pemprovsu menyurati Pemerintah Kab/Kota agar

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						pengawasan dari Pemerintah. 7. Terjadinya kelangkaan bbm pada bencana alam bulan November 2025 menyebabkan rusaknya infrastruktur logistik (jalan, jembatan, pelabuhan) yang menghambat distribusi.) sehingga pasokan dari depot atau produsen lambat sampai ke masyarakat sehingga menimbulkan antrian panjang	memberikan keringanan dalam pembelian bbm dilakukan secara manual (tidak menggunakan barcode) dan memberikan prioritas pembelian BBM JBT dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana Nomor 500.10/741/2025 Tgl. 3 Desember 2025 perihal Pembelian JBT dan JBKP
	3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		8 dokumen	11 dokumen		
		3.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	19 dokumen	1. Perda Penyertaan Modal PT. PPSU belum rampung. 2. Pemanfaatan Aset Kilang Padi milik BUMD PT. Dhirga Surya Sumatera Utara belum optimal. 3. Perda Perubahan bentuk badan hukum PT. Dhirga Sumatera Utara menjadi Perseroda serta penambahan *core business* Industri Pangan Strategis belum rampung. 4. Bentuk Badan Hukum masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara belum menyesuaikan dengan ketentuan PP 54	1. Perda Penyertaan Modal PT. PPSU sudah diajukan dalam propemperda 2026 di DPRD dan tahap pembahasan. 2. Pengoptimalan aset kilang padi melalui Penugasan yang diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara dalam penyediaan dan pendistribusian Beras. 3. Perda Perubahan bentuk badan hukum PT. Dhirga Sumatera Utara menjadi Perseroda serta penambahan *core business* Industri Pangan Strategis telah dibahas

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						Tahun 2017 tentang BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). 5. Bentuk Badan Hukum masih berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau PT. Bank Sumut belum menyesuaikan dengan ketentuan PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). 6. Persentase Kepemilikan Saham Pemprovsu pada PT. Bank Sumut belum memenuhi minimal 51% sesuai dengan peraturan perundangan tentang Kepemilikan Saham Perseroda. 7. Kepengurusan PT. Jamkrida Sumut yang masih dalam proses. 8. Pelaksanaan Tata Kelola BUMD dalam Kerja Sama Pemanfaat Aset belum memiliki standar yang berlandaskan dalam payung hukum. 9. Kepengurusan BUMD yang belum sepenuhnya	bersama Bapemperda DPRD Provsu dan saat ini tahap Fasilitasi ke Kemendagri. 4. Mengusulkan Perda perubahan bentuk badan hukum PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu menjadi Perseroda dan telah diajukan dalam propemperda 2026. 5. Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda telah disahkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2025. 6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. Bank Sumut secara *inbreng* aset melalu Perda yang baru diundangkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2025. 7. Mepercepat proses seleksi Organ PT. Jamkrida Sumut. 8. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama. 9. Pengangkatan Organ BUMD yang profesional melalui pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Direksi BUMD secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						memilki kompetensi dan professional dalam pengelolaan bisnis BUMD	
		3.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	15 dokumen	17 dokumen	1. Kepengurusan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang belum sepenuhnya memilki kompetensi dan professional dalam pengelolaan bisnis perusahaan. 2. Belum melakukan penyesuaian tarif air minum. 3. Belum aktif dalam menjalankan usaha binsis air limbah. 4. Strategi bisnis 5 tahunan atau rencana bisnis yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. Penyusunan strategi bisnis tahun 2026.	1. Pengangkatan Organ yang profesional melalui pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi. 2. SK Tarif Air Minum telah terbit dan telah dilakukan sosialisasi penyesuaian tarif. 3. Mengusulkan SK tentang Penetapan Pelanggan Air Limbah Domestik di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi. 4. Penyusunan Rencana Bisnis Perusahaan selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. 5. Mengusulkan SK tentang Pengesahan RKAP Tahun 2026.
		3.3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	10 dokumen	15 dokumen	1. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PPK-BLUD, yaitu : a. RS Jiwa Prof. Ildrem b. RS Khusus Mata Provsu c. RS Khusus Paru Provsu d. RSU Kusta Lau Simomo 2. 15 SMKN Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi BLUD belum	1. UPTD yang telah menerapkan BLUD : a. RSU Haji Medan b. UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia BPSDM Provsu 2. Mendorong Rumah Sakit untuk menerapkan PPK-BLUD dengan melengkapi berkas administrasi kebutuhan PPK-BLUD.

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
						sepenuhnya melakukan penerapan PPK-BLUD. 3. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provsu yang telah ditetapkan menjadi BLUD namun belum menerapkannya. 4. UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu yang telah ditetapkan menjadi BLUD namun belum menerapkannya. 5. UPTD. Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu yang telah ditetapkan menjadi BLUD namun belum menerapkannya. 6. UPTD. Provinsi Sumatera Utara yang tidak masuk dalam Perda Retribusi belum mengusulkan penerapan PPK-BLUD.	3. Mendorong 15 SMKN untuk menerapkan PPK-BLUD dengan melengkapi berkas administrasi kebutuhan PPK-BLUD. 4. Mendorong UPTD yang telah ditetapkan menjadi BLUD untuk menerapkan PPK-BLUD dengan melengkapi berkas administrasi kebutuhan PPK-BLUD. 5. Mendorong UPTD. Provinsi Sumatera Utara yang tidak masuk dalam Perda Retribusi belum mengusulkan penerapan PPK-BLUD dan memproses usulan tersebut melalui pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD melalui SK Gubernur Sumatera Utara. UPTD yang saat ini mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD, yaitu: a. 18 SMKN Provsu. b. UPTD. Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu c. UPTD. Klinik Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu

15. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 3.108
Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
Tahun 2024 – 2025

Sasaran strategis	Indikator kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Proposal Permohonan Belanja Hibah yang Ditindaklanjuti	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	75 %	84,57 %	75 %	90,41 %
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75 %	73,05 %	75 %	81,54 %

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu

Capaian kinerja tahun 2025, sasaran strategis "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif" menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada indikator kinerja pertama, yaitu Persentase Proposal Hibah yang Ditindaklanjuti, ditetapkan target sebesar 75% dengan realisasi mencapai 90,41%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 120,55% dari target yang ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil, yang menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi, evaluasi, dan tindak lanjut proposal hibah telah dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya realisasi ini juga mencerminkan meningkatnya kapasitas koordinasi dan ketepatan administrasi dalam pengelolaan hibah.

Selanjutnya, pada indikator kinerja kedua yaitu Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti, ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 81,54%. Tingkat capaian terhadap target mencapai 108,72%, yang juga berada dalam kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat telah ditindaklanjuti secara konsisten dan terukur, baik melalui penyusunan rekomendasi, fasilitasi pelaksanaan, maupun koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Sasaran Strategis pada Tahun 2025 tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ke depan, capaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan kualitas kinerja sekaligus meningkatkan standar pelayanan dan akuntabilitas dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.109
Capaian Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Penguatan Efektifitas Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat 1. Peningkatan efektivitas koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat. 2. Peningkatan ketepatan penanganan proposal hibah masyarakat yang valid 3. Peningkatan kualitas fasilitasi pembinaan mental spiritual dan kehidupan keagamaan. 4. Peningkatanefektivitas fasilitasi pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial) 5. Peningkatankualitas fasilitasi pengembangan kepemudaan, kebudayaan, dan pemberdayaan sosial	**Program Kesejahteraan Rakyat**						
	1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					
		1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	75%	76,00%		
		1.2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	30 Lembaga	30 Lembaga		
	2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					
		2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	852 Dokumen	852 Dokumen		
		2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen		
		2.3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	50 Dokumen	50 Dokumen		
	3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					
		3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	10 Dokumen	10 Dokumen		
		3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10 Dokumen	10 Dokumen		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75%	91,84%		
		1.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Paket	10 Paket		
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan		
		2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan	10 Laporan		
		2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan	10 Laporan		

16. Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Utara

Rincian capaian indikator kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.110
Indikator Kinerja Utama Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2024 – 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	100%	80,29%	100%	69,51%

Sumber : Biro Umum Setdaprovsu

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan ditetapkan dengan target 100%, dan pada Tahun 2025 realisasi kinerja mencapai 100% sehingga capaian kinerja juga sebesar 100%. Capaian tersebut terpenuhi karena pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini bersifat fasilitatif, yaitu menyediakan dan melaksanakan seluruh kebutuhan pelayanan sesuai dengan permintaan kegiatan pimpinan daerah. Adapun bentuk fasilitasi yang dilaksanakan meliputi antara lain belanja cenderamata, belanja dekorasi, belanja bunga hias, fasilitasi makan dan minum rapat serta jamuan tamu, fasilitasi tenaga kesenian dan kebudayaan, sewa genset, sewa alat pendingin, sewa meja dan kursi, sewa tenda, serta sewa peralatan audio, yang seluruhnya dapat direalisasikan sesuai kebutuhan kegiatan pimpinan daerah.

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu dengan Indikator Kinerja Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu ditetapkan dengan target 100%, dengan realisasi sebesar 69,51% sehingga capaian kinerja mencapai 69,51%. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian target PAD pada Perubahan APBD (PAPBD) Tahun 2025 dari Rp2,522 miliar menjadi Rp3,022 miliar dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD Provinsi, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mess di lingkungan Setdaprovsu yang menyebabkan terbatasnya pemanfaatan beberapa kamar pada periode tertentu, sehingga berdampak pada realisasi kontribusi PAD.

Pemanfaatan fasilitas mess milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi Mess Kotanopan, Mess Balige, Mess Marihat Prapat, Mess Harungguan Bolon, Mess Tarutung, Mess Gunung Sitoli–Nias, Mess Panyabungan, Mess

Sipirok, Mess Muara Sipongi, Mess Sibuhuan, Mess Padang Sidempuan, Mess Sidikalang, Mess Sempurna Berastagi, Mess Sibolga, Mess Natal, Mess Haranggaol, Mess Tanjung Balai, Convention Hall Prapat, Mess Rantau Prapat, Mess Porsea–Pora Prapat, Mess Gundaling Berastagi, Mess Tiga Raja Prapat, Mess Aek Rangat Samosir, Mess Barus, Mess Parsoburan, Mess Sipirok Baru, serta Mess Muara Soma

Tabel 3.111
Capaian Kinerja Kontribusi dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu Tahun 2025

Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
3.022.000.000	2.100.600.000	69,51%

Sumber : Biro Umum Setdaprovsu

Tabel 3.112
Capaian Program dan Kegiatan Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
1. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang beriorientasi kepada efesien dan efektifitas 2. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut 3. Membangun hubungan kerja sama yang harmonis dan mendorong berkembangnya loyalitas, partisipasi, transparansi, kreativitas, produktivitas dan inovasi antar sesama pegawai 4. Meningkatkan kemauan dan kemampuan aparatur secara professional 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan publik 6. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan mess/ gedung pemprovsu secara rutin/berkala	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi**			100%	95,19%		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%		
		1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada	
		1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	Tidak Ada	
	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%		
		2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Tidak Ada	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	40%		
		3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	2 Orang	Tidak Ada	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%		
		4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	20 Paket	Tidak Ada	
		4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22 Paket	22 Paket	Tidak Ada	
		4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	Tidak Ada	
		4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	Tidak Ada	
		4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	300 Laporan	Tidak Ada	
		4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	Tidak Ada	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%		
		5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	2 Unit	Tidak Ada	
		5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	3 Unit	Tidak Ada	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
7. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin/ berkala dengan	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75%		
		6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 Laporan	Tidak Ada	
		6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada	
		6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada	
		6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	176,47%		
		7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	8 Unit	Tidak Ada	
		7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34 Unit	34 Unit	Tidak Ada	
		7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bangunan Lainnya	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada	
		7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	Tidak Ada	
	8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	66,67%		
		8.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada	
		8.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada	
		8.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	0 Orang	Tidak Ada	
	9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%		
		9.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10 Paket	10 Paket	Tidak Ada	
		9.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	10 Paket	10 Paket	Tid 4ak Ada	
		9.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10 Paket	10 Paket	Tidak Ada	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			100%	100%		
	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	100%		
		1.1	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	5 Laporan	Tidak Ada	

17. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Utara

Pencapaian target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), adapun Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu ada 2 yaitu :

1) Persentase fasilitasi materi pimpinan;
2) Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Adapun target dan capaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu sebagai berikut :

Tabel 3.113
Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
Tahun 2024 – 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu adalah pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan. Fasilitasi kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi materi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dan terfasilitasi dengan baik.

Adapun faktor penyebab terpenuhinya target yaitu membangun koordinasi dan sinergitas yang baik dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyakarat serta adanya standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan acara pimpinan sehingga dapat berjalan tertib dan lancar.

1) Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

a. Penyiapan Materi Pimpinan

Penyediaan dan penyiapan materi pimpinan merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu. Penyiapan materi pimpinan dimulai dari mengumpulkan, mengolah, mengembangkan, memilah dan memilih, menyajikan sampaikan menyampaikan materi. Materi pimpinan berupa sambutan/pidato, bahan paparan/materi pimpinan.

Jumlah sambutan/pidato yang disiapkan sebanyak 1.325 kali dan paparan sebanyak 147 kali, dengan target kegiatan ini yaitu 100%. Semua kegiatan pimpinan terfasilitasi dalam penyediaan dan penyiapan materi (sambutan/pidato, bahan paparan/materi) sehingga realisasinya mencapai 100%.

b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Target pada kegiatan ini yaitu memfasilitasi seluruh komunikasi pimpinan (100%) dengan membuat profil pimpinan sebanyak 1 kali pembaharuan (update) yang ditayangkan dalam website https://biroadpim.sumutprov.go.id/, fasilitasi komunikasi pimpinan berupa baleho sebanyak 19 buah, dan membangun komunikasi pimpinan antar lembaga. Semua target yang telah ditetapkan dapat terealisasi 100%.

c. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

Target pada kegiatan pengelolaan dokumentasi pimpinan adalah mengelola seluruh dokumentasi pimpinan (100%). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksanakan 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Dokumentasi kegiatan pimpinan yang dilaksanakan sebanyak 1.232 kali
- kliping sebanyak 365 buah
- mengelola cendera mata sebanyak 15 buah
- penghargaan sebanyak 5 buah
- Kolase kegiatan Pimpinan sebanyak 12 buku.

2) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
   Target pada kegiatan ini yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan acara pimpinan (100%). Jumlah kegiatan pelaksanaan acara pimpinan yang terfasilitasi dan terlaksana sebanyak 1.232 kali.

b. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Target dari kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memfasilitasi seluruh kegiatan tersebut (100%). Dalam pelaksanaannya seluruh kunjungan tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terfasilitasi dan terlaksana dengan baik sehingga terealisasi 100% dengan jumlah kunjungan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 404 kali.

c. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
   Target pada kegiatan ini yaitu memfasilitasi seluruh pengelolaan hubungan keprotokolan (100%) dengan jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi dan terlaksana sebanyak 1.232 kali.

Secara keseluruhan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah mencapai sekitar 100%, yang mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan. Semua pelayanan fasilitasi materi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dan terfasilitasi dengan baik.

Dengan tercapainya target kegiatan yang telah ditetapkan sebesar 100% maka kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah telah meningkat.

Tabel 3.114
Capaian Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
	1	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					
		1.1	Penyiapan Materi Pimpinan	100%	Pelaksanaan kegiatan penyiapan materi pimpinan terlaksana dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan rincian kegiatan: • Sambutan/Pidato sebanyak 1.325 kali • Paparan sebanyak 147 kali	Tidak ada permasalahan	
		1.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan terlaksana dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan rincian kegiatan: • Membuat profil pimpinan sebanyak 1 kali perbaharuan (update) yang ditayangkan dalam website https://biroadpim.sumutprov.go.id/ • Fasilitasi komunikasi pimpinan berupa baleho sebanyak 19 buah	Tidak ada permasalahan	
		1.3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100%	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi pimpinan terlaksana dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan rincian kegiatan: • Dokumentasi kegiatan pimpinan yang dilaksanakan sebanyak 1.232 kali	Tidak ada permasalahan	

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
					• Kliping sebanyak 365 buah • Mengelola cendera mata sebanyak 15 buah • penghargaan sebanyak 5 buah • Kolase kegiatan pimpinan selama 12 buku		
	2	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan					
		2.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara terlaksana dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan jumlah kegiatan pimpinan sebanyak 1.232 kali	Tidak Ada Permasalahan	
		2.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan jumlah fasilitasi kunjungan tamu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 404 kali	Tidak Ada Permasalahan	
		2.3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hubungan keprotokolan terlaksana dan terealisasi seluruhnya (100%) dengan jumlah kegiatan pimpinan sebanyak 1.232 kali	Tidak Ada Permasalahan	

18. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu memiliki 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan, dengan capaian pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.115
Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
Tahun 2025

No	Indikator kinerja Utama	Defenisi Operasional	Target	Realisasi	Keterangan
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan	75	82,49	Skor nilai ITKP Tahun 2025 72,47 yang bersifat sementara, karena updatenya belum dikeluarkan LKPP

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu

Pada tahun 2025 nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) bernilai > 70 yang berarti terciptanya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel, serta mendukung Reformasi Birokrasi dengan target minimal predikat "Baik", meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi KKN, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri serta UMKM.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Tabel 3.116
Capaian Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		**100 %**	**100 %**	-	-
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-
	3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		**100%**	**100 %**		
	1	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	Tidak meratanya Bimbingan Teknis pelatihan kepada Kelompok Kerja	Penjadwalan dan urutan urgensi kepada Kelompok Kerja terhadap keikutsertaan Pelatihan
	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Laporan	36 Laporan	Tidak tercapai kabupaten/ kota yang mencapai 17 standarisasi	Pendampingan melalui zoom dan komunikasi secara berkala terhadap kabupaten/kota yang masih memiliki standarisasi dibawah 12 Standar
	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	108 laporan	108laporan	Rutin tidak memiliki masalah	-

D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu terdapat 3 indikator, dengan target sebagai berikut.

Tabel 3.117
Target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
Tahun 2025 – 2029

Indikator Kinerja		Target Capaian Setiap Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara	80.5	81	81.5	82	82.5
2	Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Sumatera Utara	N/A	6.3	6.4	6.5	6.6
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara	81.20	81.50	82.00	82.50	83.00

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu

Tabel 3.118
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
Tahun 2025

Indikator Kinerja		Realisasi	
		2024	2025
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara	80.19	Belum rilis
2	Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Sumatera Utara	N/A	N/A
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara	80.88	81.56

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu

Berdasarkan tabel di atas, kinerja demokrasi dan kerukunan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang relatif positif. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di kondisi awal pada tahun 2024 berada di 80,19 dengan target peningkatan bertahap hingga 82,5 pada tahun 2029. Namun realisasi pada tahun 2025 belum rilis dikarenakan perhitungan dilaksanakan lewat tahun (N+1).

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) belum memiliki data kondisi awal dan realisasi, hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara belum termasuk dalam perhitungan yang dilaksanakan oleh Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, tetapi ditetapkan target 6,3 pada tahun 2026. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) kondisi awal pada tahun 2024 dengan skor 80,88 menjadi 81,56 pada tahun 2025.

Dalam mendukung pencapaian target untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dibutuhkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dapat menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.119
Capaian Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu

No	Indikator	Target					Realisasi 2025
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	68%	72%	74%	76%	78%	51,64%
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	20%	20%	20%	20%	20%	11,11%
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu

Berdasarkan tabel diatas, capaian pelaksanaan program pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki target 68% dan terealisasi sebesar 51,64%, hal ini dikarenakan kendala jaringan Internet yang ada di beberapa daerah kurang stabil. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik telah mencapai target secara penuh dengan realisasi 100%. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif belum menunjukkan capaian, dengan realisasi 11,1% dari target 20%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Mutu SDM Anggota Ormas yang terlapor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu.

Selanjutnya, Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan berhasil mencapai target 100%. Sementara itu, Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan, realisasi capaian belum tersedia (N/A) meskipun target ditetapkan sebesar 100%.

Penjelasan terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di atas, sebagai berikut :

1) Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Indikator ini terdapat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Untuk menghitung nilai pada Indikator ini, dibutuhkan data jumlah Sekolah SLTA sederajat yang ada di Sumatera Utara yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dibutuhkan kegiatan yang dapat meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang ada di Sumatera Utara, maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara daring dengan target 1400 sekolah SLTA sederajat dengan 100 siswa per sekolah (140.000 orang siswa) dengan realisasi capaian sebesar 51,64% atau sebanyak 781 sekolah yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengn jumlah peserta sebanyak 70.330 orang siswa.

   Dalam program kegiatan ini, terdapat juga Program Strategis Daerah dengan nama Edukasi dan Pembekalan Solidaritas Ketahanan Sosial dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat dengan target 100 orang peserta di Kabupaten Asahan dan Kota Pematangsiantar pada tahun 2025.

2) Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
   Indikator ini terdapat dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi dan penguatan partisipasi politik masyarakat.

   Pendidikan politik dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, kehidupan demokrasi, serta nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berperan dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar politik, berwawasan kebangsaan, serta mampu berpartisipasi secara aktif, rasional, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung terwujudnya stabilitas politik dan kondusivitas daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

   Tujuan dalam perhitungan ini yaitu mengukur tingkat partisipasi kader partai politik dalam kegiatan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan pemahaman demokrasi, wawasan kebangsaan, serta etika dan partisipasi

politik. Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan pendidikan politik tahun 2025 yang bersumber dari dana parpol sebanyak 17.623 orang.

3) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
Indikator ini terdapat dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat. Persentase organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan aktif berdasarkan pelaksanaan kegiatan organisasi dan/atau pelaporan administrasi pada periode tertentu dibandingkan dengan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan mengikuti kegiatan Pelatihan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM ormas melalui pembinaan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar ormas memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi, wawasan kebangsaan, serta tata kelola organisasi yang akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat mendorong ormas berperan secara aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik yang kondusif di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Ormas yang melapor pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2025 sebanyak 72 Ormas. Pada Tahun 2025 tidak terlaksananya beberapa kegiatan Pelatihan SDM bagi Organisasi Kemasyarakatan, hanya 8 ormas aktif yang terfasilitasi, sehingga realisasi capaian untuk Indikator Persentase Ormas yang aktif hanya 11,11%.

4) Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan

Indikator ini terdapat dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan. Indikator ini Merupakan realisasi pelaksanaan kebijakan pada program ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasiltasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan.

Penurunan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu prioritas dalam menjaga ketahanan sosial dan keamanan masyarakat. Selain itu, upaya deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan narkoba turut dilakukan guna mendukung langkah antisipatif dan penanganan yang lebih tepat sasaran.

Dalam mencapai nilai dalam indikator ini, dibutuhkan beberapa kegiatan yang mendukung, yaitu penanganan Narkoba.

5) Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

Indikator ini terdapat dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Indikator ini dihitung berdasarkan hasil potensi konflik yang ditangani dan terselesaikan sehingga tidak terjadinya konflik sosial. Apabila konflik sosial tidak dapat dikendalikan oleh POLRI sehingga terganggunya fungsi pemerintahan, Gubernur dapat mengeluarkan Keputusan penanganan konflik sosial tingkat skala provinsi setelah berkonsultasi dengan DPRD Provinsi.

Penanganan konflik sosial di Sumatera Utara dilaksanakan secara terintegrasi melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan pascakonflik. Pemerintah daerah bersama unsur terkait melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan peran forum kewaspadaan masyarakat. Dalam tahap penanganan, pendekatan yang dikedepankan adalah mediasi, fasilitasi dialog, serta penegakan hukum secara proporsional dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Selanjutnya, pascakonflik difokuskan pada pemulihan hubungan sosial, penguatan nilai toleransi dan kebersamaan, serta pemberdayaan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, hasil kinerja indikator ini yaitu N/A karena tidak adanya data konflik sosial yang terjadi. Pada tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dalam mencapai target indikator ini, yaitu pelaksanaan kegiatan tim kewaspadaan dini daerah, peningkatan kapasitas SDM dibidang Intelijen, FGD Isu aktual, pelaksanaan Puskomin dan sosialisasi penanganan konflik, radikalisme dan cipta kondisi sehingga konflik sosial tidak terjadi.

Tabel 3.120
Capaian Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						
	1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	367 buah bendera	367 buah bendera	Tingkat kehadiran peserta Apel Bela Negara belum optimal	Peningkatan koordinasi penjadwalan dan penyampaian informasi kegiatan secara lebih awal
				1000 orang mengikuti Upacara HUT Belanegara	931 orang yang mengikuti Upacara HUT Belanegara		
		1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen Laporan Hibah FPK	1 Dokumen Laporan Hibah FPK		
		1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1400 sekolah	730 sekolah	Keterbatasan kualitas jaringan internet di sebagian lokasi peserta	Dilakukan penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, penyediaan materi dan rekaman kegiatan, serta penguatan koordinasi teknis
				100 orang anggota Ormas yang mengikuti Sosialisasi	100 orang anggota Ormas yang mengikuti Sosialisasi		
		1.4	Pembentukan Paskibra	76 orang seleksi	73 orang seleksi		
				76 orang pelatihan	73 orang pelatihan		
				76 orang Aktivitas pasca pengibaran	105 orang Aktivitas pasca pengibaran		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
		1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia		
		1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	300 orang mengikuti pendidikan partai politik	300 orang mengikuti pendidikan partai politik		
		1.3	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Kab/Kota monitoring bantuan keuangan kab/kota 3 kab/kota penilaian kenaikan bantuan keuangan Parpol Kab/Kota	33 Kab/Kota monitoring bantuan keuangan kab/kota 3 kab/kota penilaian kenaikan bantuan keuangan Parpol Kab/Kota		
				11 Parpol bantuan hibah	11 Parpol bantuan hibah		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 orang peserta Dialog Implementasi Kebijakan	80 orang peserta Dialog Implementasi Kebijakan		
				1 Dokumen Laporan Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	1 Dokumen Laporan Pemantauan Perkembangan Politik Daerah		
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan					
		1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen laporan hibah Ormas LVRI	1 dokumen laporan hibah Ormas LVRI		
				1 dokumen laporan hibah DHD 45	1 dokumen laporan hibah DHD 45		
				1 dokumen laporan hibah PWRI Sumut	-	Belum melengkapi dokumen pencairan	Percepatan penyelesaian administrasi keuangan, penguatan koordinasi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan
				1 dokumen laporan hibah PIMANSU	1 dokumen laporan hibah PIMANSU		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen laporan Timdu Pengawasan Ormas	1 dokumen laporan Timdu Pengawasan Ormas		
		1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen laporan monitoring Ormas	1 dokumen laporan monitoring Ormas		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
		1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen Laporan Hibah FKUB	1 Dokumen Laporan Hibah FKUB		
				1 Dokumen Laporan Hibah FPB	1 Dokumen Laporan Hibah FPB		
		1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kegiatan Dialog Kebangsaan	1 Kegiatan Dialog Kebangsaan		
				5 Angkatan Pelatihan Dasar Konselor Narkoba	5 Angkatan Pelatihan Dasar Konselor Narkoba		
				240 orang mendapatkan bantuan rehabilitasi Narkoba	240 orang mendapatkan bantuan rehabilitasi Narkoba		
				1 Desa Percontohan	1 Desa Percontohan		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
				1000 pcs Fasilitasi Test Urine	1525 pcs Fasilitasi Test Urine		
		1.3	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang Tim terpadu P4GN dan Timsus Perlindungan, Pendampingan dan Advokasi Narkoba	100 orang Tim terpadu P4GN dan Timsus Perlindungan, Pendampingan dan Advokasi Narkoba		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Konflik Sosial						
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
		1.1	Penyusunan Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemantauan Orang Asing	100 orang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemantauan Orang Asing		
				100 orang mengikuti Sosialisasi dengan Tim kewaspadaan Dini Daerah	100 orang mengikuti Sosialisasi dengan Tim kewaspadaan Dini Daerah		
		1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	1 Dokumen Laporan Hibah FKDM	1 Dokumen Laporan Hibah FKDM		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
		1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negera, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	25 orang peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25 orang peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganaan Konflik di Daerah	100 orang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme	100 orang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme		
		1.5	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganaan Konflik di Daerah	100 orang mengikuti FGD terkait Isu Aktual	100 orang mengikuti FGD terkait Isu Aktual		
				300 orang mengikuti kegiatan Pusat Komunikasi dan Informasi Provsu	300 orang mengikuti kegiatan Pusat Komunikasi dan Informasi Provsu		
				300 orang mengikuti kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik	300 orang mengikuti kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan			Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
				Target	Realisasi		
		1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Laporan Kegiatan Penggalangan Cipta Kondisi Sumatera Utama	1 Laporan Kegiatan Penggalangan Cipta Kondisi Sumatera Utama		

E. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

1. PT. Bank Sumut

Tabel 3.121
Capaian Kinerja PT. Bank SUMUT

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
1	Kredit/Pembiayaan	PT Bank Sumut menargetkan Nominal Kredit/Pembiayaan sebesar Rp33.225.684.565.418	Realisasi Rp32.094.409.310.303,- dengan pencapaian sebesar 95.51% atau tumbuh 0.32%% dari realisasi tahun Buku 2024 sebesar Rp31.992.415.184.283,-	1. Kondisi ekonomi yang belum stabil, sehingga penyaluran kredit lebih hati-hati 2. Persaingan antar bank terkait pemberian suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bank Sumut. 3. Teknologi yang berkaitan dengan fitur layanan perkreditan seperti CMS. 4. Terdapat beberapa dinas/instansi yang tidak mempersyaratkan bank garansi maupun rekening pembayaran proyek di Bank Sumut. 5. Pipeline pembiayaan belum optimal dieksekusi oleh unit kerja. 6. Persaingan dengan bank kompetitor yang memiliki margin pembiayaan yang lebih kompetitif. 7. Bank Sumut Unit Usaha Syariah belum memiliki produk KUR Syariah, sehingga tidak dapat menjangkau pelaku UMKM	1. Akan dimaksimalkan pada ekosistem yang dikuasai Bank Sumut dan dapat dipantau. 2. Pemberian suku bunga khusus debitur targeted. 3. Pendekatan relationship yang baik sehingga masih dapat difasilitasi dengan menggunakan fitur dan layanan yang ada saat ini. 4. Menambahkan persyaratan pada kualifikasi kontraktor/vendor di lingkungan pemerintahan provinsi, kota/kabupaten agar bank garansi maupun rekening pembayaran proyek harus melalui Bank Sumut. 5. Optimalisasi pemasaran produk, terutama produk baru syariah seperti gadai emas dan cicil emas. 6. Memaksimalkan eksekusi pipeline pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. 7. Evaluasi dan perbaikan ketentuan produk pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan, termasuk dalam pengembangan produk untuk pelaku UMKM.

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
				di Sumatera Utara yang ingin bertransaksi di perbankan syariah. 8. Belum optimalnya realisasi pembiayaan disebabkan terbatasnya jumlah tenaga pemasar (Account Officer)	
2	Dana pihak ketiga	PT Bank Sumut menargetkan nominal Dana Pihak Ketiga sebesar Rp36.389.072.577.225	Realisasi Rp38.645.163.595.43 dengan pencapaian sebesar 106.20% atau tumbuh 7.54% dari realisasi tahun Buku 2024 sebesar Rp.35.934.658.900307,-	Biaya bunga masih relatif tinggi mengikuti suku bunga bank pesaing di pasar guna menjaga nasabah agar bertahan di Bank Sumut.	1. Menerapkan suku bunga turun secara bertahap untuk perpanjangan deposito baru. 2. Membatasi penawaran suku bunga tinggi hanya untuk deposito besar dan jangka panjang. 3. Me-review kembali pricing deposito agar tetap kompetitif, namun tidak melebihi batas optimal yang menyebabkan kenaikan biaya. 4. Meningkatkan portofolio dana murah (CASA) dengan memperbanyak program akuisisi dan loyalty khususnya untuk nasabah ritel, payroll, komunitas ASN/Swasta, merchant QRIS dan agen laku pandai
3	Total Asset	PT Bank Sumut menargetkan Rp46.342.164.779.926	Realisasi Rp.48.627.918.717.100,- dengan pencapaian sebesar 104.93% atau tumbuh 6.99% dari realisasi tahun Buku 2024 sebesar Rp.45.449.143.848.644	Peningkatan asset di topang dari Peningkatan Dana Pihak Ketiga yang masih didominasi oleh Deposito	Bank focus pada peningkatan struktur dana terutama dana murah seperti Giro dan Tabungan juga peningkatan ekuitas melalui penambahan modal bank.
4	Laba setelah pajak	PT Bank Sumut menargetkan Rp753.170.600.549	Realisasi Rp.754.634.613.261,- dengan pencapaian 100.19% atau naik 1.88% dari realisasi laba Tahun Buku 2024 Rp.740.720.468.590,-	Terjadi Penurunan Fee Based Income sebesar Rp3 miliar dari 381 miliar tahun 2024 menjadi Rp378 miliar.	Meningkatkan pertumbuhan NOA dengan prioritas pada Pengembangan Layanan Digital Banking.

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
	Rasio Keuangan	1. Rentabilitas : • Return On Asset (ROA) sebesar 2.15 % • Return On Equity (ROE) sebesar 16.88% • Net Interest Margin (NIM) sebesar 6.74% • Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional sebesar 77.59% 2. Likuiditas : • Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 90.42% 3. Kualitas Aset : • Non Performance Loan (NPL) sebesar 2,08% 4. Permodalan : • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 21,34%	1. Rentabilitas : • Return on Asset (ROA) sebesar 2,10% • Return on Equity (ROE) sebesar 16,90% • Net Interest Nargin (NIM) sebesar 6,58% • Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 77,41% 2. Likuiditas : • Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 81,76% 3. Kualitas Aset : • Non Performance Loan (NPL) sebesar 2,53% 4. Permodalan : • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 23,19%	1. Perbaikan kualitas pembiayaan melalui penagihan, restrukturisasi, dan lelang belum optimal. 2. Meningkatnya pemburukan kualitas pembiayaan pada tahun berjalan. 3. Kondisi perekonomian yang mengalami penurunan di beberapa sektor yang mengakibatkan usaha beberapa debitur mengalami penurunan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya pada bank, hal ini berdampak negatif pada kualitas kredit di Bank Sumut sehingga rasio NPL memburuk. 4. Bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera Utara mengakibatkan usaha debitur tutup dan kondisi perekonomian menurun walaupun belum signifikan. Namun untuk beberapa bulan kedepan akan mempengaruhi kualitas kredit pada Bank Sumut. 5. Pembayaran klaim asuransi meninggal dunia yang tidak sebanding dengan jumlah kredit yang memburuk akibat debitur meninggal dunia	1. Meningkatkan upaya perbaikan pembiayaan bermasalah melalui upaya penagihan, restrukturisasi, lelang dan hapus buku. 2. Membentuk tim task force yang berkordinasi dengan Divisi Penyelematan Kredit dalam upaya percepatan perbaikan kualitas pembiayaan. 3. Bank akan melakukan assessment terhadap debitur – debitur bermasalah untuk menentukan upaya atau pilar penyelamatan/penyelesaian atas kredit – kredit bermasalah diantaranya : penagihan (pendekatan persuasive), restrukturisasi (perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga atau penyesuaian kemampuan angsuran debitur), eksekusi jaminan. 4. Sesuai dengan arahan Pemerintah dan kebijakan OJK, Bank Sumur telah Menyusun ketentuan pemberian relaksasi terhadap debitur – debitur yang terdampak bencana untuk mengantisipasi dampak bencana yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara, sehingga dapat mengantisipasi pemburukan kredit. 5. Melakukan koordinasi dan follow up pengajuan klaim melalui Divisi terkait kepada Perusahaan Asuransi untuk menindaklanjuti pembayaran klaim untuk meminimalisir semakin meningkat/memburuknya kualitas kredit akibat debitur meninggal dunia

2. PDAM Tirtanadi

Tabel 3.122
Capaian Kinerja PDAM Tirtanadi

NO.	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
	Menetapkan garis besar arah perusahaan untuk kurun waktu tertentu	Program Rencana Bisnis untuk kurun waktu lima tahun ke depan:				
		Penyusunan Rencana Bisnis Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara 2026-2030	1 Dokumen laporan	Selesai (Desember 2025)		
	Mapping kebutuhan dan penilaian pelanggan terhadap perusahaan	melakukan pendataan ke lapangan:				
		Survey Kebutuhan Nyata & Survey Kepuasan Pelanggan	1 Dokumen laporan	Selesai (Desember 2025)		
	Mapping kebutuhan dan penilaian pegawai terhadap Perusahaan	Melakukan pendataan di unit kerja:				
		Survey Kepuasan Pegawai	1 Dokumen laporan	Selesai (Desember 2025)		
	menyeimbangkan biaya operasional dan pelayanan kepada masyarakat	Penyesuaian tarif		rencana penyesuaian tarif 2026		
	Peningkatan cakupan pelayanan	Rencana penambahan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah air minum:				
		penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Air minum program Pemerintah Kota Medan Melalui DAK Kota Medan	1 Dokumen laporan	Selesai (Agustus 2025)		
	peningkatan pendistribusian air	Rencana penambahan JDU:				
		penyusunan DED pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Untuk Pemanfaatan dan Lokasi Khusus (DAK) Prov-Sumut TA.2025 Dalam Rangka	1 Dokumen laporan	Selesai (Juli 2025)		

NO.	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
		Penyerapan SPAM Regional Mebidang				
	Peningkatan produksi air	Rencana Peningkatan SPAM:				
		Penyusunan DED cabang Tapsel terkait peningkatan SPAM dalam rangka penambahan Produksi di Kec. Padang Sidempuan Utara dan Padang Sidempuan Selatan	1 Dokumen laporan	Selesai (Mei 2025)		
	Pemenuhan 4 TAS	Rehabilitasi pipa tua:				
		Rehabilitasi pipa tua transmisi, distribusi dan dinas	Rp7.942.500.467,00	Rp4.444.675.129,00		
		Rehabilitasi relokasi jembatan pipa transmisi Zona 1 dan Zona 2	Rp300.000.000,00	Rp383.145.462,00		
		Rehabilitasi sirkulasi penggabungan pipa transmisi	Rp400.000.000,00	Rp1.112.672.679		
	peningkatan kapasitas produksi air	Uprating IPA Sunggal:				
		Penambahan fasilitas pengolahan kapasitas 400 ltr	7 April 2026	10 Oktober 2025		

3. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Tabel 3.123
Capaian Kinerja PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

No	Kebijakan	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
1	Pendapatan Unit Usaha KMP Sumut I dan II	Operasional Kapal Penyeberangan di danau Toba (Tigasras-Simanindo)	15.551.782.475	15.740.448.917	Realisasi 101% dari Anggaran	-
2	Pendapatan Unit Usaha PRSU	Pengeloaan aset diarea PRSU	6.835.460.687	3.626.793.453	Tidak terselenggaranya event Pekan Raya Sumatera Utara ke 50 tahun 2025 dan berkurangnya pendapatan dari iuran pengelolaan paviliun Kabupaten/ Kota	Peningkatan event diluar PRSU (sewa Gedung serba guna dan event Pekan Ramadhan) dan pengurusan izin pelaksanaan PRSU tahun 2026 dilakukan lebih awal
3	Pendapatan Usaha Konstruksi	Konstruksi Proyek PTPN	3.675.368.114	1.718.185.703	Beberapa target pekerjaan tidak terealisasi karena kalah dalam proses tender	Menargetkan project konstruksi pada BUMN/BUMDN serta Dinas di Provsu pada tahun 2026 serta KSO Real Estate
4	Pendapatan lain-lain	Pendapatan/ Beban lain-lain (termasuk deviden dari anak usaha)	11.741.064.610	24.578.979.728	-	

4. PT. Perkebunan Sumatera Utara

Tabel 3.124
Capaian Kinerja PT. Perkebunan Sumatera Utara

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
1	Produksi TBS Kebun (Kg) : Tanjung Kasau Sei Kari Simpang Gambir Patiluban Sp. Koje Inti Kp. Baru Inti Sp. Koje Plasma Kp. Baru Plasma **Jumlah**	 13.543.396 3.801.791 2.044.005 3.264.760 2.733.121 411.450 1.240.644 168.642 **27.207.809**	 12.580.920 3.424.350 2.032.490 3.393.640 2.651.120 788.510 1.375.400 43.760 **26.290.190**	Capaian produksi TBS Tahun 2025 sebesar 96,63% dari RKA antara lain disebabkan : a. Tanaman terkena serangan hama ulat api dan ulat kantong di kebun Tanjung Kasau yang diperkirakan 15% persen secara keseluruhan b. Perawatan tanaman yag sangat minim antara lain seperti : – Aplikasi pemupukan tidak dilakukan tepat waktu – Rotasi pemeliharaan tanaman sangat minim dilaksanakan sesuai dengan norma – Infrastruktur pasar pikul, jalan koleksi dan jalan produksi sangat tidak mendukung untuk dilakukan penggalian produksi secara optimal – Berat janjang rata-rata (BJR) berada di bawah target akibat aplikasi pemupukan yang tidak dilaksanakan c. Teritorial kebun yang sangat rentan terhadap pencurian akibat sangat minim portal-portal pengamanan, pendangkalan parit gajah dan bahkan tidak memiliki parit gajah	- Untuk mencegah terjadinya serangan hama ulat api dan ulat kantong dilakukan proses aplikasi pestisida di lapangan yang terdampak. - Melakukan Land Clearing (LC) yang lebih bersih pada areal replanting yang telah memasuki penanaman generasi kedua - Aplikasi pemupukan sesuai dengan norma - Membangun portal-portal dan parit gajah khusus di areal yang rawan terhadap pencurian

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
				- Curah hujan yang relatif tinggi khusus di Kebun Madina mengakibatkan proses panen terhambat	
2	Produksi CPO (Kg) : PMKS Tanjung Kasau PMKS Simpang Gambir **JUMLAH** **Produksi PK (Kg)** PMKS Tanjung Kasau PMKS Simpang Gambir **Jumlah**	 3.480.709 1.970.758 **5.451.467** 737.225 394.152 **1.131.376**	 3.091.498 2.064.739 **5.156.237** 690.437 427.845 **1.118.282**	Capaian produksi CPO dan PK Tahun 2025 masing-masing sebesar 94,58 % dan 98,84 % dari target, antara lain disebabkan : **1. Kinerja PMKS Tanjung Kasau (Kapasitas 20 Ton/jam)** **a. Produksi CPO** Jumlah TBS diolah 15.936.002 kg -Kebun Sendiri 15.936.002 kg (100%) - Pembelian - kg Jumlah TBS diolah selama Tahun 2025 sesuai dengan hari kerja dan jam olah seharusnya 17.932.637 Kg , sedangkan realisasi TBS diolah sebesar 15.936.002 kg atau 91,62 % Kemampuan penerimaan TBS dari Kebun Sendiri hanya 92,02 % dari 17.932.637 Target rendemen CPO gabungan sebesar 20,01% dengan rincian : - Kebun Sendiri 20,01 % - Pembelian - % Realisasi rendemen CPO gabungan sebesar 19,40 %, berada dibawah target 3,06 % dengan rincian :	- Penambahan 1 unit Pressan dan Digester. - Pengadaan 18 unit Lori - Perbaikan pipa dan linier pada sterilizer - Pengadaan 1 unit Vibrating Screen - Pengadaan 1 unit Sand Cyclone - Perbaikan lantai sortasi - Perbaikan struktur tiang distribusi TBS - Perbaikan Body Digester dan Pressan - Service Sand Cyclone - Pengadaan 1 Unit Boiler - Membangun Standard Operating Procedures (SOP) untuk tata kelola administrasi pembelian TBS guna menciptakan internal kontrol pembelian yang pada gilirannya mampu memberikan kontribusi laba - Penyediaan dana untuk pembelian TBS luar.

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
				- Kebun Sendiri 19,40 % - Pembelian - % **b. Produksi PK** Jumlah TBS diolah 15.936.002 kg -Kebun Sendiri 15.936.002 kg (100%) - Pembelian - kg Jumlah TBS diolah selama Tahun 2025 sesuai dengan hari kerja dan jam olah seharusnya 17.932.637 Kg , sedangkan realisasi TBS diolah sebesar 15.936.002 kg atau 91,62 % Kemampuan TBS dari Kebun Sendiri hanya 92,02 % Target rendemen PK gabungan sebesar 4,24 % dengan rincian : - Kebun Sendiri 4,24 % - Pembelian - % Realisasi rendemen PK gabungan sebesar 4,33 %, berada diatas target 4,51% dengan rincian : - Kebun Sendiri 4,33 % - Pembelian - % Capaian realisasi rendemen CPO Kebun Sendiri hanya 92,02 % dapat disimpulkan bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh pemanen yang tidak melaksanakan kriteria matang panen ,	

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
				TBS sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, tidak terelisasinya pemupukan dan kondisi pabrik secara teknis tidak prima yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut : - Kondisi linier dan pipa pada sterillizer sudah korosi berdampak terjadi kebocoran steam yang akan memakan waktu proses perebusan yang lebih lama (norma 90 menit) - Jumlah Vibrating Screen hanya 1 unit yang seharusnya 2 unit kondisi ini berdampak jika terjadi trouble shooting akan menyebabkan mutu CPO tidak sesuai standar dan kinerja - Sesuai dengan spesifikasi, Pabrik tidak memiliki Sand Cyclone yang berfungsi untuk membuang pasir yang terdapat pada sludge sehingga kinerja sludge centrifuge tidak optiimal Capaian realisasi rendemen PK Kebun Sendiri mencapai 4,51%.	- Penyiadaan dana untuk pembelian TBS luar.

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
				2. Kinerja PMKS Simpang Gambir (Kapasitas 30 Ton/jam) **a. Produksi CPO** Jumlah TBS diolah 10.339.377 kg - Kebun Sendiri 8.927.437 kg (105,61%) - Pembelian 1.411.940 kg (100,82%) Jumlah TBS diolah selama Tahun 2025 sesuai dengan hari kerja dan jam olah seharusnya 9.853.792 Kg, sedangkan realisasi TBS diolah sebesar 10.339.377 kg atau 104,93% Kemampuan penerimaan TBS dari Kebun Sendiri melebihi target 104,04 % dari 8.453.336 Kg Target rendemen CPO gabungan sebesar 20,00% dengan rincian : - Kebun Sendiri 20,00 % - Pembelian 20,00 % Realisasi rendemen CPO gabungan sebesar 19,97 % berada dibawah target 0,15 % atau dengan capaian 99.85 % dengan rincian : - Kebun Sendiri 19,96 % (99,78 %) - Pembelian 20,06 % (100,31 %)	

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
				b. Produksi PK Jumlah TBS diolah 10.339.377 kg - Kebun Sendiri 8.927.437 kg (105,61%) - Pembelian 1.411.940 kg (100,82%) Jumlah TBS diolah selama Tahun 2025 sesuai dengan hari kerja dan jam olah seharusnya 9.853.792 Kg , sedangkan realisasi TBS diolah sebesar 10.339.377 kg atau 104,93% Kemampuan penerimaan TBS dari Kebun Sendiri melebihi target 104,04 % dari 8.453.336 Kg Target rendemen PK gabungan sebesar 4,00 % dengan rincian : - Kebun Sendiri 4,00 % - Pembelian 4,00 % Realisasi rendemen PK gabungan sebesar 4,14 % berada diatas target 4,41 % atau dengan capaian 103,445 % dengan rincian : - Kebun Sendiri 4,14 % (103,47 %) - Pembelian 4,13 % (103,32 %)	

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
3	**Jumlah Tenaga Kerja :** Kantor Direksi Tanjung Kasau / Sei Kari PMKS Tanjung Kasau Simpang Gambir / Kampung Baru PMKS Simpang Gambir Patiluban/ Simpang Koje **Jumlah**	 49 312 100 123 96 216 **896**	 39 286 63 101 68 204 **761**	Jumlah Tenaga Kerja diseluruh Kebun dan Unit berada dibawah target atau secara keseluruhan sebesar 92,03%, antara lain disebabkan oleh : - Mengundurkan diri, pensiun, diberhentikan dan sebab lain. - Melakukan rekrutmen/ pengisian karyawan, karena kondisi keuangan yang cenderung terus menurun tetapi tidak dapat dipenuhi semua sesuai kriteria jabatan dan keahlian. Jika dilakukan rekrutmen terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat spesifik dan menuntut keahlian/ kompetensi selalu tidak tercapai kesepakatan karena kriteria kesejahteraan yang ditawarkan.	- Melakukan kebijakan tugas rangkap dengan mengangkat karyawan ke level yang lebih tinggi meskipun kompetensi tenaga kerja yang diangkat tersebut belum memenuhi persyaratan - Melakukan program Benchmark dan Studi Banding ke Perusahaan - Perusahaan sejenis yang sudah mapan. - Melakukan pelatihan - pelatihan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keahlian
4	**Pendapatan (Rp)** CPO PK **Jumlah Pendapatan Produksi** **Jumlah Pendapatan lain-lain** TOTAL PENDAPATAN TOTAL BEBAN **LABA/RUGI BERSIH** **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	 72.788.322.712 11.393.859.352 **84.182.182.064** **1.158.415.450** 85.340.597.514 114.357.401.101	 73.444.962.274 14.150.800.000 **87.595.762.274** **876.612.714** 88.472.374.988 110.664.140.336	Jumlah pendapatan naik sebesar 4% dari target tahun 2025 antara lain disebabkan oleh : - Tingginya Harga CPO dan PK naik dari yang dianggarkan - Realisasi Produksi CPO dan PK sebesar 94 % dan 99 % dari target - Perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar Rp. 22,19 milyar atau 76 % dari target antara lain disebabkan : 1. Adanya pengakuan sanksi pajak atas pemeriksaan SPT PPh Badan Tahun 2020 dan 2021	- Melakukan penjajakan sumber pendanaan untuk Investasi dan Eksploitasi melalui Pemegang Saham, Perbankan atau Investor pihak ketiga dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku - Melakukan upaya Restrukturisasi kredit Bank Mandiri untuk merelaksasi kewajiban yang harus dipenuhi - Mengupayakan penjualan Produksi tidak kepada kawasan berikat - Menyusun program Rencana Kerja Operasional pertriwulan dan dirinci secara bulanan dengan berdasarkan RKA yang telah disetujui RUPS yang

No	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
		Target	Realisasi		
		(29.016.803.587) -	(22.191.765.348) -	2. Produktifitas pemanen tidak sesuai/ lebih rendah dari basis borong yang ditetapkan 3. Biaya pengangkutan TBS dari TPH ke PMKS tidak kompetitif dan masih terjadi beberapa kali penambahan biaya pengangkutan dari lapangan ke TPH. - Rendahnya Produksi di Kebun Madina sehingga pengelolaan hanya dilakukan 1 s/d 2 kali dalam seminggu	dikaitkan dengan kemampuan Cashflow - Menganalisa dan mengevaluasi cost per unit setiap pekerjaan - pekerjaan yang diminta Kebun dan Unit oleh Bagian terkait dan dicek oleh Bagian Keuangan atas ketersediaan Anggaran dan kemampuan Cashflow - Mendorong dan berkoordinasi dengan Bagian Produksi dan Bagian Komersil untuk mempercepat penjualan komoditi yang tersedia Bagian Keuangan atas ketersediaan Anggaran dan kemampuan Cashflow

5. PT Dhirga Surya Sumatera Utara

Tabel 3.125
Capaian Kinerja PT. Dhirga Surya

No	Kebijakan	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
1	1. Penugasan Beras Dhirga Surya Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Bahan Pangan Untuk Sumut 2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Beras	Beras Dhirga Surya Sumatera Utara	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara menargetkan pendapatan dari Kilang Beras Dhirga Surya sebesar Rp. 22.168.569.600	Realisasinya PT. Dhirga Surya hanya memperoleh pendapatan Rp.483.175.000,00	Baru terbitnya Penugasan kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dalam Penyediaan dan Pendistribusian Beras pada tanggal 01 September 2025	1. Perlu adanya dukungan regulasi pemasaran beras Dhirga Surya ditingkat OPD Pemprovsu maupun BUMD. 2. Perlu adanya kolaborasi BUMD dalam mendukung pembiayaan usaha.
2	Kerjasama dengan PT. Cakrawala Dekatama	Realiasi pembayaran Fix Income Kerjasama PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dengan PT. Cakrawala Dekatama.	Sesuai dengan izin prinsip dari Gubernur kenaikan fix income 15% perlima tahun dari Rp1.265.000.000,00 menjadi **Rp.1.454.750.000,00**	Terlaksana dan sekarang Fix Income PT. Dhirga Surya **Rp.1.454.750.000,00**	-	-
3	Travel Umrah	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Bekerjasama Dengan PT. Annajwa, tentang Pengelolaan Ibadah	Target pendapatan dalam program ini Rp.400.000.000,00	Realisasi Rp. 0,00	Dalam pelaksanaan ini telah dilakukan sosialisasi ke setiap OPD di lingkungan Pemprovsu	Perlu dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan

No	Kebijakan	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
		Umroh dan Paket Wisata lainnya dengan menggunakan talangan dari Bank Sumut.				program ini ke seluruh OPD dan BUMD yang ada dilingkungan Provinsi Utara
4	Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Terintegrasi di Sekitar KEK Sei Mangke	Pengelola Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Terintegrasi di Sekitar KEK Sei Mangke	Target pendapatan dalam pengelolaan Rusun Rp.50.000.000,00	Realisasi pendapatan Rp. 0,00	Pengelolaan tidak optimal karena setelah penyerahan pengelolaan, terdapat kerusakan- kerusakan seperti saluran air yang bocor, furniture yang rusak, sehingga mempengaruhi tingkat hunian.	Perbaikan saluran air limbah serta sarana prasarana pendukung lainnya.

6. PD. Aneka Industri dan Jasa

Tabel 3.126
Capaian Kinerja PD. Aneka Industri dan Jasa

No	Kebijakan	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
1	Peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha Badan Usaha Milik Daerah.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Usaha PD Aneka Industri dan Jasa.	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025.	Program pengembangan dan pengelolaan usaha telah dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi riil dan kemampuan perusahaan sepanjang Tahun Anggaran 2025.	Keterbatasan modal kerja, sarana dan prasarana usaha, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal.	Melakukan efisiensi operasional, serta perencanaan penguatan usaha secara bertahap.
2	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.	Pelaksanaan kegiatan usaha percetakan.	Terselenggaranya kegiatan percetakan.	Kegiatan percetakan dilaksanakan dan berjalan sepanjang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan.	Keterbatasan mesin produksi dan perlunya maintenance mesin percetakan.	Optimalisasi penggunaan mesin yang tersedia serta perencanaan pengadaan mesin baru secara bertahap.
3	Penataan dan penguatan tata kelola perusahaan.	Program Penunjang Administrasi dan Manajemen Perusahaan.	Terwujudnya tata kelola perusahaan yang tertib administrasi dan mendukung kelancaran operasional.	Kegiatan penunjang administrasi dan manajemen telah dilaksanakan untuk mendukung operasional perusahaan sepanjang Tahun Anggaran 2025.	Penyesuaian manajemen seiring dengan pergantian kepemimpinan perusahaan.	Evaluasi dan penataan organisasi serta penyelarasan kebijakan internal secara bertahap.
4	Dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengendalian inflasi daerah.	Dukungan kegiatan perdagangan dan distribusi cabai merah dalam rangka menjaga stabilitas harga di daerah.	Terlaksananya kegiatan dukungan perdagangan dan distribusi cabai merah sesuai dengan arahan	PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara bersama PT. Pembangunan	Ketidakstabilan harga cabai merah	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan penyesuaian pola

No	Kebijakan	Uraian Kegiatan	Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
			Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020	Prasarana Sumatera Utara dan PT Dhirga Surya Sumatera Utara dan telah melaksanakan dukungan kegiatan perdagangan dan distribusi cabai merah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga.		distribusi sesuai kondisi lapangan.
5	Optimalisasi pemanfaatan dan penataan aset perusahaan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.	Penataan, inventarisasi, dan optimalisasi aset-aset milik PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung kegiatan usaha dan rencana pengembangan perusahaan.	Tersedianya data aset perusahaan yang tertib dan terlaksananya upaya optimalisasi pemanfaatan aset sesuai kondisi dan kebutuhan perusahaan.	PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan penataan dan inventarisasi aset perusahaan serta melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset secara bertahap sesuai dengan kondisi riil perusahaan.	Sebagian aset perusahaan belum optimal dimanfaatkan dan masih memerlukan penataan lebih lanjut, termasuk penilaian aset untuk mendukung perencanaan pemanfaatan ke depan.	Melakukan penataan lanjutan, penilaian aset melalui KJPP, serta menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan secara bertahap.

F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada strategi tertentu. Tujuan dari penyusunan kebijakan adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan pembangunan yang mendesak harus ditangani dan diselesaikan. Kebijakan yang telah disusun diharapkan dapat diberlakukan dan dipatuhi oleh setiap unsur pelaksana.

Kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Tabel 3.127
Kebijakan Strategis Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia (SDM) 2. Menjaga Stabilitas makro Ekonomi Daerah 3. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan 4. Mengembangkan dan Menata Inftastruktur yang Berkualitas, Estetik, dan Ramah Lingkungan 5. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang Tangguh. Bappelitbang juga mempunyai 17 Program Prioritas dan 6 Quick Wins antara lain : 1. Bersekolah Gratis 2. Berobat Gratis 3. Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan 4. Digitalisasi Pelayanan Poblik 5. Pembanunan infrastruktur Terintegrasi 6. Perlindungan Rakyat melalui Layanan Restrorative Justice Beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang akan dikerjakan pada tahun 2025 antara lain :	1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): fokus pada pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah: menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 5,2-5,4%. 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik, dan Ramah Lingkungan: membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. 5. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh: meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Jalan Tol Sumatera: ruas Binjai-Langsa dan Tebingtinggi-Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga 2. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung 3. Kereta Api Tebingtinggi-Kuala Tanjung 4. Kawasan Industri Kuala Tanjung 5. Bendungan Lau Simeme 6. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai		

Sumber : Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Tabel 3.128
Tindal Lanjut Rekomendasi DPRD
Terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Utara TA. 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Urusan Wajib Pendidikan (Dinas Pendidikan Provsu)		
	a. DPRD Provsu menyoroti masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provsu, oleh karenanya agar dilakukan perbaikan untuk tahun berikutnya terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Kualitas dan Kompetensi Guru Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai dan kurangnya pemerataan distribusi tenaga pendidik ke daerah terpencil;	Moratorium perpindahan ASN dari kepulauan nias ke Daerah lainnya diluar kepulauan Nias.	Agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di daerah terpencil ditambah lagi akan dicanangkannya sekolah unggulan gratis di kepulauan nias

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Rekomendasi : Mengadakan pelatihan berkala dan sertifikasi wajib bagi tenaga pendidik serta memberikan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.	Berkaitan dengan sertifikasi, dikelola langsung oleh kemendikdasmen bahwasanya ppg dalam jabatan akan diselesaikan ditahun 2026.artinya semua guru akan mendapatkan sertitikat pendidik.	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikn mendapatkan tuinjangan profesi guru
	b. Akses pendidikan yang tidak merata Banyak anak di daerah pelosok, perkebunan, dan pesisir yang kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas serta faktor ekonomi keluarga menjadi penghambat utama bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; Rekomendasi : Adanya program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan dilakukan pembangunan atau renovasi sekolah dan fasilitas pendidikan di daerah yang masih tertinggal;	Mendorong Sekolah dan mengusulkan Beasiswa melalui Program PIP dan Program Beasiswa ADEM bagi siswa SMA di Daerah Khusus (kepulauan Nias) ke Puslabdik Kemdikdasmen Pengusulan Revitalisasi Satuan Pendidikan (Pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan) melalui kementerian Pengusulan dan pembangunan USB SMAN Rahuning Kab. Asahan melalui dana APBN Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 24 Ruang pada 12 SMA Penyediaan Fasilitas Internet dan Listrik: - Pemasangan Jaringan Internet sebanyak 85 SMA - Pemasangan Instalasi listrik sebanyak 3 SMA - Pengadaan PLTS sebanyak 8 SMA	Siswa penerima PIP melalui usulan Dinas/Cabdis sebanyak 100.365 siswa dan Penerima PIP melalui DTSEN/DTKS sebanyak 49.129 siswa (dgn sumber pengusulan oleh sekolah) serta Siswa Penerima Program ADEM sebanyak 35 siswa SMA Penambahan gedung dan renovasi melalui bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan melalui APBN sebanyak 119 SMA (92 SMAN dan 17 SMAS se Sumut) Penambahan 1 USB di Kab. Asahan Penambahan RKB pada 12 SMA Negeri
	c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai Provinsi Sumatera Utara memiliki SMA sejumlah 1.088, SMK sejumlah 967 dan SLB sejumlah 64, dari total ruang kelas yang dimiliki yaitu sejumlah 29.590, banyak yang dalam kondisi rusak dan terdiri dari rusak ringan sejumlah 6.775, rusak sedang sejumlah 2.923 dan ruang kelas		SMAN yang selama ini tidak memiliki Fasilitas Internet dan Listrik sudah teratasi dengan rincian : - Jaringan Internet sebanyak 85 SMA - Instalasi listrik sebanyak 3 SMA - SMA dengan listrik PLTS sebanyak 8 SMA

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dalam kondisi rusak berat sejumlah 2.853. Selain itu, banyak sekolah yang masih mengalami kekurangan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet serta infrastruktur sekolah di beberapa daerah masih belum layak untuk mendukung proses belajar mengajar. Rekomendasi : Renovasi sekolah yang mengalami kerusakan khususnya yang dalam kondisi rusak berat serta penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan akses internet; d. Pengelolaan anggaran dan transparansi, Masih ditemukan indikasi korupsi dalam pengadaan fasilitas pendidikan serta alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan; Rekomendasi : Dilakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dana pendidikan, selain melakukan pengawasan internal dan verifikasi laporan keuangan secara konsisten, juga aktif dan membuka diri atas audit rutin oleh Inspektorat, BPK, dan BPKP untuk mencegah kecurangan.	Pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan serta mendorong keterlibatan masyarakat merupakan kunci untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana pendidikan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	b.	Kemudian, DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa dalam pembangunan fisik bangunan sekolah dan renovasi agar kepala dinas pendidikan melibatkan pihak sekolah dalam menyusun Rancangan Anggaran Belanja (RAB)	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara setuju atas rekomendasi DPRD Provsu dengan melibatkan sekolah dalam pembangunan fisik bangunan sekolah dan renovasi, meskipun mekanisme pembangunan fisik menggunakan pola swakelola dengan mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian.	Pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan serta mendorong keterlibatan masyarakat merupakan kunci untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana pendidikan.
	c.	DPRD Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar indikator bangunan sekolah dalam kondisi baik, rusak, dan rusak berat diuraikan secara rinci sehingga tidak menimbulkan pro kontra penilaian	Dasar Hukum Utama Bangunan Gedung adalah : • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. • Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Sedangkan Pedoman Teknis Spesifik Sekolah berdasarkan Dapodik/Kemendikbud adapat dilihat pada : • Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah. • Buku Panduan Tata Cara Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Cara Mengisi Form Kerusakan untuk Sekolah dan Madrasah (biasanya diterbitkan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen/Ditjen Cipta Karya). • SE Dirjen Cipta Karya No. 47 Tahun 2020 tentang Juknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah. • Data kerusakan sekolah pada aplikasi Dapodik mengacu pada klasifikasi tingkat kerusakan bangunan.	Regulasi bangunan gedung secara umum yang disesuaikan dengan standar teknis pendidikan menjadi pedoman teknis yang jelas bagi sekolah dan Dinas Pendidikan dalam melakukan penilaian kerusakan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Dengan demikian, Penilaian kerusakan dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi lapangan menggunakan formulir khusus (R1) yang memuat komponen struktur (kolom, balok, pelat lantai) dan non-struktur (atap, plafon, dinding, lantai). Kriteria Tingkat Kerusakan (Berdasarkan Pedoman PUPR & Dapodik) dilakukan terhadap masing-masing massa bangunan dengan kriteria persentase sebagai berikut: • Rusak Ringan (0- 30%): Kerusakan non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, lantai, atau dinding pengisi. • Rusak Sedang (30%- 45%): Kerusakan sebagian komponen non-struktural dan/atau struktural (seperti struktur atap, lantai, atau kolom). • Rusak Berat (45%- 65%): Kerusakan sebagian besar komponen bangunan, berbahaya, dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Rusak Total (>65%): Kerusakan struktur utama yang membuat bangunan tidak laik fungsi dan harus dibongkar.	
	d.	Dalam penguatan tata kelola dan regulasi pendidikan dibutuhkan revisi kebijakan pendidikan daerah agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan lokal serta meningkatkan koordinasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan *stakeholder* pendidikan lainnya untuk implementasi kebijakan yang lebih efektif	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, selain menggunakan data Asesmen Nasional, data pokok pendidikan (Dapodik), dan data hasil belajar siswa untuk merumuskan kebijakan, juga : 1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi anggaran dan program sekolah (dana BOS). 2. Meningkatkan koordinasi internal antara Dinas Pendidikan dengan lembaga pemerintah daerah lainnya untuk mempermudah perizinan dan dukungan prasarana. 3. Memberikan pelatihan rutin bagi kepala sekolah dan pengawas tentang manajemen adaptif dan kepemimpinan visioner. 4. Fokus pada peningkatan kualitas sarana fisik dan digital, terutama di daerah terpencil atau kurang beruntung, untuk mengurangi kesenjangan kualitas, dan	1. Kebijakan yang telah dirancang dapat dieksekusi secara nyata di lapangan melalui perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan 2. Mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data dan dukungan infrastruktur yang memadai. Mendorong inovasi di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Mengembangkan kurikulum yang mengangkat potensi daerah (keunggulan lokal), baik ekonomi, seni, maupun budaya, agar pendidikan relevan dengan lapangan kerja lokal.	manajemen, kompetensi tenaga pendidik, serta sarana prasarana penunjang.
	e.	Dibutuhkan penguatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, yaitu dengan menyusun kebijakan insentif bagi guru di daerah terpencil dan bagi tenaga kependidikan dengan kinerja unggul serta meningkatkan mekanisme perlindungan guru dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja	Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRDSU dalam menyusun anggaran yang berkaitan dengan kebijakan insentif bagi guru di daerah terpencil dan bagi tenaga kependidikan dengan kinerja unggul serta meningkatkan mekanisme perlindungan guru dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja	Dinas Pendidikan mempersiapkan data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan didaerah terpencil untuk kebutuhan penganggaran pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil
	f.	DPRD Sumatera Utara meminta agar menjaga keseimbangan antara teori dan praktik sehingga siswa siap menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi	Dinas Pendidikan meminta Cabang Dinas Pendidikan untuk Sekolah di bawah kewenangannya agar : 1. mampu beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan yang tidak hanya mencari lulusan dengan nilai akademik bagus, tetapi juga keterampilan yang langsung bisa diaplikasikan di dunia kerja dengan menjalin kemitraan (kolaborasi) antara institusi pendidikan dan industri. 2. Melakukan pengembangan karakter dan soft skills. Tidak hanya keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama tim, kreativitas, dan kepemimpinan. Mulai memberi ruang untuk pengembangan kewirausahaan, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar cara menjalankan bisnis sejak dini.	Dengan berbagai inovasi serta perbaikan yang dilakukan, siswa kini lebih siap menghadapi dunia kerja
	g.	DPRD sumatera utara meminta kepada pengurus sekolah untuk bersikap amanah dan hati-hati dalam pengelolaan dana bos, agar tidak disalahgunakan dan memiliki akibat hukum	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selalu menekankan Kepatuhan terhadap Regulasi dan Perencanaan, Transparansi dalam Pengelolaan, Penguatan Pengawasan Internal dan Partisipatif melalui kegiatan-kegiatan pemahaman Juknis, penyusunan RKAS yang partisipatif, Validasi Dapodik, Pelaporan online dan keterbukaan Tim	Pengelolaan yang baik dan berlandaskan prinsip akuntabilitas dengan sendirinya akan membuat kepala sekolah beserta tim BOS bertanggung jawab penuh baik secara formal maupun material,

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		yang akan dikenakan kepada para pelakunya	BOS, Pengawasan Internal melalui Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Optimalisasi peran komite sekolah.	sehingga tujuan Dana BOS dalam meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, membebaskan biaya operasional bagi siswa tidak mampu, dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah tercapai.
	h.	Dinas pendidikan diminta untuk meningkatkan retribusi kantin sekolah sebagai pendapatan daerah pada tahun 2025	Retribusi kantin sekolah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dari pemakaian kekayaan daerah (jasa usaha). Dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan mengacu pada Peraturan Daerah Provsu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pendidikan juga memperhitungkan Kondisi Pedagang Kecil (UMKM), Dampak pada Kualitas dan Harga Jajanan, dan Kualitas Gizi dan Kesehatan.	Retribusi kantin dilakukan dengan menyeimbangkan antara potensi PAD bagi daerah dan keberlanjut an usaha pedagang serta kesejah teraan warga sekolah (siswa), sehingga Keamanan dan higienitas makanan/minuman (nutrisi) tetap menjadi prioritas dan Pedagang kantin umumnya sebagai pelaku usaha mikro tidak merasa diberatkan dengan besaran retribusi.
	i.	Terdapat indikator kinerja pada dinas pendidikan mengenai harapan lama sekolah yang belum mencapat target yaitu dengan realisasi sebesar 13,49% dan pada indikator kinerja persentase guru SMA yang bersertifikasi juga belum mencapai target, maka DPRD Provsu menegaskan adanya perbaikan untuk tahun 2025	berdasarkan data yang sudah sertifikasi tahun 2025 ASN 13.357 dan Non ASN (GTT / GTY) 11.669 sehingga berdasrkan kebutuhan guru yg telah ditetapkan menpan sebesar : 30,233 sehingga pesentase nya sebesar 82,77 % dikarenakan program kemendikdasmen di tahun 2026 diselesaikan guru bersertifikasi di Indonesia.	Program prioritas kemendikdasmen tahun 2026 adalah berkewajiban untuk menuntaskan 100 % guru bersertifikat pendidik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	Urusan Wajib Kesehatan (Dinas Kesehatan Provsu)		
	a. DPRD Provsu selalu memberikan perhatian penuh terhadap urusan wajib kesehatan yang dinaungi oleh dinas kesehatan provinsi sumatera utara. Masih terdapat beberapa catatan terkait pelayanan di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumatera utara dan diperlukan adanya perbaikan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Tingginya kasus tuberkulosis (tb), Pada tahun 2024, jumlah kasus tb di sumatera utara mencapai 18.411 kasus, dengan kota medan sebagai daerah dengan angka penularan tertinggi salah satunya dikarenakan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih rendah, menyebabkan banyak kasus terlambat didiagnosis dan diobati; Rekomendasi : Agar dilakukan peningkatan penanganan tuberkulosis dengan kegiatan antara lain kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tb dan pentingnya pemeriksaan dini serta program skrining aktif di sekolah, pesantren, dan lapas untuk	a. Target penemuan kasus tb yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan di provinsi sumatera utara tahun 2024 adalah sebesar 90% dari sebanyak 74.434 kasus dan target angka keberhasilan pengobatan sebesar 90%. Sampai akhir tahun 2024 penemuan kasus di sumatera utara adalah sebanyak 53.473 kasus (71,3%) dan angka keberhasilan pengobatan sebesar 85%, capaian ini menunjukkan penemuan kasus tb dan angka keberhasilan pengobatan tb yang belum mampu mencapai target 90% yang ditetapkan. Untuk meningkatkan penanganan kasus tuberkulosis dalam rangka penuntasan kasus tbc (eliminasi tbc) dibutuhkan kerjasama seluruh elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, komunitas, elemen masyarakat, dan media. Pada tahun 2025 provinsi sumatera utara melaksanakan kegiatan penemuan kasus tbc secara aktif (active case finding/acf) dengan pemeriksaan radiografi toraks dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (tpt) pada populasi berisiko. Kegiatan acf ini akan melibatkan 3.000 orang kader kesehatan di kabupaten/kota, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini jumlah kasus tbc akan lebih banyak ditemukan sehingga dapat diputuskan rantai penularan dan orang yang kontak serumah serta kontak erat dengan pasien tbc dapat dicegah dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (tpt). Kegiatan acf pada tahun 2025 dilaksanakan di 14 kabupaten/kota yakni batu bara, mandailing natal, labuhan batu, tapanuli tengah, serdang bedagai, pematang siantar, labuhan batu utara, binjai, langkat, tanjung balai, toba, deli serdang, tapanuli selatan dan labuhanbatu selatan.	Untuk menurunkan kasus tuberkulosis dan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terutama di wilayah yang sulit

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	mendeteksi kasus lebih cepat. b. Akses layanan kesehatan yang tidak merata, Yaitu pada daerah terpencil (kepulauan nias) masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dikarenakan jarak fasilitas kesehatan yang jauh dari tempat tinggal pasien menghambat akses pengobatan. Rekomendasi : Dilakukan pemerataan akses layanan kesehatan dengan adanya pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta program jemput bola untuk layanan kesehatan bagi masyarakat yang sulit mengakses fasilitas medis; c. Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, Yaitu rumah sakit dan puskesmas masih kekurangan tenaga medis yang kompeten serta beberapa fasilitas kesehatan belum memiliki peralatan medis yang memadai. Rekomendasi : Penguatan tenaga medis dan fasilitas dengan melakukan pelatihan dan insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil	b. Dalam rangka pemerataan akses layanan kesehatan pemerintah provinsi sumatera utara melalui dinas kesehatan melakukan kegiatan khususnya daerah terpencil yaitu keliling sumatera utara sehat (kesuma sehat) dengan bus kesehatan bergerak, melakukan pelayanan spesialistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, pelayanan kesuma sehat ini akan memberikan pelayanan kesehatan mata, pelayanan paru, pelayanan penyakit dalam, dan pelayanan laboratorium. Dalam rangka pembangunan fasilitas kesehatan khususnya daerah kepulauan nias, pada tahun 2025, kabupaten nias utara dan nias barat mendapatkan anggaran kementerian kesehatan dan dana alokasi khusus (dak) fisik bidang kesehatan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah serta pemenuhan alat kesehatan dalam rangka dukungan rsud kabupaten/kota dengan layanan unggulan. c. Terkait dengan penguatan tenaga medis dan fasilitas dilakukan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh kementerian kesehatan dengan mendistribusikan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui: 1. Program penugasan khusus tenaga kesehatan, untuk mengisi kekosongan 7 jenis tenaga kesehatan di puskesmas. 2. Program pendayagunaan dokter spesialis (pgds), untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rsud milik pemerintah. 3. Program internship dokter dan dokter gigi indonesia, untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di rsud dan puskesmas. 4. Program fellowship, untuk memenuhi kebutuhan dokter sub spesialis di RSUD.	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		(kepulauan nias) serta pengadaan alat kesehatan yang lebih modern dan memadai di rumah sakit dan puskesmas. d. Pengelolaan anggaran dan transparansi Yaitu masih ditemukan kendala dalam efektivitas penggunaan anggaran kesehatan dan perlu peningkatan pengawasan terhadap distribusi dana kesehatan agar lebih tepat sasaran. Rekomendasi : Transparansi dan efisiensi anggaran dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran kesehatan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana kesehatan.	Pemprov Sumatera Utara melalui dinas kesehatan juga melaksanakan peningkatan kapasitas bagi tenaga medis sehingga mampu melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui berbagai pelatihan teknis atau workshop. dalam rangka pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan khususnya di kepulauan nias, pada tahun 2025 kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan alat kesehatan dari anggaran dak fisik bidang kesehatan. d. Terkait pengelolaan anggaran dan transparansi: - Digitalisasi dan integrasi sistem informasi anggaran dalam sipd dan penggunaan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dan *real time* membuat proses perencanaan, penganggaran, penyerapan anggaran dan pelaporan dapat dipantau secara terbuka oleh pemangku kepentingan terkait. - Audit internal dan eksternal dilakukan secara rutin, berkala dan mendalam oleh tim auditor inspektorat dan bpk ri terkait penggunaan anggaran kesehatan serta tindak lanjut yang jelas atas temuan-temuan audit. - Melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dan lsm terkait kesehatan dengan melibatkan masyarakat, lsm dan media dalam proses pengawasan anggaran kesehatan sebagai wujud keterbukaan informasi publik dengan menyediakan akses informasi anggaran melalui tim ppid pembantu guna meningkatkan akuntabilitas publik.	
	b.	Kemudian, terdapat permasalahan terkait pelaksanaan *Universal Health Coverage* (UHC)	a. Dalam upaya percepatan pencapaian *universal health coverage* (uhc) sesuai dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah	Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pencapaian UHC

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	di Provinsi Sumatera Utara yaitu: a. Cakupan kepesertaan JKN belum optimal, Berdasarkan data per februari 2025, cakupan peserta jkn di sumatera utara baru mencapai 93,61% dari total penduduk, masih terdapat "gap" sebesar 4,99% untuk mencapai target 98,6% dan beberapa kab/kota belum mencapai status uhc, dengan cakupan kepesertaan yang masih di bawah standar. Berdasarkan data, masih terdapat 22 kabupaten/kota di sumatera utara yang belum mencapai status *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu: ○Tapanuli Utara (97,76%) ○Samosir (96,75%) ○Nias (97,54%) ○Labuhanbatu selatan (97,54%) ○Tapanuli tengah (97,43%) ○Batubara (97,24%) ○Mandailing natal (97,58%) ○Tanjung balai (96,42%) ○Padangsidempuan (96,29%) ○Tapanuli selatan (96,19%) ○Karo (95,80%) ○Binjai (95,71%) ○Nias selatan (94,35%) ○Dairi (94,28%) ○Simalungun (91,71%) ○Labuhanbatu (90,58%) ○Padang Lawas Utara (88,76%)	nasional tahun 2025-2029, yang mengamanatkan tercapainya universal health coverage melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar 98,6% dan cakupan kepesertaan aktif jkn sebesar 80% pada tahun 2025. Pemerintah provinsi sumatera utara melakukan komitmen dengan membuat kesepakatan bersama (mou) antara Pemprov Sumatera Utara dengan pemerintah kab/kota yang ditandatangani langsung oleh kepala daerah dalam pemenuhan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan metode cost sharing (20%-80%) pada tahun 2025. Proporsi 20% menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan 80% menjadi kewajiban pemerintah kab/kota. Dan per tanggal 1 oktober 2025 Provinsi Sumatera Berhasil mencapai UHC prioritas. b. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan pemenuhan kepesertaan jaminan kesehatan nasional untuk pencapaian uhc 98,6%, maka pemerintah provinsi sumatera utara bersama dengan pemerintah kab/kota telah menyepakati pembiayaan jkn melalui metode cost sharing (20%-80%) pada tahun 2025. Dimana pemenuhan 80% proporsi pemerintah kab/kota akan dipenuhi dari belanja bagi hasil provinsi ke kab/kota. Selanjutnya untuk pengembangan skema pembiayaan alternative seperti kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi kesehatan, maka Pemprov Sumatera Utara akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lintas sektor swasta dan filantropi kesehatan, untuk mendapatkan dana *corporate social responsibillity* (csr). Dalam rangka pembangunan fasilitas kesehatan khususnya daerah kepulauan nias, pada tahun 2025, kabupaten nias utara dan nias barat mendapatkan anggaran kementerian	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	○Deli Serdang (86,76%) ○Asahan (86,88%) ○Serdang Bedagai (86,53%) ○Labuhanbatu Utara (85,86%) ○Padang lawas (83,10%) Rekomendasi : Adanya percepatan cakupan kepesertaan JKN dengan melakukan optimalisasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN serta penyederhanaan prosedur pendaftaran dan integrasi data kependudukan untuk mempercepat cakupan UHC; b. Kendala pembiayaan dan anggaran, Yaitu pembiayaan iuran JKN masih menjadi tantangan, dengan proporsi 80% ditanggung pemerintah kab/kota dan 20% oleh pemerintah provinsi serta beberapa daerah mengalami keterbatasan fiskal, sehingga sulit mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program uhc. Rekomendasi : Penguatan pembiayaan dan efisiensi anggaran dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam pembiayaan iuran jkn	kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah serta pemenuhan alat kesehatan. Terkait penyediaan tenaga medis tambahan serta insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil (kepulauan nias), pemerintah provinsi sumatera utara melalui dinas kesehatan pada tahun 2025 akan melakukan pemenuhan dokter spesialis dengan memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi dokter umum khususnya putra daerah dan penempatan residen di rsud khususnya yang berada di kepulauan nias. Selanjutnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga medis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang kesehatan – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada tahun 2025 telah dialokasikan insentif tenaga Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang ada di puskesmas.	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		serta mengembangkan skema pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi kesehatan. c. Keterbatasan infrastruktur dan layanan kesehatan, Yaitu masih terdapat daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung program uhc serta keterbatasan tenaga medis dan distribusi layanan kesehatan yang belum merata menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Rekomendasi : Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah yang belum terjangkau layanan medis serta penyediaan tenaga medis tambahan serta insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil (kepulauan nias).		
	c.	Terkait usia harapan hidup bagi masyarakat provinsi sumatera utara yang saat ini pada angka 73,9 tahun, dirasa perlu untuk terus melakukan perbaikan agar usia harapan hidup dapat meningkat. Maka diperlukan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan, terutama di	Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) adalah meningkatnya usia harapan hidup (UHH). Uhh merupakan indikator utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka kualitas kesehatan masyarakat harus ditingkatkan. Saat ini kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dapat dilihat dari umur harapan hidup penduduk Sumatera Utara yang meningkat dari tahun ke tahu, namun	Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		daerah terpencil serta meningkatkan jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian diperlukan program pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat dengan terus melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Selain itu diperlukan juga peningkatan gizi dan ketahanan pangan dengan program edukasi gizi untuk mencegah malnutrisi dan stunting serta mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi melalui kebijakan pangan yang lebih baik. Sehingga dapat menjadi mungkin usia harapan hidup masyarakat provinsi sumatera utara mencapai 80 tahun	kualitas kesehatan masyarakat belum optimal ditandai dengan uhh tahun 2024 provinsi sumatera utara sebesar 73,90 tahun, masih berada di bawah UHH nasional tahun 2024 sebesar 74,15 tahun. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk terus meningkatkan uhh, pada tahun 2025 melalui dinas kesehatan melakukan antara lain: - peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan melalui cakupan pelayanan kesehatan semesta (universal health coverage/uhc), melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak terutama di daerah terpencil serta meningkatkan jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai melalui penyediaan dokter spesialis dengan memberikan beasiswa/ikatan dinas yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yakni usu dan ugm - melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir sesuai standar - melaksanakan promosi kesehatan dan deteksi dini/skrining penyakit dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit. - pelaksanaan dukungan pemeriksaan kesehatan gratis serta mendorong kabupaten/kota dalam penerapan integrasi layanan primer (ilp) - peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian suplementasi gizi, edukasi gizi dan surveilans gizi di kabupaten/kota - peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan menggiatkan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs)	
	d.	Perihal upaya penurunan angka kematian ibu juga harus tak luput dari perhatian kita bersama,	a. Pemprov Sumatera Utara melalui dinas kesehatan telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan Ibu	Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	karena berdasarkan data tahun 2024, terdapat angka kematian ibu di provinsi sumatera utara sejumlah124 kasus hingga september 2024. Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, terutama pada masa nifas. Sehingga DPRD Provsu memberikan rekomendasi untuk menurunkan angka kematian ibu di sumatera utara dengan melakukan beberapa program yaitu: a. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu, yaitu dengan memperkuat layanan kesehatan ibu di puskesmas dan rumah sakit, terutama di daerah dengan angka kematian tinggi seperti deliserdang dan medan. Kemudian menyediakan fasilitas rujukan cepat bagi ibu hamil dengan risiko tinggi. b. Penguatan sistem rujukan dan penanganan darurat, yaitu dengan optimalisasi sistem *audit maternal perinatal surveilans respon* (ampsr) untuk evaluasi kasus kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan. c. Edukasi dan pencegahan perdarahan pada masa nifas, yaitu dengan melakukan kampanye kesehatan	dan Anak (KIA) di puskesmas dan rumah sakit. Untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, maka pada tahun 2025, dinas kesehatan akan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya: - peningkatan kapasitas dokter umum di puskesmas melalui orientasi antenatal care (anc) dan usg obstetri dasar terbatas bagi dokter umum; - melaksanakan koordinasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan program anc terpadu di puskesmas - melaksanakan roadshow program gizi kia ke 41 puskesmas di kota medan serta roadshow replikasi mphd ke 4 rs dan 2 klinik di kota medan - penyediaan buku kesehatan ibu dan anak sebagai panduan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar - mendukung pelaksanaan program integrasi pelayanan kesehatan primer (ilp) untuk menurunkan aki dan akb - pengaktifan kembali desa siaga di kabupaten/kota, dimana setiap desa siaga harus mempunyai rumah tunggu kehamilan, daftar pendonor darah dan daftar transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil apabila ibu hamil akan melahirkan atau jika terjadi komplikasi kehamilan. Dan salah satu program desa siaga adalah pemasangan stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) sehingga masyarakat ikut serta dalam mengawasi ibu hamil di wilayahnya apabila terjadi komplikasi kehamilan. - memaksimalkan pemanfaatan anggaran dana alokasi khusus (dak) nonfisik bidang kesehatan yakni bantuan operasional kesehatan (BOK) kab/kota untuk pendampingan tim ahli (SPA dan SPOG) ke puskesmas, audit kasus	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang tanda bahaya perdarahan dan pelatihan bagi tenaga medis dalam penanganan cepat kasus perdarahan postpartum. d. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga medis, yaitu dengan penyediaan insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah dengan angka kematian tinggi serta diadakan pelatihan berkala bagi bidan dan dokter dalam penanganan komplikasi kehamilan. e. Penguatan pengawasan dan evaluasi program kesehatan ibu, yaitu dengan monitoring berkala terhadap pelaksanaan program kesehatan ibu di kabupaten/kota dan evaluasi efektivitas kebijakan dan intervensi yang telah dilakukan.	kematian ibu dan anak, serta tempat tunggu kelahiran bagi ibu hamil - melakukan koordinasi lintas program dan sektor dengan dinas kesehatan kab/kota dan rumah sakit untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sistem rujukan terintegrasi (sisrute) atau melakukan komunikasi rujukan dengan metode lain apabila ada gangguan sisrute. b. Terkait penguatan sistem rujukan dan penanganan darurat melalui optimalisasi sistem audit maternal perinatal surveilans dan respon (amp-sr), pemerintah sumatera utara melalui dinas kesehatan telah melaksanakan dan akan mengupayakan optimalisasi amp-sr antara lain: - membentuk Tim AMP-SR di kab/kota melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan melaksanakan peningkatan kapasitas Tim AMP-SR kab/kota termasuk tim pengkaji amp-sr yaitu dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis anak; - melaksanakan sosialisasi pedoman AMP-SR tahun 2022 ke 33 kab/kota dan mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini terhadap kasus komplikasi serta merujuk secara tepat waktu ke rs rujukan. Fktp wajib punya nomor kontak rs rujukan serta melakukan komunikasi sebelum merujuk ke rumah sakit; - melaksanakan upaya peningkatan kelengkapan dan kualitas pencatatan pelaporan kematian dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN), sehingga keaktifan melaporkan kasus kematian di fasilitas kesehatan terutama rumah sakit dapat ditingkatkan serta melakukan desk data kematian secara berkala dengan dinas kesehatan kab/kota.	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			- mendorong kab/kota melakukan kegiatan pengkajian kasus kematian, dengan dukungan dari dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis anak sebagai tim pengkaji amp dengan hasil kajian yang ditindaklanjuti tergantung permasalahan yang ada di kab/kota. - melakukan monitoring dan supervisi fasilitatif ke kab/kota dalam rangka koordinasi dan optimalisasi sistem rujukan maternal neonatal antara fktp dan fkrtl sehingga dapat mencegah terjadinya resiko dan kematian ibu dan anak. c. Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan secara rutin dan teratur melaksanakan edukasi tentang tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar kepada tenaga kesehatan, salah satunya dengan menyediakan dan mendorong pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Buku kia merupakan sarana pencatatan hasil pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak serta media penyuluhan yang berisi anjuran hal-hal yang harus dilakukan oleh ibu semasa hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita serta tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi pada masa-masa itu. Dinas kesehatan provinsi sumatera utara dan dinas kesehatan kabupaten/kota akan melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas agar setiap tenaga kesehatan mampu mengajarkan dan memotivasi ibu di wilayah kerjanya agar rajin membaca dan mengikuti anjuran/panduan dalam buku kia sehingga dapat mengetahui tanda bahaya pada dirinya sejak dini. Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas melakukan program antenatal care (anc) terpadu dengan berbagai kegiatan misalnya pemeriksaan hb, pemeriksaan triple eliminasi (penyakit hiv, sifilis, hepatitis b) sehingga kondisi ibu hamil diketahui sejak dini serta	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			ditindaklanjuti agar tidak menyebabkan kematian atau menularkan penyakit kepada janin dalam kandungannya. d. Untuk peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga medis melalui dana alokasi khusus (dak) nonfisik bidang kesehatan – bantuan operasional kesehatan (bok) puskesmas pada tahun 2025 telah dialokasikan untuk insentif tenaga upaya kesehatan masyarakat (ukm) yang ada di puskesmas. Terkait dengan pelatihan berkala bagi bidan dan dokter dalam penanganan komplikasi kehamilan, pada tahun 2025 akan dilaksanakan peningkatan kapasitas dokter umum di puskesmas melalui orientasi antenatal care (anc) dan usg obstetri dasar terbatas bagi dokter umum. e. Pemerintah provinsi sumatera utara melalui dinas kesehatan secara rutin dan berkala melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program KIA di kab/kota dan pemantauan pelaporan hasil pelayanan KIA diinput dan dikirimkan melalui aplikasi komdat kesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Selain itu, secara berkala dilaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, monitoring dan bimbingan teknis untuk mengetahui secara langsung kondisi pelaksanaan program kia di puskesmas. Dinas kesehatan provinsi sumatera utara juga mempunyai saluran komunikasi melalui grup whatsapp, media sosial, dan zoom meeting yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi, memberikan saran dan masukan terhadap kendala yang dihadapi oleh kab/kota terhadap pelaksanaan program kia.	
3	Urusan Wajib Kesehatan (RS. Umum Haji Medan)			
	a.	DPRD Provsu mengapresiasi kinerja RS Haji Medan yang semakin baik, termasuk	Kami mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD Provsu atas apresiasi dan dukungan yang diberikan terhadap kinerja UPTD Khusus RSU. Haji	meningkatkan sosialisasi keberadaan RS. Haji sebagai rumah sakit KJSU (kanker,

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		manajemen yang sudah berjalan baik. Kemudian diharapkan RS. Haji Medan dapat meningkatkan sosialisasi keberadaan RS. Haji sebagai rumah sakit KJSU (kanker, jantung, stroke, dan urologi)	Medan. Pengakuan ini menjadi motivasi besar bagi jajaran manajemen, tenaga medis, dan seluruh Civitas Hospitalia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kami juga menyambut baik harapan DPRD Provsu agar UPTD Khusus RS. Haji Medan dapat lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai keberadaan rumah sakit sebagai rumah sakit jejaring pengampuan layanan prioritas KJSU (kanker, jantung, stroke, dan uro-nefrologi). Kami menyadari pentingnya penyebaran informasi yang luas agar masyarakat dapat lebih mengenal layanan unggulan kami dan memanfaatkannya secara optimal. UPTD Khusus RS. Haji Medan telah melaksanakan : - Sosialisasi melalui berbagai media komunikasi, podcast/talkshow edukasi kesehatan, seminar kesehatan, dan kerja sama dengan pemerintah kab/kota serta organisasi, lembaga ataupun perusahaan. - Memperkuat pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uro-nefrologi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan bimbingan teknis, fasilitas medis, serta teknologi kesehatan yang digunakan. - Menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan rumah sakit agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan terpercaya.	jantung, stroke, dan uro-nefrologi)
	b.	DPRD Provsu menyarankan agar memperhatikan kenyamanan areal rumah sakit dengan membenahi ruang terbuka hijau di area rumah sakit sebagai tempat bersantai baik pasien maupun pengunjung rumah sakit	Atas saran DPRD Provsu kami ucapkan terima kasih. Dapat kami sampaikan kepada anggota dewan yang terhormat bahwa UPTD Khusus RSU Haji Medan di tahun 2025 akan melakukan pemasangan serta perbaikan marka dan rambu jalan di lingkungan rumah sakit. Namun karena adanya efisiensi anggaran kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Untuk menata kembali ruang terbuka hijau agar lebih baik di tahun 2026 direncanakan akan ada	Kenyamanan areal rumah sakit dengan membenahi ruang terbuka hijau di area rumah sakit

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			pengaspalan jalan rumah sakit serta pemasangan pavingbloc untuk area parkir sehingga dapat berkontribusi pada terwujudnya suasana rumah sakit yang lebih asri, nyaman, dan ramah lingkungan bagi pasien dan pengunjung lainnya	
	c.	DPRD Provsu juga menyoroti mengenai ketersediaan obat yang tidak stabil, hal mana Gubernur Sumatera Utara sendiri yang menemukan bahwa beberapa obat masih kosong karena kendala dalam proses pengadaan atau mekanisme pengadaan obat belum optimal yang menyebabkan keterlambatan distribusi. Sehingga dibutuhkan upaya optimalisasi pengadaan dan distribusi obat dengan melakukan implementasi sistem pemantauan stok obat secara real-time untuk menghindari kekosongan obat serta percepatan proses pengadaan dengan mekanisme yang lebih transparan dan efisien	Atas perhatian Dprd Provsu terkait ketersediaan obat di UPTD Khusus RSU Haji Medan kami ucapkan terima kasih, dan kami senantiasa berupaya mengoptimalkan proses pengadaannya agar lebih transparan dan efisien sehingga obat dapat tersedia sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan. Dapat kami sampaikan juga kepada anggota dewan yang terhormat bahwa UPTD Khusus RSU Haji Medan telah mengimplementasikan sistem pemantauan stok obat secara *real-time* melalui sistem informasi manajemen rumah sakit, sehingga kekosongan obat dapat segera terdeteksi dan terlaporkan, serta dapat dilakukan pemenuhannya dalam waktu 1x24 jam. Dalam situasi obat yang sedang kosong dan terjadi gangguan distribusi oleh penyedia, maka UPTD Khusus RSU Haji Medan melakukan substitusi/ pergantian obat yang sejenis sesuai dengan persetujuan dokter penulis resep dan pasien, serta melakukan pembelian obat yang kosong dimaksud melalui apotek pendamping yang bekerja sama.	Ketersediaan obat yang tidak stabil
	d.	Kemudian dalam rangka optimalisasi penggunaan tower baru untuk meningkatkan kapasitas rawat inap dan layanan spesialis juga perlu mendapat perhatian, yaitu dengan pengembangan sistem layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta diperlukan juga peningkatan infrastruktur dan sdm kesehatan	Dapat kami sampaikan bahwa UPTD Khusus RSU Haji Medan melalui anggaran tahun 2025 telah memenuhi prasarana pendukung yang dibutuhkan di tower seperti sofa, meja makan, kulkas, dispenser, dan lemari. Selain itu, terdapat penambahan 3 unit mesin hemodialisa (hd) kerjasama operasi (kso), dan SDM baru hasil penerimaan cpns dan tenaga kontrak blud yang sebagiannya ditugaskan di tower a untuk mendukung beroperasinya tower a secara penuh. Uptd khusus rsu haji medan juga akan terus berupaya meningkatkan kapasitas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga	Optimalisasi penggunaan tower baru untuk meningkatkan kapasitas rawat inap dan layanan spesialis

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dengan penyediaan fasilitas medis yang lebih lengkap, termasuk alat diagnostik dan ruang perawatan intensif, serta adanya pelatihan tenaga medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan respons terhadap kondisi darurat	pendukung kesehatan lainnya demi terselenggaranya layanan kesehatan yang berkualitas dan responsif.	
4	Urusan Wajib Kesehatan (RS. Jiwa Prof. dr. M. Ildrem)			
	a.	DPRD Provsu mengharapkan agar rs jiwa prof. Dr. M. Ildrem dapat menyusun langkah-langkah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan rs jiwa prof. Dr. M. Ildrem, menghapus stigma terhadap kesehatan jiwa, serta memastikan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan	Strategi Penghapusan Stigma dengan mengubah pandangan masyarakat dari "Rumah Sakit Orang Gila" menjadi "Pusat Kesehatan Mental", dengan : 1. Menonjolkan layanan konsultasi psikologi umum, konseling stress kerja dan layanan tumbuh kembang anak untuk menarik masyarakat umum (non-psikotik). 2. Membuat Program Rehabilitasi Berbasis Kerja (Daycare) dengan menyediakan unit rehabilitasi okupasi seperti berkebun, kerajinan tangan, atau UMKM) bagi pasien rawat jalan agar mereka memiliki ketrampilan ekonomi dan mandiri setelah kembali ke masyarakat. 3. Melibatkan mantan pasien yang sudah pulih sebagai dukungan untuk menunjukkan kepada publik bahwa kesembuhan itu nyata.	Untuk mengungkit Indikator Kinerja lebih baik
	b.	Digitalisasi layanan dan administrasi rumah sakit juga menjadi perhatian melalui implementasi rekam medis elektronik untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pemantauan pasien serta pengembangan aplikasi *telemedicine* untuk konsultasi awal bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental ringan	Digitalisasi Layanan (E-Health) dengan Meningkatkan kualitas layanan agar lebih responsif dan modern dengan : 1. Mengoptimalisasikan sistem pendaftaran online, rekam medis elektronik dan layanan telemedicine untuk memudahkan akses pasien tanpa harus datang langsung jika tidak darurat. 2. Meningkatkan administrasi yang cepat, tepat dan nyaman sesuai SPM yang telah ditentukan.	Untuk mengungkit Indikator Kinerja lebih baik
	c.	Kemudian, peningkatan kolaborasi dan edukasi masyarakat juga harus diperhatikan melalui kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk	Meningkatkan kolaborasi dan edukasi ke masyarakat dengan cara : 1. Mengadakan Penyuluhan Edukasi Publik dengan mengadakan program *goes to school*, *goes to campus* dan sosialisasi di media sosial untuk mengedukasi bahwa gangguan jiwa	Untuk mengungkit Indikator Kinerja lebih baik

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		meningkatkan pemahaman dan inovasi dalam kesehatan jiwa serta kampanye edukasi melalui media sosial dan seminar publik untuk mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa dan meningkatkan kesadaran masyarakat	adalah penyakit jiwa yang bisa diobati, bukan aib, sehingga dapat mengurangi stigma negatif terhadap mantan orang dengan gangguan jiwa dan meningkatkan kesadaran masyarakat. 2. Membangun jejaring dengan layanan primer (Puskesmas) di seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera Utara agar penanganan dini gangguan jiwa bisa dilakukan di tingkat komunitas.	
	d.	DPRD Provsu mendukung langkah-langkah rs jiwa prof. Dr. M. Ildrem dalam penguatan regulasi dan pengawasan manajemen rumah sakit yaitu dengan audit berkala terhadap pengelolaan keuangan, terutama dalam pembagian insentif tenaga medis serta evaluasi kinerja rumah sakit secara transparan melalui mekanisme *feedback* dari pasien dan keluarga	Langkah-langkah RS Jiwa Prof dr. M. Ildrem dalam penguatan Regulasi dan Pengawasan Manajemen Rumah Sakit dengan: 1. Telah dilaksanakan Tindak Lanjut dari Inspektorat dengan dibuatnya Regulasi serta Panduan dan Pedoman terkait pembagian Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis. 2. Pedoman dan Panduan yang telah dibuat telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai UPTDK RS Jiwa Prof DR Muhammad Ildrem	Untuk mengungkit Indikator Kinerja lebih baik
5	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu)			
	a.	Jalan provinsi sumatera utara memiliki panjang sekitar 3.005 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 56% dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan 17% dalam kondisi rusak berat. Terhadap kondisi tersebut, DPRD Provsu menghimbau kepada dinas pupr provinsi sumatera utara untuk menyusun strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di sumatera utara, memastikan pemerataan pembangunan, serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi	Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya melaksanakan survei kondisi jalan untuk melihat Tingkat kemantapan dan kerusakan jalan provinsi sebagai dasar dalam menentukan skala prioritas Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan. Selain dengan tingkat kerusakan jalan, penanganan longsor juga menjadi prioritas kami dikarenakan sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari topografi pegunungan Bukit Barisan, serta struktur tanah yang tidak stabil, membuat lereng curam mudah longsor saat tanah jenuh air. Pembangunan dan perbaikan jalan provinsi tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh sebab itu, langkah yang sudah kami lakukan adalah mengusulkan ruas jalan provinsi untuk ditangani dalam Dana Bagi Hasil, Inpres Jalan Daerah , Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri	Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan provinsi berdasarkan survei kondisi jalan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menentukan skala prioritas perbaikan infrastruktur yakni dengan menyusun prioritas perbaikan jalan dan jembatan berdasarkan tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat serta memfokuskan perbaikan pada jalan strategis ekonomi, seperti jalur distribusi barang dan kawasan industri. Kemudian, diperlukan juga opsi dalam optimalisasi pendanaan dan skema pembiayaan alternatif yakni dengan memanfaatkan dana alokasi khusus (dak) dan apbd secara lebih efektif untuk proyek infrastruktur serta mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta *Corporate Social Responsibility* (CSR)	kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium	
	b.	DPRD Provsu juga menghimbau kepada dinas pupr provinsi sumatera utara dalam upaya peningkatan kualitas konstruksi dan pemeliharaan yaitu dengan menggunakan material berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya tahan jalan dan jembatan terhadap cuaca ekstrem serta menerapkan sistem pemeliharaan berkala untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur yang sudah diperbaiki	Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan sistem pemeliharaan berkala terhadap kondisi jalan mantap (baik dan sedang) namun dikarenakan keterbatasan anggaran, pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi tidak maksimal.	Diharapkan penambahan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi untuk tahun anggaran selanjutnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	c. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya upaya digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur, yaitu melalui implementasi sistem pemantauan jalan berbasis teknologi untuk mendeteksi kerusakan lebih cepat serta pengembangan *dashboard* digital untuk transparansi proyek infrastruktur dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan	Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dalam mendeteksi kerusakan jalan menggunakan Aplikasi PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System),* berdasarkan masukan dari DPRD akan kami tampung dan melakukan upaya lebih lanjut terkait digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur	
6	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu)		
	DPRD Provsu meminta kepada dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi sumatera utara untuk melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di sumatera utara, mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, serta memastikan akses hunian yang lebih merata bagi masyarakat. Diantaranya terus melakukan optimalisasi anggaran untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan terus meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan, memastikan hanya masyarakat berpenghasilan rendah yang menerima manfaat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD melalui: • Penguatan kebijakan dan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. • Peningkatan pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat melalui optimalisasi program dan kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas rumah. • Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis data terpadu dan kriteria penerima manfaat yang terukur. • Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga pelaporan. • Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran program.	• Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan. • Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. • Meningkatnya pemerataan akses terhadap hunian layak secara adil dan inklusif. • Terwujudnya penyaluran bantuan perumahan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. • Meningkatnya kinerja pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. • Meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
				pelaksanaan program perumahan.
7	Urusan Wajib Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provsu)			
	a.	Dalam menjalankan urusan wajib ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka Satpol PP Provsu diharap mampu meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat penegakan hukum	Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat penegakan hukum Satpol PP Provsu telah melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui latihan pembinaan mental, fisik dan disiplin yang dilaksanakan oleh pelatih dari TNI, sarana prasarana yang mendukung, optimalisasi anggaran dan koordinasi lintas sektoral	Pada tahun 2025 telah terbitnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan terbitnya Perda itu tentunya dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum di Provinsi Sumatera Utara
	b.	DPRD Provsu menemukan upaya penegakan Perda oleh Satpol PP Provsu yang belum optimal seperti penertiban PKL dan bangunan liar yang belum berjalan efektif, sehingga diperlukan upaya-upaya dengan menyusun strategi penertiban yang lebih humanis dan berbasis dialog dengan masyarakat	Kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terhormat dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangannya masing-masing dimana terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) yg berada di Trotoar dan izin pendirian bangun gedung (PBG) merupakan kewenangan kabupaten/kota yang di atur di dalam perda dan perkada masing-masing kabupaten/kota.	a. Langkah-langkah yang dapat kami ambil, dimana Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, Satpol PP sebagai OPD yang menegakkan Perda dan Perkada akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan perda dan perkada di seluruh kab/kota se Sumatera Utara agar sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Bahwa dalam penegakan perda dan perkada satpol PP dalam pelaksanaanya mengedepankan pendekatan yang humanis sehingga dalam setiap kegiatan penertiban menghindari

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
				terjadinya bentrok dengan masyarakat.
	c.	Terdapat isu terkini yang viral dibahas yaitu mengenai banyaknya oknum preman yang berseragam ormas dengan melakukan pungutan liar (pungli), sehingga diharapkan juga kepada Satpol PP Provsu untuk mengambil peran yakni melakukan *mapping* terhadap wilayah-wilayah yang rawan dan kemudian berkoordinasi ke aparat penegak hukum	Dapat kami sampaikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan *mapping* terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, selanjutnya akan berkoordinasi kepada aparat penegak hukum dalam upaya penanganannya	Terkait premanisme yaitu pungutan kepada para pedagang kaki lima (PK5), parkir liar, bongkar muat barang, pungutan kepada supir truck yang di back up oleh ormas, saat ini aksi mereka sudah berkurang dan sudah tidak menggunakan seragam ormas, dikarenakan saat ini di wilayah khususnya Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) telah rutin dilaksanakannya patroli gabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara bersama TNI/Polri
8	Urusan Wajib Sosial (Dinas Sosial Provsu)			
	a.	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Sosial Provsu untuk terus melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dinas sosial provinsi sumatera utara dengan memastikan layanan sosial lebih transparan dan tepat sasaran, serta mempercepat pemulihan operasional pasca insiden kebakaran di kantor Dinas Sosial Provsu pada Desember 2024 yang lalu	Dinas sosial Provsu dalam memberikan layanan sosial kepada PPKS baik di dalam panti maupun di luar panti telah berupaya secara teruss menerus agar transparan dan efektif. Hal ini dapat di lihat mulai proses awal /tahap seleksi dan identifikasi calon penerima mamfaat sesuai kriteria dengan memanfaatkan DTKS/DTSEN dan pelaksanaan assesmen agar calon penerima manfaat dan jenis bantuan/ layanan yang akan diberikan tepat sasaran. Sedangkan pemulihan operasional gendung dinsos provsu pasca kebakaran pada desember 2024 belum dapat ditindaklanjuti karena terjadi efisiensi anggran pada tahun 2025. Namun operasional bidang rehabilitasi sosial masih tetap berjalan sebagaimana biasa dengan memamfaatkan ruang perkantoran yang ada	Agar proses layanan tranparan dan efektif
	b.	Dinas sosial provinsi sumatera utara memiliki 15 UPTD dan 24 panti sosial, adapun salah satu panti sosial menampung ODGJ berada di Berastagi	Kegiatan rehab/revitalisasi 24 gedung panti sosial milik dinas sosial provsu belum dapat dilakukan di tahun 2025 namun ada apbd tahun 2026 kegiatan apraisal /perencanaan untuk seluruh panti sosial milik dinsos provsu	Tersedianya dokumen perencanaan / gmbar dan rab sebagai dasar renovasi / revitalisasi gedung -gedung panti sosial

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kabupaten Karo yang membina sekitar 150 warga panti, perlu adanya peningkatan kapasitas bangunan terkait pembinaan warga ODGJ di Kabupaten Karo dan juga peningkatan biaya makan minum per harinya	anggrannya telah ditampung, kegiatan sebagai dasar pelaksanaan renovasi maupun revitalisasi gedung panti sosial di sumatera utara . Sedangkan biaya makan minum warga di seluruh panti sosial milik sdinsos provsu telah mengalami kenaikan pada tahun 2025 dari semula rp. 27.000/org/hari menjadi rp. 34.000/org/hr	
	c.	DPRD Provsu meminta agar dilakukan renovasi gedung panti asuhan dan pengadaan meubiler serta menambah gedung baru pada UPT Dinas Sosial di Pematangsiantar	Tahun 2026 kegiatan apraisal /perencanaan untuk seluruh panti sosial milik dinsos provsu anggrannya telah ditampung, kegiatan sebagai dasar pelaksanaan renovasi maupun revitalisasi gedung panti sosial di sumatera utara	Tersedianya dokumen perencanaan / gmbar dan rab sebagai dasar renovasi / revitalisasi gedung -gedung panti sosial
	d.	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Sosial Provsu untuk memperhatikan akses layanan kesehatan terhadap seluruh warga panti sosial dengan mengurus pendaftaran keanggotaan BPJS kesehatannya masing-masing	Pada dasarnya akses pelayanan kesehatanseluruh ppks /penerima mamfaat panti sosial milik dinsos provsu telah terpenuhi khususnya setelah lahirnya kebijakan gubenur sumut dengan program UHC.	Agar akses layanan kesehatan bagi ppks dalam panti dapat terpenuhi
9	Urusan Wajib Ketenagakerjaan (Dinas Ketenagakerjaan Provsu)			
	a.	DPRD Provsu menyoroti perihal persoalan banyak perusahaan yang tidak patuh untuk menyusun peraturan perusahaan, berdasarkan data hanya terdapat 6.033 perusahaan yang patuh menyusun peraturan perusahaan dari total 29.360 perusahaan yang ada di Sumatera Utara. Diharapkan kepada Dinas ketenagakerjaan Provsu agar selalu berhati-hati dalam mengesahkan peraturan perusahaan tersebut, terutama terhadap ketentuan terkait cuti (bagi ibu hamil/haid) dan juga terkait jam lembur pekerja	Sehubungan dengan perhatian dan sorotan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyusun Peraturan Perusahaan (PP) di Sumatera Utara, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan data, hingga saat ini baru 6.033 perusahaan (20,55%) dari total 29.360 perusahaan yang tercatat telah menyusun dan mengesahkan Peraturan Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami menyadari bahwa angka ini masih jauh dari ideal, dan oleh karena itu menjadi perhatian utama kami dalam upaya penegakan norma ketenagakerjaan. b. Dinas Ketenagakerjaan Provsu senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan, terutama pada ketentuan	Langkah yang telah dan akan dilakukan: 1) Sosialisasi dan Edukasi: melakukan sosialisasi dan asistensi *(coaching clinic)* kepada perusahaan-perusahaan, khususnya sektor padat karya dan UMKM, agar memahami kewajiban, tata cara menyusun PP, dan manfaat menyusun PP sebagai instrumen pengaturan hubungan kerja yang adil dan transparan 2) Inspeksi dan Monitoring: Pengawas ketenagakerjaan

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			yang menyangkut hak normatif pekerja. Proses pengesahan Peraturan Perusahaan diawali oleh proses pembinaan (*coaching clinic*) dan verifikasi materi pasal per pasal dari Peraturan Perusahaan. c. Kami merencanakan beberapa langkah tindak lanjut: - Penyusunan surat edaran kepada seluruh perusahaan agar segera menyusun PP - Pemberian sanksi administratif secara bertahap kepada perusahaan yang tidak patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Pembentukan tim monitoring lintas sektor untuk mendukung penegakan norma ketenagakerjaan - Dinas Ketenagakerjaan melalui bidang Perlindungan Ketenagakerjaan juga melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Perusahaan. Apabila penerapannya tidak sesuai maka pengawas dapat menetapkan pemeriksaan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar kepatuhan norma ketenagakerjaan	Sumatera Utara yang tersebar di 6 UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, secara berkala melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap perusahaan, termasuk meminta ketaatan penyusunan dan pengesahan PP 3) Digitalisasi Proses: Kami sedang membangun kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk ikut serta menggunakan sistem layanan berbasis digital (e-PP) untuk memudahkan perusahaan dalam proses penyusunan dan pengesahan PP serta mempercepat proses verifikasi substansi norma kerja Pemeriksaan terhadap dokumen Peraturan Perusahaan dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu: 1) Aspek Formal, yang mencakup kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini meliputi antara lain: Surat pernyataan bahwa perusahaan telah meminta pendapat Serikat Pekerja (jika ada); Pengisian dan pencatatan melalui

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
				aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring; Kelengkapan dokumen lainnya yang relevan sesuai ketentuan. 2) Aspek Materil, yang mencakup kesesuaian isi Peraturan Perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait hak-hak dasar pekerja/buruh seperti: Ketentuan cuti (termasuk cuti haid dan cuti melahirkan); Pengaturan jam kerja dan jam lembur; Upah, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja, serta ketentuan lain yang melindungi hak normatif pekerja
	b.	Berdasarkan data LKPJ Gubsu TA. 2024, upaya Dinas Ketenagakerjaan Provsu masih belum tercapai dalam memenuhi Indeks Kinerja Utama (IKU) mengenai ''menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru''. Dalam indeks kinerja tentang persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi masih belum mencapai target, yaitu hanya terdapat realisasi sebesar 0,004% dari target tahun 2024 sebesar 0,15%.	a. Untuk target persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang belum tercapai sesuai IKU dikarenakan kondisi sarana dan prasarana yang ada di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) tidak atau belum up to date mengingat kondisi peralatan pelatihan yang masih menggunakan teknologi yang lama sehingga tidak memungkinkan untuk membuka kejuruan baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri terutama kebutuhan tenaga kerja untuk KEK Sei Mangkei. Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2024 yang dilaksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Provsu adalah sebanyak 304 orang (19 paket pelatihan), dimana peserta yang lulus uji kompetensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) adalah sebanyak 283 orang, dan tidak	Melaksanakan rehabilitasi BLK; melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi penciptaan wirausaha sesuai tematik arah pembanguan yaitu ''bioindustri dan pariwisata global''; melaksanakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dibawah naungan Dinas Ketenagakerjaan Provsu

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kemudian dalam indeks kinerja tentang persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja juga belum mencapai target, yaitu hanya terdapat realisasi sebesar 39,39 % dari target tahun 2024 sebesar 90,02%	lulus uji kompetensi sebanyak 21 orang b. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan penciptaan wirausaha baru oleh Dinas Ketenagakerjaan (atau dinas terkait) meliputi : Kurangnya dukungan anggaran dan infrastruktur (Modal peralatan wirausaha); Rendahnya minat masyarakat; kurangnya pengetahuan dan keterampilan wirausaha; masalah modal dan akses keuangan; kurangnya pendampingan dan dukungan; ketidakmampuan dan merencanakan dan mengelola usaha.	
	c.	Terkait kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, DPRD Provsu meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Provsu untuk mengurangi dampak PHK dan memastikan perlindungan bagi pekerja, Dinas Ketenagakerjaan Provsu dapat mengambil langkah-langkah diantaranya pemetaan dan monitoring pasar kerja, dengan memantau tren PHK secara real-time serta mengidentifikasi sektor dengan risiko tinggi phk agar dapat dilakukan intervensi lebih awal	Dinas Ketenagakerjaan Provsu akan berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak PHK serta memastikan perlindungan bagi pekerja sesuai amanat undang-undang dan arahan pemerintah. Berikut langkah konkret yang akan dilakukan: Pemetaan dan Monitoring Pasar Kerja; intervensi dini untuk mencegah PHK; perlindungan bagi pekerja terdampak; kolaborasi multi-pihak; serta sosialisasi dan transparansi	- Penguatan Sistem Data Real-Time : Mengembangkan platform digital untuk memantau tren PHK secara real-time, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Kab/Kota (untuk pelaporan kasus PHK setiap minggu), dan perusahaan - Identifikasi Sektor Berisiko Tinggi : Melakukan analisis sektor industri yang rentan PHK (misalnya: manufaktur, pariwisata) melalui data klaim JKP dan JKK BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut - Pemberdayaan LKS Bipartit di Perusahaan sebagai media komunikasi rutin antara pengusaha dan pekerja - Pemberdayaan LKS Tripartit sebagai wadah komunikasi organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, akademisi, kepolisian dan pengadilan

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
				hubungan industrial dalam upaya pemetaan kerawanan hubungan industrial dan pencegahan penyelesaian perselisihan PHK yang lintas kabupaten/kota dan berskala besar - Mediasi dan Konseling Perusahaan : Memberikan pendampingan kepada perusahaan menghadapi kesulitan operasional, termasuk skema reshuffle atau reduksi yang tidak melibatkan PHK massal, atau pekerja dirumahkan - Membangun skema kerja sama pelatihan tenaga kerja dengan perusahaan : Membantu pekerja ter-PHK beralih ke sektor lain melalui pelatihan vokasional atau pendampingan wirausaha, seperti kerja sama dengan PT. IKD untuk pemagangan tenaga kerja, Bengkel Terakreditasi untuk mekanik kendaraan
	d.	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Provsu untuk melakukan program re-skilling dan up-skilling, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan baru bagi pekerja terdampak PHK, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan industri berbasis digital serta mendorong kemitraan dengan perusahaan untuk program magang bagi	a. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan program re-skilling dan up-skilling, salah satunya dengan melaksanakan Program Pemagangan Dalam Negeri yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi APBN. Pada tahun 2024 peserta Program Pemagangan Dalam Negeri Dana Dekonsentrasi APBN berjumlah 279 orang yang magang selama 5 bulan mulai tanggal 22 Juli 2024 s/d 20 Desember 2024 di 38 Perusahaan/ Hotel/ UMKM dan Salon pada 10 Kabupaten/Kota yaitu : Medan, Deli Serdang, Langkat, Tebing Tinggi, Asahan,	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kemudian, diharapkan adanya bantuan bagi pekerja terdampak PHK yaitu dengan memfasilitasi mediasi dan bantuan hukum bagi pekerja yang terdampak PHK yang tidak adil serta mengembangkan program bantuan sosial atau skema jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan	Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Padangsidempuan. b. Bagi pekerja terdampak PHK akan dilakukan perlindungan dalam memfasilitasi klaim hak-hak pekerja, pelatihan keterampilan baru, dan menyediakan layanan konsultasi hukum bagi pekerja yang merasa dirugikan dalam proses PHK. Dalam hal mediasi dan konseling perusahaan : Dinas Ketenagakerjaan Provsu akan memberikan pendampingan kepada perusahaan yang menghadapi kesulitan operasional, termasuk skema reshuffle atau reduksi yang tidak melibatkan PHK massal, atau pekerja dirumahkan.	
10	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu)			
	a.	Sepanjang tahun 2024, terdapat 314 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, dengan Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi yakni mencapai 23,2% dari total kasus, DPRD Provsu pada pembahasan LKPJ TA. 2023 telah memberikan rekomendasi untuk terus melakukan penguatan terhadap upaya penurunan TPPO di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu DPRD Provsu meminta kepada Dinas PPPAKB Provsu untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut : - Penguatan pencegahan dan edukasi masyarakat, yaitu dengan mkengembangkan kampanye kesadaran publik tentang bahaya TPPO, terutama di daerah yang menjadi kantong pekerja migran serta menyediakan	Penguatan yang Telah Dilakukan dalam Upaya Penurunan TPPO di Provinsi Sumatera Utara: a. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui media sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, menyusun serta menyebarluaskan KIE berupa leaflet dan poster ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. b. Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi Sumatera Utara melalui rapat koordinasi. c. Menyusun kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/261/KPTS/2025 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara.	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		materi edukasi digital dan pelatihan bagi perempuan dan anak agar lebih waspada terhadap modus perdagangan orang. - Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, yaitu dengan memperkuat koordinasi dengan apparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan TPPO serta mengembangkan sistem pelaporan online yang memungkinkan korban atau masyarakat melaporkan dugaan kasus TPPO secara aman. - Perlindungan dan rehabilitasi korban, yaitu dengan mendirikan pusat rehabilitasi bagi korban TPPO yang menyediakan layanan psikososial, hukum dan ekonomi, serta memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi korban untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan.	d. Melakukan penguatan dan sosialisasi pencegahan kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kab/Kota se Sumatera Utara melalui desa percontohan PKK. e. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di satuan pendidikan (Perguruan Tinggi, SMA, SMP dan SD). f. Mendorong pembentukan UPTD PPA di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebagai unit layanan bagi korban kekerasan dan TPPO. Kondisi saat ini, sudah 26 Kab/Kota yang sudah membentuk UPTD PPA serta meningkatkan kapasitas unit-unit layanan perlindungan perempuan dan anak.	
	b.	Kemudian, dalam rangka mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, diharapkan kepada Dinas PPPAKB Provsu untuk meningkatkan peran keluarga dan tetangga serta bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan organisasi lainnya untuk memperkuat program perlindungan serta mengembangkan kemitraan dengan	Peningkatan peran keluarga yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak : a. Melaksanakan penguatan peran keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yaitu kelas pembelajaran dan konseling keluarga. b. Penguatan peran keluarga melalui Desa Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) atau sekarang dikenal dengan istilah Ruang Bersama Indonesia (RBI).	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	komunitas lokal untuk meningkatkan pengawasan dan respon cepat terhadap kasus kekerasan	c. Melakukan kerjasama dengan organisasi yang peduli terhadap perempuan dan anak, lembaga masyarakat,akademisi, media dan dunia usaha terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
11	Urusan Wajib Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu)		
	Dalam konteks Pemerintahan, urusan wajib pangan mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. DPRD Provsu menghimbau kepada Dinas Ketahanan Pangan & TPH Provsu untuk terus memperhatikan beberapa poin utama, yaitu : ketersediaan dan keterajangkauan pangan, keamanan dan mutu pangan, diversifikasi dan kemandirian pangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan.	Kami sangat sependapat dengan rekomendasi dari tim pansus LKPJ DPRD Provsu terkait beberapa point utama yaitu ketersediaan dan keterjangkauan pangan, keamanan dan mutu pangan, diversifikasi dan kemandirian pangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan telah diupayakan dengan mendorong peningkatan produksi pangan utama di semua daerah yang memiliki potensi lahan pertanian, sehingga ketersediaan dapat dipastikan aman dan keterjangkauan terhadap pangan utama dapat diakses dengan mudah, disamping itu Gerakan Pangan Murah dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi pangan di masyarakat. Sementara keamanan dan mutu pangan telah diupayakan dengan melakukan pengawasan mutu pangan ke semua penyedia dan pasar untuk memastikan peredaran pangan aman dari residu pestisida serta mengeluarkan registrasi terhadap komoditas pangan. Untuk diversifikasi pangan telah dilakukan dengan penguatan sosialisasi dan penyaluran pangan alternatif. Perlindungan dan Pemberdayaan petani dilakukan dengan menyiapkan asuransi usaha tani padi serta peningkatan kapasitas petani berupa demplot atau sekolah lapang. Penguatan sistem distribusi dan Cadangan pangan telah dilakukan dengan penguatan koordinasi Cadangan pangan dengan instansi terkait seperti Bulog serta meningkatkan kapasitas Cadangan Beras Daerah.	Ketersediaan dan keterjangkauan pangan, keamanan dan mutu pangan, diversifikasi dan kemandirian pangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
12	Urusan Wajib Pertanahan (Biro Pemerintahan dan Otnomi daerah Setdaprovsu)			
	a.	Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024, salah satu permasalahan terkait pilar batas wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih terjadi yang disebabkan ketidakjelasan batas administratif antara beberapa daerah, sehingga diharapkan kepada Pemprovsu untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pilar batas tersebut.	Terimakasih kami sampaikan kepada DPRD Provsu atas saran dan masukannya, terkait permasalahan pilar batas wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih terjadi yang disebabkan ketidakjelasan batas administratif antara beberapa daerah, dengan ini kami sampaikan data-data mengenai perkembangan segmen batas daerah di Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan segmen batas daerah di Provinsi Sumatera Utara yang dalam proses penyelesaian sebagai berikut: 1) Permendagri No. 28 Tahun 2020 (Kab. Aceh Tamiang – Kab. Langkat) 2) Permendagri No. 29 Tahun 2020 (Kab. Aceh Tenggara - Kab. Karo) 3) Permendagri No. 30 Tahun 2020 (Kab. Aceh Singkil - Kab. Tapanuli Tengah) 4) Permendagri No. 34 Tahun 2020 (kota Subulussalam - Kab. Pakpak Bharat) 5) Permendagri No. 33 Tahun 2020 (Kab. Aceh Tenggara - Kab. Langkat) 6) Permendagri No. 32 Tahun 2020 (Kab. Aceh Tenggara - Kab. Dairi) 7) Permendagri No. 27 Tahun 2020 (Kab. Gayo Lues - Kab. Langkat) 8) Permendagri No. 35 Tahun 2020 (Kab. Aceh Singkil - Kab. Pakpak Bharat) 9) Permendagri No. 31 Tahun 2020 (Kota Subulussalam - Kab. Dairi) 10) Permendagri No. 56 Tahun 2018 (Kab. Labuhanbatu - Kab. Rokan Hilir) 11) Permendagri No. 57 Tahun 2018 (Kab. Labuhanbatu Selatan - Kab. Rokan Hilir) 12) Permendagri No. 58 Tahun 2018 (Kab. Paluta - Kab. Rokan Hulu) 13) Permendagri No. 59 Tahun 2018 (Kab. Palas - Kab. Rokan Hilir) 14) Permendagri No. 81 Tahun 2019 (Kab. Palas - Kab. Rokan Hulu) 15) Permendagri No. 53 Tahun 2018 (Kab. Palas - Kab. Pasaman) 16) Permendagri No. 54 Tahun 2018 (Kab. Madina - Kab. Pasaman) 17) Permendagri No. 55 Tahun 2018 (Kab. Madina - Kab. Pasaman Barat) 18) Permendagri No. 29 Tahun 2007 (Kab. Sergai - Kab. Deli Serdang)	Penyelesaian pilar batas wilayah

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			19) Permendagri No. 42 Tahun 2014 (Kab. Asahan - Kab. Labura) 20) Permendagri No. 44 Tahun 2014 (Kab. Asahan - Kab. Toba) 21) Permendagri No. 45 Tahun 2014 (Kab. Asahan - Kab. Batu Bara) 22) Permendagri No. 47 Tahun 2014 (Kota Binjai - Kab. Deli Serdang) 23) Permendagri No. 47 Tahun 2014 (Kab. Langkat - Kota Binjai) 24) Permendagri No. 49 Tahun 2014 (Kab. Langkat – Kab. Deli Serdang) 25) Permendagri No. 23 Tahun 2015 (Kab. Asahan – Kab. Simalungun) 26) Permendagri No. 77 Tahun 2016 (Kab. Tapteng – Kab. Humbang Hasundutan) 27) Permendagri No. 78 Tahun 2016 (Kab. Asahan – Kota Tanjungbalai) 28) Permendagri No. 79 Tahun 2016 (Kab. Karo – Kab. Simalungun) 29) Permendagri No. 20 Tahun 2017 (Kab. Humbang Hasundutan – Kab. Taput) 30) Permendagri No. 21 Tahun 2017 (Kab. Humbang Hasundutan – Kab. Samosir) 31) Permendagri No. 27 Tahun 2017 (Kab. Humbang Hasundutan – Kab. Pakpak Bharat) 32) Permendagri No. 23 Tahun 2019 (Kab. Karo – Kab. Langkat) 33) Permendagri No. 24 Tahun 2019 (Kab. Pakpak Bharat – Kab. Tapteng) 34) Permendagri No. 26 Tahun 2019 (Kab. Batu Bara – Kab. Sergai) 35) Permendagri No. 27 Tahun 2019 (Kab. Karo – Kab. Dairi) 36) Permendagri No. 28 Tahun 2019 (Kab. Pakpak Bharat – Kab. Dairi) 37) Permendagri No. 29 Tahun 2019 (Kab. Batu Bara – Kab. Simalungun) 38) Permendagri No. 64 Tahun 2019 (Kab. Tapsel – Kota Padangsidimpuan) 39) Permendagri No. 68 Tahun 2019 (Kab. Madina – Kab. Palas) 40) Permendagri No. 115 Tahun 2019 (Kab. Tapsel – Kab. Paluta) 41) Permendagri No. 116 Tahun 2019 (Kab. Paluta – Kab. Palas) 42) Permendagri No. 49 Tahun 2021 (Kab. Tapsel – Kab. Palas)	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			43) Permendagri No. 36 Tahun 2021 (Kab. Tapteng – Kab. Taput) 44) Permendagri No. 51 Tahun 2021 (Kab. Karo – Kab. Deli Serdang) 45) Permendagri No. 13 Tahun 2022 (Kab. Samosir – Kab. Pakpak Bharat) 46) Permendagri No. 14 Tahun 2022 (Kab. Samosir – Kab. Dairi) 47) Permendagri No. 17 Tahun 2022 (Kab. Labuhanbatu – Kab. Labusel) 48) Permendagri No. 18 Tahun 2022 (Kab. Labura – Kab. Paluta) 49) Permendagri No. 19 Tahun 2022 (Kab. Toba – Kab. Taput) 50) Permendagri No. 20 Tahun 2022 (Kab. Tapsel – Kab. Taput 51) Permendagri No. 125 Tahun 2022 (Kab. Labuhanbatu – Kab. Paluta) 52) Permendagri No. 128 Tahun 2022 (Kota Tebing Tinggi – Kab. Sergai) 53) Permendagri No. 123 Tahun 2022 (Kab. Simalungun – Kab. Sergai) 54) Permendagri No. 77 Tahun 2022 (Kab. Nias – Kab. Nias Utara) 55) Permendagri No. 122 Tahun 2022 (Kab. Nias Selatan – Kab. Nias) 56) Permendagri No. 135 Tahun 2022 (Kab. Tapteng – Kota Sibolga) 57) Permendagri No. 96 Tahun 2022 (Kota Medan – Kab. Deli Serdang) 58) Permendagri No. 105 Tahun 2022 (Kab. Nias Selatan – Kab. Nias Barat) 59) Permendagri No. 116 Tahun 2022 (Kab. Nias – Kab. Nias Barat) 60) Permendagri No. 76 Tahun 2022 (Kab. Nias Utara – Kab. Nias Barat) 61) Permendagri No. 78 Tahun 2022 (Kab. Nias Utara – Kota Gunungsitoli) 62) Permendagri No. 110 Tahun 2022 (Kab. Simalungun – Kab. Deli Serdang) 63) Permendagri No. 142 Tahun 2022 (Kab. Labuhanbatu – Kab. Labura) 64) Permendagri No. 108 Tahun 2022 (Kab. Labusel – Kab. Paluta) 65) Permendagri No. 131 Tahun 2022 (Kab. Labura – Kab. Tapsel) 66) Permendagri No. 120 Tahun 2022 (Kab. Labura – Kab. Toba) 67) Permendagri No. 93 Tahun 2022 (Kab. Labura – Kab. Taput)	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			68) Permendagri No. 119 Tahun 2022 (Kota Pematangsiantar – Kab. Simalungun) 69) Permendagri No. 100 Tahun 2022 (Kab. Simalungun – Kab. Toba) 70) Permendagri No. 136 Tahun 2022 (Kab. Tapsel – Kab. Tapteng) Segmen batas daerah yang masih dalam proses penyelesaian : 1) Kab. Mandailing Natal – Kab. Tapsel 2) Kab. Nias – Kota Gunungsitoli	
	b.	Kemudian diharapkan juga kepada Pemprovsu untuk melakukan upaya dalam mengembangkan sistem pemetaan digital berbasis GIS (*Geographic Information System*) untuk memantau batas wilayah secara lebih akurat dan terus meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan pelayanan publik serta melibatkan masyarakat dalam penentuan batas wilayah agar tidak terjadi konflik sosial akibat perubahan administratif	Terimakasih kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Saran dan masukan kepada Pemprov Sumut agar melakukan upaya dalam mengembangkan system pemetaan digital berbasis GIS *(Geographic Information System)* untuk memantau batas wilayah secara lebih akurat dan terus meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan pelayanan publik serta melibatkan Masyarakat dalam penentuan batas wilayah agar tidak terjadi konflik sosial akibat perubahan administratif, akan menjadi perhatian kami dimasa mendatang	
13	Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu)			
	Pada tahun 2024, terdapat anggaran besar untuk pengelolaan hutan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu yaitu sekitar Rp. 33 Milyar. Akan tetapi, sepanjang tahun 2024 pengelolaan hutan di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerusakan hutan, perambahan illegal dan lemahnya penegakan hukum. Terdapat data bahwa kerusakan hutan semakin meluas di beberapa kabupaten, termasuk Karo,		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan senantiasa mengambil kebijakan yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan hutan (termasuk yang disebabkan oleh praktik tambang) dengan memperkuat penegakan hukum. Kebijakan strategis yang dapat dan telah dilaksanakan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sumatera Utara terhadap praktik tambang emas illegal yang terjadi di Desa Sale Baru Kelurahan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat 99° 13’ 20.19’’ Bujur Timur dan 00° 51’ 56.36’’ Lintang Utara dan	Terlesesaikannya penegakan hukum untuk permasalahan hutan baik secara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Tapanuli Selatan, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Tengah. Kemudian, hutan mangrove di Sumatera Utara juga mengalami degradasi, dengan sekitar 15 ribu hektar yang rusak, berdampak pada keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karenanya, diminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu untuk terus mengambil kebijakan yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan hutan (termasuk yang disebabkan oleh praktik tambang) dengan memperkuat penegakan hukum terhap pelaku *ILegal Logging* dan perambahan hutan, mengembangkan sistem pemantauan berbasis GIS untuk mendeteksi dan mencegah kerusakan hutan, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk perlindungan ekosistem serta mendorong rehabilitasi hutan mangrove yang telah mengalami degradasi.	telah memiliki hukum tetap dengan putusan Kasasi Makamah Agung no. : 1205/K.Pid.Sus-LH/2025 tanggal 04 Maret 2025 berupa Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan dalam penengakan hukum terhadap praktik illegal logging yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Karo. Adapun selain Penegakkan Hukum secara Pidana, penegakkan hukum juga dilaksanakan secara keperdataan dan Tata Usaha Negara (TUN). Adapun perkara keperdataan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 2 perkara di Kabupaten Labuhan Batu dan 1 perkara di Kabupaten Langkat, sedangkan untuk perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 2 perkara yang masing-masing berlokasi di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.	
14	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu)		
	a. Berdasarkan data, terdapat realisasi kinerja yang belum mencapai target tahun 2024, yaitu pada persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat direalisasikan sebesar 89,86% dari target sebesar 97,50%, oleh karenanya diminta kepada Dinas	• Melakukan peningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait kependudukan dan pencatatan sipil. • Melakukan identifikasi permasalahan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota terkait target pencapaian kinerja sebagai dasar dalam melakukan perencanaan yang akan dilakukan selama setahun	• Inovasi layanan: mengembangkan dan memperkuat inovasi pelayanan seperti penggunaan platform digital atau layanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. • Koordinasi lintas sektor: meningkatkan

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Duk dan Capil Provsu untuk terus melakukan perbaikan kinerja	untuk meningkatkan pencapain target. • Melakukan koordinasi dengan pusat terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan di tahun berikutnya. • Melakukan koordinasi dengan dinas dukcapil kab/kota mempersiapkan data dukung terkait perkembangan status kependudukan dan pencatatan sipil. • Terus meningkatkan dan juga mengingatkan partisipasi masyarakat melalui media cetak dan media sosial akan pentingnya kesadaran masyarakat dan juga melakukan jemput bola terkait dokumen kependudukan untuk meningkatkan capaian kinerja.	pembinaan, supervisi, dan evaluasi terhadap disdukcapil di tingkat kab/kota untuk memastikan keselarasan target kinerja. • Sosialisasi masyarakat: mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui kampanye edukasi yang lebih intensif. • Pemanfaatan teknologi: memaksimalkan penggunaan kanal komunikasi digital (seperti whatsapp atau media sosial) untuk mempercepat respon layanan informasi dan pengaduan
	b.	Dalam meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan agar lebih efektif dan berkualitas, diharapkan kepada Pemprovsu untuk terus menerapkan pelayanan administrasi yang lebih cepat dan transparan serta terus mengembangkan sistem digitalisasi dan integrasi data kependudukan	Melakukan peningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait kependudukan dan pencatatan sipil, dan juga mengingatkan partisipasi masyarakat melalui media cetak dan media sosial akan pentingnya kesadaran masyarakat terkait dokumen kependudukan, dan terus meningkatkan kepada masyarakat untuk melakukan aktifasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk mempermudah segala urusan masyarakat dalam hal permintan data identitas kependudukan dan terus melakukan update data terkait data kependudukan	• Digitalisasi: implemen tasi layanan online seperti identitas kependudukan digital (ikd) atau aplikasi pengurusan dokumen kependudukan. • Integrasidata: mengh ubungkan sistem data dukcapil dengan instansi lain (seperti bpjs, pajak) untuk validasi data yang lebih mudah dan cepat. • Peningkatan kapasitas sdm: pelatihan petugas agar cakap dalam sistem digital dan pelayanan publik. • Sosialisasi: mengeduk asi masyarakat tentang layanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			digital yang tersedia dan pentingnya administrasi kependudukan yang akurat
15	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu)		
	Dalam melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat indikator kinerja yakni pada jumlah BUMDes maju dengan target kinerja yang direncanakan tidak dapat tercapai. Dimana dengan target 35 bumdes realisasi hanya mencapai 9 BUMDes. Oleh karenanya, DPRD Provsu meminta kepada Dinas PMD, Kependudukan dan Capil Provsu untuk menjalankan berbagai kebijakan strategis, yaitu : - Meningkatkan kapasitas pengelola bumdes melalui pelatihan manajemen bisnis dan keuangan; - Mengembangkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; - Mengidentifikasi potensi ekonomi desa, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, untuk dikembangkan sebagai unit usaha BUMDes; - Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk desa; - Memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk bumdes, termasuk e-commerce dan media sosial; - Mengembangkan program penelitian dan inovasi	• Pada tahun 2025 dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil telah merencanakan kegiatan – kegiatan pembinaan kepada bumdes, peningkatan kapasitas dan pengelolaan bumdes tertampunug didalam apbd murni tahun 2025 namun pada tahun 2025 diinstruksikan untuk melakukan efisiensi belanja dan refocusing anggaran yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kegiatan kegiatan dimaksud namun dengan kondisi anggaran yang tersedia, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil tetap melakukan monitoring dan pembinaan kepada bumdes khsusunya bumdes yang menerima bantuan hibah di tahun 2023 dalam hal mendorong kemitraan dengan sektor wisata dalam pemasaran produk unggulan desa di tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga, namun masih perlu dorongan oleh dprd provsu untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka pembinaan kelompok badan usaha milik desa bersama (bumdesma). • Selain itu, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil juga tetap melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui daring serta tetap melaksanakan kegiatan lomba desa dan kelurahan dengan se efisien mungkin.rekomendasi dprd terhadap lkpj gubernur sumatera utara menjadi perhatian penting sebagai masukkan kedalam dokumen perencanaan karena hal tersebut juga sejalan	• Mencapai target bumdes maju: mengubah bumdes yang ada menjadi unit usaha yang efektif dan maju secara ekonomi. • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa: melalui pengembangan usaha bumdes, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan warga desa meningkat. • Mewujudkan tata kelola desa yang baik (good governance): menciptakan bumdes yang profesional, transparan, dan akuntabel. • Meningkatkan kemandirian ekonomi desa: desa menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokal.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	bersama perguruan tinggi untuk meningkatkan efisiensi usaha bumdes	dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	
16	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provsu)		
	DPRD Provsu meminta kepada Dinas PPPAKB Provsu untuk terus melaksanakan program genting (gerakan orang tua asuh cegah stunting), karena berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) Keluarga Berisiko Stunting (KRS) tahun 2024, jumlah KRS di Sumatera Utara tercatat sebanyak 25%. Oleh karenanya, program genting agar terus dilanjutkan	Terimakasih kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat atas saran dan masukannya. Pada dasarnya, kami setuju dan bersepakat bahwa upaya penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING) merupakan salah satu instrumen yang dapat memberikan dampak bagi Keluarga Resiko Stunting (KRS), oleh karena itu melalui dukungan anggota Dewan yang terhormat kami akan terus berupaya mengoptimalkan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara.	
17	Urusan Wajib Perhubungan (Dinas Perhubungan Provsu)		
	a. Berdasarkan data, terdapat pembangunan terminal lubuk pakam yang memiliki pagu anggaran sebesar 9 milyar rupiah dan realisasinya sebesar Rp. 7 milyar. Saat dilakukan kunjungan ke lokasi oleh pansus LKPJ DPRD Provsu, sudah ditemukan beberapa kerusakan pada bangunan terminal yaitu pada plafon dan toilet, padahal pembangunan terminal baru saja selesai dilaksanakan	Pada saat kunjungan Tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara, belum dilakukan inventarisasi kerusakan pada pelafon dan toilet, saat ini telah diajukan perbaikan ke rekanan (penyedia) pelaksana dan telah diperbaiki sebagai tanggung jawab masa pemeliharaan. Dan selanjutnya untuk antisipasi internal akan ada kegiatan pembersihan toilet secara rutin.	Telah dilakukan Perbaikan kerusakan plafon dan toilet oleh penyedia. (Dokumen terlampir).
	b. DPRD Provsu menilai besarnya anggaran untuk pembangunan terminal lubuk pakam yaitu sebesar 7 milyar rupiah merupakan investasi yang tidak melalui kajian secara komprehensif, hal ini dikarenakan potensi penghasilan pada terminal lubuk pakam sangat rendah, terlihat dari kendaraan umum yang masuk ke terminal	Karena pembangunan baru selesai, selanjutnya masih masa sosialisasi dan tahap uji coba sehingga pengguna terminal belum sepenuhnya mengetahui bahwa terminal tersebut sudah beroperasi dan selanjutnya untuk mengantisipasinya adanya kegiatan petugas yang mengarahkan angkutan penumpang umum yang wajib mamasuki terminal.	Telah dilakukan Pengarahan kepada Perwakilan Mandor Bus/ Non Bus untuk menaikkan/menurunkan penumpang di Terminal Tipe B Lubuk Pakam.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		lubuk pakam sangat sedikit. Sehingga dari besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan terminal menjadi sia-sia dan tidak akan bisa menyumbang pendapatan ke kas daerah pemerintah provinsi sumatera utara;		
	c.	Kemudian, ditemukan kondisi terminal lubuk pakam yang telah mulai beroperasi tapi tidak adanya biaya perawatan terminal pada anggaran tahun 2025, sehingga kondisi terminal lubuk pakam akan menjadi tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, diminta kepada dinas perhubungan provinsi sumatera utara untuk mengeluarkan kebijakan strategis dalam menjalankan operasional terminal lubuk pakam agar dapat produktif memberikan sumbangan pendapatan ke kas daerah provinsi sumatera utara, yaitu sebagai berikut: - Meningkatkan sosialisasi dan penegakan aturan agar semua angkutan umum menggunakan terminal lubuk pakam secara optimal; - Mempercepat perbaikan fasilitas berdasarkan hasil evaluasi uji coba operasional; - Mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi operasional terminal; - Memastikan integrasi transportasi agar	Terkait saran yang Bapak/Ibu sampaikan akan menjadi pedoman bagi kami atau menindaklanjuti pelaksanaan operasional di lapangan.	Dinas Perhubungan telah menindaklanjuti pelaksanaan evaluasi dan monitoring di lokasi kegiatan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	terminal berfungsi sebagai simpul utama bagi berbagai moda angkutan atau terminal lubuk pakam harus menjadi pusat integrasi berbagai moda transportasi.		
18	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu)		
	Sepanjang tahun 2024, Pemprovsu masih menghadapi beberapa tantangan dalam urusan wajib komunikasi dan informatika, terutama terkait akses internet, infrastruktur digital, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). DPRD Provsu meminta kepada Dinas Kominfo untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya yaitu : - blank spot dan keterbatasan akses internet, Masih terdapat wilayah *blank spot* di beberapa daerah, terutama di kabupaten nias utara (memiliki 42 wilayah *blank spot*), yang menghambat akses komunikasi. *Blank spot* ini berdampak pada proses pembelajaran dan akses informasi bagi masyarakat. Sehingga diminta kepada dinas kominfo provinsi sumatera utara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah *blank spot* untuk meningkatkan akses internet. -SPBE di Sumut masih membutuhkan upaya optimalisasi karena integrasi data kependudukan dan layanan publik belum sepenuhnya berjalan efektif. Sehingga dibutuhkan strategi dalam mengoptimalkan spbe dengan dukungan pusat	– Pemetaan blank spot berbasis kebutuhan daerah; - Kerjasama dengan PT Telkom; - Pengajuan ke Pusat (Kementerian Komunikasi dan Digital) dengan mengirimkan data blank spot; - Penyediaan jaringan layanan internet Gratis di Ruang Publik Strategis. - Kerjasama dengan BPS Sumatera Utara.	– Mengidentifikasi area tanpa sinyal dengan survei lapangan dan mengumpulkan data pendukung seperti koordinat dan jumlah penduduk. – Untuk membuka akses internet di daerah blankspot. – Untuk ditindaklanjuti dengan mengusulkan dan mengupayakan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet di daerah blankspot. – Kegiatan penyediaan internet gratis di ruang publik strategis di 33 kab/kota sebagai solusi perluasan akses internet secara merata, meningkatkan literasi digital, meningkatkan daya saing UMKM melalui platform digital serta peningkatan layanan SPBE. – Membangun Portal Portal Anjungan Satu Data Sumatera Utara yang mudah diakses dan berisi berbagai informasi data yang valid dan akurat serta dapat dimanfaatkan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	agar layanan publik lebih efisien serta meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mempercepat implementasi satu data indonesia.		
19	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu)		
	a. Koperasi adalah "sokoguru" perekonomian indonesia, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan berperan dalam pemerataan serta kemandirian ekonomi. DPRD Provsu meminta kepada Dinas Koperasi UKM Provsu melakukan upaya pembinaan seluruh koperasi yang ada di provinsi sumatera utara. Langkah pemeriksaan koperasi yang ada juga harus dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provsu, dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan koperasi memiliki tata kelola, permodalan, profil risiko, dan kinerja keuangan yang baik	Dukungan terhadap koperasi dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai stabilisator dan dinamisator merupakan kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus menerus mendorong koperasi dan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Program dan kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan isu – isu yang berkembang, seperti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman akan tertib administrasi dan pengembangan usaha koperasi merupakan pelatihan yang rutin dilakukan. Demikian juga terhadap pemeriksaan koperasi, ditengah keterbatasan jumlah pengawas koperasi yang ada, pemeriksaan koperasi tetap rutin dilakukan untuk memastikan koperasi memenuhi persyaratan dan peraturan perundangan melalui penilaian tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan.	Meningkatnya jumlah koperasi memiliki tata kelola, permodalan, profil risiko, dan kinerja keuangan yang baik.
	b. DPRD Provsu mengharapkan adanya upaya pembinaan yang dilakukan kepada UKM, khususnya bagi pelaku ukm yang berada di Kab. Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Tebing Tinggi. Upaya pembinaan tersebut dapat melalui upaya meningkatkan fasilitas UKM terkait mempermudah proses pelayanan perijinan, peningkatan kualitas kemasan, tentang status	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menerus mendorong koperasi dan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM terus dilakukan seperti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman akan tertib administrasi dan pengembangan usaha koperasi merupakan pelatihan yang rutin dilakukan. Demikian juga dengan peningkatan kualitas produk – produk KUMKM, yang sering menjadi keluhan konsumen, telah dilakukan standarisasi produk melalui fasilitasi haki dan label halal. Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu berupaya untuk menerapkan pemerataan	Peningkatan kualitas produk - produk KUMKM

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		halal, dan pelayanan perijinan pada BPOM	pemberdayaan terhadap KUMKM di 33 kab/kota se Sumatera Utara. Untuk itu kami selalu berharap organisasi perangkat daerah yang membidangi KUMKM di Kab/Kota agar selalu berkoordinasi dengan kami sehingga sinkronisasi pemberdayaan KUMKM dapat dilakukan lebih maksimal.	
20	Urusan Wajib Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provsu)			
	a.	DPRD Provsu memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumatera Utara dengan capaian kinerja pada urusan wajib penanaman modal dalam mencapai sasaran strategis secara keseluruhan sangat baik dengan capaian kerja mencapai > 90%. Akan tetapi, kinerja baik diharapkan terus ditingkatkan dan masih terdapat beberapa program yang juga harus mendapat perhatian, seperti menggali investasi untuk program hilirisasi pada sektor perkebunan khususnya kelapa sawit, sehingga dapat menghasilkan produk turunan yang bernilai tinggi	Pertama-tama terima kasih kepada DPRD Provsu yang terhormat atas masukan atau rekomendasi pada LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, dimana di dalamnya direkomendasikan kepada Dinas PMPTSP untuk memperhatikan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara pengembangan program hilirisasi khususnya kelapa sawit dengan merumuskan kebijakan, dukungan fiskal, dukungan kemudahan perizinan, dan penelitian. Selanjutnya, disampaikan kepada dewan yang terhormat bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM – RI telah telah menetapkan target realisasi investasi tahun 2025 di Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 53,67 Triliun atau sebesar 2,85% dari total target nasional yang sebesar Rp. 1.905 Triliun. Dimana target realisasi tersebut di dalamnya adalah pencapaian hilirisasi kelapa sawit, karet, pala, dan tilapia di Sumatera Utara. Sumatera Utara, sebagai provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 1.390.184,84 ha yang terkonsentrasi di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Salah satu upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk	Upaya – upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PMPTSP untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan kepastian serta keamanan berusaha adalah salah satunya dengan menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai tindak lanjut atas atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023 dan membangun aplikasi mandiri untuk operasionalisasi petunjuk pelaksanaan dimaksud. Kemudian upaya – upaya lainnya yang telah dilaksanakan adalah Kerja sama dengan BI bentuk NSI (North Sumatra Invest) menjaring Investor Potensial, melakukan fasilitasi dan mendorong penyediaan infrastruktur di KEK Sei
	b.	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan ptsp Provsu untuk melaksanakan kebijakan agar investasi program hilirisasi perkebunan kelapa sawit dapat direalisasikan, diantaranya dengan optimalisasi kawasan industri dan infrastruktur, kemitraan dengan investor dan sektor swasta, penyediaan insentif investasi (termasuk kemudahan perizinan dan fasilitas		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pajak bagi investor yang berinvestasi di sektor hilirisasi) serta mendapatkan dukungan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan industri	meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Adapun tujuan dari hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Industri hilirisasi merupakan industri yang membutuhkan modal besar/*capital intensive* serta teknologi tinggi. Oleh karena itu, untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di sektor-sektor yang dapat memproduksi output dengan nilai tambah yang tinggi diperlukan strategi peningkatan investasi dan perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif.	Mangkei dan KIM serta fasilitasi penurunan avtur di Bandara Kualanamu, melakukan fasilitasi kajian hilirisasi di Sumatera Utara, Pengembangan Hilirisasi pada sektor Biodiesel di Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, dan Pengembangan Hilirisasi pada sektor Oleochemical di KEK Sei Mangkei dan KIM.
21	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu)		
	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu agar lebih memperhatikan pengembangan olahraga arung jeram di Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai. Terkait adanya temuan awal bahwa sungai di Kec. Sipispis sudah tercemar oleh limbah pabrik kelapa sawit, diminta kepada Dispora Provsu untuk berkoordinasi dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup berkaitan status pabrik kelapa sawit yang mencemari sungai yang ada di kecamatan sipispis tersebut.	Dispora Provinsi Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai untuk memperoleh data dan bukti terkait pencemaran Sungai Sipispis.	• Adanya data yang pasti dan konkret terkait kondisi kualitas air di Kecamatan Sipispis • Adanya data terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran di sungai tersebut • Meminta kepada instansi terkait untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pencemaran di kawasan Sungai Sipispis
22	Urusan Wajib Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu)		
	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Kominfo Provsu untuk memperhatikan kendala dalam menjalankan urusan wajib statistik, salah satunya yaitu minimnya ASN dibidang statistik, sehingga diperlukan bimtek atau diklat dalam rangka peningkatan sdm. Selain itu, indeks pembangunan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari implementasi satu data	– Peningkatan Pelatihan, Bimtek atau Diklat Penguatan Kapasitas ASN Bidang Statistik; – Akselerasi Penguatan Kolaborasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Penyelenggara SDI dan Statistik Sektoral di Provinsi Sumatera Utara.	– Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Statistik; – Akselerasi Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral yang selaras antar Penyelenggara SDI dan Statistik Sektoral.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan terkini bagi perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk sinkronisasi data antar instansi masih perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan angka dalam laporan statistik, serta integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus terus ditingkatkan lagi		
23	Urusan Wajib Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu)		
	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Kominfo Provsu untuk memperhatikan kendala dalam menjalankan urusan wajib persandian, salah satunya yaitu minimnya asn dibidang persandian, sehingga diperlukan bimtek atau diklat dalam rangka peningkatan SDM. Kemudian, masih terdapat beberapa tantangan dalam urusan wajib persandian, terutama terkait keamanan informasi, sinkronisasi sistem, dan kesiapan infrastruktur digital. Sehingga diminta kepada Dinas Kominfo Provsu untuk memperkuat sistem keamanan informasi dengan menerapkan standar enkripsi yang lebih tinggi, meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memastikan sinkronisasi sistem persandian berjalan optimal, mengembangkan pelatihan sdm agar tenaga ahli persandian lebih siap menghadapi tantangan keamanan digital dan mempercepat implementasi teknologi persandian untuk meningkatkan perlindungan data Pemerintahan.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kominikasi dan Informatika terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pengelolaan persandian dan keamanan informasi Sumatera Utara. Pada tahun 2025 capaian kinerja yang diukur melalui indeks Kemanan Infrormasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2024, dari nilai 449 menjadi 559. Pembenahan-pembenahan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan baik yang diselenggarakan oleh BSSN maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP), pada tahun 2025 telah dilakukan 15(lima belas) kali pelatihan bersertifikat, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 5(lima) kali pelatihan bersertifikat. Pada tahun 2025 Dinas Kominfo juga telah membentuk Security Operation Center, capaian 100% pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada 33(tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, penetapan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi, adanya Kebijakan Pelindungan Data Pribadi melalui surat edaran sekda nomor 000.6.1/322/2025, adanya kebijakan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Keamanan Siber Pada Sistem Elektronik di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Edaran Sekda Nomor 000.6/9659/2025 yang antara lain	– Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; – Memperkuat Sistem Keamanan Informasi Pemerintahan melalui penerapan standar enkripsi; – Meningkatkan Kesiapan dan Keandalan Infrastruktur Persandian dan Keamanan Informasi; – Mengakselerasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Persandian antar Instansi; – Meningkatkan Perlindungan Data dan Ketahanan Siber Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		menerapkan kebijakan stadar enkripsi terhadap pengelolaan sistem elektronik dan pelindungan data. Dalam hal kesiapan infrastruktur di bidang Persandian dan Keamanan Informasi masih perlu dilakukan peningkatan meskipun Dinas Kominfo telah memiliki teknologi Firewall dan WAF. Kedepannya Pemprovsu melalui Diskominfo akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan urusan persandian dan keamanan informasi berupa peningkatan kualitas SDM, Infrastruktur, adanya SOP, kerjasama antara Kab/Kota dan OPD serta Pemerintah Pusat.	
24	Urusan Wajib Kebudayaan (Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu)		
	a. DPRD Provsu meminta kepada Dinas Budpar dan Ekraf Provsu dalam melakukan penetapan cagar budaya harus melalui SK Gubernur.	Ada 10 Cagar Budaya yang direkomendasikan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan sekarang masih dalam proses di Biro Hukum.	Agar Cagar Budaya yang menjadi Cagar Budaya Provinsi bisa lebih terjaga dan terlindungi dari kepunahan
	b. Kemudian, terdapat laporan masih ada pekerjaan yang tidak selesai di 2024 sehingga menjadi hutang pada alokasi anggaran tahun 2025, kondisi ini menyebabkan perbedaan persentasi realisasi anggaran menjadi 96,11% atau gagal bayar berjumlah sekitar 11,6 milyar rupiah. Oleh karenanya, diminta kepada dinas kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terus berkoordinasi dengan BKAD Provsu agar keadaan gagal bayar dapat segera diselesaikan.	Semua pekerjaan yang tidak selesai pembayarannya di Tahun 2024 sudah dibayarkan pada anggaran Tahun 2025	Terlaksananya pemeliharaan dan pelindungan cagar budaya
25	Urusan Wajib Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu)		
	DPRD Provsu menyoroti persoalan indeks pembangunan literasi masyarakat yang masih rendah atau belum tercapai,	Dalam rangka pengembangan dan peningkatan minat baca serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya Provinsi Sumatera Utara, tentu dibutuhkan dukungan	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dari target tahun 2024 di angka 23 namun pada realisasinya di angka 13,10. Oleh karenanya, diharapkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu untuk terus berinovasi dalam kebijakan dan berkolaborasi dengan *stake holder* terkait untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat, diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Literasi di daerah terpencil, yaitu dengan memastikan akses pendidikan yang lebih merata, termasuk distribusi buku dan pelatihan guru di wilayah yang sulit dijangkau; b. Transformasi perpustakaan digital, yaitu dengan mengembangkan perpustakaan digital dan titik akses wifi untuk meningkatkan keterjangkauan bahan bacaan; c. Program literasi berbasis inklusi sosial, yaitu dengan menggunakan perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan keterlibatan masyarakat; d. Kolaborasi dengan institusi pendidikan, yaitu dengan mendorong sekolah dan universitas untuk lebih aktif dalam program literasi, termasuk penyediaan bahan bacaan yang menarik dan relevan; e. Peningkatan kualitas koleksi perpustakaan, yaitu dengan memastikan koleksi buku dan bahan bacaan lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	infrastruktur perpustakaan yang berkualitas. Untuk itu Pemprov Sumatera Utara telah menambah koleksi bahan bacaan, antara lain bahan bacaan untuk anak, bahan bacaan referensi, bahan bacaan bagi pendidikan dan remaja, serta bahan bacaan untuk layanan umum, serta telah mengembangkan bahan bacaan e-book yang telah disosialisasikan bagi pemustaka dan bisa diakses melalui aplikasi IPUSDA Sumut. Dalam hal peningkatan minat baca dengan melaksanakan Gerakan Masyarakat Minat Baca di Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai kegiatan, antara lain berupa sosialisasi minat baca di masyarakat, promosi perpustakaan, lomba literasi serta pelatihan bagi pegiat literasi guna peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Sumatera Utara. Untuk membuka akses layanan perpustakaan bagi masyarakat sampai di pinggiran dan pelosok Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip di tahun 2024 telah mengembangkan layanan titik baca digital Sumut dengan 1.000 judul e-book yang dilengkapi dengan sambungan wifi sebanyak 15 titik baca digital yang tersebar di 9 Kab/Kota, serta pembangunan 15 unit pojok baca di 10 Kab/Kota, serta 3 unit gerobak baca yang dimulai pada tahun 2022. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan infrastruktur, dukungan teknologi informasi dan dukungan penyediaan dana, mengingat jumlah perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, kecamatan yang cukup banyak. Rekomendasi ini sangat baik dan akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
26	Urusan Wajib Kearsipan (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu)		
	DPRD Provsu terus mendukung upaya Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu dalam menjalankan setiap program kegiatannya pada pelaksanaan urusan wajib kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu diharapkan terus mampu membudayakan tertib arsip untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian membuat program yang bertujuan untuk menguatkan peran arsip sebagai bukti akuntabilitas dan alat bukti yang sah serta memperluas layanan dan akses arsip untuk kepentingan pembangunan, pemerintahan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan rakyat.	Pemprov Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa program urusan, antara lain pembinaan dan penataan kerasipan, program pemusnahan arsip, program pengolahan data arsip dan Badan/ Dinas, program peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur di bidang kearsipan, dan program operasional kenderaan layanan masyarakat sadar arsip. Dalam hal peningkatan tersebut, Pemprov Sumatera Utara telah berupaya melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan ke perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara, pembinaan SDM Pengelola Kearsipan dan melaksanakan penilaian internal dan eksternal. Kearsipan di Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini dibutuhkan dukungan infrastruktur dan penyediaan dana untuk kegiatan tersebut secara bertahap.	
27	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan (Dinas Pilihan Kelautan dan Perikanan Provsu)		
	a. DPRD Provsu meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu untuk terus menggali potensi dari sektor kelautan dan perikanan di sumatera utara, dibutuhkan langkah-langkah yang menunjukkan komitmen pemerintah provinsi sumatera utara dalam menjaga keseimbangan antara konservasi ekosistem laut dan pembangunan ekonomi berbasis kelautan.	1. Identifikasi komunitas masyarakat adat, tradisional dan lokal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Identifikasi kearifan lokal masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil. 4. Kajian identifikasi alur, pola migrasi biota dan tingkah laku jenis ikan mamalia laut dan biota lainnya. 5. Sosialisasi konservasi jenis ikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Labuhanbatu). 6. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana dan perubahan iklim. 7. Pelatihan selam, sabang. 8. Pelatihan wanita nelayan. 9. Pelatihan GIS, Medan 10. Pelatihan metode monitoring kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, Padang 11. Pelatihan metode dan analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Medan.	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			12. Peningkatan kemampuan SDM kepariwisataan pantai, bawah laut dan pulau-pulau kecil. 13. Pengembangan SDM berbasis lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 14. Pembentukan kelompok dan kelembagaan di kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. 15. Pengadaan sarana dan prasarana kelompok dan kelembagaan di kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. 16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alru migrasi penyu dan biota lainnya.	
	b.	Program yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu harus selaras dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sumut, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara konservasi, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem laut. Kemudian, dibutuhkan pula peningkatan partisipasi masyarakat dan industri dengan mengembangkan program *blue economy* yang melibatkan nelayan dalam ekowisata berbasis kelautan serta dapat pula mengajak pelaku industri perikanan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam budi daya ikan dan pengolahan hasil laut	1. Sosialisasi Perda RTRWP 2. Perubahan materi teknis perairan pesisir. 3. Penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tapsel. 4. Penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Gide dan Bawolato Kab. Nias 5. Penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Secanggang dan Pulau Pandang Tanjung Tiram. 6. Penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Madina. 7. Penetapan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Lahusa, Alasa 8. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan. 9. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau-Pulau Batu Timur Pulau Pini Kab. Nias Selatan. 10. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau-Pulau Salah Nama dan Pulau Berhala 11. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kasawan Konservasi di Tapanuli Tengah dan perairan sekitarnya	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			12. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kasawan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sirombu 13. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kasawan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Batang Toru Tapsel 14. Penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata Pantai Bawah Laut Pulau-pulau Kecil (Tapteng) 15. Pengembangan Kawasan pariwisata Pantai Terpadu di Kawasana Konservasi perairan 16. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Wisata Pantai di Kawasan Konservasi 17. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi pariwisata Pantai , Bawah Laut dan Pulau-pulau kecil 18. Penyusunan Kajian Kawasan Konservasi Jenis Ikan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara (Batubara) 19. Panandaan Batas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Tapteng, Batubara, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat) 20. Sosialisasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 21. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang 22. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 23. Rehabilitasi Lamun 24. Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Lainnya 25. Gerakan Bulan Cinta Laut 26. Mata Pencaharian Alternatif 27. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Perikanan Tangkap telah sesuai dengan RZWP3K dan menciptakan keseimbangan konservasu ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut, dan adanya partsipasi masyarakat dan industri dengan mengembangkan program yang melibatkan nelayan	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			28. Dalam budi daya perikanan dinas kelautan dan perikanan selalu mendorong dan membina pembudidaya untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) selama melakukan usaha budidaya nya. Dalam CBIB di wajibkan menggunakan pakan, pupuk, obat-obatan, dan peralatan yang ramah lingkungan serta penggunaan benih ikan unggul juga mengatur kepadatan terbar benih	
28	Urusan Pilihan Pariwisata (Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu)			
	a.	DPRD Provsu menyoroti soal pentingnya karakter sadar wisata dalam meningkatkan potensi pariwisata sumatera utara, karena sumatera utara memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari danau toba, sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, hingga pantai lagundri dan sorake di Nias Selatan yang terkenal dengan ombak kelas dunia. Namun, DPRD Provsu menghimbau kepada Dinas Budpar dan Ekraf Provsu dalam rangka pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam mendukung ekosistem wisata yang berkelanjutan	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan kenyamanan wisatawan. Pelaksanaan program sadar wisata secara terfokus di kawasan strategis seperti Danau Toba, Nias Selatan, dan destinasi unggulan lainnya.	Manfaat Ekonomi yang Belum Merata; Masyarakat sekitar destinasi belum sepenuhnya menikmati dampak ekonomi pariwisata. Daya Saing Pariwisata Sumatera Utara yang Belum Maksimal: Belum terpenuhinya standar destinasi berkelanjutan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
	b.	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Budpar dan Ekraf Provsu membuat program sadar wisata kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata di Sumatera Utara. Karakter sadar wisata adalah sikap dan perilaku masyarakat dalam mendukung	Pelatihan keramahan (hospitality), komunikasi, dan etika menerima wisatawan. Pendampingan Pokdarwis sebagai motor penggerak sadar wisata di tingkat lokal.	Citra Destinasi yang Kurang Positif dimana Pengalaman wisatawan yang kurang baik menurunkan daya tarik dan daya saing destinasi. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pariwisata yang mana Masyarakat belum

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		industri pariwisata dengan menjaga kebersihan, keramahan, serta menghargai budaya dan lingkungan. Masyarakat yang memiliki karakter ini tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan, tetapi juga turut serta dalam melestarikan dan mempromosikan destinasi wisata		memahami peran pentingnya dalam mendukung industri pariwisata.
	c.	Kemudian, Dinas Budpar dan Ekraf Provsu diharap mampu menciptakan pariwisata berkelanjutan dengan membangun karakter sadar wisata sehingga dapat membantu menjaga ekosistem destinasi wisata agar tetap menarik dan layak dikunjungi dalam jangka panjang. Sebagaimana dipahami bersama, karakter sadar wisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan komitmen bersama, Sumatera Utara bisa menjadi destinasi wisata yang lebih menarik, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional	Sosialisasi Sapta Pesona dan prinsip pariwisata berkelanjutan kepada masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pengelola destinasi. Pelatihan pemandu wisata lokal, UMKM pariwisata, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pemanfaatan media digital untuk membangun citra Sumatera Utara sebagai destinasi berkelanjutan.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran mereka dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi. SDM pariwisata yang belum terlatih menyebabkan pengalaman wisatawan kurang maksimal. Pemahaman bahwa pengelolaan pariwisata hanya tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab bersama.
29	Urusan Pilihan Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu)			
	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu untuk dapat terus meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Utara. Berdasarkan data, jumlah produksi tanaman pangan khususnya		Kami sangat sependapat dengan rekomendasi dari DPRD Provsu terkait peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2024, produksi komoditas padi sebesar 3.923.928 ton GKG atau mencapai 97,76 persen dari target 4.013.809 Ton GKG. Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu perubahan iklim yeng mengakibatkan	Jumlah produksi tanaman pangan khususnya padi di tahun 2024 tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 4.013.809 ton GKG.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	padi di tahun 2024 tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 4.013.809 ton gkg. Sehingga dinas Ketapang dan TPH Provsu diharapkan terus mampu menangani tantangan baik dikarenakan berkurangnya luas lahan (karena alih fungsi ke permukiman) maupun dikarenakan adanya faktor cuaca atau iklim yang tidak mendukung produksi pertanian.	beberapa daerah mengalami kekeringan seperti di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Kekeringan tersebut terjadi pada kurun waktu Februari hingga Mei 2024 sementara beberapa daerah mengalami banjir seperti di Kabupaten Batu Bara dan Serdang Bedagai yang terjadi pada bulan Agustus Hingga September 2024. Namun produksi komoditas padi di Sumatera Utara sebesar 3,9 juta ton tersebut, masih mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sumatera Utara, bahkan bila di konversi ke beras, komoditas padi mengalami surplus sebanyak 749.779 ton beras.	
30	Urusan Pilihan Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu)		
	DPRD Provsu meminta kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu untuk terus menjalankan program dalam rangka memenuhi indikator kinerja dalam urusan pilihan pertanian. Pada tahun 2024, pada program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tidak mencapai target atau hanya ada realisasi sebesar 50%, sehingga dibutuhkan inovasi program dan komitmen yang serius dari dinas perkebunan dan peternakan provinsi sumatera utara untuk memenuhi target di tahun yang akan datang.	Dinas perkebunan dan peternakan provinsi sumatera utara menyadari bahwa pada pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian belum seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam yang tidak terprediksi, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung akibat rasionalisasi , serta belum optimalnya sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektor di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dinas perkebunan dan peternakan provinsi sumatera utara berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan inovasi berkelanjutan agar target program dapat terpenuhi pada tahun-tahun mendatang, antara lain: 1. Penguatan perencanaan berbasis risiko, melalui pemetaan wilayah rawan bencana perkebunan dan peternakan secara lebih detail dan terintegrasi. 2. Penerapan inovasi teknologi, seperti pemanfaatan data cuaca, sistem informasi geografis (sig), serta penguatan sistem peringatan dini	Melalui langkah-langkah tersebut, kinerja program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dapat ditingkatkan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			bencana di sentra perkebunan dan peternakan. 3. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya dengan BPBD, BMKG, Pemerintah Kab/Kota, masyarakat peduli api, dan kelompok tani/ternak. 4. Peningkatan kapasitas sdm dan kelembagaan petani, melalui pelatihan mitigasi bencana, respon cepat, dan pemulihan pasca bencana. 5. Optimalisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan, dengan penajaman sasaran, efisiensi pelaksanaan, serta penguatan monitoring dan evaluasi program. 6. Penguatan komitmen organisasi, dengan menjadikan pengendalian dan penanggulangan bencana sebagai prioritas strategis dalam mendukung ketahanan perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.	
31	Urusan Pilihan Kehutanan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu)			
	a.	DPRD Provsu mendukung upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu dalan menjalankan program penanaman pada lokasi perhutanan sosial sekitar 694 hektar	DPRD Provsu mendukung upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu dalan menjalankan program penanaman pada lokasi perhutanan sosial sekitar 694 hektar.	meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, mencegah degradasi lahan.
	b.	Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam perhutanan sosial adalah kegiatan penanaman, yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar	Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam perhutanan sosial adalah kegiatan penanaman, yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar; Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 99.479,23 Ha / 269 Kelompok Perhutanan Sosial dengan rincian : 1. Hutan Kemasyarakatan (HKM): 58.018,95 Ha / 197 KPS 2. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : 7.617,61 Ha / 14 KPS	mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			3. Hutan Desa (HD) : 5.118 Ha / 16 KPS 4. Kemitraan Kehutanan (KK) : 5.965, 84 Ha / 32 KPS 5. Hutan Adat (HA) : 22.758, 83 Ha / 10 KPS Pada Tahun 2024, Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merealisasikan pemberian Bibit Produktif sebanyak 310.884 batang kepada 73 Kelompok Perhutanan Sosial dengan luas perkiraan penanaman ± 694 Ha sebagai mana dukungan yang telah diberikan DPRD Provinsi Sumatera Utara.	
	c.	Dalam menjalankan program tersebut, DPRD Provsu meminta kepada dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi sumatera utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pemilihan jenis tanaman yang tepat, yaitu dengan menanam spesies asli yang sesuai dengan kondisi ekologi setempat untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem; b. Pelibatan masyarakat lokal, yaitu dengan memberikan pelatihan dan insentif kepada masyarakat agar mereka aktif dalam program penanaman dan pemeliharaan hutan; c. Pendekatan agroforestri, yaitu menggabungkan tanaman produktif dengan pohon konservasi untuk	a. Dasar Pemberian bibit tanaman produktif kepada Kelompok Perhutanan Sosial adalah sesuai dengan proposal permohonan bibit dari Kelompok Perhutanan Sosial yang ditujukan kepada UPTD KPH. Adapun Jenis Tanaman yang diserahkan seperti Alpukat, Durian, Aren, Mangga, Duku, Pinang, Rambutan, Matoa, Macadamia, Pinus, Kemiri, Kopi, Kayu Manis, Manggis, Kelapa Genjah, yang diharapakan melalui pemberian bibit tanaman produktif ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem b. Pada Tahun 2024 , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan telah melaksanakan Sosialiasi Optimalisasi Pemanfaatan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu Menuju Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat yang diikuti 60 Kelompok Perhutanan Sosial yang diadakan di 4 lokasi yaitu	untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem, menjaga keseimbangan alam, memperkuat daya dukung lingkungan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga ekosistem; d. Monitoring dan evaluasi berkala, yaitu dengan memastikan keberhasilan program dengan pemantauan pertumbuhan tanaman dan dampaknya terhadap lingkungan; e. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pendanaan, penelitian, dan pengelolaan hutan sosial.	Medan, Simalungun, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara c. Jenis tanaman produktif yang diserahkan kepada masyarakat seperti Alpukat, Durian, Aren, Mangga, Duku, Pinang, Rambutan, Matoa, Kemiri, Kopi, Kayu Manis, Manggis, Kelapa Genjah dan pohon konservasi seperti Macadamia, Pinus diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan kelestarian ekosistem. d. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh UPTD KPH sebagai pengelola tingkat tapak secara berkala untuk pemantauan kegiatan pemberian tanaman produktif tersebut dengan tetap melibatkan semua unsur yang terlibat. e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi bersama sama dengan funding / NGO yang ada di Provinsi Sumatera Utara seperti Yayasan PETAI (Pesona Tropis Alam Indonesia) , Lascar Coco, Yayasan Konservasi Indonesia, Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU), Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (TAHUKAH), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Yayasan PRCF, Walhi Sumut, Bitra, AMAN, KSPPM, Samudra mendukung kegiatan Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Sumatera Utara.	
32	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu)			
	a.	DPRD Provsu menyambut baik kinerja dari Dinas Perindag, ESDM Provsu dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2024 dalam urusan pilihan energi dan sumber daya mineral, namun diharapkan untuk dapat terus berbenah dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kinerja meningkatkan akses infrastruktur ketenagalistrikan dan	Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara atas dukungan dan penghargaan terhadap kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program strategis dan indikator kinerja tahun 2024. Rekomendasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelaksanaan program-program prioritas khususnya dalam peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan serta pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program strategis urusan energi dan sumber daya mineral, khususnya peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan serta pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		meningkatkan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang telah tercapai di tahun 2024		
	b.	Dalam menjalankan program bantuan pemasangan listrik baru, diharapkan kepada Dinas Perindag, ESDM Provsu agar memberikan data penerima bantuan secara rinci agar prinsip keterbukaan (*tranparansi*) dapat terwujud	Menindaklanjuti saran terkait bantuan pemasangan listrik baru, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan transparansi, dan meningkatkan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara.	
	c.	Kemudian, diharapkan juga kepada Dinas Perindag, ESDM Provsu untuk menelaah lebih lanjut pengembangan program yang berkaitan dengan lampu tenaga surya	Penggunaan energi terbarukan, termasuk tenaga surya, merupakan salah satu Langkah strategis dalam mendukung transisi energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta perluasan akses penerangan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap potensi dan arah pengembangan program lampu tenaga surya. Kami berkomitmen untuk mengembangkan program ini secara bertahap dan terencana, guna memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.	
33	Urusan Pilihan Perdagangan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu)			
	a.	Dalam menjalankan urusan pilihan perdagangan, Dinas Perindag, ESDM Provsu diharapkan serius dalam memperhatikan sektor pengembangan ekspor, hal ini dikarenakan realisasi menunjukkan penurunan yaitu 0,98% dari target 2,90%, ini menandakan adanya hambatan dalam meningkatkan ekspor, Termasuk partisipasi dalam pameran internasional dan peningkatan citra produk	Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan urusan pilihan perdagangan, khususnya dalam aspek pengembangan ekspor Sumatera Utara yang hanya mencapai nilai 0,98% dari target 2,90% pada akhir tahun 2024 disebabkan beberapa faktor eksternal dan global. Hambatan peningkatan ekspor Sumatera Utara bukan hanya kurangnya pendanaan dalam mengikuti pameran dagang internasional, namun juga dikarenakan oleh faktor permasalahan global diantaranya penurunan beberapa harga komoditi ekspor dan perubahan regulasi dalam	Mengatasi hambatan peningkatan ekspor akibat faktor eksternal dan global serta meningkatkan kinerja dan daya saing produk ekspor Provinsi Sumatera Utara. Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui penguatan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		ekspor dari provinsi sumatera utara	ekspor komoditi kelapa sawit dan turunannya, uang masih menjadi primadona komoditi ekspor Sumatera Utara.	
	b.	DPRD Provsu juga mengharapkan perhatian dari Dinas Perindag, ESDM Provsu dalam rangka melaksanakan upaya peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa serta kegiatan perdagangan agar sesuai dengan parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Kami sependapat bahwa pengawasan yang efektif dan peningkatan kapasitas pengawasan merupakan kunci dalam mewujudkan perlindungan konsumen serta menjamin tertib niaga di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan hal tersebut, kami akan memperkuat fungsi pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Akan meningkatkan intensitas pengawasan barang beredar dan pengawasan di bidang perdagangan melalui kegiatan pengawasan berkala di pasar tradisional, pusat distribusi, dan toko modern guna memastikan barang yang diperdagangkan memenuhi standar mutu, pelabelan dan ketentuan lainnya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan berkala dibidang perdagangan antara lain: pengawasan tanda daftar gudang bapok, pengawasan distribusi minuman beralkohol, pengawasan produk SNI Wajib, pengawasan bapok. Dan telah melakukan pengawasan khusus monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). 2. Telah dan akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait termasuk balai pengawasan, satgas pangan, kepolisian, pemerintah kab/kota dan balai pengawasan tertib niaga regional Sumatera-Kemendag, guna mendukung implementasi tertib niaga dan perlindungan konsumen secara lintas sektor. 3. Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas telah dilakukan upaya melalui pendidikaj dan pelatihan bagi ASN Pengawas Perdagangan.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
34	Urusan Pilihan Perindustrian (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu)		
	DPRD Provsu melihat program pengendalian izin usaha industri dengan indikator jumlah industri besar yang difasilitasi penerbitan ijinnya memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% oleh Dinas Perindag, ESDM Provsu, akan tetapi diharapkan dalam menerbitkan ijin usaha industri tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terkait dengan Program Pengendalian Izin Usaha Industri, kami mengapresiasi perhatian dan masukan konstruktif dari DPRD Provinsi Simatera Utara. Capaian kinerja sebesar 100% dalam fasilitasi penerbitan izin usaha industri mencerminkan komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sunber daya Mineral Provsu dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada pelaku usaha. Namun demikian, kami menyadari bahwa keberhasilan administratif harus tetap sejalan dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami akan terus memastikan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha industri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, termasuk kajian teknis, kelayakan lingkungan, dan tata ruang wilayah. Ke depan, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap industri yang telah memperoleh izin, agar dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dapat terus dikendalikan secara optimal.	Menjamin penerbitan izin usaha industri yang transparan dan sesuai ketentuan serta meningkatkan pengawasan terhadap industri guna mengendalikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
35	Urusan Pilihan Transmigrasi (Dinas Ketenagakerjaan Provsu)		
	DPRD Provsu menghimbau kepada Dinas Ketenagakerjaan Provsu untuk dapat mengatasi permasalahan dan potensi masalah yang berkaitan dengan lahan transmigrasi, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekonomis dari lahan transmigrasi dimaksud dan adanya tekanan jumlah penduduk serta meningkatnya sarana prasarana, khususnya peningkatan kondisi jalan sehingga tidak ada lagi wilayah terisolir terutama lokasi transmigrasi.	Sesuai UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian bahwa setelah 5 (lima) tahun sejak awal penempatan maka wilayah transmigrasi diserahkan kepada pihak Kabupaten, baik secara otoritas maupun pembinaannya sehingga dalam hal ini pihak Provinsi sudah tidak mempunyai kewenangan atas Eks UPT dimaksud kecuali jika diminta membantu untuk penyelesaian permasalahan.	Langkah yang akan dilakukan dalam membantu mengatasi permasalahan lahan transmigrasi antara lain: - Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk mencari solusi atas masalah lahan transmigrasi, termasuk akses jalan dan nilai ekonomi lahan - Mengusulkan perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum, dengan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			melibatkan dinas teknis terkait - Mendata dan memetakan kondisi kawasan transmigrasi agar penanganannya lebih tepat sasaran.
36	Inspektorat Provsu		
	DPRD Provsu mengharapkan komitmen dari Inspektorat Provsu dalam melakukan penegakan disiplin pegawai secara berintergritas dan turut berperan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam dilaksanakan dengan baik.	Inspektorat Provsu berkomitmen untuk: • Melaksanakan penegakan disiplin Pegawai secara profesional, adil, dan berintegritas; • Memperkuat fungsi pengawasan internal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; • Meningkatkan pembinaan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran disiplin serta penyimpangan tata kelola pemerintahan. Melalui pelaksanaan pengawasan yang independen, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung terlaksananya pembangunan Provinsi Sumatera Utara secara efektif dan berkelanjutan.	Penegakan disiplin pegawai secara berintergritas
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provsu		
	a. Terkait adanya SILPA pada Bappelitbang Provsu selama 3 tahun berturu-turut yang nilainya sekitar 1 triliun, maka DPRD Provsu menghimbau untuk dilakukan perencanaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan terus disempurnakan	Terkait adanya SILPA pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun berturut-turut yang nilainya sekitar 1 triliun, dengan ini dapat kami sampaikan realisasi Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut: a. Realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 41.649.336.993,- atau mencapai 96,01 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 43.379.810.043,- dengan SILPA sebesar Rp. 1.730.473.050,- atau mencapai (3,99 %) b. Realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 54.717.476.170,- atau mencapai 97,23 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.	Terkait dengan SILPA ini adalah dikarenakan adanya Silpa dari gaji yang pada setiap tahunnya yang diberikan berlebih dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			56.274.561.626,-, dengan SILPA sebesar Rp. 1.557.085.456,- atau mencapai (2,77 %) c. Realisasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 54.929.378.046,- atau mencapai 96,76 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 56.768.213.233, dengan SILPA sebesar Rp. 2.050.737.063,- atau mencapai (3,24 %)	
	b.	DPRD Provsu menilai di masa yang akan datang bapelitbang punya pengaruh besar terhadap semua program-program yang ada di Provinsi Sumatera Utara, tidak hanya sekedar penelitian oleh lembaga atau internal atau badan riset, tetapi diharapkan memiliki dampak yang besar. Contohnya seperti dapat memberikan dampak pada pendapatan daerah, diharapkan ada penelitian agar pad provinsi sumatera utara bisa lebih besar lagi agar tidak terganggu apabila terdapat kebijakan efisiensi anggaran	Dapat kami sampaikan bahwa tahun 2024, Bappelitbang Provsu telah menyusun penelitian terkait peningkatan Pendapatan Daerah dengan judul ‘‘Model Formulasi dan Proyeksi Target Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara’’ yang bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan Pemprov Sumatera Utara dalam mengoptimalkan capaian target penerimaan PKB dan BBNKB. Atas pandangan Anggota Dewan yang terhormat, untuk penyusunan penelitian yang lebih komprehensif terkait Peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara, ke depannya hal ini akan menjadi perhatian dan prioritas kami.	Hasil penelitian ini telah disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan kebijakan yang akan dilakukan dan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu			
	a.	DPRD Provsu menyoroti tidak tercapainya sasaran strategis dari BKAD Provsu dalam mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas, hal ini terlihat dari persentase tanah milik Pemprovsu yang disertifikasi belum mencapai target, artinya masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum ‘‘diamankan’’ atau dalam kondisi dikuasai pihak lain. Oleh karenanya, diminta kepada BKAD Provsu	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 296 ayat (1) menyatakan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dan ayat (2) menyatakan Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.	Sudah selesainya double pencatatan dengan Pemerintah Kab/Kota sebanyak 9 tanah

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		untuk terus melakukan upaya ‘‘pengamanan’’ aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Upaya yang telah dilakukan untuk pengamanan aset khusunya tanah dalam sertifikasi adalah: 1. Melakukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. 2. Melakukan pelaporan kepada tim Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI setiap bulannya pada realisasi Sertifikasi Aset (https://bit.ly/SumutSertifikasi205) 3. Jumlah Tanah Pemprovsu sebanyak 1.929 persil tanah, yang sudah bersertifikat sebanyak 1.114 persil tanah dan yang belum bersertifikat sebanyak 815 persil tanah. 4. Kendala kendala pensertifikatan adalah sebagai berikut : - Aset tanah dikuasi masyarakat/pihak ketiga tanpa izin - Double pencatatan dengan Pemerintah Kab/Kota. - Aset merupan milik pihak lain (HGU PTPN, Kwartir Pramuka, PT. Kereta Api Indonesia dan Otorita Asahan) - Tanah termasuk kawasan hutan lindung - Tanah termasuk sempadan danau toba - Objek tanah belum ditemukan	
	b.	DPRD Provsu menghimbau kepada BKAD Provsu tentang pentingnya kolaborasi dengan DPRD Provsu, karena proses koordinasi pembahasan anggaran bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, DPRD Provsu menemukan adanya alokasi anggaran pada Badan Penghubung	Terkait alokasi pembangunan fisik pada wisma bukit barisan di Yogyakarta berada di sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung pada anggaran Badan Penghubung Provsu, dapat kami sampaikan bahwa kedepannya hal ini akan jadi perhatian dan catatan kami dengan melakukan sinkronisasi dan penyelarasan sub kegiatan dalam penyusunan anggaran belanja yang dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Provsu terkait pembangunan fisik, yaitu ditemukannya alokasi anggaran mengenai pekerjaan fisik pada Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta sebesar Rp. 24.271.489.129,25, dimana anggaran tersebut dimasukkan pada nomenklatur atau sub kegiatan pada Badan Penghubung yaitu "koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung". Menjadi tidak Logis apabila pada nomenklatur "koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung" terdapat jumlah alokasi anggaran untuk pekerjaan fisik yang nilainya besar. Oleh karenanya diharapkan hal seperti ini tidak diulang pada tahun anggaran yang akan datang		
	c.	Kemudian, terkait adanya hibah bansos sejumlah 895 unit dengan nilai Rp.106.895.000.000,- yang belum direalisasikan pada tahun anggaran 2024 agar menjadi perhatian BKAD Provsu untuk segera menyelesaikan persoalan ini	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja hibah kepada badan/Lembaga/organisasi sebesar Rp1.179.023.078.650,00 dan terealisasi Rp1.070.902.571.804,00 atau 90,83%. Sisanya sebesar Rp108.120.506.846,00 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan ketidaktercapaian target pendapatan Pemprov Sumatera Utara sehingga memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Bahwa sesuai dengan draft LHP BPK RI pada pemeriksaan LKPD Tahun 2024, belanja hibah yang tidak terealisasi tersebut tidak dapat diakui sebagai kewajiban/utang karena sesuai ketentuan sebagai berikut: a. PP 71/2010 tentang SAP Menegaskan bahwa komitmen anggaran (rencana belanja) bukanlah kewajiban jika belum ada	

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			transaksi atau peristiwa yang mengikat. b. PSAP 09 tentang Kewajiban Paragraf 08: Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan c. Permendagri 90/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136: Penyusunan laporan keuangan harus sesuai SAP, dan Pasal 137: Komitmen yang tidak memenuhi syarat liabilitas tidak diakui sebagai utang, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). d. Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019: Belanja Hibah: 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, *bersifat tidak wajib dan tidak mengikat*, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Maka di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 hanya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terkait hibah sejumlah 895 Penerima hibah dengan nilai Rp. 106.895.000.000,- yang tidak terealisasi pada Tahun 2024 sudah dialokasikan pada Pergeseran Kedua APBD TA. 2025. Pada waktu itu hibah tersebut tercatat sebagai hutang pada Laporan Keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara *Unaudited,* informasi terakhir dari BPK RI bahwa hutang hibah senilai Rp. 106.895.000.000,- tersebut dikoreksi BPK-RI hanya tercatat tidak terbayar di APBD TA. 2024	
39	Badan Pendapatan Daerah Provsu		
	Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, DPRD Provsu menghimbau kepada Bapenda Provsu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diantaranya mengenai penetapan target pengelolaan pajak daerah belum diformulasikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta belum tersusunnya kajian analisa dan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah Provinsi Sumatera Utara.	Terkait dengan penetapan target pengelolaan pajak daerah Bapenda Provsi Sumatera Utara telah memformulasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berdasarkan dengan: 1. Realisasi PAD, yang berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan realisasi penerimaan yang digunakan untuk menilai tren dan menetukan target; 2. Potensi rill pajak daerah yang meliputi jumlah potensi objek pajak dan pertumbuhan objek pajak tahun berjalan ; 3. Proyeksi kondisi ekonomi daerah meliputi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pertahun; 4. Faktor kebijakan dan regulasi. Target pajak daerah disesuaikan dengan adanya perubahan regulasi antara lain perubahan tarif pajak, pemberian insentif dan penghapusan sanksi, serta penyesuaian regulasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) Terkait dengan pembuatan kajian analisa sudah pernah dialokasikan pada APBD TA. 2025 yang	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		direncanakan antara Bapendasu dengan Universitas Sumatera Utara (USU) akan tetapi karena adanya efesiensi dan pertimbangan teknis lainnya kegiatan tersebut tidak dilanjutkan. Terkait dengan pengembangan pajak daerah Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui inovasi mencapaian target pajak daerah yaitu sebagai berikut: a. E-Samsat Sumut yaitu kerja sama dengan Bank Mandiri (ATM & Livin Mandiri) untuk pembayaran PKB, menggantikan metode pembayaran melalui e-Commerce dan ATM Bank Sumut; b. Samsat malam di UPTD Pependa Binjai, UPTD Pependa Pematang Siantar, UPTD Pependa Simalungun, UPTD Pependa Padangsidimpuan dan UPTD Pependa Kisaran. c. Penambahan Kanal Pembayaran PKB melalui QRIS dan EDC; d. Penambahan Layanan Samsat Gerai; e. Penambahan layanan di tempat-tempat keramaian dan acara event tertentu dengan Bus Samsat Keliling; f. Program Mandiri Ketuk Pintu dengan metode mendatangi langsung wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB; g. Membuat Nota Kesepakatan antara Pemprovsu dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Nota Kesepakatan antara UPTD Pependa Bependa dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota tentang penagihan tunggakan Pajak Daerah (Nomor 100.3.7/13804/2023, Nomor 08/L.2/Gs. 10/2023 tanggal 24 Oktober 2023); h. Pemberian Stimulus kepada Wajib Pajak antara lain berupa pembebasan Pajak Progresif dan Pembebasan Sanksi Administrasi BBNKB ke-2 dan seterusnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/166/KPTS/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kendaraan Bermotor berupa Pembebasan Pajak Progresif untuk Kepemilikan Dan/Atau Penguasaan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Dan Pembebasan Pokok Dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Kendaraan Kedua Dan Seterusnya; i. Pemberian keringanan atas Pokok PKB, pembebasan Pokok PKB dan pembebasan atas sanksi administrasi Pokok PKB serta pemberian keringanan atas pokok PKB tahun jalan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak 30 s.d 60 hari kalender sebelum jatuh tempo sebesar 5%, melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024; j. Melakukan Razia Terpadu/Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak Kepolisian	
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu		
	DPRD Provsu menilai pengembangan kompetensi ASN di Sumatera Utara sangat penting, hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. BPSDM Provsu diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN. Diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mampu beradaptasi terhadap perubahan, dengan perkembangan teknologi dan regulasi, ASN perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Serta adanya upaya yang dapa meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui	Terkait pentingnya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya peningkatan profesionalisme, efektivitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik, harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian diperkuat dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pelatihan dan pengembangan kompetensi membantu asn bekerja lebih efisien dan inovatif.	Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BPSDM secara konsisten mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi ASN melalui pendekatan inovatif dan efisien, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan model pembelajaran berbasis *Corporate University (Corpu)*. Implementasi Corpu dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran klasikal, pembelajaran daring, dan pembelajaran berbasis praktik kerja, sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih luas dan meningkatkan jumlah alumni pengembangan kompetensi dari tahun ke tahun. Dalam mendukung implementasi Corporate University, telah dibangun sistem pengelolaan pembelajaraan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni *Learning Management System* (LMS) Sumut Berkah yang merupakan salah satu teknologi pembelajaran dalam memperkuat pengembangan kompetensi ASN Sumatera Utara dan penyusunan Grand Design Pengembangan Kompetensi ASN Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai upaya perencanaan pengembangan kompetensi ASN Sumatera Utara selama 5 tahun dalam mewujudkan ASN yang unggul, maju dan professional. Dalam rangka menjaga dan menjamin kualitas pelatihannya, pada tahun 2025 telah mendapatkan Akreditasi yang baik pada beberapa program pelatihan dari instansi pembina sebagai bentuk pengakuan bahwa BPSDM Provsu telah menyelenggarakan pelatihan dengan mutu yang baik, diantaranya Akreditasi Istimewa sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Akreditasi B pada Bidang Teknis Penanggulangan Bencana dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Rencana	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kontingensi, Akreditasi B untuk Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, serta Akreditasi B untuk Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan kompetensi, BPSDM Provsu juga memperkuat sinergi dan kerja sama dengan instansi pemerintah pusat, lembaga pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi, serta lembaga terkait lainnya. Kerja sama tersebut diarahkan pada pemanfaatan sumber daya bersama, pengembangan kurikulum yang relevan, serta peningkatan kualitas narasumber dan metode pembelajaran. Melalui optimalisasi inovasi program, pemanfaatan teknologi, dan penguatan jejaring kerja sama, BPSDM Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan cakupan pengembangan kompetensi ASN. Dengan demikian, diharapkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah.	
41	Badan Kepegawaian Provsu		
	a. DPRD Provsu menghimbau kepada Badan Kepegawaian Provsu agar dalam upaya menuju reformasi birokrasi berkelas dunia serta dalam melaksanakan program prioritas pembangunan Presiden RI maka diharapkan Pemprov Sumatera Utara agar secara terus menerus berbenah diri dalam memperbaiki kinerja ASN dan berupaya meningkatkan mutu		

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan melalui penerapan sistem merit		
	b.	Terkait masih banyaknya tenaga honorer, dprd provinsi sumatera utara menghimbau kepada Badan Kepegawaian Provsu agar melaksanakan penyusunan roadmap pengelolaan tenaga honorer dengan menyusun strategi jangka panjang untuk mengelola tenaga honorer, termasuk skema transisi ke status ASN atau PPPK, serta peningkatan kompetensi agar mereka lebih siap menghadapi seleksi		
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu			
	DPRD Provsu menilai kesiapsiagaan bencana sangat penting, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun non-alam. Indonesia, termasuk Sumatera Utara, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi. Sehingga DPRD Provsu mengharapkan anggaran pada BPBD Provsu dapat terus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kajian kesiapsigaan bencana di Provinsi Sumatera Utara.		Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian, saran, serta dukungan DPRD Provsu terhadap penyelenggaraan urusan penanggulangan Bencana. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan penguatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Kami sependapat dengan DPRD bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, sebagian besar kabupaten/kota berada pada kategori risiko sedang hingga tinggi terhadap bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung api. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam penentuan prioritas program, lokasi kegiatan, serta alokasi anggaran penanggulangan bencana. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan bencana, pada tahun anggaran berjalan telah dilaksanakan program dan kegiatan yang terfokus pada fase pra-bencana dan kesiapsiagaan, antara lain :	Kesiagsiagaan dalam penanganan bencana

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		1. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen kebencanaan, meliputi Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontijensi, dan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana pada wilayah rawan prioritas. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi Aparatur BPBD, relawan dan masyarakat di wilayah rawan bencana, dengan capaian peserta sebanyak 2.208 orang. 3. Penguatan Sistem Peringatan Dini, melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana peringatan dini serta peningkatakn koordinais penyampaian informasi kebencanaan dengan instansi terkait. 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi Aparatur BPBD, relawan dan masyarakat di wilayah rawan bencana, dengan capaian peserta sebanyak 100 orang. Sehubungan dengan alokasi anggaran, bahwa pagu anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal dan diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Realisasi anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesiapsiagaan dan penurunan risiko bencana, dengan tingkat serapan anggaran mencapai 81,50 %. Dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, pemerintah Kab/Kota, TNI/Polri, Instansi vertikal, serta unsur masyarakat. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kecepatan respon, ketepatan distribusi logistik dan peralatan, serta efektivitas penanganan korban terdampak bencana.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti harapan DPRD dengan: 1. Menguatkan perencanaan dan penganggaran berbasis data risiko bencana; 2. Meningkatkan kualitas indikator kinerja yang terukur dan berdampak; 3. Memperluas cakupan wilayah dan masyarakat sasaran kegiatan kesiapsiagaan; 4. Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Dengan dukungan DPRD Provsu, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata dalam melindungi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.	
43	Badan Penghubung Provsu		
	a. DPRD Provsu mendapatkan data bahwa di tahun anggaran 2024 terdapat anggaran SILPA pada Badan Penghubung sejumlah Rp. 14.771.662.955,75,-. Hal ini bukan dikarenakan Badan Penghubung tidak melakukan banyak pekerjaan akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2024 Pemprovsu tidak mampu membayar atau dapat dikatakan tidak adanya anggaran pada saat akhir tahun 2024 sehingga beberapa pekerjaan yang ada pada badan penghubung belum dilakukan pembayaran, oleh karenanya dalam catatan keuangan dimasukkan ke dalam SILPA	Menganggarkan kembali pekerjaan yang belum terbayarkan di tahun 2024 ke dalam APBD Tahun 2025 sebagai bagian dari kewajiban (hutang) Tahun Anggaran 2024.	Perencanaan dan Penganggaran ulang di tahun 2025 sebagai hutang tahun 2024 agar pekerjaan yang tertunda pembayarannya dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan SILPA kembali.
	b. DPRD Provsu juga menemukan fakta bahwa terdapat anggaran untuk	Di Tahun Anggaran 2025, tidak ada lagi kegiatan fisik dan belanja modal yang dimasukkan ke dalam sub kegiatan	Tidak memasukkan belanja modal maupun kegiatan fisik ke dalam

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	belanja modal pada program pelayanan penghubung dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung sebesar Rp. 24.271.489.129,25, setelah dikonfirmasi anggaran ini dipergunakan untuk perbaikan wisma bukit barisan yang berlokasi di yogyakarta. Yang menjadi perhatian adalah adanya jenis pekerjaan fisik pada nomenklatur ''koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung'' sebesar Rp. 24.271.489.129,25, yang dirasa tidak sesuai tempatnya atau ''ga nyambung'' seharusnya jika ada anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan fisik ditempatkan pada bagian ''belanja modal'' atau ditempatkan ke Dinas PUPR Provsu.	''Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung''.	sub kegiatan ''Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung'' di Tahun Anggaran 2025, sehingga klasifikasi anggaran lebih tepat dan sesuai aturan.
44	Sekretariat DPRD Provsu		
	DPRD Provsu menghimbau kepada Sekretariat DPRD Provsu untuk selalu berbenah meningkatkan kinerjanya dalam hal melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD, meningkatkan persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dan fasilitasi dalam penetapan ranperda	a. Melakukan peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan serta anggota DPRD melalui penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelayanan administrasi kegiatan kedewanan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. b. Mengoptimalkan pengelolaan dan penjadwalan kegiatan DPRD, termasuk rapat, kunjungan kerja, dan perjalanan dinas, guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. c. Meningkatkan fasilitasi tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dukungan administrasi, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta pemantauan terhadap aspirasi yang disampaikan melalui alat kelengkapan DPRD.	Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meningkatkan persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti secara efektif, serta memastikan proses penetapan Ranperda berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		d. Meningkatkan dukungan teknis dan administratif dalam proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar dapat diselesaikan sesuai program pembentukan peraturan daerah yang telah ditetapkan.	
45	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu		
	DPRD Provsu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama yakni mengenai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan persentase kerjasama yang difasilitasi	Menindaklanjuti dukungan DPRD Provsu terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya terkait Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan persentase kerja sama yang difasilitasi, dengan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Dukungan DPRD Provsu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Ke depan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah akan terus melakukan penguatan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan pencapaian target Indikator Kinerja Utama secara optimal.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan persentase kerjasama yang difasilitasi
46	Biro Hukum Setdaprovsu		
	DPRD Provsu menghimbau kepada Biro Hukum Setdaprovsu untuk memperhatikan program pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kemudian diharapkan Biro Hukum selalu berupaya meningkatkan aksesibilitas dan akurasi informasi hukum melalui jdih, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses peraturan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Biro Hukum Setdaprovsu akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui *update* data peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan secara berkala, peningkatan kualitas sistem dan layanan digital serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyediaan informasi hukum dan pengembangan pengelolaan JDIH.	Biro Hukum Setdaprovsu mampu meningkatkan aksesibilitas dan akurasi informasi hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara mudah, cepat, dan tepat guna mendukung kepastian hukum dan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Saat ini layanan website JDIH (jdih.sumutprov.go.id.)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			sudah ada dan tersedia dalam aplikasi *mobile*.
47	Biro Organisasi Setdaprovsu		
	DPRD Provsu menghimbau kepada Biro Organisasi Setdaprovsu untuk selalu aktif melakukan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kelembagaan dan distribusi tugas untuk memastikan efisiensi kerja, serta dibutuhkan juga penguatan reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap tantangan pemerintahan modern	Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Organisasi telah melaksanakan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan secara berkala guna memastikan efektivitas organisasi, kejelasan pembagian tugas, serta peningkatan kinerja perangkat daerah. Selain itu, kami terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui penerapan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika Pemerintahan.	Pemerintah Provinsi Sumatera utara berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan DPRD Provsu dalam rangka mewujudkna tata kelola Pemerintahan yang efektiv, efisien dan akuntabel.
48	Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu		
	DPRD Provsu menghimbau kepada Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu untuk dapat terus berinovasi dalam mewujudkan kualitas manajemen administrasi pembangunan yang profesional melalui jumlah kebijakan yang dirumuskan dan digunakan dalam pelaksanaan administrasi pembangunan serta melakukan evaluasi terhadap realisasi fisik yang ada pada setiap perangkat daerah karena masih ada perangkat daerah yang masih belum menyelesaikan realisasi fisiknya pada aplikasi PRP2SUMUT yaitu : a. Dinas Kesehatan Provsu 96,49%; b. UPTD Khusus RS. Umum Haji 79,97%; c. Dinas PU dan PR 48,44%; d. Satpol PP 7,12%; e. Dinas Sosial 34,28%; f. Dinas Kominfo 84,39%; g. BKAD 0%; h. Biro Perekonomian 46,5%.	Kami mengapresiasi saran dan masukkan dari DPRD Provsu terhadap peranan Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu mewujudkan kualitas manajemen administrasi yang profesional. Adapun strategi/langkah-langkah yang akan dilaksanakan: 1. Penguatan Tata Kelola Administrasi Pembangunan. Strategi ini mencakup peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan. 2. Digitalisasi dan Inovasi Sistem Administrasi Pembangunan. Strategi ini mencakup pengembangan dan pemanfaatan system informasi berbasis digital untuk pengendalian, monitoring, dan evaluasi Pembangunan serta memperluas integrasi data pembangunan antara Biro Adm. Pembangunan dengan OPD terkait. 3. Penguatan Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek strategis nasional dan daerah serta Menyusun	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		laporan capaian pembangunan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan. 4. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Pembangunan. Peningkatan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah kab/kota dan sektor swasta serta mengoptimalkan forum koordinasi pembangunan daerah untuk sinkronisasi program prioritas. 5. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja. Meningkatkan transparansi dalam proses pengendalian dan pelaporan administrasi Pembangunan dan memastikan setiap kebijakan dan kegiatan memiliki indicator kinerja yang terukur. Terkait evaluasi terhadap realisasi fisik perangkat daerah, setelah dilakukan inventarisasi realisasi kegiatan fisik perangkat daerah pada Aplikasi PRP2Sumut dapat dilaporkan sebagai berikut: a. Dinas Kesehatan Provsu 96,49%; b. UPTD Khusus RS. Umum Haji 100%; c. Dinas PU dan PR 69,05%; d. Satpol PP 97,73%; e. Dinas Sosial 99,37%; f. Dinas Kominfo 100%; g. BKAD 0%; h. Biro Perekonomian 100%.	
49	Biro Perekonomian Setdaprovsu		
	a. DPRD Provsu menyoroti kinerja Biro Perekonomian Setdaprovsu yang memiliki peran penting sebagai pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan tugas utama mencakup pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD, peningkatan kapasitas dan efisiensi BUMD, mengembangkan strategi agar BUMD lebih mandiri, kuat, dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi.	Terima kasih atas bimbingan dan arahan dari DPRD Provsu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian Setdaprovsu selalu melakukan pembinaan dan dorongan kepada BUMD Provinsi Sumatera Utara. berikut tanggapan atas rekomendasi dimaksud: Biro Perekonomian melakukan langkah-langkah yang berperan sebagai Pembina BUMD sebagai berikut : 1. Melaksanakan penguatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja BUMD secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan efektivitas peran pembinaan Biro Perekonomian terhadap BUMD agar pengelolaan usaha dan tata kelola perusahaan berjalan lebih optimal dan terarah. 2. Mengatasi permasalahan kinerja dan tata kelola BUMD melalui evaluasi yang terukur

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			2. Melakukan evaluasi kinerja dan evaluasi penerapan GCG BUMD secara periodik, serta memfasilitasi tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi dimaksud. 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen BUMD, khususnya pada aspek perencanaan bisnis, pengendalian kinerja, dan efisiensi operasional. 4. Mengoordinasikan sinergi pembinaan dan pengawasan BUMD dengan Inspektorat, BPKP, dan perangkat daerah terkait guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern.	dan tindak lanjut perbaikan yang berkelanjutan. 3. Mendorong terwujudnya BUMD yang sehat, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 4. Meningkatkan akuntabilitas pembinaan BUMD, sejalan dengan prinsip pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan yang baik.
	b.	Pemprov Sumatera Utara memiliki 6 BUMD dan hanya 3 yang dalam kondisi sehat sementara lainnya dalam keadaan merugi dan dengan kondisi manajemen yang tidak sehat pula. Oleh karenanya, DPRD Provsu meminta kepada Biro Perekonomian Setdaprovsu untuk mengeluarkan kebijakan strategis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam upaya pemulihan BUMD yang tidak sehat sehingga diharapkan nantinya seluruh BUMD milik Pemprov Sumatera Utara dapat meningkatkan sumbangan PAD.	Biro Perekonomian telah dan akan melakukan langkah-langkah pembinaan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan strategis jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka pemulihan kinerja BUMD yang tidak sehat, mencakup aspek kelembagaan, manajemen, dan kinerja usaha seperti penyusunan Ranpergub tentang Kerja Sama BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar pelaksanaan kerja sama BUMD berstandar. 2. Memfasilitasi penyusunan dan penyesuaian Rencana Bisnis (Renbis) BUMD agar selaras dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, arah kebijakan pembangunan daerah, serta potensi dan karakteristik usaha masing-masing BUMD. 3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMD, khususnya BUMD yang mengalami kerugian, sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan langkah pemulihan.	Langkah-langkah strategis yang dilakukan bertujuan untuk : 1. Mengatasi kondisi kinerja dan manajemen BUMD yang belum sehat, khususnya BUMD yang mengalami kerugian, melalui kebijakan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. 2. Menyelaraskan arah usaha BUMD dengan kebijakan pembangunan daerah, termasuk penguatan peran BUMD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. 3. Mendorong pemulihan dan transformasi BUMD yang merugi, agar memiliki model bisnis yang jelas, berkelanjutan, dan

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			4. Mendorong perbaikan manajemen dan penguatan tata kelola perusahaan (GCG) melalui pembinaan, pendampingan, serta sinergi dengan Inspektorat dan BPKP. 5. Mengarahkan BUMD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kontribusi terhadap PAD, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha. 6. Dalam rangka pengendalian kinerja, Biro Perekonomian melakukan monitoring capaian target dividen BUMD, dimana pada Tahun 2025 ditetapkan target dividen sebesar Rp334.970.755.319 dengan realisasi sebesar Rp329.075.868.190 atau tercapai 98%, sebagai indikator kinerja pembinaan BUMD. 7. Khusus BUMD PT. Dhirga Surya Sumatera Utara, yang saat ini berada dalam kondisi merugi, Biro Perekonomian memfasilitasi transformasi kelembagaan dan arah usaha untuk menjadi BUMD Pangan mulai Tahun 2026 setelah Peraturan Daerah terkait diundangkan. Transformasi ini diarahkan agar PT. Dhirga Surya Sumatera Utara berperan sebagai BUMD strategis daerah, antara lain dalam pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi pasokan dan harga komoditas strategis, khususnya cabai merah dan beras.	berdampak langsung pada masyarakat. 4. Memperkuat fungsi BUMD sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas strategis pangan. 5. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan dan kesehatan BUMD secara bertahap. 6. Meningkatkan akuntabilitas pembinaan BUMD oleh Biro Perekonomian, sebagaimana tercermin dari capaian target dividen dan perbaikan kinerja BUMD.
50	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu			
	Adanya hibah Bansos sejumlah 895 unit dengan nilai Rp.106.895.000.000,- yang belum direalisasikan pada tahun anggaran 2024 menjadi perhatian serius bagi DPRD Provsu, karena terjadi gejolak di masyarakat pada saat akhir tahun 2024, para penerima bansos tersebut sudah menandatangani seluruh dokumen pencairan, tetapi hibah tersebut tidak dapat dibayarkan akibat tidak adanya ketersediaan anggaran pada kas Provinsi		Pemprov Sumatera Utara telah menganggarkan belanja hibah kepada badan/Lembaga/organisasi sebesar Rp1.179.023.078.650,00 dan terealisasi sebesar Rp1.070.902.571.804,00 atau 90,83%. Sisanya sebesar Rp108.120.506.846,00 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan ketidaktercapaian target pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Bahwa sesuai dengan draft LHP BPK RI pada pemeriksaan LKPD Tahun 2024, belanja hibah yang tidak terealisasi	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sumatera Utara. Hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang, pentingnya perencanaan program dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran harus menjadi perbaikan bagi Biro Kesra Setdaprovsu.	tersebut tidak dapat diakui sebagai kewajiban/utang karena sesuai ketentuan sebagai berikut: a. PP 71/2010 tentang SAP Menegaskan bahwa komitmen anggaran (rencana belanja) bukanlah kewajiban jika belum ada transaksi atau peristiwa yang mengikat. b. PSAP 09 tentang Kewajiban Paragraf 08: Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan c. Permendagri 90/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136: Penyusunan laporan keuangan harus sesuai SAP, dan Pasal 137: Komitmen yang tidak memenuhi syarat liabilitas tidak diakui sebagai utang, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). d. Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019: Belanja Hibah: a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, *bersifat tidak wajib dan tidak mengikat*, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dengan peraturan perundang-undangan. Maka di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 hanya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terkait hibah sejumlah 895 Penerima hibah dengan nilai Rp. 106.895.000.000,- yang tidak terealisasi pada Tahun 2024 sudah dialokasikan pada Pergeseran Kedua APBD TA. 2025. Pada waktu itu hibah tersebut tercatat sebagai hutang pada Laporan Keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara *Unaudited,* informasi terakhir dari BPK RI bahwa hutang hibah senilai Rp. 106.895.000.000,- tersebut dikoreksi BPK-RI hanya tercatat tidak terbayar di APBD TA. 2024	
51	Biro Umum Setdaprovsu		
	DPRD Provsu meminta kepada Biro Umum Setdaprovsu untuk dapat melakukan perbaikan kinerja karena tidak tercapainya target konstribusi PAD tahun 2024 dari pemanfaatan pelayanan gedung dan mess Pemprovsu dengan realisasi hanya sebesar 80,29%.	Biro Umum Setdaprovsu akan melakukan pembuatan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Mess (SMESS) untuk mendukung digitalisasi pengelolaan mess Pemprovsu, sehingga data penggunaan dapat terpantau secara real time, pengelolaan aset dan anggaran menjadi lebih transparan dan tertelusur, serta mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi kontribusi PAD pada tahun anggaran berikutnya.	
52	Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu		
	DPRD Provsu menghimbau kepada Biro Adm. Pimpinan Setdaprovsu untuk selalu melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan juga melakukan optimalisasi digitalisasi administrasi dengan meningkatkan sistem digitalisasi administrasi yang memungkinkan masih menghadapi kendala teknis dan administratif, terutama dalam integrasi data antar instansi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja	Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu telah memulai transformasi digital dalam pengelolaan administrasi pimpinan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Implementasi awal digitalisasi difokuskan pada sistem pengelolaan dan akses bahan sambutan Gubernur Sumatera Utara untuk kegiatan apel pagi setiap hari Senin dan upacara resmi, sehingga proses penyediaan materi pimpinan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, tepat waktu, dan terstandar.	Biro Adm. Pimpinan juga mengembangkan kliping digital serta membangun basis data terpusat yang memuat arsip bahan sambutan dan paparan Gubernur Sumatera Utara. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta meminimalkan kendala teknis dan administratif yang selama ini bersifat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			manual. Digitalisasi administrasi pimpinan ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan sistem yang berkelanjutan dalam mendukung pengambilan kebijakan pimpinan dan peningkatan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.
53	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu		
	DPRD Provsu mendukung setiap program yang dilaksanakan oleh biro pengadaan barang dan jasa setdaprovinsi sumatera utara untuk dapat mewujudkan proses dan pelayanan/ layanan pengadaan secara elektronik yang transparan dan akuntabel serta terstandar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI). Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik dalam penggunaan anggaran pemerintah serta meminimalkan risiko hukum melalui pengadaan yang sesuai dengan regulasi menghindarkan pemerintah dari potensi sengketa hukum dan pelanggaran aturan.	Sesuai dengan rekomendasi DPRD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kepercayaan Masyarakat dengan selalu melakukan afirmasi dengan mengumumkan RUP sebelum 31 Maret Tahun Berjalan, dan juga melakukan proses pengadaan secara transparan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel	Tahun 2025 proses Pengadaan Barang/Jasa yang melalui mekanisme manual menurun dikarenakan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing meningkat, proses pemilihan melalui mekanisme Tender dapat dilakukan 100 %. Untuk Tahun 2025 juga proses penginputan SIRUP 100% sebelum 31 Maret 2025.
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu		
	Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Badan Kesbang Pol Provsu menjalankan beberapa program diantaranya turut berpartisipasi dalam sosialisasi wawasan kebangsaan, pendidikan politik serta mengambil peran dalam menahan laju angka prevalensi narkotika di	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan kegiatan pendidian politik dan wawasan kebangsaan serta mengambil peran dalam menahan laju angka prevalensi narkotika di Sumatera Utara sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan	Tujuan rekomendasi telah ditindaklanjuti, namun belum sepenuhnya terselesaikan dan masih memerlukan penguatan program pendidikan politik bagi pemilih pemula secara berkelanjutan, sementara untuk

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sumatera Utara. DPRD Provsu mengharapkan adanya program pendidikan politik bagi pemilih pemula, pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi demokratis. Pemilih pemula, yang biasanya terdiri dari generasi muda yang baru mendapatkan hak pilih, sering kali belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan proses pemilu.	pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk Tahun 2025, jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik berjumlah 17.923 orang, sementara untuk sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan secara Daring dengan melibatkan 782 sekolah tingkat SLTA sederajat masing-masing 100 orang siswa.Sosialisasi wawasan kebangsaan juga dilaksanakan untuk Anggota Ormas yang terlapor di Sumatera Utara, Tahun 2025 ada 100 peserta. Untuk Tahun 2026, akan kita fokuskan pelaksanaan Pendidikan politik bagi pemilih pemula dan Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi siswa SLTA sederajat di Sumatera Utara.	pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi sekolah yang memiliki internet kurang stabil, akan di data dan dilakukan di daerah secara offline dengan mengumpulkan siswa dari berbagai sekolah di satu daerah
55	BUMD (PT. Bank SUMUT)		
	a. Bank SUMUT merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Sumatera Utara dalam sektor keuangan dan saat ini menjadi salah satu BUMD dalam kondisi sehat, dimana salah satunya memiliki program penyaluran kredit di sektor produktif. Kredit produktif yang disalurkan oleh Bank SUMUT memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumatera Utara. Diharapkan Bank SUMUT selalu membangun komitmen untuk memperbesar alokasi kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk UMKM, manufaktur, dan konstruksi.	Terimakasih atas bimbingan dan arahan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, berikut tanggapan atas rekomendasi dimaksud: 1. PT. Bank Sumut pada tahun 2026 diberikan kuota KUR sebesar Rp1 Triliun; 2. Kolaborasi dengan Pemerintah dalam penyaluran progam melalui : a. KUR KPP (Kredit Progam Perumahan) dengan kuota 400 Miliar; b. Kredit FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan target 1.000 unit rumah.	1. Mengurangi tingkat ketergantungan UMKM dengan rentenir ; 2. Mendukung Progam Pemerintah dalam pemberian kemudahan akses kredit kepada UMKM 3. Meningkatkan portopolio kredit produktif di Bank Sumut
	b. Terkait penyaluran kredit multiguna oleh bank sumut banyak ditemukan keluhan terkait besarnya biaya asuransi yang sangat memberatkan bagi debitur, sehingga DPRD Provsu meminta kepada	Mengusulkan kepada pihak penjamin (asuransi) untuk melakukan penyesuaian terhadap nilai premi sehingga kompetitif dengan perbankan lain.	Meningkatnya penyaluran kredit konsumtif (KMG, PRA PENSIUN dan PENSIUN) dengan premi asuransi yang kompetitif.

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Bank SUMUT untuk dapat berkoordinasi dengan pihak asuransi mengenai besarnya nilai asuransi yang harus dibayarkan tersebut.		
	c.	Terkait langkah negara amerika serikat yang meminta indonesia untuk tidak menggunakan gpn atau qris, diharapkan kepada Bank SUMUT untuk merancang strategi sebagai langkah antisipasi terhadap persoalan tersebut.	Bank Indonesia memberi tanggapan terhadap sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional bahwa penerapan sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan layanan pembayaran cepat lainnya didasarkan pada prinsip kerja sama yang setara dengan negara mitra.	Diversifikasi Produk Transaksi Non-QRIS kembangkan : 1. Super Apps Bank Sumut (transfer, bill payment, e-wallet, paylater, merchant tools). 2. Account-to-Account Payment (direct debit, open banking, virtual account massif) 3. Contactless card & tokenization 4. Host-to-host corporate payment
56	BUMD (PDAM Tirtanadi)			
	a.	DPRD Provsu terus memberikan perhatian kepada Perumda Tirtanadi selaku BUMD milik Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan selalu terjadi adalah terkait besarnya tingkat kehilangan air (*losis)* yaitu sekitar 27,5 %. DPRD Provsu menilai Perumda Tirtanadi tidak pernah menyajikan data secara rinci apa penyebab *losis* itu terjadi, pada bagian distribusi air yang mana *losis* itu ada (kerusakan meteran atau adanya pipa distribusi yang bocor). Oleh karenanya, Dprd Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Perumda Tirtanadi untuk melakukan kajian tentang	Perumda Tirtanadi akan melakukan kajian dengan tenaga ahli profesional tentang penyebab dan besarnya tingkat kehilangan air dan setelah selesai kajian terinci tersebut akan kami serahkan laporan tersebut kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara.	Tujuannya agar tingkat kehilangan air dapat diturunkan secara significant dimana permasalahan utama yang akan diselesaikan yaitu kehilangan air komersil dan kehilangan air phisik. Kehilangan air komersil adalah kehilangan air yang tidak bisa diukur secara langsung seperti meter yang tidak akurat, sambungan illegal dan kesalahan dalam mencatat meter. Sedangkan kehilangan air phisik adalah kehilangan air yang bisa dilihat seperti kebocoran pipa tua (keropos), kerusakan infrastruktur, overflow atau luapan air dan pipa bocor atau retak. Perumda Tirtanadi akan menyusun rencana strategis dan rencana

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		penyebab dan besarnya tingkat kehilangan air *(losis)* tidak dapat diatasi, serta kemudian melaporkan hasil kajian tersebut kepada Dprd Provinsi Sumatera Utara.		aksi untuk menurunkan kehilangan air dimana khusus kehilangan air komersil akan melakukan kalibrasi dan penggantian meter bermasalah dan meter kadaluarsa diatas 5 tahun, pengawasan dan penindakan pencurian air serta pembacaan meter dengan sistem android berbasis kinerja. Sedangkan kehilangan air phisik akan melakukan percepatan perbaikan pipa bocor, melakukan manajemen tekanan air dengan pemasangan presure reducing valve dan memasang SCADA di Instalasi Pengolahan Air, Booster Pump dan Sistem Jaringan Perpipaan.
	b.	Kemudian, terkait kapasitas produksi air harus mendapat perhatian, masih banyak pelanggan perumda tirtanadi yang mengeluh karena ketiadaan air yang mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Sehingga diharapkan kepada manajemen Perumda Tirtanadi untuk serius merancang strategi atau upaya konkrit dalam mengatasi permasalahan kekurangan produksi air.	Untuk daerah yang sudah ada penambahan produksi Perumda Tirtanadi akan membangun sistem jaringan perpipaan baru untuk mempercepat penyerapan air dan meningkatkan cakupan pelayanan sedangkan untuk daerah belum ada penambahan produksi Perumda Tirtanadi akan membangun Instalasi Pengolahan Baru, Booster Pump dan Resevoir serta Jaringan Perpipaan.	Tujuannya agar seluruh pelanggan Perumda Tirtanadi mendapat air yang baik dan layak, Permasalahan yang akan diselesaikan adalah penambahan jaringan perpipaan untuk mempercepat penyerapan *idle capacity* Instalasi Pengolahan Air baru, membangun Booster Pump dan Reservoir agar pendistrubusian air lebih terjangkau dan lebih merata.
57	BUMD (PD. Aneka Industri dan Jasa)			
	Pansus lkpj DPRD Provsu telah melakukan kunjungan langsung ke salah satu aset tanah yang dikelola PD AIJ yang saat ini diatasnya telah terdapat bangunan berupa Hotel Grand Central Premier yang berlokasi di Jl. Putri Merak Jingga No. 3A Kota		PD. Aneka Industri dan Jasa (PD. AIJ) pada prinsipnya menghormati dan menerima rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah. Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan tata kelola, optimalisasi pemanfaatan aset,	1. Atas tindaklanjut point 1 adalah: a. Memastikan tidak terdapat pelanggaran hukum atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Medan. Ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: - asset tanah milik PD AIJ selaku BUMD milik Pemprov Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Merak Jingga No. 3A Kota Medan saat ini telah berdiri Hotel Grand Central Premier dengan berdasarkan kontrak kerja sama sejak tahun 2017 dengan skema bangun guna serah dengan jangka waktu 30 tahun; - Hotel Grand Central Premier telah beroperasi sejak tahun 2023, terdapat 155 kamar dengan 4 tipe, memiliki ballroom dan club malam yang dikelola manajemen hotel sendiri; - dalam kontrak kerjasama tersebut, PD AIJ memperoleh konpensasi keuntungan sebesar 566 juta per tahun selama 5 tahun pertama dan untuk tahun-tahun berikutnya terdapat kenaikan yang nominalnya telah ditentukan di dalam kontrak; - Pansus LKPJ DPRD Provsu menilai mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh PD AIJ dengan hotel Grand Central Premier bukan *profit sharing* (bagi hasil) akan tetapi hanya sistem sewa yang harganya telah ditentukan di dalam kontrak. Sehingga, direkomendasikan untuk dilakukan audit oleh Inspektorat Provsu dan atau aparat penegak hukum karena ditemukan beberapa pelanggaran yaitu adanya keterlambatan pembangunan yang mengharuskan Hotel Grand Central Premier membayar denda keterlambatan sekitar 3 milyar rupiah. Selain itu,	serta penguatan aspek kepatuhan hukum. Tindaklanjut yang akan dilakukan : 1. Audit dan Evaluasi Kerja Sama a. PD. AIJ akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap: - Pelaksanaan kontrak kerja sama Bangun Guna Serah (BGS); - Kepatuhan terhadap ketentuan kontrak, termasuk klausul sanksi dan denda keterlambatan; - Kesesuaian mekanisme kerja sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. PD. AIJ juga siap memberikan seluruh dokumen dan data yang diperlukan apabila dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku 2. Penelusuran dan Penegakan Klausul Denda Keterlambatan a. PD. AIJ akan melakukan penelaahan ulang terhadap jadwal pembangunan dan realisasi fisik proyek dibandingkan dengan ketentuan kontrak; b. Apabila terbukti terjadi keterlambatan yang memenuhi unsur wanprestasi, PD. AIJ akan menempuh langkah penagihan denda (penalty) sesuai dengan ketentuan perjanjian. 3. Evaluasi Nilai Kompensasi dan Skema Kerja Sama a. PD. AIJ akan melakukan evaluasi ekonomi dan bisnis terhadap nilai kompensasi/sewa yang diterima, dengan mempertimbangkan: - Nilai pasar aset; - Potensi pendapatan hotel yang telah beroperasi; - Prinsip optimalisasi aset daerah. b. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk: - Renegosiasi kontrak, sepanjang dimungkinkan secara hukum;	b. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset BUMD. 2. Atas tindaklanjut point 2 adalah : a. Menegakkan hak PD. AIJ selaku pemilik aset; b. Menghindari potensi kerugian keuangan daerah akibat kelalaian mitra kerja sama. 3. Atas tindaklanjut point 3 adalah : a. Meningkatkan kontribusi pendapatan PD. AIJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Menghilangkan ketimpangan antara potensi usaha dengan manfaat yang diterima daerah. 4. Atas tindaklanjut point 4 adalah : a. Mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang; b. Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas PD. AIJ sebagai BUMD.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	harga sewa yang diterima oleh PD AIJ sangat murah dan disarankan untuk dapat dinaikkan lagi.	- Penyesuaian skema kerja sama agar lebih mencerminkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) atau peningkatan nilai manfaat bagi daerah. 4. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Internal dengan memperkuat : a. Mekanisme pengawasan internal terhadap kerja sama pemanfaatan aset; b. Sistem pelaporan dan monitoring berkala atas kinerja mitra; c. Kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).	
58	BUMD (PT. Dhirga Surya)		
	DPRD Provsu memberikan rekomendasi kepada Pemprov Sumatera Utara agar mengembalikan PT. Dhirga Surya ke *core business* utama sesuai tujuan dasar berdirinya, karena banyak penugasan yang diberikan kepada PT. Dhirga Surya dan kemudian gagal, dikarenakan bukan *core business* utama. Sebagai contoh: penugasan pembangunan pabrik beras yang berlokasi di Kabupaten Serdang Bedagai dalam status gagal karena tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku karena harus bersaing dengan pihak lain dan ketiadaan modal.	Terimakasih atas bimbingan dan arahan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, berikut tanggapan atas rekomendasi dimaksud: Saat ini PT. Dhirga Surya Sumatera Utara memiliki Industri Beras Dhirga Surya di Dusun I Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Kilang tidak beroperasi karena ruang lingkup terbatas didasari Penugasan Beras Dhirga Surya Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Bahan Pangan Untuk Sumut dan berakhir pada 28 Desember 2023, dan pada tanggal 01 September 2025 telah terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 35 Tahun 2025 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Beras, hingga Desember 2025, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara telah menjual beras sebanyak 37 Ton beras.	- Perlunya penguatan dalam pengelolaan Beras Dhirga Surya dengan menempatkannya pada core bisnis PT. Dhirga Surya Sumatera Utara didalam Peraturan Daerah Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara. - Perlu adanya dukungan regulasi pemasaran beras Dhirga Surya ditingkat OPD Pemprovsu maupun BUMD Beras Dhirga Surya. - Perlunya adanya kolaborasi BUMD dalam mendukung pembiayaan Usaha.
36	BUMD (PT. Pembangunan Psarasana Sumatera Utara)		
	DPRD Provsu memberikan rekomendasi kepada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara untuk memperbaiki kinerja dengan karena terdapat target pendapatan yang tidak tercapai, yaitu pada operasional kapal	Terimakasih atas bimbingan dan arahan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, berikut tanggapan atas rekomendasi dimaksud: 1. Terkait hadirnya kompetitor pada lintasan Tigaras-Simanindo yang dapat mempengaruhi pendapatan unit Transportasi (KMP SUMUT I & II) maka manajemen PT PPSU telah	1. Untuk mempertahankan kinerja unit transportasi yang baik di 2025, manajemen PT PPSU pada tahun 2026 akan terus melakukan langkah-langkah

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	penyeberangan di Danau Toba (Tigasras-Simanindo) yang disebabkan adanya kompetitor pada lintasan tersebut, selain itu target pendapatan dari pengelolaan aset di area pekan raya sumatera utara juga tidak tercapai, sehingga dibutuhkan langkah evaluasi secara serius pada manajemen PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.	mengupayakan efektifitas pola operasional dan efisiensi biaya operasional. Hal ini ditunjukan dari realisasi pendapatan unit transportasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp15,7M atau sebesar 101% jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan unit Transportasi tahun 2025 sebesar Rp15,5M. 2. PT PPSU telah melakukan kajian kembali terhadap penyelengaraan PRSU di bulan November 2025 yang sebelumnya sempat beberapa kali tertunda. Namun setelah berkonsultasi dengan Biro PBJ dan mempertimbangkan kemampuan EO dalam menyelenggarakan event besar dalam waktu yang sempit maka event PRSU tahun 2025 kembali ditunda untuk menghindari risiko ketidakpatuhan terhadap proses tender dan penyelenggaraan.	strategis dengan melakukan efisiensi biaya operasional dan peningkatkan pelayanan KMP SUMUT I & II serta melakukan perawatan kapal secara rutin untuk menunjang operasional kapal dan kenyamanan penumpang. 2. Manajemen PRSU melakukan perencanaan dan pengurusan izin pelaksanaan PRSU tahun 2026 dilakukan lebih awal untuk memastikan terselenggaranya event PRSU dengan tepat waktu. Manajemen PT PPSU juga melakukan upaya promosi dalam upaya untuk peningkatan event diluar PRSU (sewa Gedung serba guna dan event Pekan Ramadhan) dengan tujuan meningkatkan realisasi pendapatan unit PRSU di tahun 2026.
37	BUMD (PT. Perkebunan Sumatera Utara)		
	a. DPRD Provsu memberikan rekomendasi kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi menajemen yang lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan dan fokus pada perbaikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).	Terimakasih atas bimbingan dan arahan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, berikut tanggapan atas rekomendasi dimaksud: Untuk evaluasi manajemen dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti : - Dengan memberikan rumah dinas untuk karyawan kebun dan PMKS - Gaji karyawan yang memakai UMK sudah disesuaikan dengan UMK.	Untuk evaluasi manaejemen masalah yang diselesaikan: - Gaji Pegawai yang Dikeluarkan dari SK Direktur belum ada kenaikan sejak Maret 2018

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Untuk perbaikan PMKS Tanjung Kasau dilakukan : - Pemasangan seng di St. Boiler akan dilakukan karena material sudah tersedia - Pengadaan 5 unit lori dan rencana Investasi Tahun 2025 sudah dikerjakan secara swakelola oleh Tim Maintenance - Per baikan dan penyisipan linier Sterillizer no. 1 dan 2 dengan menggunan plat bekas dan baru oleh Tim Maintenance - Pemanfaat material Boiler no. 1 untuk pipa di St. Rebusan - Melakukan pengecatan seng areal Loading Ramp	Untuk perbaikan PMKS Tanjung Kasau masalah yang diseelsaikan : - Mencegah agar air tidak merusak peralatan di arel St. Boiler - Menjaga agar kontiniutas pengoalahan agar tetap lancar - Mencegah agar tidak terjadi kebocoran steam pada linier - Mencagah agar tidak terjadi kebocoran steam pada pipa - Menjaga agar lifetime seng tetap bisa bertahan lebih lama dari korosif
	b.	DPRD Provsu meminta kepada Inspektorat Provsu agar melakukan audit investigasi kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara terkait adanya kontrak menanam ubi karena hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan tidak memberikan dampak positif pada kemajuan perusahaan.	Permasalahan kerja sama *replanting* kelapa sawit dengan kompensasi tanam ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau saat ini masih proses pemeriksaan di Kejati Sumatera Utara. Selanjutnya Inspektorat Provinsi Sumatera Utara akan menindaklanjuti dengan : 1. melaksanakan audit investigasi secara independen dan komprehensif terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan kontrak penanaman ubi di PT Perkebunan Sumatera Utara. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap aspek kepatuhan regulasi, potensi konflik kepentingan, transparansi, serta dampak finansial dan operasional kontrak terhadap kinerja perusahaan. 3. Menindaklanjuti hasil audit dengan rekomendasi perbaikan tata kelola, pembatalan/penyesuaian kontrak apabila ditemukan penyimpangan, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.	Tujuan / Masalah yang diselesaikan terhadap kerja sama tanaman ubi: - Penghentian kerja sama tanaman ubi kepada pihak ketiga - Mengungkap dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan dalam kontrak penanaman ubi. - Menjamin bahwa setiap kerja sama usaha BUMD dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan perusahaan. - Mencegah kerugian perusahaan serta memastikan kegiatan usaha memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja dan keberlanjutan PT

No	Rekomendasi		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
				Perkebunan Sumatera Utara. - Memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang disertai dengan pendanaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penugasan yang diberikan agar berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Secara umum, Tugas Pembantuan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional di daerah;
2. Meringankan beban Pemerintah Pusat dalam mengelola urusan pemerintahan;
3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat; serta
4. Memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan visi dan arah pembangunan nasional.

Berdasarkan tujuan tersebut, Tugas Pembantuan merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan yang memungkinkan terjalinnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penugasan ini bersifat spesifik, terukur, dan dilaksanakan dengan dukungan anggaran serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari mekanisme penugasan, pelaksanaan Tugas Pembantuan memiliki fungsi strategis dalam menjamin keterpaduan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

A. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas - Pembantuan

1. Identifikasi Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan

1.1 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu

1.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2) Undang - Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
3) Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2023 tentang APBN TA. 2025 SP DIPA-018.06.4.079127/2025

1.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

1.1.3 Program dan Kegiatan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan :

1) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

1.1.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

1) Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan jumlah anggaran Rp. 123.248.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.877.814,- atau 79,42%.

1.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu

1.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1.2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga

1.2.3 Program dan Kegiatan

1) Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan Kegiatan :
   a. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan : Preservasi jalan H.M. Yamin (Tebing Tinggi)
   b. Dukungan Teknis (Monitoring Dan Evaluasi Satker)
2) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan Kegiatan :
   a. Layanan Umum
   b. Layanan Perkantoran

1.2.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran berasal dari APBN TA. 2025, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 731.548.000,- dan realisasi sebesar Rp. 690.099.000,- atau 94,33%.

1.3 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

1.3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara didalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia didasari oleh :

1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian
3) Nomor : SP DIPA- 018.03.4.079124/2025 Revisi ke 13 Tanggal 12 Desember 2025
4) Nomor : SP DIPA- 018.08.4.079132/2025 Revisi ke 14 Tanggal 09 Desember 2025

1.3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

1.3.3 Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :
1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan.
2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :
1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan :
   a. Perlindungan dan Penyediaan Lahan;
   b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
   c. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;

2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan.
2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

1.3.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp 63.271.107.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 62.758.624.319,- atau 99,19%.

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat program kerja terkait tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada tahun anggaran 2025 terdapat beberapa hambatan/permasalahan dan penyelesaiannya yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Hambatan/Permasalahan & Penyelesaian

No	OPD	Hambatan	Penyelesaian
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu	a. Ketersediaan dan kualitas pakan, keterbatasan bibit ternak unggul, serta resiko gangguan kesehatan hewan dan penyakit menular. b. Keterbatasan sarana prasarana budidaya, rendahnya penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, serta keterbatasan akses peternak terhadap pemodal dan teknologi juga mempengaruhi capaian produksi secara berkelanjutan. c. Adanya hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak dikarenakan jumlah vaksinator kurang memadai serta banyak lokasi ternak yang cukup sulit dijangkau pada musim hujan. d. Lamanya penyelesaian perbaikan dokumen pembayaran yang diajukan secara online.	a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan telah menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk menambah jumlah vaksinator yang kemudian akan dilatih oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. b. Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang aman dan berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta peningkatan pendapatan peternak. Selain itu, indikator ini mendukung penguatan ketahanan pangan daerah, perbaikan gizi masyarakat dan stabilitas ekonomi wilayah, khususnya di sentra-sentra peternakan. c. Perlu dilakukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut sebelum pengajuan ke KPPN.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan serta sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.

Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta berbagai kebijakan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Capaian-capaian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diarahkan untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa indikator makro pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,295, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,297. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 juga mengalami penurunan dari 5,60% pada tahun 2024 menjadi 5,32% pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,99%, dan pada tahun 2025 berhasil diturunkan menjadi 7,36%. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai program pembangunan daerah, peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kejadian bencana alam yang terjadi pada bulan November 2025 di beberapa wilayah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan dari berbagai instansi terkait, telah melakukan berbagai langkah penanganan bencana secara cepat dan terpadu, mulai dari upaya tanggap darurat, penyaluran bantuan logistik, evakuasi masyarakat terdampak, hingga langkah-langkah pemulihan pascabencana. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih terdapat berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, berbagai masukan, rekomendasi, serta saran dari DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta seluruh masyarakat Sumatera Utara atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Semoga upaya dan kerja keras yang telah dilakukan bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Provinsi Sumatera Utara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan, semoga Allah S.W.T, Tuhan yang maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.